



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU

KAJIAN FISKAL REGIONAL

PROVINSI LAMPUNG

Triwulan II 2024

Kanwil DJPb Provinsi Lampung



TIM PENYUSUN

Pengarah

Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Penanggung Jawab

Farhan Fatnanto
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Ketua Tim

Gwen Adhitya Amalkhan
Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Tim Penyusun

Silvi Yuniar
Aulia Resto Nuryantie
Romadhona Puspita Sari
Lily Radhiya Ulfa

Anggota Tim

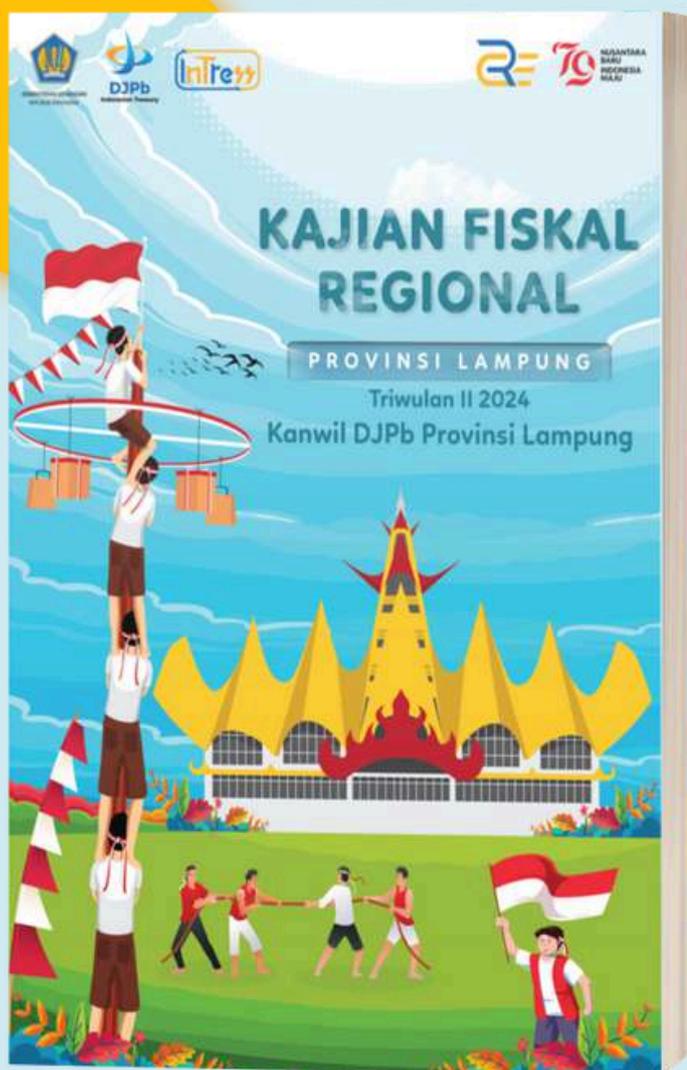
Ponco Priyono
Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
Ahmad Sapriannoor
Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

*New DJPb
in Town*

HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal



UNDUH KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II 2024 SECARA ONLINE



SCAN ME!



Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

<https://bit.ly/KFRLampung>



KRITIK DAN SARAN:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Email: pa2.kanwildjpb.lampung@gmail.com

New DJPb
in Town

HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

Kata Pengantar



Tabik pun, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi dan fiskal di tingkat regional menjadi semakin penting. Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2024 hadir sebagai panduan strategis yang memberikan wawasan mendalam tentang kondisi makroekonomi, implementasi kebijakan fiskal, serta kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung. Sebagai bagian dari komitmen Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung, laporan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah serta memfasilitasi perjalanan Lampung menuju pencapaian yang lebih gemilang.

Penyusunan KFR ini tidak terlepas dari kerja sama erat berbagai pihak, yang berkontribusi layaknya orkestrasi dalam merajut kemajuan pembangunan Lampung. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Lampung, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, serta *Regional Economist* dan *Local Experts*. Terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra utama Kemenkeu Satu Regional Lampung, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Lampung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu.



Kata Pengantar

Lebih dari sekadar kumpulan data dan analisis, KFR Triwulan II 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan lebih efektif. Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, kami percaya Lampung akan terus maju menuju masa depan yang sejahtera. KFR ini merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Lampung. Kami mengajak semua pihak untuk turut berkolaborasi, memberikan masukan, serta saran konstruktif untuk penyempurnaan KFR di masa yang akan datang. Semoga setiap usaha kita untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung selalu mendapatkan berkah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat beraktivitas dan salam sejahtera untuk kita semua.



Bandar Lampung, 30 Agustus 2024
Kepala Kanwil DJPb
Perbendaharaan Provinsi Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
EXECUTIVE SUMMARY	xv
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI.....	1
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
1.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1
1.1.1.2. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sisi Pengeluaran	3
1.1.1.3. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto Sisi Lapangan Usaha	7
1.1.1.4. Kontribusi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pembentukan PDRB	8
1.1.2. Suku Bunga.....	8
1.1.3. Inflasi.....	9
1.1.3.1. Inflasi Bulanan	9
1.1.3.2. Inflasi Tahunan	12
1.1.3.3. Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengendalian Inflasi	14
1.1.3.4. Pengendalian Inflasi.....	15
1.1.4. Nilai Tukar	16
1.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN	18
1.2.1. Tingkat Kemiskinan	18
1.2.2. Tingkat Ketimpangan.....	21
1.2.3. Nilai Tukar Petani (NTP).....	23
1.2.4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	25
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL	27
2.1. PELAKSANAAN APBN.....	27
2.1.1. Pendapatan Negara.....	28
2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan.....	28



2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	31
2.1.1.3. Prognosis/ <i>Outlook</i> Pendapatan Negara.....	33
2.1.1.4. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan	33
2.1.2. Belanja Negara	33
2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	34
2.1.2.2. Transfer ke Daerah (TKD).....	38
2.1.2.2.2. Dana Transfer Khusus (DTK)	40
2.1.2.3. Prognosis/ <i>Outlook</i> Belanja Negara	42
2.1.2.4. Rekomendasi Kebijakan Belanja	42
2.1.3. Surplus/Defisit APBN.....	43
2.1.4. Capaian Output Strategis APBN	43
2.2. PELAKSANAAN APBD	44
2.2.1. Pendapatan Daerah.....	45
2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	46
2.2.1.2. Pendapatan Transfer.....	50
2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	51
2.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah	52
2.2.1.5. Prognosis/ <i>Outlook</i> Pendapatan	53
2.2.1.6. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan	54
2.2.2. Belanja Daerah	54
2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja	54
2.2.2.2. Berdasarkan Fungsi	58
2.2.2.3. Berdasarkan Urusan	58
2.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB	59
2.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita.....	59
2.2.2.6. Prognosis/ <i>Outlook</i> Belanja Daerah	60
2.2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja	61
2.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD	61
2.2.4. Pembiayaan Daerah	62
2.3. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD	62
2.3.1. Pendapatan Konsolidasian	63
2.3.2. Belanja Konsolidasian.....	63



2.3.2.1. Belanja Perkapita Konsolidasi	63
2.3.3. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian	63
2.3.4. Pembiayaan Konsolidasian	63
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN TRANSFER KE DAERAH	64
3.1. PENDAHULUAN	64
3.2. ALOKASI BELANJA K/L YANG MENDUKUNG DAK FISIK DAN DAK FISIK PADA 6 BIDANG.....	64
3.2.1. Perbandingan Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik	65
3.2.2. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum.....	66
3.2.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik.....	66
3.2.4. Capaian RO utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik	67
3.2.4.1. Bidang Jalan.....	67
3.2.4.2. Bidang Kesehatan dan KB	68
3.2.4.3. Bidang Pendidikan	69
3.2.4.4. Bidang Air Minum.....	70
3.2.4.5. Bidang Sanitasi	71
3.2.4.6. Bidang Pertanian	71
3.3. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L	72
3.4. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik pada 6 Bidang.....	74
3.5. Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda.....	75
BAB IV ANALISIS TEMATIK: PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMITIGASI DAMPAKNYA	76
4.1. PENDAHULUAN	76
4.2. ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KINERJA SEKTOR PEREKONOMIAN REGIONAL ...	76
4.2.1. Fenomena Perubahan Iklim	76
4.2.1.1. Fenomena Umum pada Level Global, Nasional, dan Lampung	76
4.2.1.2. Fenomena Spesifik pada Beberapa Daerah di Regional Lampung.....	77
4.2.2. Sektor Ekonomi Paling Terdampak Perubahan Iklim di Lampung.....	78
4.2.2.1. Dampak terhadap Sektor Pertanian	78
4.2.2.2. Dampak terhadap Sektor Perikanan dan Kelautan	79
4.2.2.3. Dampak terhadap Sektor Pariwisata Pesisir Laut.....	79
4.2.2.4. Dampak terhadap Sektor Kesehatan	80
4.2.2.5. Dampak terhadap Sektor Air	80



4.3. ANALISIS <i>POLICY RESPONSES</i> PEMERINTAH DALAM MEMITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.....	81
4.3.1. Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Belanja Negara dan Daerah.....	81
4.3.1.1. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat terkait Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Lampung	81
4.3.1.2. Alokasi Transfer Ke Daerah terkait Perubahan Iklim di Lampung.....	84
4.3.1.3. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terkait Perubahan Iklim di Lampung	86
4.3.2. Intervensi Pemerintah Pusat & Daerah terhadap Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Non Belanja.	87
4.3.2.1. Kebijakan Non Belanja oleh Pemerintah Pusat.....	88
4.3.2.2. Kebijakan Non Belanja oleh Pemerintah Daerah Lampung	88
4.4. EVALUASI ATAS <i>POLICY RESPONSE</i> PEMERINTAH DALAM MEMITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM... ..	90
4.4.1. Evaluasi Ketepatan dan Kapasitas Alokasi Belanja APBN/D Dengan Kebutuhan Sektor Terdampak Perubahan Iklim di Lampung.....	90
4.4.2. Evaluasi atas Kebijakan Non Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Perubahan Iklim	92
4.4.3. Efektivitas/ Dampak dari Belanja Pemerintah Terkait Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perekonomian (Sektor Basis) di Lampung	92
4.4.3.1. Pemodelan Regresi.....	93
4.4.3.2. Pendalaman Kualitatif Melalui Wawancara	93
4.4.4. Rekomendasi Kebijakan Upaya Perubahan Iklim	94
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	95
5.1. KESIMPULAN	95
5.1.1. <i>Outlook</i> Makroekonomi Regional Lampung	95
5.1.2. Kinerja Fiskal Regional Lampung	95
5.1.2.1. Kinerja APBN	95
5.1.2.2. Kinerja APBD	96
5.1.2.3. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD	97
5.1.3. Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah	97
5.1.4. Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya.....	98
5.2. REKOMENDASI	99



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Semester I 2020 – Semester I 2024 persen (ctc)	1
Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 persen (yoy) .	2
Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 persen (qtq)	3
Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan II 2024 Menurut Pengeluaran (Persen)	4
Grafik 1.5. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Triwulan II 2024	5
Grafik 1.6. Distribusi dan Pertumbuhan (yoy) PDRB menurut Lapangan Triwulan II 2024	8
Grafik 1.7. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB per Triwulan Tahun 2020-2024 (Persen)	8
Grafik 1.8. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate dan Inflasi Lampung	9
Grafik 1.9. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan II 2024 (Persen)	10
Grafik 1.10. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan April 2024 (mtm)	10
Grafik 1.11. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Mei 2024 (mtm)	11
Grafik 1.12. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Juni 2024 (mtm)	11
Grafik 1.13. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (yoy)	12
Grafik 1.14. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan II 2024	13
Grafik 1.15. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Lampung	14
Grafik 1.16. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih di Provinsi Lampung	14
Grafik 1.17. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – Triwulan II 2024	16
Grafik 1.18. Tren Ekspor, Impor, Neraca Perdagangan Luar Negeri (juta USD) Lampung	17
Grafik 1.19. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode Maret 2020 – 2024 (persen)	18
Grafik 1.20. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Periode Maret 2020 s.d. 2024 (persen)	19
Grafik 1.21. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal Periode Maret 2020 – 2024	19
Grafik 1.22. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2024 (persen)	20
Grafik 1.23. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020 – 2024 (persen)	20
Grafik 1.24. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode Maret 2024	20
Grafik 1.25. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode Maret 2020 – 2024	21
Grafik 1.26. <i>Gini Rasio</i> Provinsi di Regional Sumatera Periode Maret 2020 – 2024	22

Grafik 1.27. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Lampung Menurut Tempat Tinggal Periode Maret 2020 – 2024.....	22
Grafik 1.28. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Periode Maret 2020–2024.....	22
Grafik 1.29. Perkembangan NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024	23
Grafik 1.30. NTP Regional Sumatera Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024 (persen).....	23
Grafik 1.31. Perkembangan NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024	26
Grafik 1.32. NTN Regional Sumatera Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024 (persen)	26
Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Negara di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)	28
Grafik 2.2 Realisasi Pajak Dalam Negeri di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)	28
Grafik 2.3 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)	30
Grafik 2.4 Realisasi Pajak Perdagangan Internasional di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)	30
Grafik 2.5 Realisasi PNBPN Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024.....	31
Grafik 2.6 Rincian Realisasi PNBPN Lainnya di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024	32
Grafik 2.7 Rincian Realisasi Pendapatan BLU di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024.....	32
Grafik 2.8 Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)	34
Grafik 2.9 Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (persen).....	34
Grafik 2.10 Realisasi BPP Berdasarkan Jenis Belanja s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen).....	34
Grafik 2.11 Rincian Belanja Modal di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)	35
Grafik 2.12 Pagu, Realisasi, dan Perbandingan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen).....	35
Grafik 2.13 Pertumbuhan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (persen).....	36
Grafik 2.14 Pagu, Realisasi, dan Perbandingan Realisasi BPP Lampung Berdasarkan Fungsi s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen).....	36
Grafik 2.15 Pertumbuhan Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)	37
Grafik 2.16 Tren BPP Per Kapita s.d. 30 Juni 2022 – 2024 (rupiah, jiwa)	37
Grafik 2.17 Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022 – 2024 (miliar Rp, persen)	38
Grafik 2.18 Realisasi Penyaluran TKD Berdasarkan Komponen s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)....	38
Grafik 2.19 Pagu dan Realisasi Penyaluran TKD per Pemerintah Daerah s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen) .	38
Grafik 2.20 Realisasi Dana Transfer Umum wilayah Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)	39
Grafik 2.21 Realisasi DAU Per Jenis s.d. 30 Juni 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	39
Grafik 2.22 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)	40
Grafik 2.23 Realisasi Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)....	40



Grafik 2.24 Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal di Lampung s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen).....	41
Grafik 2.25 Pagu dan Realisasi Dana Desa s.d. 30 Juni 2024 Berdasarkan Jenis (miliar rupiah)	42
Grafik 2.26 <i>Clustering</i> Penyerapan Dana Desa Berdasarkan Bidang (miliar Rp, persen).....	42
Grafik 2.27 Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2024 (miliar, Rp).....	42
Grafik 2.28 Surplus/Defisit APBN Regional Lampung s.d. 30 Juni 2023-2024 (miliar, Rp)	43
Grafik 2.29 Perkembangan Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) Triwulan II 2023 dan 2024. 45	
Grafik 2.30. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	46
Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	47
Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	47
Grafik 2.33. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	48
Grafik 2.34. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	48
Grafik 2.35. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Triwulan II Tahun 2023- 2024 (miliar rupiah)	49
Grafik 2.36. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 20023-2024 (miliar rupiah)	50
Grafik 2.37. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	50
Grafik 2.38. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	50
Grafik 2.39. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	51
Grafik 2.40. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	51
Grafik 2.41. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal (persen) Lampung Triwulan II Tahun 2023 2024	52
Grafik 2.42. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Triwulan II Tahun 2024 (persen).....	52
Grafik 2.43. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Triwulan II Tahun 2024 (miliar rupiah)	53
Grafik 2.44. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024	54
Grafik 2.45. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan II Tahun 2023 dan 2024	54
Grafik 2.46. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah), Rasio Belanja Pegawai (persen), dan Rasio Belanja Modal (persen) Triwulan II-2024	55
Grafik 2.47. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) . 55	



Grafik 2.48. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	56
Grafik 2.49. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)	56
Grafik 2.50. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	57
Grafik 2.51. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	57
Grafik 2.52. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	58
Grafik 2.53. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan II Tahun 2024 (miliar rupiah)	58
Grafik 2.54. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Triwulan II Tahun 2024 (miliar rupiah).....	59
Grafik 2.55. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2024 (ribu rupiah).....	60
Grafik 2.56. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2024 (ribu rupiah).....	60
Grafik 2.57. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024	60
Grafik 2.58. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)	62
Grafik 2.59. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	63
Grafik 3.1. Porsi Pagu DAK Fisik Pemda Per Bidang Tahun 2024.....	65
Grafik 4.1. Fenomena Perubahan Iklim pada beberapa daerah di regional Lampung (Rp Miliar)	78
Grafik 4.2. Perbandingan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Q1-2019 s.d. Q1-2024.....	78
Grafik 4.3. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. Juni 2024 (Rp Miliar)	82
Grafik 4.4. <i>Clustering</i> Proporsi Pagu Anggaran terbesar terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. 2024 (%)	83
Grafik 4.5. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Terkait Perubahan Iklim di Lampung Semester I Tahun 2021 s.d. 2024	83
Grafik 4.6. <i>Clustering</i> DAK Fisik Terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. Juni 2024 (Pagu dan Realisasi dalam Rp Miliar)	84
Grafik 4.7. Realisasi DAK Fisik Terkait Perubahan Iklim di Lampung per Lokasi pada 2021 s.d. Juni 2024 (Rp Miliar)	85
Grafik 4.8. <i>Clustering</i> Dana Desa Terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. Juni 2024 (Realisasi dalam Rp Miliar).....	85
Grafik 4.9. Realisasi Dana Desa Terkait Perubahan Iklim di Lampung per Lokasi pada 2021 s.d. Juni 2024 (Rp Miliar).....	86
Grafik 4.10. Alokasi dan Realisasi APBD Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Lampung periode 2020-2023 (Rp Miliar)	87



Grafik 4.11. Realisasi APBD Belanja Urusan Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung periode 2021-2023 (Rp Miliar) 87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024 (persen)	4
Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024	7
Tabel 1.3. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan II 2024 (Persen)	10
Tabel 1.4. Inflasi Bulanan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan II 2024	12
Tabel 1.5. Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan II 2024	13
Tabel 1.6. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan II 2024 (Persen)	13
Tabel 1.7. Belanja Pengendalian Inflasi per Kementerian/Lembaga	15
Tabel 1.8. Belanja Pengendalian Inflasi per Intervensi di Provinsi Lampung	15
Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 – Triwulan II 2024	24
Tabel 1.10. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 – Triwulan II 2024	25
Tabel 2.1 <i>I-Account</i> APBN di Provinsi Lampung Realisasi s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp).....	27
Tabel 2.2 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)...	29
Tabel 2.3 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Masuk di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen).....	31
Tabel 2.4 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Keluar di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen).....	31
Tabel 2.5 <i>Tax Ratio</i> Penerimaan Perpajakan di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)	31
Tabel 2.6 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Negara Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar rupiah)	33
Tabel 2.7 Pagu, Realisasi, dan Penyerapan DAK Fisik Per Bidang s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)	40
Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen).....	41
Tabel 2.9 Pagu, Realisasi, dan Capaian Output Program Prioritas Nasional s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)	44
Tabel 2.10 <i>I-Account</i> Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)	45
Tabel 2.11. Perbandingan <i>Local Tax Ratio</i> Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024.....	49
Tabel 2.12. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024.....	53
Tabel 2.13. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II Tahun 2023 dan 2024.....	59
Tabel 2.14. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024	60
Tabel 2.15. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024	62
Tabel 2.16. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024	62

Tabel 2.17 <i>I-Account</i> Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung s.d. 30 Juni 2023-2024 (miliar Rp, persen)	62
Tabel 2.18. Belanja Perkapita Konsolidasi Triwulan II Tahun 2023-2024	63
Tabel 3.1. Perbedaan DAK Fisik dan RO Harmonis K/L DAK Fisik	65
Tabel 3.3. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Jalan	67
Tabel 3.4. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan	68
Tabel 3.5. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan	69
Tabel 3.6. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum	70
Tabel 3.7. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi.....	71
Tabel 3.8. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian.....	71
Tabel 4.1. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Terkait Perubahan Iklim per Program di Lampung 2021 s.d. 2024	81
Tabel 4.2. Deskripsi Variabel.....	93
Tabel 4.3. Estimasi Parameter Model 1	93
Tabel 4.4. Hasil Pendalaman Kualitatif Melalui Wawancara <i>Subject Matters Experts</i> Bappeda dan BPKAD Provinsi Lampung	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II Tahun 2024 (yoy)	2
Gambar 4.1. Dampak Negatif Perubahan Iklim di Indonesia dan Provinsi Lampung	77
Gambar 4.2. Fenomena Perubahan Iklim pada beberapa daerah di regional Lampung	78
Gambar 4.3. Potensi Bahaya Perubahan Iklim di Provinsi Lampung	79
Gambar 4.4. Tren APBD Terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Lampung 2020-2023 (Rp Miliar)	86
Gambar 4.5. Transformasi Kebijakan RAD-GRK Provinsi Lampung Menjadi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	89
Gambar 4.6. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung 2021 s.d. 2024	89
Gambar 4.7. Contoh Kolaborasi Dalam Program Kampung Iklim	90

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2024 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Outlook Ekonomi Regional Lampung

Ekonomi Lampung Triwulan II 2024 mencatat pertumbuhan yang solid dengan indikator kesejahteraan yang terus membaik. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu fokus pada stabilitas inflasi dan ketahanan pangan dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan terus mengutamakan upaya peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi guna memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Semester I 2024, ekonomi Lampung tumbuh 4,08% (ctc), lebih lambat dibandingkan 4,45% (ctc) pada Semester I 2023. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan, serta peningkatan Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,27% (ctc). Secara year-on-year, ekonomi Lampung tumbuh 4,80% (yoy) di Triwulan II 2024, meskipun masih di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,05% (yoy). Secara quarter-to-quarter, Lampung mencatatkan pertumbuhan 9,71% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi nasional dan Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan II secara yoy tetap tumbuh solid utamanya didorong sektor transportasi dan pergudangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif utamanya didorong aktivitas ekspor barang dan jasa. sektor transportasi dan pergudangan tumbuh signifikan didorong mobilitas masyarakat yang meningkat akibat momen mudik lebaran dan libur sekolah. Peningkatan ekspor berasal dari komoditas unggulan Lampung seperti Crude Palm Oil (CPO) dan kopi

robusta, yang melonjak seiring dengan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan musim panen raya.

Struktur PDRB Lampung pada triwulan II 2024 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 29,04 persen. Namun, kontribusi sektor ini menunjukkan tren penurunan sejak Triwulan II 2020 hingga Triwulan II 2024. Meskipun tetap menjadi sektor utama dalam menyumbang PDRB, proporsinya terus berkurang seiring dengan pergeseran kontribusi menuju sektor tersier. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tetap memberikan perhatian besar terhadap sektor ini, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas dalam kerangka RPJMD 2019-2024.

Inflasi Lampung pada triwulan II tetap terjaga pada di level sasaran $2,5 \pm 1$ persen (yoy). Capaian inflasi Juni 2024 adalah sebesar 2,84 persen (yoy), di atas inflasi nasional sebesar 2,51 persen (yoy). Secara bulanan, Lampung mengalami deflasi dengan rata-rata deflasi pada triwulan II 2024 sebesar 0,01 persen (mtm), yang lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang mengalami inflasi dengan rata-rata inflasi pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 0,19 persen (mtm). Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada triwulan II 2024 terutama dipengaruhi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya komoditas beras.

Suku bunga acuan pada triwulan II 2024 berada pada angka 6,25 persen untuk memastikan inflasi terkendali dalam level sasaran $2,5 \pm 1$ persen (yoy). Fokus kebijakan moneter melalui suku bunga acuan terus diarahkan untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil. Triwulan II 2024 nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap USD sehingga



meningkatkan harga barang impor. Namun demikian, impor bahan baku dan penolong serta impor barang konsumsi Lampung mengalami peningkatan. Kenaikan ini menunjukkan indikasi sektor industri dan investasi di Lampung yang masih berkembang dengan baik dan daya beli masyarakat yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada Maret 2024, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan Lampung, baik dari segi jumlah maupun persentase dengan pengurangan sebanyak 29,4 ribu orang dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Lampung tercatat mencapai 941,23 ribu orang atau 10,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,03 persen dan regional Sumatera sebesar 8,97 persen. Penurunan tingkat kemiskinan di Lampung menunjukkan efektivitas strategi pembangunan inklusif yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Capaian Gini Ratio Lampung yang semakin baik di periode 2024 mencerminkan semakin rendahnya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Pada Maret 2024, Gini Ratio Provinsi Lampung tercatat 0,302, mengalami penurunan sebesar 0,022 poin atau 6,79 persen dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,313. Tren Gini Ratio di Provinsi Lampung selama periode 2020 hingga 2024 fluktuatif, dengan rata-rata penurunan sebesar 1,90 persen (yoy) atau 0,00625 poin per tahun.

Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung menunjukkan tren yang positif, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dan konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata NTP Provinsi Lampung di triwulan II 2024 mencapai 122,55, lebih tinggi dari capaian NTP nasional yang sebesar 117,42. Namun demikian, capaian ini masih di bawah rata-rata NTP regional Sumatera yang sebesar 135,01. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya untuk mendukung kesejahteraan petani, antara

lain akses permodalan KUR melalui e-KPB, Asuransi Usaha Tani Padi, dan berbagai dukungan lainnya.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Lampung mencatat capaian cukup baik. Pada triwulan II 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata mencapai 109,11, menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata NTN nasional dan regional Sumatera. Dalam upaya meningkatkan sektor perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menerapkan berbagai program dan kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah Lampung. Sebagai hasil dari kerja sama ini, lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) telah ditetapkan di Pulau Pasaran.

Analisis Fiskal Regional: APBN dan APBD

Kinerja APBN di Provinsi Lampung sampai dengan 30 Juni 2024 menunjukkan kinerja positif dan resilien. Belanja Negara mencatat pertumbuhan double-digit, meskipun Pendapatan Negara masih mengalami penurunan yang terkendali.

Belanja Pemerintah Pusat terakselerasi 15,63% (yoy), khususnya guna mendukung pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, persiapan Pilkada, serta peningkatan kualitas layanan publik termasuk Bidang Pendidikan. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp4.712,43 miliar atau 48,29 persen dari pagu, tumbuh 23,51 persen (yoy) didorong oleh penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Pegawai. Belanja Pegawai terealisasi Rp2.299,97 miliar atau 57,45 persen dari pagu, tumbuh 16,81 persen (yoy) dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri serta PPPK termasuk guru. Belanja Barang mencatatkan realisasi Rp2.078,70 miliar atau 46,46 persen dari pagu, dengan pertumbuhan



sebesar 38,94 persen (yoy) utamanya untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Belanja Modal secara nominal terealisasi Rp312,94 miliar, atau 25,18 persen dari pagu, tumbuh negatif 6,06 persen (yoy), seiring penurunan alokasi pagu dari Tahun 2023, namun dari sisi penyerapan terakselerasi. Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp 20,82 miliar, atau 56,49 persen dari pagu, tercatat tumbuh 20,21 persen (yoy) berupa penyaluran Bantuan KIP Kuliah dan PIP kepada sekolah/pesantren.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh seiring peningkatan alokasi pagu dan penyempurnaan kebijakan penyaluran guna mengakselerasi pemerataan pembangunan di daerah. Alokasi TKD pada tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp22.259,81 miliar, meningkat 3,11 persen (yoy). Sampai dengan 30 Juni 2024, telah terealisasi Rp11.458,40 miliar atau 51,47 persen dari pagu, tumbuh 12,68 persen (yoy) dipicu oleh pertumbuhan penyaluran DAU (16,82 persen, yoy) seiring peningkatan alokasi untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan melekat ASN-D. Pertumbuhan penyaluran Dana Desa (22,46 persen, yoy), Insentif Fiskal (29,09 persen, yoy), dan DAK Non Fisik (1,07 persen, yoy) juga menyumbang pertumbuhan seiring *redesign* kebijakan penyaluran dan didukung peningkatan kepatuhan pemda. Di sisi lain, Penyaluran DBH dan DAK Fisik masih perlu terus dioptimalkan.

Pendapatan Negara mengalami penurunan yang terkendali didukung oleh kinerja penerimaan Pajak Dalam Negeri dan PNBPNBP. Secara nominal, Pendapatan Negara telah terkumpul Rp4.795,23 miliar atau 42,77 persen dari target, terkontraksi tipis 0,48 persen (yoy) utamanya disebabkan oleh penurunan Penerimaan Perpajakan (1,62 persen, yoy) yang dipicu oleh kontraksi yang cukup dalam pada penerimaan Bea Keluar. Meskipun demikian, kinerja penerimaan Pajak Dalam Negeri yang bersumber dari PPh, Cukai, dan Pajak Lainnya

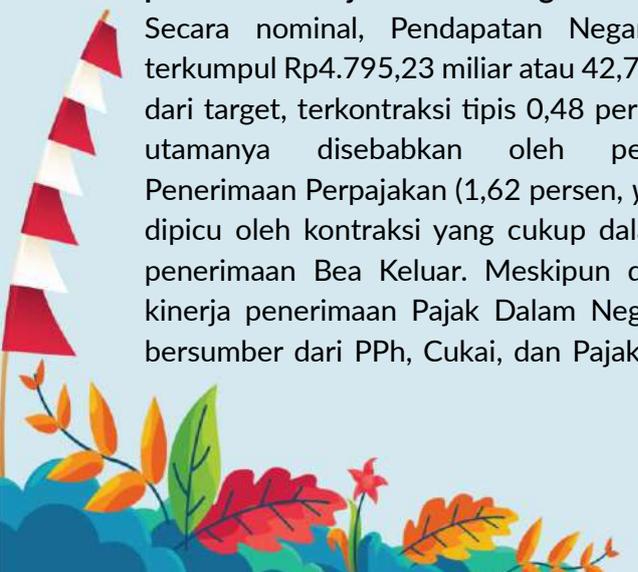
serta penerimaan Bea Masuk tercatat tumbuh. Di samping itu, PNBPNBP menunjukkan kinerja optimal dengan capaian 65,78 persen dari target, tumbuh 6,91 persen (yoy) didukung oleh penerimaan PNBPNBP Lainnya dan Pendapatan BLU yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan.

APBN terus bekerja keras mendukung kebijakan fiskal ekspansif bagi Provinsi Lampung. Defisit APBN tercatat sebesar Rp11.735,60 miliar, atau melebar 24,11 persen (yoy), dipicu oleh peningkatan Belanja Negara di tengah Pendapatan Negara yang masih tumbuh negatif.

Kinerja APBD Provinsi Lampung Triwulan II 2024 menunjukkan Belanja Daerah yang tumbuh positif dengan kontribusi terbesar dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, sementara Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami pertumbuhan meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mengalami kontraksi. Dominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Lampung, surplus APBD mengindikasikan kebijakan fiskal yang konservatif.

Realisasi Belanja Daerah tercatat Rp10.930,06 miliar, atau 33,79 persen dari pagu, tumbuh 11,83 persen (yoy). Realisasi Belanja Operasi mencapai Rp8.220,10 miliar atau 35,79 persen dari pagu, tumbuh 7,71 persen (yoy). Kontribusi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah mencapai 75,21 persen. Realisasi Belanja Modal Daerah di Lampung hingga 30 Juni 2024 tumbuh 11,64 persen (yoy) mencapai Rp683,81 miliar atau 16,92 persen dari pagu. Pertumbuhan didorong utamanya oleh peningkatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, serta Gedung dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Daerah Lampung sampai dengan mencapai Rp13.038,93 miliar atau 40,42 persen dari target APBD, tumbuh 9,46 persen (yoy). Meski demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tercatat sebesar Rp2.546,94 miliar atau 31,35 persen dari





target, tumbuh negatif 3,02 persen (yoy). Kontraksi ini terjadi seiring dengan penurunan pada kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,92 persen (yoy) dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 64,67 persen (yoy). Sementara itu pendapatan dari Retribusi Daerah tumbuh signifikan hingga 795,25 persen (yoy), begitu pula dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,81 persen (yoy). Termoderasinya Pendapatan Pajak Daerah mengakibatkan *Local Tax Ratio* yang membandingkan PDRD terhadap PDRB Lampung cenderung rendah. Kondisi ini mengindikasikan potensi fiskal lokal yang belum optimal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih dominan berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Lampung tercatat Rp13.038,93 miliar atau 40,42 persen dari pagu, tumbuh 19,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap menjadi kontributor utama, menyumbang 75,85 persen dari total Pendapatan Daerah. Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi tingkat kemandirian daerah di regional Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan 54,20 persen.

Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada Triwulan II-2024 menunjukkan surplus, mengindikasikan kebijakan fiskal yang lebih konservatif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Peningkatan belanja perlu diakselerasi agar dapat mendorong daya beli masyarakat, namun dengan tetap memastikan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan fiskal.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat Dan Transfer Ke Daerah

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), melalui Rincian Output (RO) Harmonis yang teridentifikasi sinergis mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di regional Lampung menunjukkan fokus peningkatan pembangunan dan pengembangan pada sektor-sektor strategis seperti jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, air minum dan sanitasi.

Harmonisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dengan DAK Fisik menunjukkan progres yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pada semester I 2024, anggaran DAK Fisik yang dialokasikan di regional Lampung mencapai Rp 1.453,58 miliar dengan realisasi mencapai Rp113,75 miliar atau 7,83 persen dari pagu anggaran, sementara Belanja K/L yang selaras dengan DAK Fisik tersebut mencapai Rp603,25 miliar dengan capaian realisasi Rp165,76 miliar atau 27,48 persen dari pagu anggaran.

Belanja K/L yang harmonis dengan DAK Fisik pembangunan selaras dengan program nasional. Melalui RO Harmonis Bidang Jalan yang bertujuan meningkatkan konektivitas daerah menunjukkan pola alokasi proyek yang cukup merata di seluruh regional Lampung. Dukungan pada bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, air minum dan sanitasi juga menjadi prioritas dengan alokasi anggaran yang signifikan di berbagai daerah regional Lampung untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan tenaga kesehatan, penyaluran benih, peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru, dan pengembangan akses air minum layak dan layanan sanitasi. Hal ini menunjukkan upaya harmonis pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di regional Lampung.

Analisis Tematik: Perubahan Iklim Dan Upaya Pemerintah Untuk Memitigasi Dampaknya

Lampung menghadapi ancaman perubahan iklim serius. Sektor pertanian menurun akibat El Niño dan sektor perikanan terancam produktivitasnya. Fokus lebih pada infrastruktur jangka pendek dibandingkan adaptasi jangka panjang. Evaluasi menunjukkan hubungan positif belanja iklim dan pertumbuhan sektor basis pertanian di Lampung. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan perlunya dukungan lebih baik.

Lampung, sebagai lumbung pangan nasional, menghadapi ancaman signifikan dari perubahan iklim yang berdampak besar pada sektor pertanian dan perikanan. Pada triwulan I 2024, sektor pertanian di Lampung mengalami penurunan tajam sebesar -10,97% akibat fenomena El Niño, sementara sektor perikanan terancam oleh perubahan suhu air laut dan kerusakan ekosistem pesisir yang mempengaruhi stok ikan dan produktivitas nelayan.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menghadapi ketimpangan dan keterbatasan fiskal. Alokasi ketahanan sumber daya air di Lampung mencapai Rp2.778,21 miliar atau 66,91 persen dari total anggaran dalam 4 tahun terakhir, menunjukkan belanja iklim cenderung tidak merata antar sektor terdampak. Fokus lebih besar ditempatkan pada infrastruktur jangka pendek dibandingkan terhadap kebutuhan adaptasi jangka panjang. Belanja iklim di tingkat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal selama 4 tahun terakhir, dengan penekanan pada program jangka pendek.

Evaluasi menunjukkan hubungan positif antara belanja iklim dan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, namun kontribusinya masih minimal. Pemodelan regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam belanja terkait iklim diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian sebesar 0,0102 persen. Efek positif ini

menekankan pentingnya investasi dalam inisiatif terkait iklim untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Adapun tantangan utama implementasi kebijakan terkait perubahan iklim meliputi keterbatasan anggaran, anggaran belanja yang timpang dan terbatas, dan perlunya peningkatan strategi serta dukungan *political will* yang lebih kuat.

Policy Responses

Berdasarkan kondisi makroekonomi, fiskal, dan pembangunan di Lampung pada Triwulan II 2024, dapat disampaikan beberapa policy responses sebagai berikut:

1. **Dukungan Anggaran Pertanian sebagai sektor paling terdampak perubahan iklim.** Alokasi dana untuk subsidi benih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi usaha tani, dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) perlu ditingkatkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan mengatasi inflasi pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kopi di Lampung.
2. **Penyaluran KUR Berbasis Klaster dan Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian (Alsintan).** Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung, OJK, Dinas Koperasi, UMKM, Ditjen Perbendaharaan dan Biro Perekonomian Daerah perlu mendorong penyaluran KUR berbasis klaster dan Kredit Usaha Alsintan di wilayah penghasil komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kelapa sawit.
3. **Pengembangan agrowisata sebagai pivot sektor pariwisata.** Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan agrowisata dapat mengurangi ketergantungan pada permintaan global dan membuka sumber pendapatan baru di Lampung.
4. **Koordinasi Pajak dan Teknologi Informasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli**



- Daerah (PAD).** Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah dalam perbaikan SDM, interkoneksi informasi pajak, dan penerapan sistem pembayaran digital.
- 5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kolaboratif.** Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat skema pembangunan infrastruktur kolaboratif antar kewenangan daerah. Misalnya seperti, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 sebagai payung hukum pembangunan jalan antar kewenangan daerah.
 - 6. Urgensi Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.** Peningkatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga, satuan kerja, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD).
 - 7. Meminimalisir Time Lag Implementasi Transfer Ke Daerah (TKD).** Proses perencanaan, penyaluran, dan realisasi TKD harus dipercepat, termasuk pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit agar tidak mengganggu pelaksanaan program.
 - 8. Mitigasi Risiko Perubahan Anggaran dan Mekanisme.** Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah perlu memahami mekanisme dan batas waktu pengajuan perubahan anggaran untuk meminimalkan ketidakpastian dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
 - 9. Mitigasi Risiko Peran Pejabat Perbendaharaan dalam implementasi DAK Fisik.** Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perlu mempertegas peran pejabat perbendaharaan di Pemda ex-officio untuk memastikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berjalan lancar sejak awal tahun anggaran.
 - 10. Peningkatan Interkoneksi Data Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah.** Peningkatan validitas dan akurasi integrasi data Belanja Pemerintah Pusat dan TKD yang direalisasikan oleh Pemerintah Daerah penting untuk meningkatkan harmonisasi Belanja K/L dan TKD di tingkat wilayah.
 - 11. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).** Utamanya, untuk proyek-proyek lingkungan hidup, seperti rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor pertanian. Dana ini penting untuk mendukung upaya adaptasi perubahan iklim.
 - 12. Dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar dioptimalkan melalui orkestrasi pemerintah daerah.** Dana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Lampung. Program replanting, pelatihan petani, dan pengembangan produk turunan sawit yang bernilai tambah harus menjadi prioritas.
 - 13. Kementerian terkait dapat meningkatkan efisiensi penerbitan Surat Keputusan penetapan lokasi penerima bantuan lebih awal.** Hal ini memberikan waktu bagi satuan kerja untuk melakukan verifikasi penerima bantuan dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
 - 14. Program Desa Devisa dapat diimplementasikan untuk mendukung kapasitas ekonomi.** Khususnya, desa-desa di Lampung yang memiliki produk unggulan ekspor seperti kopi dan lada. Ini akan memperkuat kapasitas produksi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui akses ke pasar internasional.



Indikator

Makro Ekonomi



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2024 (yoy)



Perekonomian Lampung pada Triwulan II 2024 tumbuh positif, menguat dibandingkan triwulan sebelumnya serta periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan ini utamanya didorong Lapangan Usaha (LU) Transportasi dan Perdagangan dan aktivitas Ekspor Barang dan Jasa.



Transportasi dan Pergudangan
15,19% (yoy) ↑

LU Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh didorong momen mudik Hari Keagamaan Besar Nasional dan libur anak sekolah.



Ekspor Barang dan Jasa
14,20% (yoy) ↑

Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertingi, didorong peningkatan ekspor komoditas unggulan Lampung seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan kopi robusta, yang melonjak seiring dengan perayaan HKBN dan musim panen raya.

Struktur PDRB Triwulan II 2024 (yoy)

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi Produksi



Kontribusi 29,04%
PERTANIAN
0,32% (yoy) ↑

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi tumbuh, didorong meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan khususnya padi akibat panen raya yang terkonsentrasi pada Triwulan 2.



Kontribusi 17,66%
INDUSTRI PENGOLAHAN
4,77% (yoy) ↑

Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh didorong oleh kinerja industri makan dan industri pakaian jadi selaras dengan adanya peningkatan permintaan seragam menjelang tahun ajaran baru.



Kontribusi 13,69%
PERDAGANGAN
5,36% (yoy) ↑

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh sejalan normalisasi aktivitas perdagangan komoditas pangan pasca puncak panen raya serta ramainya penyelenggaraan event kuliner di Lampung.

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi pengeluaran

Pertumbuhan konsumsi RT relatif stabil jika dibandingkan periode triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 4,67% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya periode *high demand* pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kontribusi 62,54%
KONSUMSI RT
4,69% (yoy) ↑



Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan positif, menguat dibandingkan periode triwulan II 2023 yang tumbuh 2,14% (yoy), didorong peningkatan realisasi belanja modal APBD antara lain untuk pembangunan JPO Siger Milenial.

Kontribusi 29,57%
PMTB
3,33% (yoy) ↑



Perkembangan Inflasi Lampung (yoy)

Periode Juni 2024

Kota Metro
IHK 105,52
2,37% (yoy)

Kabupaten Mesuji
IHK 110,75
3,40% (yoy)

Kabupaten Lampung Timur
IHK 109,57
4,06% (yoy)

Kota Bandar Lampung
IHK 106,11
2,25% (yoy)

Perhitungan
IHK pada Empat
Wilayah



Inflasi Provinsi Lampung
2,84% (yoy)

Penahan Inflasi (yoy)

- Telur Ayam Ras
- Parfum
- Air Kemasan

Pendorong Inflasi (yoy)

- Beras
- Kopi Bubuk
- Sigaret Kretek Mesin



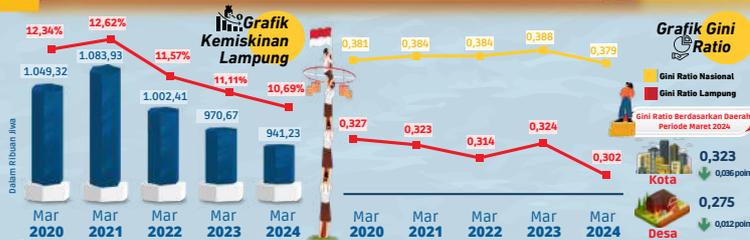
Highlights Perkembangan Inflasi Lampung triwulan II 2024

Pada tahun 2024, level sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen (yoy). Sepanjang triwulan II 2024 inflasi Lampung dan nasional konsisten berada dalam level sasaran. Inflasi Lampung dan Nasional melanjutkan tren yang menurun. Pemda Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya konsisten melakukan mitigasi risiko inflasi melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Indikator

Kesejahteraan

Kemiskinan dan Ketimpangan



Highlights Kemiskinan dan Ketimpangan Lampung Maret 2024

Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Lampung mengalami penurunan, baik dari segi jumlah maupun persentase. Penurunan ini mencerminkan hasil strategi pembangunan inklusif yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui *Gini Ratio* juga menunjukkan penurunan pada periode Maret 2024 dibandingkan dengan Maret 2023, dan *Gini Ratio* di Lampung tercatat lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan di Lampung.

Nilai Tukar Petani (NTP)



Highlights NTP

Rata-rata NTP Lampung Triwulan II 2024 sebesar 122,55 meningkat 15,15% (yoy). Peningkatan ini didorong hampir seluruh subsektor NTP kecuali Nilai Tukar Petani Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan yang mengalami penurunan. Dalam meningkatkan kesejahteraan Petani, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan Program e-KPB yang memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha.



Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

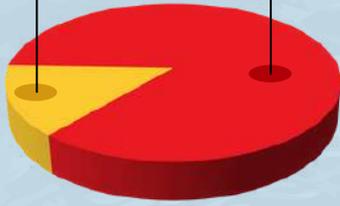


Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp688,50 Miliar
65,78% dari target

Realisasi
Penerimaan Perpajakan
Rp4.106,73 Miliar
40,40% dari target

Total Realisasi
Pendapatan Negara **42,77%**
dari target
Rp4.795,23 Miliar



Realisasi Pendapatan Negara di Lampung

Sampai dengan Triwulan II 2024, Pendapatan Negara menunjukkan capaian yang positif dengan nilai realisasi mencapai Rp4.795,23 miliar atau setara dengan 42,77% dari target. Kontributor utama Pendapatan Negara bersumber dari Pajak Penghasilan (PPH)

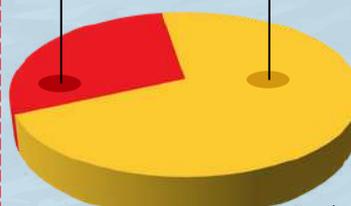
Pajak Penghasilan Rp1.886,76 Miliar	Cukai Rp6,25 Miliar	Bea Keluar Rp150,10 Miliar
Pajak Pertambahan Nilai Rp1.629,03 Miliar	Pajak Lainnya Rp82,79 Miliar	PNBP Lainnya Rp410,26 Miliar
Pajak Bumi dan Bangunan Rp28,12 Miliar	Bea Masuk Rp323,68 Miliar	Pendapatan BLU Rp278,24 Miliar

Realisasi Belanja Negara

Realisasi
Belanja Pemerintah Pusat
Rp4.712,43 Miliar
48,29% dari pagu

Realisasi
Transfer Ke Daerah
Rp11.458,40 Miliar
51,47% dari pagu

Total Realisasi
Belanja Negara **50,50%**
dari pagu
Rp 16.170,83 Miliar



Realisasi Belanja Negara di Lampung

Hingga Triwulan II 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp16.170,83 miliar atau tumbuh 15,63% (yoy). Realisasi Belanja Negara masih didominasi oleh penyaluran Dana Transfer ke Daerah dengan nominal Rp11.458,40 miliar dengan kontribusi 70,86% dari total Belanja Negara.

Belanja Pegawai Rp2.299,97 Miliar	Belanja Barang Rp2.078,70 Miliar	Dana Alokasi Umum Rp7.597,20 Miliar	Dana Bagi Hasil Rp225,04 Miliar	DAK Fisik Rp113,75 Miliar
Belanja Modal Rp312,94 Miliar	Belanja Bansos Rp20,82 Miliar	DAK NonFisik Rp2.118,03 Miliar	Insentif Fiskal Rp73,85 Miliar	Dana Desa Rp1.330,53 Miliar

Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah
Rp2.546,94 Miliar
31,35 Persen

Pendapatan Transfer (Pusat)
Rp9.890,11 Miliar
44,42 Persen

Transfer Antar Daerah
Rp594,00 Miliar
35,54 Persen

Lain-lain Pendapatan yang Sah
Rp7,88 Miliar
3,95 Persen

Total Realisasi
Pendapatan Daerah **40,42%**
dari target
Rp13.038,93 Miliar

PAD Lampung mencapai 31,35% target, utamanya dari Pajak Daerah yang mencerminkan stabilitas dalam penerimaan pajak sebagai komponen penting dari PAD.

Pendapatan Transfer (Pusat) telah mencapai 44,42% dari target, menjadi kontributor utama yakni sebesar 75,85% terhadap total Pendapatan Daerah.

Total Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp594,00 miliar atau 35,54% dari target, meningkat sebesar 10,73% (yoy).

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp7,88 miliar, yang sebagian besar didominasi oleh pendapatan BLUD

Sumber data: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja Daerah

Belanja Operasional
Rp8.220,10 Miliar
35,79 Persen

Belanja Modal
Rp683,81 Miliar
16,92 Persen

Belanja Tidak Terduga
Rp26,76 Miliar
21,55 Persen

Belanja Transfer
Rp1.999,39 Miliar
38,36 Persen

Total Realisasi
Belanja Daerah **33,79%**
dari pagu
Rp10.930,06 Miliar

Belanja Operasional telah terealisasi 35,79% dari pagu, dengan Belanja Pegawai yang masih mendominasi Belanja Operasi dengan andil sebesar 63,86%.

Belanja Modal telah terealisasi 16,92% dari pagu, utamanya didorong Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan dengan andil terhadap belanja modal mencapai 64,86%.

Belanja Tidak Terduga telah terealisasi 21,55% dari pagu. Belanja ini juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer telah terealisasi 38,36% dari pagu. Realisasi Belanja Transfer tertinggi berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

Snapshot Analisis Tematik



Dampak Negatif Perubahan Iklim di Indonesia dan Lampung

- 5,8 juta km² wilayah perairan Berbahaya bagi kapal nelayan < 10 GT
- 18.000 km garis pantai masuk kategori rentan
- Produksi Beras akan menurun di beberapa wilayah
- Peningkatan Suhu 0,45-0,75^o Celcius
- Perubahan Curah Hujan ± 2,5 mm per hari
- Kenaikan Muka Laut 0,8-1,2 cm per tahun
- Gelombang Ekstrem Meningkat < 1,5 m

Analisis Dampak Belanja Pemerintah Terkait Perubahan Iklim

Peningkatan 1% dalam belanja terkait iklim diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian Lampung sebesar 0,0102%, menegaskan pentingnya investasi dalam inisiatif terkait iklim untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Begitu pula, kenaikan 1% dalam curah hujan rata-rata diproyeksikan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian sebesar 0,0196%, menunjukkan peran curah hujan dalam hasil pertanian.

Sumber data: Dinas LHK Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan

Rekomendasi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Basis di Lampung

- Penjaringan Talenta dan Pendanaan Swasta melalui Call for Project, untuk pengembangan program-program inovatif
- Mekanisme Baru dalam Kemitraan Publik-Swasta, membuka kesempatan bagi pihak swasta dalam perencanaan pembangunan daerah
- Sistem Peringatan Dini Perubahan Iklim melalui Teknologi Informasi untuk penyebaran informasi mengenai dampak perubahan iklim
- Optimasi Penggunaan Lahan meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian yang ada melalui praktik pertanian yang lebih baik
- Program Pemulihan Lahan untuk mengelola lahan yang terdampak perubahan iklim dengan teknik agroforestri dan praktik pertanian konvensional
- Belanja Iklim yang Efektif serta Monev untuk memastikan bahwa investasi direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif
- Manajemen Sumber Daya Air dengan mengimplementasikan strategi manajemen air yang komprehensif untuk menjamin pasokan air yang cukup dan tepat waktu
- Dukungan dan Peningkatan Tenaga Kerja Pertanian dengan adanya kebijakan dan program untuk mendukung petani



Halaman ini sengaja dikosongkan

“ Pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB I

Analisis Ekonomi Regional

 Tugu Payan Mas, Lampung Utara



BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Indikator makro ekonomi berperan dalam membantu memantau dan memprediksi perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar.

1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

1.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

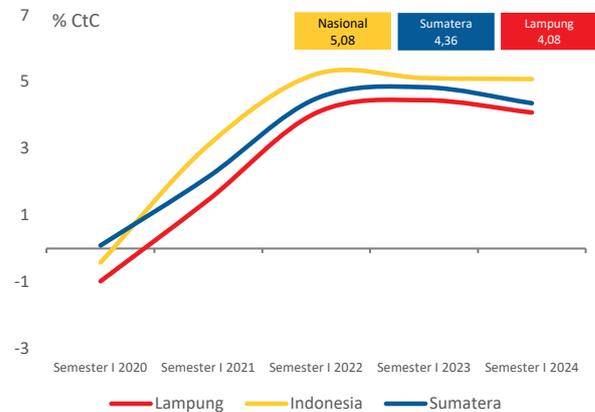
Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, data yang digunakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Secara *Cumulative-to-Cumulative (ctc)*, Kinerja Ekonomi Provinsi Lampung Semester I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,08 persen (*ctc*), meski melambat dibandingkan 4,45 persen (*ctc*) pada Semester I 2023. Capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,08 persen (*ctc*) dan ekonomi Sumatera yang tercatat sebesar 4,36 persen (*ctc*). Tren kinerja ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung secara *ctc* dapat dilihat sebagaimana pada grafik 1.1.

Provinsi dengan capaian kinerja ekonomi di atas 5,00 persen yaitu Sumatera Selatan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,01 persen (*ctc*). Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah di regional Sumatera dengan pertumbuhan sebesar 1,02 persen (*ctc*). Kinerja ekonomi seluruh Provinsi regional Sumatera di Semester I 2024 mengalami pertumbuhan positif yang ditopang oleh perbaikan kinerja hampir seluruh lapangan usaha. Dari sisi permintaan,

konsumsi rumah tangga naik didorong daya beli dan mobilitas masyarakat.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Semester I 2020 – Semester I 2024 persen (*ctc*).



Sumber: BPS (diolah)

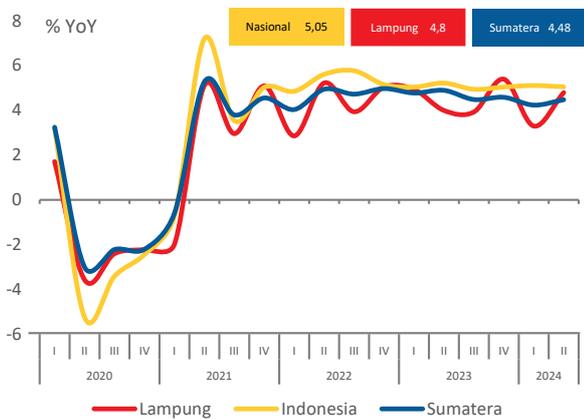
Pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung pada Semester I 2024 didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha terutama transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 13,37 persen (*ctc*). Kinerja perekonomian Lampung yang lebih baik tertahan oleh kinerja sektor pengadaan listrik dan gas; pertanian, kehutanan dan perikanan; serta pengadaan air yang berkontraksi masing-masing sebesar 14,00 persen (*ctc*); 4,84 persen (*ctc*); dan 1,49 persen (*ctc*). Lapangan usaha transportasi dan pergudangan Semester I 2024 tumbuh ekspansif sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat Lampung dibandingkan periode sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif kinerja ekonomi didorong seluruh komponen. Komponen yang tumbuh signifikan yaitu Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 16,27 persen (*ctc*) didorong aktivitas Pemilu pada triwulan I 2024 dan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang serta peningkatan aktivitas lembaga keagamaan dalam rangka peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).



Secara *year-on-year (yoy)*, kinerja ekonomi Lampung triwulan II 2024 dibandingkan dengan triwulan II 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,80 persen (*yoy*), menguat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,00 persen (*yoy*). Capaian kinerja ekonomi Lampung triwulan II 2024 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen (*yoy*), namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi Sumatera yang tumbuh sebesar 4,48 persen (*yoy*). Tren kinerja ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung secara *yoy* dapat dilihat sebagaimana pada grafik 1.2.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 persen (*yoy*)



Sumber: BPS (diolah)

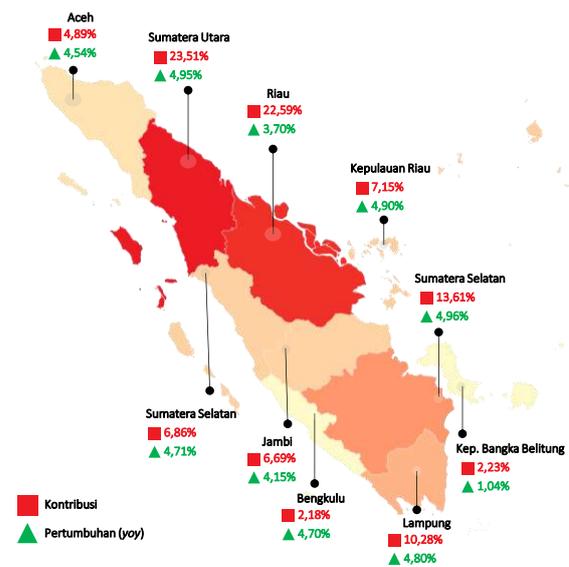
Pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh sebagian besar peningkatan sejumlah sektor lapangan usaha, terutama sektor transportasi dan perdagangan yang tumbuh sebesar 15,19 persen (*yoy*). Selain itu, sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 9,89 persen (*yoy*) dan 9,44 persen (*yoy*). Kinerja perekonomian Lampung yang lebih baik tertahan oleh kinerja sektor pengadaan listrik dan gas yang berkontraksi sebesar 11,23 persen (*yoy*).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh peningkatan di seluruh komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah komponen Ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 14,20 persen (*yoy*) diikuti komponen

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 13,55 persen (*yoy*) dan Komponen Impor yang tumbuh sebesar 13,47 persen (*yoy*).

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada Triwulan II Tahun 2024 didominasi oleh tiga provinsi utama. Provinsi Sumatera Utara memiliki kontribusi terbesar sebesar 23,51 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen (*yoy*). Provinsi Riau menyusul dengan kontribusi 22,59 persen dan pertumbuhan ekonomi 3,70 persen (*yoy*). Provinsi Sumatera Selatan juga berperan penting dengan kontribusi 13,61 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen (*yoy*) dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II Tahun 2024 (*yoy*)



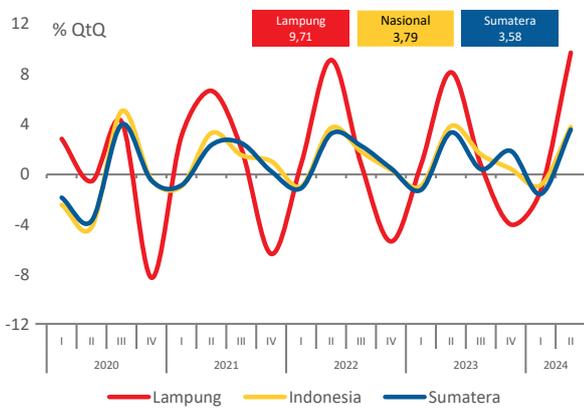
Sumber: BPS (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada pada posisi ke-5 tertinggi dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Sektor transportasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,19 persen (*yoy*) didorong adanya momen libur mudik Lebaran Idul Adha dan libur anak sekolah. Sektor ini memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam struktur ekonomi di Lampung yaitu sebesar 7,57 persen dari total PDRB ADHB Lampung triwulan II 2024.



Secara *quarter-to-quarter (qtq)*, kinerja ekonomi Lampung triwulan II 2024 dibanding triwulan I 2024 tumbuh positif sebesar 9,71 persen (*qtq*), menguat dari capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,24 persen (*qtq*). Konsisten dengan tren tahunan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I. Kinerja ekonomi Lampung secara *qtq* melampaui capaian kinerja ekonomi nasional dan Sumatera pada Triwulan II 2024, yang masing-masing mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,79 persen (*qtq*) dan 3,58 persen (*qtq*). Tren kinerja ekonomi secara *qtq* di tingkat Nasional, Sumatera, dan Lampung dapat dilihat pada grafik 1.3.

Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 persen (*qtq*)



Sumber: BPS (diolah)

Pada periode triwulan II, secara *qtq* Lampung menunjukkan *seasonal pattern* pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan I). Tren yang terjadi pada empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung di triwulan II selalu mencatatkan pertumbuhan positif yang lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya.

Capaian ekonomi Lampung triwulan II 2024 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya (triwulan II 2023 dibanding triwulan I 2022) yang tumbuh sebesar 8,15 persen (*qtq*). Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu

sebesar 33,57 persen (*qtq*), kemudian disusul oleh sektor pengadaan listrik, gas dan sektor jasa lainnya yang tumbuh positif masing-masing sebesar 11,74 persen (*qtq*) dan 10,43 persen (*qtq*). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu tumbuh positif sebesar 17,31 persen (*qtq*), kemudian disusul oleh komponen Ekspor barang dan jasa yang tumbuh positif sebesar 13,45 persen (*qtq*).

1.1.1.2. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 masih dipengaruhi secara signifikan oleh dua komponen permintaan domestik, yaitu Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada triwulan II 2024, Konsumsi RT memberikan kontribusi sebesar 62,54 persen terhadap PDRB Provinsi Lampung, disusul oleh Investasi PMTB yang memberikan kontribusi sebesar 29,57 persen. PDRB ADHB Konsumsi RT sebesar Rp77.982,03 miliar dan PDRB ADHB Investasi PMTB sebesar Rp36.870,17 miliar.

Pada triwulan II 2024, laju pertumbuhan ekonomi tahunan Lampung pada konsumsi RT tumbuh sebesar 4,69 persen (*yoy*), melemah dibandingkan periode triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 5,87 persen (*yoy*). Di sisi lain, investasi PMTB tumbuh sebesar 3,33 persen (*yoy*), menguat dibandingkan periode triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 2,14 persen (*yoy*). Sementara itu, laju pertumbuhan triwulanan yakni untuk konsumsi RT tumbuh sebesar 5,38 persen (*qtq*), menguat dibandingkan periode triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 5,36 persen (*qtq*). Investasi PMTB tumbuh sebesar 1,47 persen (*qtq*), menguat dibandingkan periode triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 0,47 persen (*qtq*). Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung triwulan II 2020 hingga triwulan II 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1.

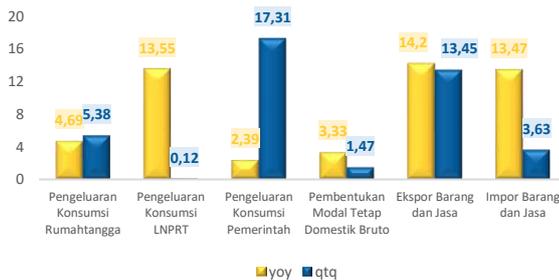
Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024 (persen)

Pengeluaran	Triwulan II 2020			Triwulan II 2021			Triwulan II 2022			Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,25	-5,82	-4,40	61,16	2,99	5,12	60,41	4,37	5,42	61,83	5,36	5,87	62,54	5,38	4,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,64	-4,04	-9,31	1,61	-0,99	3,38	1,58	2,74	5,04	1,64	5,04	9,29	1,77	0,12	13,55
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,44	20,39	-5,22	7,37	31,67	4,65	6,34	30,48	-3,79	6,31	32,52	4,62	6,09	17,31	2,39
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	32,12	-2,51	-7,32	32,38	0,07	4,44	30,91	1,12	3,40	30,52	0,46	2,14	29,57	1,47	3,33
Perubahan Inventori	0,50			0,57			0,73			0,65			0,64		0,00
Ekspor Barang dan Jasa	38,81	-2,39	-10,66	45,33	3,20	20,71	48,43	5,63	4,74	48,98	5,40	9,86	55,46	13,45	14,20
Impor Barang dan Jasa	41,75	-8,88	-14,12	48,41	-3,31	20,11	48,38	-3,66	2,28	49,93	-0,68	11,44	56,07	3,63	13,47
PDRB	100,00	-0,54	-3,59	100,00	6,67	5,12	100,00	9,13	5,23	100,00	8,15	4,00	100,00	9,71	4,80

Sumber: BPS (diolah)

Secara tahunan dan triwulanan, semua komponen PDRB berdasarkan pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2024 sebagaimana tampak pada grafik 1.4.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan II 2024 Menurut Pengeluaran (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Secara tahunan, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 14,2 persen (yoy), didorong oleh peningkatan ekspor komoditas unggulan Lampung seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan kopi robusta, yang melonjak seiring dengan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan musim panen raya. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 13,55 persen (yoy), didorong oleh peningkatan aktivitas lembaga keagamaan dalam peringatan HKBN (Idul Fitri, Idul Adha, Waisak, dan kenaikan Isa Almasih) serta peningkatan aktivitas partai politik pasca Pemilihan Umum (Pemilu) dan masih berlanjut dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Impor barang dan jasa tumbuh 13,47 persen (yoy) yang didorong peningkatan impor barang konsumsi dan bahan baku penolong.

Pengeluaran Konsumsi RT tumbuh sebesar 4,69 persen (yoy) yang dipicu berlanjutnya periode *high demand* selama momen HKBN. PMTB tumbuh 3,33 persen (yoy) didorong kenaikan realisasi belanja modal APBD dibandingkan triwulan II 2023, utamanya belanja modal untuk pembangunan Jalan dan Jembatan, antara lain untuk pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Siger Milenial pembangunan inpres jalan desa di beberapa Kabupaten, pembangunan pipa irigasi, dan penambahan daya listrik penerangan jalan. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh sebesar 2,39 persen (yoy) yang didorong naiknya realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja Bansos pada APBN. Kemudian, didorong juga realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya pada APBD terutama Belanja Hibah tumbuh signifikan hingga 194,98 persen (yoy). Hal ini terkait adanya Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat (KPU/Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024.

Secara triwulanan, PKP mencatatkan pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi yaitu sebesar 17,31 persen (qtq) didorong peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor barang dan jasa tumbuh 13,45 persen (qtq), dipicu oleh peningkatan volume ekspor luar negeri Lampung sebesar 3,33 persen (qtq). Hal ini termasuk peningkatan volume impor bahan bakar mineral sebesar 6,70 persen (qtq) dengan kontribusi 19,42 persen; peningkatan volume kopi, teh, dan rempah sebesar 69,59 persen



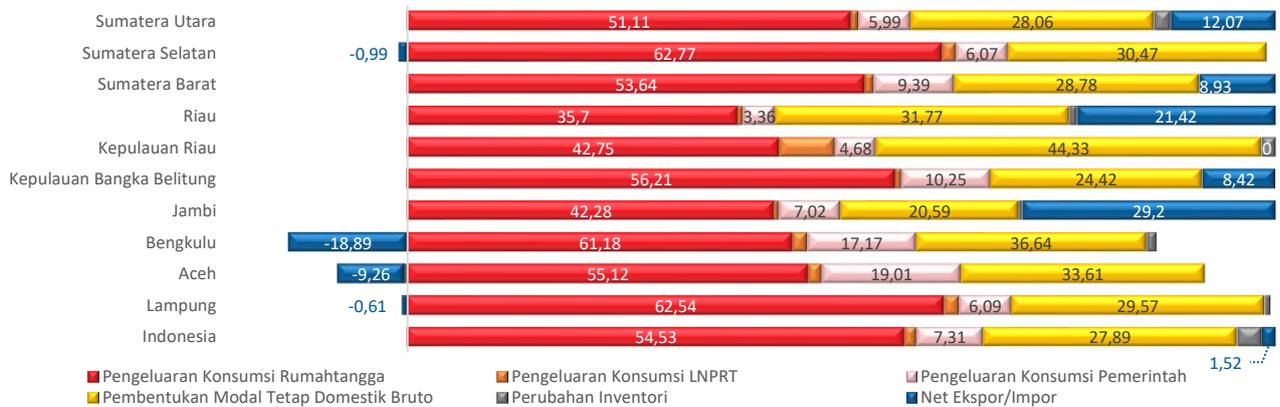
(*qtq*) dengan kontribusi 9,39 persen; serta peningkatan volume bubuk kayu atau pulp sebesar 10,48 persen (*qtq*) dengan kontribusi 5,81 persen. Pengeluaran Konsumsi RT tumbuh 5,38 persen (*qtq*) yang didorong oleh konsumsi makanan minuman pada momen HKBN di triwulan II 2024. Impor barang dan jasa tumbuh 3,63 persen (*qtq*), didorong oleh peningkatan volume impor luar negeri Lampung sebesar 6,31 persen (*qtq*). Komoditas utama yang mencatat peningkatan volume impor secara *qtq* adalah gula dan kembang gula dengan peningkatan volume sebesar 111,73 persen (*qtq*) serta binatang hidup dengan peningkatan volume sebesar 84,87 persen (*qtq*). PMTB tumbuh sebesar 1,47 persen (*qtq*) dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal APBD dibandingkan triwulan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh 0,12 persen (*qtq*) didorong adanya aktivitas dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada serta peningkatan aktivitas lembaga keagamaan dalam rangka peringatan HKBN.

Struktur ekonomi Provinsi Lampung dari sisi pengeluaran ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi

RT yang mencakup 62,54 persen dari total PDRB. Selain itu, komponen permintaan domestik lainnya seperti PKP dan PK-LNPRT memberikan kontribusi masing-masing sebesar 6,09 persen dan 1,77 persen. Dari sisi komponen eksternal, impor memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pengurang PDRB Lampung dengan kontribusi sebesar 56,07 persen. Sementara itu, ekspor memberikan kontribusi sebesar 55,46 persen terhadap PDRB Lampung sehingga menghasilkan net impor sebesar 0,61 persen.

Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional dan Provinsi lainnya di regional Sumatera, Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi komponen utama permintaan domestik, seperti halnya di Lampung sebagaimana tampak pada grafik 1.5. Namun, dalam komponen eksternal, Nasional dan enam Provinsi di regional Sumatera yakni Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masing-masing menghasilkan net ekspor, dimana kontribusi ekspor dan barang keluar daerah lebih.

Grafik 1.5. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Triwulan II 2024



Sumber: BPS (diolah)

Pada triwulan II 2024, kontribusi konsumsi RT terhadap PDRB meningkat 0,71 persen poin jika dibandingkan kontribusi pada triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 61,82 persen. Namun, kontribusi tersebut masih lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar 65,64 persen.

Konsumsi RT di Lampung menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 4,69 persen (*yoy*). Capaian triwulan II 2024 melemah dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 5,87

persen (*yoy*), dan triwulan II 2020, triwulan II 2021, dan triwulan II 2023 yang mencapai pertumbuhan di atas 5,00 persen (*yoy*). Pada Triwulan II tahun 2024, pertumbuhan konsumsi RT dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada berbagai momen penting, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Waisak, dan kenaikan Isa Almasih. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pencairan gaji ke-13 juga berkontribusi dalam mendorong daya beli



masyarakat. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebesar 3,16 persen, atau meningkat sekitar Rp83.212, menjadi Rp2.716.496 per 1 Januari 2024 juga berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat secara umum.

Pada triwulan II 2024, terdapat peningkatan kontribusi PK-LNPRT terhadap PDRB sebesar 0,13 persen poin jika dibandingkan kontribusi pada triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 1,64 persen. Lebih lanjut, kontribusi PK-LNPRT pada periode pelaporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 hingga 2022.

Kinerja PK-LNPRT tumbuh cukup signifikan yakni sebesar 13,55 persen (yoy), menguat jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 9,29 persen (yoy). Pertumbuhan PK-LNPRT di triwulan II 2024 didorong peningkatan berbagai kegiatan partai politik dalam masa kampanye Pilkada 2024 dan peningkatan aktivitas lembaga keagamaan.

Dari komponen konsumsi pemerintah, pada triwulan II 2024 kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB sebesar 6,09 persen, menurun dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar 6,31 persen dan juga lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan peran sektor swasta yang meningkat dalam perekonomian baik dari investasi, produksi, maupun pengeluaran konsumen.

Pada triwulan II 2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 2,39 persen (yoy), melemah jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 4,62 persen (yoy). Hal tersebut diakibatkan menurunnya realisasi belanja modal pada APBN karena pagu belanja modal tahun 2024 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya ada penambahan pagu belanja modal untuk pembangunan jalan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2023. Namun demikian, Konsumsi Pemerintah pada triwulan II masih dapat tumbuh positif yang didorong peningkatan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja Bansos pada APBN. Kemudian, didorong juga realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya terutama Belanja Hibah

tumbuh signifikan hingga 194,98 persen (yoy). Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai belanja pemerintah, dapat ditemukan pada Bab II Analisis Fiskal Regional.

Pada Triwulan II tahun 2024, kontribusi PMTB terhadap PDRB Lampung mencatat penurunan sebesar 0,95 persen poin dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2023, yang tercatat sebesar 30,52 persen. Meskipun demikian, kinerja PMTB pada Triwulan II tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,33 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan II tahun 2023 yang sebesar 0,46 persen (yoy).

Kontribusi ekspor terhadap PDRB Triwulan II 2024 sebesar 55,46 persen, mengalami peningkatan sebesar 6,48 persen poin dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 48,98 persen. Kinerja ekspor Provinsi Lampung triwulan II 2024 tumbuh signifikan sebesar 14,20 persen (yoy), menguat dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tumbuh sebesar 9,86 persen (yoy).

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat secara proaktif mendorong peningkatan ekspor dari Lampung melalui berbagai inisiatif strategis. Sampai dengan Semester I 2024, Kanwil DJBC Sumbagbar telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) asistensi ekspor secara hybrid bagi UMKM di Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Atase Perdagangan Luar Negeri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM Lampung di pasar internasional. Selain itu, Kanwil DJBC Sumbagbar memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kawasan Berikat, serta berhasil mendorong ekspor UMKM ke Singapura dan mendukung pencaangan desa devisa untuk komoditas pisang, kopi, dan madu.

Kontribusi impor Lampung triwulan II 2024 sebesar 56,07 persen, mengalami kenaikan sebesar 6,14 persen poin dibandingkan triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 49,93 persen. Pada triwulan II 2024, kinerja impor Lampung tumbuh sebesar 13,47 persen (yoy), menguat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di periode yang sama tahun



sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,44 persen (yoy). Impor bahan baku dan penolong triwulan II 2024 mencapai 553,64 juta USD, menunjukkan peningkatan sebesar 9,54 persen (yoy). Peningkatan juga terjadi pada impor barang konsumsi yang mencapai 965,15 juta USD atau meningkat sebesar 2.604,31 persen (yoy).

1.1.1.3. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto Sisi Lapangan Usaha

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar PDRB ADHB Provinsi Lampung pada Triwulan II 2024, dengan kontribusi Rp36.207,17 miliar atau 29,04

persen. Sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan reparasi kendaraan menyusul dengan kontribusi masing-masing 17,66 persen dan 13,69 persen, sehingga total kontribusi ketiga sektor ini mencapai 60,39 persen dari total PDRB. Dari ketiga *leading sector* tersebut, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 0,32 persen (yoy), industri pengolahan tumbuh 4,77 persen (yoy), serta perdagangan besar dan reparasi kendaraan tumbuh 5,36 persen (yoy). Perkembangan PDRB lapangan usaha Lampung triwulan II 2020 hingga triwulan II 2024 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024

Lapangan Usaha	Triwulan II 2020			Triwulan II 2021			Triwulan II 2022			Triwulan II 2023			Triwulan II 2024		
	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,35	9,34	1,69	30,23	11,94	0,28	29,87	16,08	3,33	29,67	18,55	1,56	29,04	33,57	0,32
Pertambangan dan Penggalian	4,81	-1,04	-2,68	5,46	0,97	-4,54	5,8	1,27	-4,57	4,75	0,05	-2,42	4,86	-4,78	6,17
Industri Pengolahan	18,12	-5,34	-12,5	18,51	0,55	8,04	18,43	8,87	7,33	17,6	5,15	-0,55	17,66	3,43	4,77
Pengadaan Listrik, Gas	0,16	-3,66	-1,97	0,13	-1,33	-10,28	0,13	3,25	12,08	0,13	4,6	5,49	0,1	11,74	-11,23
Pengadaan Air	0,11	1,42	4,11	0,11	3,53	6,52	0,1	-2,05	3,9	0,1	0,09	2,06	0,09	3,77	0,28
Konstruksi	9,04	-3,61	-2,45	9,46	-0,44	9,01	9,31	-0,54	4,93	9,08	0,87	2,37	9,12	2,02	8,08
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	10,89	-9,49	-10,19	11,71	9,64	13,48	12,92	10	14,19	13,71	5,84	9,97	13,69	2,7	5,36
Transportasi dan Pergudangan	4,74	-12,19	-13,22	4,99	12,9	9,95	5,43	9,51	14,21	6,97	4,49	19,32	7,57	8	15,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	-10,42	-7,14	1,46	5,16	2,5	1,44	5,05	8,53	1,59	8,41	18,02	1,55	5,26	4,04
Informasi dan Komunikasi	4,44	9,05	11,03	4,38	9,1	8,19	3,82	9,13	-2,52	3,82	4,93	7,64	3,74	1,98	6,26
Jasa Keuangan	2,08	-3,77	2,11	2,16	1,24	7,08	2,06	-2,71	-2,48	1,93	2,47	0,05	1,97	3,84	9,12
Real Estate	2,94	-5,97	-1,73	2,76	0,48	0,16	2,61	2,11	3,93	2,52	4,58	1,9	2,5	1,2	6,29
Jasa Perusahaan	0,15	-6,15	-4,33	0,14	5,69	4,21	0,15	5,53	14,84	0,15	1,26	4,89	0,16	0,83	9,44
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,69	5,76	5,42	3,7	22,67	7,81	3,22	18,09	-4,81	3,19	13,62	4,39	3,17	4,86	5,43
Jasa Pendidikan	3,14	2,64	4,44	2,94	4,36	0,03	2,83	4,92	4,01	2,75	3,3	1,57	2,71	-0,18	0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	-3,2	3,12	1,02	3,51	10,03	0,92	-6,63	-1,45	0,94	2,67	6,73	0,97	7,91	9,26
Jasa lainnya	0,84	-16,84	-11,44	0,83	-2,49	5,29	0,96	15,73	26,45	1,08	9,59	15,68	1,11	10,43	9,89
PDRB	100	-0,54	-3,58	100	6,67	5,12	100	9,13	5,23	100	8,15	4	100	9,71	4,8

Sumber: BPS (diolah)

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB Lampung terus menurun dari Triwulan II 2020 hingga Triwulan II 2024. Meskipun tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB dalam empat tahun terakhir, porsinya cenderung berkurang, dengan pergeseran kontribusi ke sektor tersier.

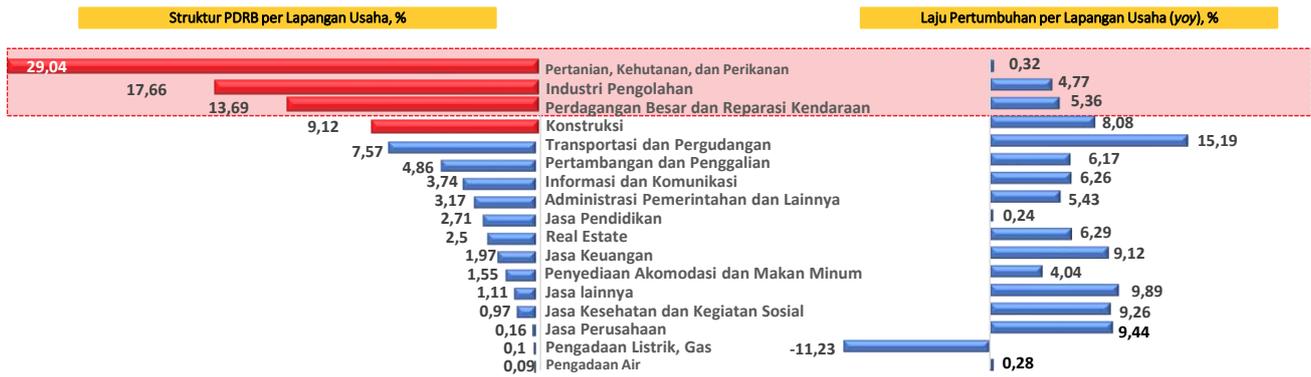
Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Lampung menurun 3,44 persen, dari 1.420.607 unit pada 2013 menjadi 1.371.783 unit. Meski demikian, perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

terhadap sektor ini tetap besar, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas dalam RPJMD 2019-2024.

Kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dibandingkan triwulan II 2023, namun masih lebih rendah dibandingkan kontribusi triwulan II tahun 2020 hingga 2022. Sektor perdagangan besar dan reparasi kendaraan juga meningkat dari tahun triwulan II tahun 2020 hingga 2023, tetapi triwulan II 2024 menurun 0,02 persen poin dibandingkan triwulan II 2023.



Grafik 1.6. Distribusi dan Pertumbuhan (yoy) PDRB menurut Lapangan Triwulan II 2024



Sumber: BPS (diolah)

Distribusi dan Pertumbuhan (yoy) PDRB menurut Lapangan Triwulan II 2024 dapat dilihat pada grafik 1.6. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 didukung oleh kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi, sebesar 15,19 persen (yoy) dengan kontribusi 7,57 persen, didorong oleh momen mudik dan libur sekolah. Industri pengolahan tumbuh 4,77 persen (yoy) dengan kontribusi 17,66 persen, dipengaruhi oleh peningkatan permintaan seragam sekolah. Perdagangan besar dan reparasi kendaraan tumbuh 5,36 persen (yoy) dengan kontribusi 13,69 persen, didorong oleh normalisasi aktivitas perdagangan setelah panen raya. Sektor konstruksi tumbuh 8,08 persen (yoy) dengan kontribusi 9,12 persen, didukung oleh pembangunan pusat perbelanjaan dan fasilitas pendidikan. Sebaliknya, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi 11,23 persen (yoy) dengan kontribusi 0,1 persen, akibat berakhirnya kontrak distribusi gas antara PLN dan PGN pada Oktober 2023 tanpa perjanjian baru.

1.1.1.4. Kontribusi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pembentukan PDRB

Pada triwulan II 2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 2,39% (yoy), melemah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 4,54% (yoy). Meskipun demikian, Konsumsi Pemerintah masih dapat tumbuh positif sejalan dengan peningkatan

pada realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial.

Grafik 1.7. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB per Triwulan Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

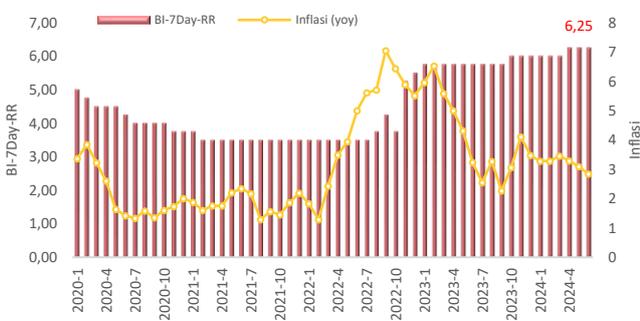
Pola fluktuasi kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB setiap tahun menunjukkan konsistensi, dengan peningkatan yang signifikan pada periode triwulan IV, sedangkan pada triwulan I terjadi tren penurunan dan akan kembali meningkat pada triwulan II. Hal ini sejalan dengan pola realisasi belanja APBN dan APBD yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

1.1.2. Suku Bunga

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Dengan menetapkan suku bunga acuan yang sesuai dengan tingkat inflasi, Bank Indonesia dapat mempengaruhi perilaku kreditur dan debitur. Suku bunga yang tinggi akan menekan permintaan kredit dan mendorong tabungan, sehingga mengurangi uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi dan melambatkan ekonomi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan

meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi tabungan, sehingga menambah uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dan mempercepat ekonomi. Bank Indonesia (BI) juga memiliki kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pertumbuhan sehingga akan terus mendorong penyaluran kredit meskipun suku bunga mengalami kenaikan. Sebagai contoh, BI memberikan insentif kepada lembaga perbankan yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Dalam menetapkan suku bunga acuan, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 1.8. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate dan Inflasi Lampung Tahun 2020 – Triwulan II Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Pada tahun 2020 – Triwulan III 2023 suku bunga acuan tertinggi sebesar 5,75 persen, sementara di triwulan IV 2023 sampai triwulan I 2024 suku bunga acuan meningkat sebesar 6,00 persen dan di triwulan II 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 6,25 persen. Suku bunga acuan berada di level 6,25 persen untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen sepanjang tahun 2024 dan 2025 mendatang. Fokus kebijakan moneter melalui suku bunga acuan terus diarahkan untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil, agar harga barang-barang impor dari luar negeri tidak naik terlalu tinggi (*imported inflation*), serta untuk menghadapi risiko pasar keuangan global yang masih penuh

ketidakpastian, yang menyimpan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan regional.

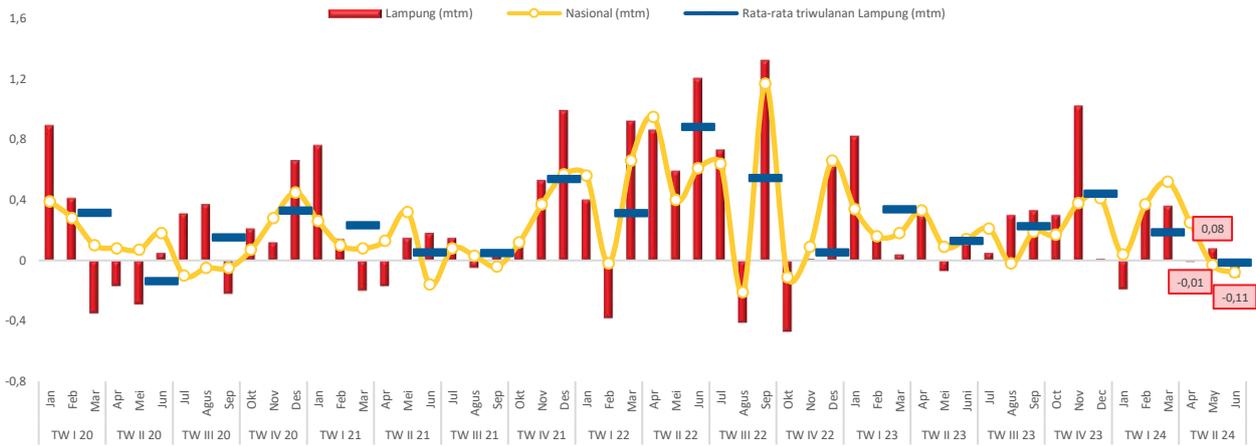
1.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, sementara penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu disebut deflasi. Pada tahun 2024, perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung dilakukan pada empat wilayah yakni Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Pada periode sebelumnya hanya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang menjadi dasar perhitungan IHK Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi di Provinsi Lampung yang dihitung berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji dipilih untuk mewakili daerah perdesaan di Provinsi Lampung, dikarenakan dari hasil Survei Potensi Desa (PODES) tahun 2021, Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji memiliki komposisi daerah perdesaan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Lampung.

1.1.3.1. Inflasi Bulanan

Pada triwulan II 2024, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,01 persen (*mtm*), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2024 dengan rata-rata inflasi mencapai sebesar 0,19 persen (*mtm*). Secara rata-rata bulanan, selama periode 2020 hingga triwulan II 2024, deflasi terjadi hanya pada periode triwulan II 2020 dan triwulan II 2024, sementara pada periode lainnya terjadi inflasi. Jika dibandingkan secara nasional, rata-rata bulanan pada triwulan II 2024 menunjukkan inflasi sebesar 0,05 persen (*mtm*). Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional dari tahun 2020 hingga Triwulan II 2024 dapat dilihat pada grafik 1.9.

Grifik 1.9. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan II 2024 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Sepanjang periode tahun 2020 hingga triwulan II 2024, tekanan inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan September 2022 yaitu sebesar 1,32 persen (*mtm*) dengan andil atau porsi inflasi tertinggi berasal dari kelompok transportasi (*administered price*) sebesar 0,96 persen (*mtm*). Lebih lanjut, komoditas dengan andil inflasi tertinggi yaitu berasal dari bensin dengan andil sebesar 0,81 persen (*mtm*). Artinya, bensin menyumbang sebesar 0,81 persen (*mtm*) dari porsi inflasi bulanan periode September 2022 yang sebesar 1,32 persen (*mtm*).

Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan II 2024 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Apr-24		May-24		Jun-24	
	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi
Umum	-0,01	-0,01	0,08	0,08	-0,11	-0,11
Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,08	-0,20	0,03	0,12	-0,15	-0,49
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,28	0,00	0,05	0,01	0,09
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah	0,00	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,12
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,01	0,12	0,02	0,40	0,01	0,19
Kesehatan	0,00	0,17	-0,02	-0,98	0,00	0,13
Transportasi	0,06	0,52	-0,05	-0,49	0,01	0,13
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,02	-0,29	0,00	-0,01	0,00	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,02	-1,39	0,00	-0,07	0,00	-0,18
Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,01	0,02	0,22	0,02	0,20
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,02	0,28	0,09	1,47	0,01	0,19

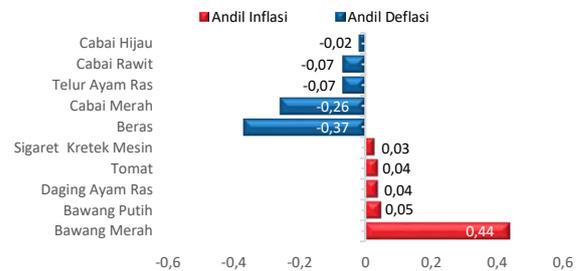
Sumber: BPS (diolah)

Bagian ini akan menguraikan perkembangan inflasi pada Triwulan II tahun 2024, sedangkan inflasi pada

Triwulan I tahun 2024 telah dibahas dalam Kajian Fiskal Regional Lampung Triwulan I tahun 2024.

Pada April 2024, secara *mtm* Lampung mengalami deflasi sebesar 0,01 persen (*mtm*) sedangkan nasional mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (*mtm*). Komoditas dominan yang memberikan andil deflasi *mtm* pada periode ini yaitu beras, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai hijau sebagaimana tampak pada grafik 1.10.

Grifik 1.10. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan April 2024 (mtm)



Sumber: BPS (diolah)

Penurunan harga beras disebabkan di beberapa daerah sudah memasuki masa panen sehingga pasokan beras dapat memenuhi permintaan pasar. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah, cabai rawit dan juga cabai hijau, hal ini disebabkan karena di sentra produksi cabai sudah panen raya dan pasokan dari sejumlah daerah sentra cukup melimpah.

Di sisi lain masih terdapat komoditas yang mengalami inflasi, beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *mtm* pada periode ini yaitu bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, tomat, dan Sigaret Kretek Mesin



SUPLEMEN 1.1

Dashboard Indikator Makro Ekonomi Lampung



Kanwil DJPb Provinsi Lampung membuat *dashboard* indikator makro ekonomi untuk menyediakan alat visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami bagi pengguna. *Dashboard* memungkinkan pengguna untuk memantau berbagai indikator ekonomi secara cepat dan akurat. Pengguna bisa melihat tren dan perbandingan data dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan grafik dan visualisasi yang interaktif, *dashboard* ini membantu menyederhanakan data yang kompleks, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami informasi penting dengan menggunakan fitur filter yang dapat disesuaikan untuk menampilkan data yang diinginkan. Pengguna dapat dengan mudah memfilter data berdasarkan wilayah, tahun, dan bulan, memungkinkan analisis yang lebih terperinci dan sesuai dengan kebutuhan spesifik. *Dashboard* ini mempermudah kolaborasi antar tim atau pihak yang membutuhkan akses data, karena data dapat diakses secara *online* dan diperbarui secara otomatis.

Tata Cara Penggunaan *Dashboard*

- 1 Akses <https://bit.ly/IndikatorMakroLampung>. Setelah itu, akan tampak tampilan seperti gambar disamping.
- 2 Gunakan menu yang terdapat di sisi atas *dashboard* untuk memilih indikator ekonomi yang diinginkan. Pilihan indikator meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi LU, Pertumbuhan Ekonomi Pengeluaran, Inflasi Lampung, NTP Lampung, Kemiskinan Lampung, dan Gini Ratio Lampung.
- 3 Di bagian atas *dashboard*, terdapat opsi untuk memilih Tahun dan Quarter. Pilihlah periode waktu yang ingin Anda analisis dengan mengklik *dropdown* yang tersedia. Anda dapat melihat data per kuartal maupun per tahun untuk memahami tren dari waktu ke waktu. Selain itu juga terdapat filter wilayah untuk dapat menampilkan data wilayah yang diinginkan.
- 4 Di bagian bawah grafik, terdapat kotak berwarna merah muda yang berisi ringkasan atau catatan penting terkait kinerja ekonomi Lampung. Bacalah *highlights* ini untuk mendapatkan pemahaman cepat mengenai situasi atau tren ekonomi terbaru.



Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat dengan mudah memanfaatkan *dashboard* Indikator Makro Ekonomi Lampung untuk melakukan analisis dan memonitor kinerja ekonomi Provinsi ini secara efektif. Kedepannya, *Dashboard* akan terus dikembangkan untuk kepentingan pengguna.

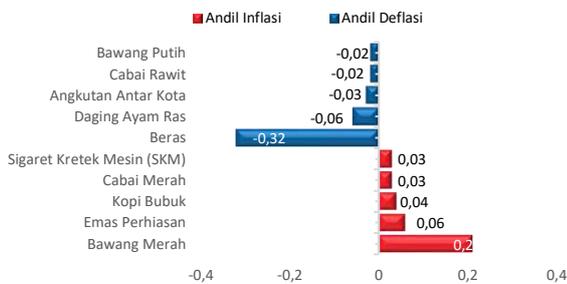




(SKM). Kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh faktor cuaca, banjir, dan pengiriman serta banyak petani bawang yang menahan panen karena pekerjaannya masih libur lebaran, sedangkan kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh naiknya harga bawang putih impor dari cina. Untuk harga daging ayam ras terjadi kenaikan karena permintaan ayam ras meningkat menjelang hari raya lebaran, komoditas tomat mengalami kenaikan disebabkan oleh curah hujan tinggi yang membuat banyak tanaman tomat menjadi rusak atau cepat busuk sehingga pasokan tomat menjadi berkurang. Kemudian komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM) mengalami kenaikan dampak dari kenaikan cukai hasil tembakau yang mulai berlaku per 1 Januari 2024 yang membuat harga sigaret kretek mesin perlahan-lahan mengalami kenaikan.

Pada Mei 2024, secara *mtm* Lampung mengalami inflasi sebesar 0,08 persen (*mtm*) sementara nasional mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (*mtm*). Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi *mtm* pada Mei 2024 adalah bawang merah, emas perhiasan, kopi, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan cabai merah sebagaimana tampak pada grafik 1.11.

Grafik 1.11. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Mei 2024 (*mtm*)



Sumber: BPS (diolah)

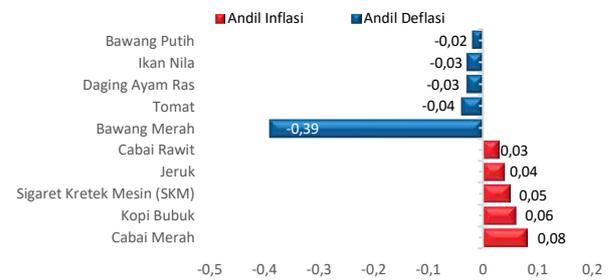
Peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh sedikitnya pasokan dari sentra produksi bawang merah, sejak bulan lalu banyak petani yang mengalami gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi, emas perhiasan mengalami kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya harga emas dunia yang memengaruhi harga emas perhiasan di pasar lokal. Meningkatnya harga kopi lokal disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari luar daerah. Sementara itu komoditi Sigaret Kretek Mesin (SKM) peningkatan harganya disebabkan

oleh penyesuaian terhadap cukai produk tembakau, sedangkan harga cabai merah sedikit mengalami peningkatan karena pasokan dari luar daerah yang menurun.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang berhasil menahan inflasi yang lebih tinggi dengan kontribusi deflasi *mtm* yang dominan yaitu beras, daging ayam, angkutan antar kota, cabai rawit, dan bawang putih. Daging ayam ras, angkutan antar kota, cabai rawit dan bawang putih mengalami penurunan harga karena disebabkan karena ketika lebaran harga daging ayam ras, angkutan antar kota, cabai rawit, dan bawang putih yang cukup tinggi, setelah lebaran harga-harga komoditi tersebut kembali ke harga normal.

Pada Juni 2024, secara *mtm* Lampung mengalami deflasi sebesar 0,11 persen (*mtm*) sementara itu, nasional mengalami deflasi sebesar 0,08 persen (*mtm*). Komoditas dominan yang memberikan andil deflasi *mtm* pada Juni 2024 bawang merah, tomat, daging ayam ras, ikan nila, dan bawang putih sebagaimana tampak pada grafik 1.12.

Grafik 1.12. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Juni 2024 (*mtm*)



Sumber: BPS (diolah)

Penurunan harga bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya harga bawang merah dan bawang putih naik tinggi sehingga bulan ini turun karena kembali ke harga normal. Penurunan harga juga terjadi pada harga tomat yang disebabkan sedang panen raya di tingkat petani, sehingga stok di pasaran melimpah. Penurunan juga terjadi pada daging ayam ras dikarenakan permintaan konsumen juga menurun yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, banyaknya masyarakat beralih ke daging yang di dapatkan dari hari raya kurban. Begitu pun dengan permintaan ikan nila, yang biasanya menjadi primadona untuk bulan Juni ini permintaannya pun menurun.





Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi dengan kontribusi inflasi *mtm* dominan, antara lain cabai merah, kopi bubuk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), jeruk, dan cabai rawit. Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh ditingkat petani belum panen sedangkan permintaan cabai menjelang hari raya Idul Adha meningkat. Harga kopi bubuk juga mengalami kenaikan dikarenakan harga biji kopi juga mengalami kenaikan disebabkan berkurangnya jumlah panen di tingkat petani. Kemudian komoditas sigaret kretek mesin (SKM) mengalami kenaikan dampak dari kenaikan cukai hasil tembakau yang mulai berlaku per 1 Januari 2024 yang membuat harga sigaret kretek mesin perlahan-lahan mengalami kenaikan. Sedangkan penyebab kenaikan harga buah jeruk disebabkan faktor cuaca sehingga panen berkurang.

Tabel 1.4. Inflasi Bulanan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan II 2024

Wilayah	Apr-24	May-24	Jun-24
	Inflasi <i>mtm</i> (%)	Inflasi <i>mtm</i> (%)	Inflasi <i>mtm</i> (%)
Kabupaten Lampung Timur	-0,24	0,24	-0,37
Kabupaten Mesuji	0,53	0,02	-0,16
Kota Bandar Lampung	0,04	0,08	-0,01
Kota Metro	-0,02	-0,32	0,09

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan wilayahnya di Lampung, rata-rata inflasi *mtm* tertinggi pada triwulan II 2024 terjadi pada Kabupaten Mesuji dengan rata-rata sebesar 0,13 persen (*mtm*) kemudian disusul oleh Kota Bandar Lampung sebesar 0,04 persen (*mtm*). Sementara itu, Kota Metro deflasi sebesar 0,08 persen (*mtm*) dan Kabupaten Lampung Timur deflasi sebesar 0,12 persen (*mtm*). Inflasi *mtm* di Kabupaten/Kota yang menjadi dasar perhitungan inflasi didominasi inflasi dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya dari komoditas kopi dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sementara itu, deflasi bulanan didorong oleh harga beras yang mulai stabil dibandingkan periode sebelumnya.

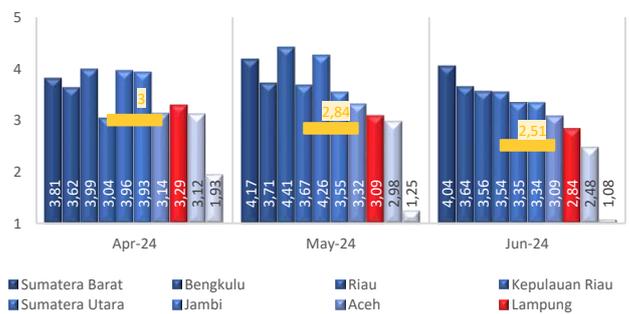
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di regional Lampung adalah kesediaan stok komoditas. Penting untuk mengidentifikasi komoditas yang rentan terhadap inflasi. Hal ini dilakukan sebagai *early warning* terhadap kenaikan

harga, Jika inflasi terjadi pada komoditas bahan pokok, maka dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat lapisan bawah.

1.1.3.2. Inflasi Tahunan

Inflasi di Lampung Juni 2024 mencapai 2,84 persen (*yoy*), lebih rendah sedikit dibandingkan Mei 2024 yang tercatat sebesar 3,06 persen (*yoy*), tetapi masih di atas inflasi nasional Juni yang tercatat sebesar 2,51 persen (*yoy*) sebagaimana tampak pada grafik 1.13.

Grafik 1.13. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (*yoy*)

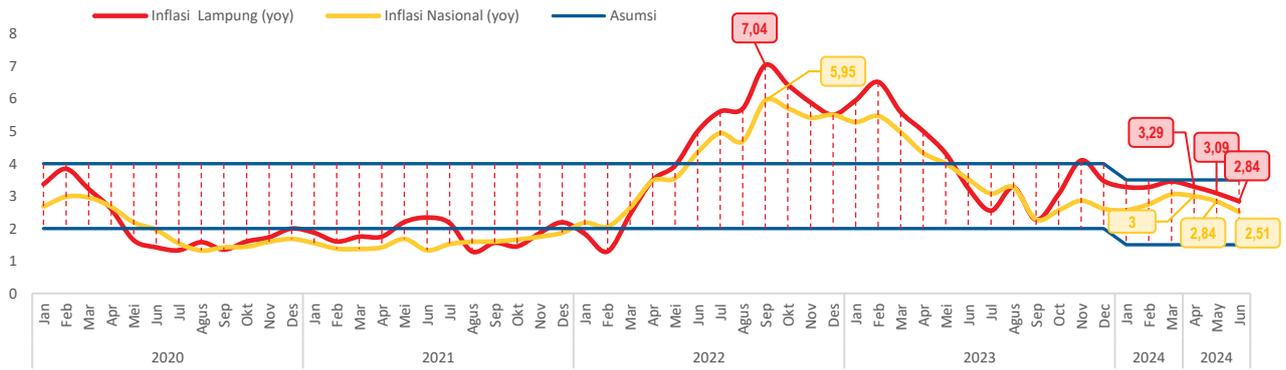


Sumber: BPS (diolah)

Pada Triwulan II 2024, Lampung mencatatkan inflasi rata-rata sebesar 3,19 persen (*yoy*), menjadikannya provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Sumatera, meskipun masih di atas rata-rata nasional sebesar 2,92 persen (*yoy*). Namun, capaian ini tetap berada dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen (*yoy*) dan diharapkan stabil sepanjang 2024. Inflasi tertinggi di regional Sumatera dan nasional terjadi pada Mei 2024.

Sejak lonjakan inflasi tahun 2022, yang dipicu oleh tekanan harga global, kebijakan pengalihan subsidi BBM, dan peningkatan permintaan pasca-pandemi, inflasi Lampung kembali pada sasaran 3±1 persen pada Juni 2023, sebagaimana tampak pada grafik 1.14 dan bertahan sampai dengan Desember 2023 meskipun pada bulan November 2023 inflasi Lampung sempat berada di atas level sasaran inflasi 3±1 persen yakni sebesar 4,10 persen (*yoy*). Pada 2024, sasaran inflasi berubah menjadi 2,5±1 persen (*yoy*), dan hingga Triwulan II 2024, inflasi Lampung dan nasional konsisten dalam level sasaran tersebut.

Grifik 1.14. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan II 2024



Sumber: BPS dan Bank Indonesia (diolah)

Secara spasial, Inflasi tahunan Kabupaten di Lampung pada triwulan II 2024 di atas angka 3-5 persen (yoy) sementara untuk Kota pada triwulan II 2024 berada di sekitar angka 2,00 persen (yoy) sebagaimana tampak pada tabel 1.5.

Tabel 1.5. Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan II 2024

Wilayah	Apr-24	May-24	Jun-24
	Inflasi yoy (%)	Inflasi yoy (%)	Inflasi yoy (%)
Kabupaten Lampung Timur	5,12	4,41	4,06
Kabupaten Mesuji	4,06	4,36	3,40
Kota Bandar Lampung	2,39	2,44	2,25
Kota Metro	2,88	2,25	2,37

Sumber: BPS (diolah)

Inflasi Provinsi Lampung pada periode triwulan II 2024 (April, Mei, dan Juni) tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau kemudian disusul kelompok Pakaian dan Alas Kaki dan kelompok pendidikan sebagaimana tampak pada tabel 1.16.

Tabel 1.6. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan II 2024 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Apr-24		May-24		Jun-24	
	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi
Umum	3,29	3,29	3,09	3,09	2,84	2,84
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,59	8,07	2,32	7,22	2,05	6,35
Pakaian dan Alas Kaki	0,23	3,48	0,23	3,50	0,22	3,40
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah	0,10	0,76	0,09	0,66	0,07	0,54
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,01	0,19	0,04	0,66	0,04	0,59
Kesehatan	0,02	0,71	-0,01	-0,34	0,00	0,06
Transportasi	0,05	0,44	0,04	0,40	0,06	0,59
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,03	-0,42	-0,02	-0,41	-0,02	-0,37
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	-0,18	0,00	-0,27	-0,02	-0,96
Pendidikan	0,17	2,72	0,17	2,72	0,18	2,77
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,06	0,78	0,08	0,97	0,09	1,04
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,09	1,44	0,15	2,54	0,17	2,68

Sumber: BPS (diolah)

Pada bagian ini akan menguraikan tiga kelompok dengan inflasi tertinggi yakni sebagai berikut.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

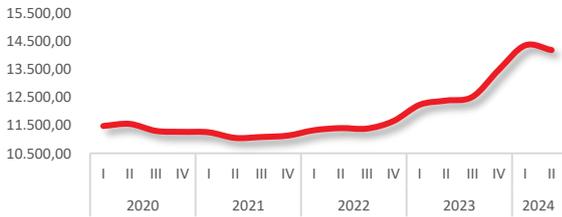
Di Provinsi Lampung kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terpantau pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan tekanan inflasi di atas 5 persen (yoy) dan andil/sumbangan inflasi di atas 2 persen (yoy). Subkelompok yang mengalami inflasi yoy tertinggi yaitu subkelompok makanan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy pada April yaitu beras 0,63 persen (yoy), bawang merah 0,53 persen (yoy), bawang putih 0,27 persen (yoy), dan daging ayam ras 0,19 persen (yoy); Mei yaitu bawang merah 0,44 persen (yoy), beras 0,27 persen (yoy), bawang putih 0,20 persen (yoy), dan kopi bubuk 0,17 persen (yoy); Juni yaitu beras 0,32 persen (yoy) dan kopi bubuk 0,20 persen (yoy). Dapat disimpulkan bahwa tekanan inflasi triwulan II 2024 didominasi oleh komoditas beras, bawang merah, dan bawang putih.

Tekanan inflasi pada beras secara yoy disebabkan berkurangnya jumlah produksi beras akibat dampak dari *climate change* yakni akibat El Nino di tahun 2023 sehingga mundurnya masa tanam. Jika masa tanam beras terganggu akibat kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, produksi beras dapat menurun, sehingga mempengaruhi harga beras. Berdasarkan grafik 1.15 yang menunjukkan tren perkembangan harga beras di Lampung, lonjakan harga beras di Lampung terjadi di tahun 2023 hingga puncaknya terjadi pada triwulan I 2024, selanjutnya pada triwulan II 2024 tren kenaikan



harga beras mulai melandai. Panen raya yang berlangsung pada triwulan II 2024 berhasil menstabilkan harga beras di Provinsi Lampung.

Grafik 1.15. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Lampung



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (diolah)

Harga bawang merah dan bawang putih telah mengalami kenaikan sejak triwulan I 2024, dan mengalami lonjakan yang signifikan pada triwulan II 2024. Kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh peningkatan harga di Cina, yang merupakan pemasok utama impor bawang putih untuk wilayah Lampung. Sementara itu, kenaikan harga bawang merah terjadi akibat keterbatasan stok di tengah tingginya permintaan, yang disebabkan oleh penurunan produktivitas bawang merah akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, serta keterlambatan suplai bawang merah dari Brebes. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengembangkan komoditas bawang merah khususnya di daerah Ketapang Lampung Selatan dan di Ambarawa Pringsewu agar dapat memenuhi ketersediaan pasokan di Lampung selain pasokan yang berasal dari Brebes.

Grafik 1.16. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih di Provinsi Lampung



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (diolah)

Tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi, Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi *yoy* pada April yaitu terong 0,05 persen (*yoy*), ikan kembung dan minyak goreng 0,04 persen (*yoy*); Mei yaitu minyak goreng 0,05 persen (*yoy*), pir dan cumi-cumi 0,02 persen

(*yoy*); Juni yaitu telur ayam ras 0,08 persen (*yoy*), air kemasan dan ikan kembung 0,03 persen (*yoy*).

Inflasi triwulan II 2024 dominan tertahan oleh minyak goreng. Penurunan harga minyak goreng didorong pemenuhan *Domestik Market Obligation* (DMO) untuk *Crude Palm Oil* (CPO) yang berjalan semakin baik di tengah melandainya tekanan harga CPO dunia.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki juga memiliki peran menyumbang inflasi di Provinsi Lampung. Pada triwulan II 2024 kelompok ini mengalami tekanan inflasi di atas 3 persen (*yoy*) dengan andil/sumbangan inflasi di kisaran 0,2 persen (*yoy*). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *yoy* pada triwulan II 2024 (April, Mei, dan Juni) yaitu celana panjang jeans pria 0,03 persen (*yoy*), seragam sekolah anak, seragam sekolah pria, baju muslim wanita masing-masing sebesar 0,02 persen (*yoy*). inflasi yang signifikan pada kelompok ini dapat mengindikasikan adanya tekanan biaya produksi atau perubahan harga bahan baku, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Kelompok pakaian dan alas kaki tetap perlu diperhatikan dalam mengelola stabilitas harga dan inflasi di Lampung.

Kelompok Pendidikan

Pada triwulan II 2024, kelompok Pendidikan terpantau mengalami tekanan inflasi di atas 2 persen (*yoy*) dengan andil/sumbangan inflasi di kisaran 0,17 persen (*yoy*). Andil dominan berasal dari biaya sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

1.1.3.3. Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengendalian Inflasi

Jumlah alokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2024 dalam rangka program dukungan pengendalian inflasi lingkup Provinsi Lampung mencapai Rp414,45 Miliar. Belanja yang telah direalisasikan hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp187,12 Miliar atau 45,22% dari total pagu belanja dukungan pengendalian inflasi tahun 2024.

Kementerian PUPR merupakan K/L dengan pagu tertinggi dalam penanganan inflasi di Lampung



dengan total pagu mencapai Rp347,16 miliar dan telah terealisasi pada K/L ini mencapai Rp177,46 miliar atau 50,97%. Kementerian Perhubungan merupakan K/L dengan pagu tertinggi kedua sebesar Rp21,40 miliar dan realisasi sebesar Rp7,51 miliar atau 35,11%. K/L lain yang terlibat dalam penanganan inflasi adalah Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik sebagaimana tampak pada tabel 1.7.

Tabel 1.7. Belanja Pengendalian Inflasi per Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
Badan Pusat Statistik	1,94	0,33	17,28%
Kementerian PUPR	388,32	177,46	45,70%
Kementerian Perhubungan	21,40	7,51	35,11%
Kementerian Pertanian	2,79	2,11	75,68%
Total	414,45	187,42	45,22%

Sumber: Sintesa, Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan bentuk program intervensi, alokasi anggaran tertinggi dialokasikan untuk kegiatan Ketersediaan Pasokan, yaitu sebesar Rp281,40 miliar atau 67,90% dari total anggaran. Kegiatan ini juga menunjukkan realisasi tertinggi, mencapai Rp149,82 miliar atau 53,24%. Ketersediaan Pasokan merupakan intervensi krusial untuk memastikan pasokan yang memadai bagi masyarakat, mengingat kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sering kali memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Lampung. Dengan ketersediaan pasokan yang cukup, diharapkan dapat membantu menstabilkan harga dan meredam potensi gejolak. Sementara itu, Intervensi Kelancaran Distribusi dan Keterjangkauan Harga telah terealisasi masing-masing sebesar 27,21% dan 44,02%. Program Komunikasi Efektif menunjukkan realisasi terendah, yaitu 17,28%, karena kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil kajian dan publikasi dari Badan Pusat Statistik yang telah terjadwal, sehingga percepatan penyerapan anggaran sulit dilakukan.

Tabel 1.8. Belanja Pengendalian Inflasi per Intervensi di Provinsi Lampung

INTERVENSI	PAGU	REALISASI	% REALISASI
Kelancaran distribusi	121,69	33,11	27,21%
Keterjangkauan Harga	9,43	4,15	44,02%
Ketersediaan Pasokan	281,40	149,82	53,24%
Komunikasi Efektif	1,94	0,33	17,28%
Total	414,45	187,42	45,22%

Sumber: Sintesa, Kementerian Keuangan (diolah)

1.1.3.4. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka menjaga inflasi di Lampung berada pada level sasaran 2,5±1 persen di tahun 2024, adapun beberapa langkah yang telah dilakukan dan opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Regional Lampung dan *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi, antara lain:

- a. Bank Indonesia terus memperkuat operasi moneter melalui kenaikan BI 7-day *Repo Rate* atau suku bunga acuan. Suku bunga acuan dipertahankan pada level 6,00 persen di triwulan I 2024. Hal ini dilakukan sebagai langkah *front loaded, preemptive, dan forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi memastikan inflasi tetap pada level sasaran.
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan inflasi. Adapun strategi yang digunakan yakni strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
 - i. Ketersediaan Pasokan. TPID Provinsi/ Kabupaten/ Kota agar terus mengoptimalkan dan meningkatkan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi pasokan dan menjaga disparitas pasokan dan harga antar wilayah. Dengan memperluas Kerja sama antar daerah, TPID dapat mengoptimalkan distribusi barang dan jasa serta mengurangi ketidakseimbangan harga. Hilirisasi dan kerja sama dengan mitra ataupun *off taker* terus ditingkatkan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selain itu, melanjutkan perluasan akseptasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dan perluasan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian dan UMKM;
 - ii. Keterjangkauan Harga. melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat

Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) (<https://www.bi.go.id/hargapangan>) untuk melihat perkembangan harga terkini dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan operasi pasar, hingga pasar murah. Selanjutnya, pemberian bantuan sosial dan subsidi juga dapat didorong untuk memastikan keterjangkauan harga;

- iii. Kelancaran Distribusi. TPID agar terus melakukan penguatan dan perluasan KAD dengan mendorong kerja sama perdagangan antar Daerah, terutama antar BUMD. Selain itu, memastikan kelancaran transportasi dengan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas, peningkatan frekuensi penerbangan, dan optimalisasi pelabuhan Panjang untuk menyebar kepadatan di pelabuhan Bakauheni. Program unggulan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2024, yakni bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penjamin suplai komoditas strategis atau *stand by buyer*;
- iv. Komunikasi yang efektif. Penguatan koordinasi antara TPID dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) melalui rapat rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, TPID melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan harga pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah sebagai *early warning* yang akurat untuk memantau denyut perekonomian daerah. Peningkatan penyebaran informasi harga acuan pemerintah kepada pelaku usaha/pedagang komoditas perlu dimaksimalkan.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara hati-hati, mengurangi belanja yang inefisien atau tidak mendesak. Di samping itu, fokus pada proyek

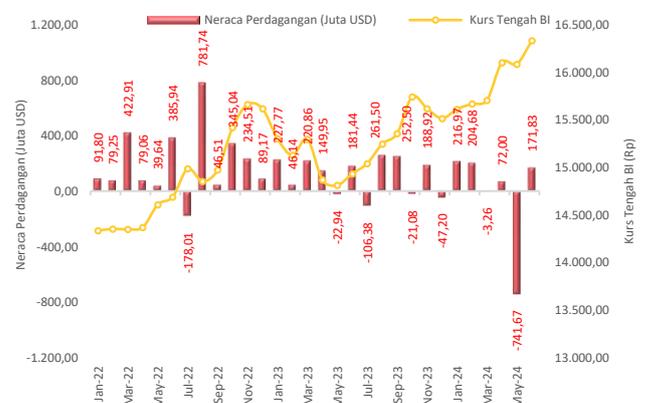
infrastruktur yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dapat membantu mengurangi inefisiensi anggaran dari segi alokasi sumber daya dan meningkatkan potensi distribusi pendapatan kepada masyarakat. Kedua prioritas tersebut dapat membantu mengalokasikan dana secara lebih efisien, dan mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh peningkatan belanja negara yang tidak produktif, dipadukan dengan perluasan basis pajak guna mengendalikan inflasi.

- d. Pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, guna memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa. Ini dapat dilakukan melalui program pembangunan dan perbaikan infrastruktur secara bertahap, dengan prioritas pada lokasi yang paling membutuhkan.

1.1.4. Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar bertujuan untuk mengukur nilai Rupiah terhadap mata uang asing yang memengaruhi indikator ekonomi, termasuk Neraca Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Lampung. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) dapat dilihat pada grafik 1.17.

Grafik 1.17. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – Triwulan II 2024



Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

Kenaikan impor bahan baku dan penolong menandakan masih terdapat dorongan dalam sektor industri dan investasi, meskipun terjadi penurunan pada impor barang modal.

Peningkatan impor barang konsumsi di tengah terdepresiasi nilai tukar rupiah mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Lampung masih baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat. Lebih dari setengah ekonomi Lampung berasal dari Konsumsi Rumah Tangga, sehingga jika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi dapat melambat. Di lain sisi, dengan mengimpor barang konsumsi, negara dapat menstabilkan harga barang tertentu di pasar domestik, terutama jika terjadi kekurangan pasokan dalam negeri. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi.

1.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pencapaian kesejahteraan merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator kesejahteraan, yaitu Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Informasi IPM Lampung Tahun 2023, Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Lampung periode Maret 2024 telah dijelaskan dalam seri Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung sebelumnya dan dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/KFRLampung>.

1.2.1. Tingkat Kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan identik dengan taraf hidup yang rendah, yang menggambarkan suatu keadaan dimana penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan. Berdasarkan konsep *Basic Needs Approach* yang digunakan BPS dalam mengukur kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

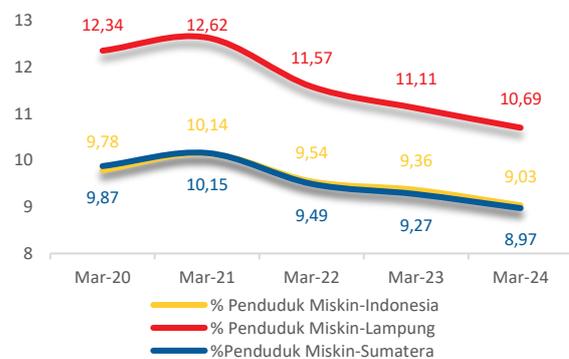
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada bagian ini akan dibahas Tingkat Kemiskinan sesuai dengan data terakhir yang tersedia yaitu Periode Maret 2024.

Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2024 sebesar Rp586.551/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp438.079 (74,69 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp148.472 (25,31 persen).

Garis Kemiskinan Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,93 persen dibandingkan Maret 2023 yang sebesar Rp559.011/kapita/bulan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2024 yaitu sebesar 74,69 persen, artinya kenaikan harga bahan makanan di tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung. Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik perkotaan maupun pedesaan pada umumnya hampir sama dan beras masih memberi sumbangan terbesar yakni 22,32 persen di perkotaan dan 24,28 persen di pedesaan.

Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 941,23 ribu orang atau 10,69 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional 9,03 persen dan tingkat kemiskinan regional Sumatera 8,97 persen, sedikit di bawah nasional. Persentase penduduk miskin di Lampung masih berada di atas tingkat regional Sumatera dan Nasional sebagaimana tampak pada grafik 1.19.

Grafik 1.19. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode Maret 2020 – 2024 (persen)

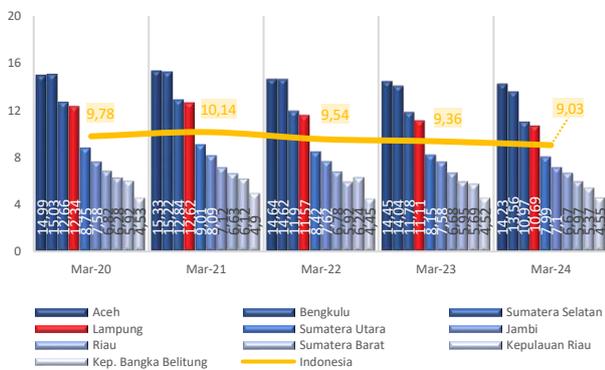


Sumber: BPS (diolah)



Dicermati berdasarkan tingkat kemiskinan masing-masing Provinsi di Regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.20, Lampung merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-4 di regional Sumatera selama periode Maret 2020 s.d. 2024. Dengan tren tingkat kemiskinan yang turun setiap periodenya, diharapkan kemiskinan Provinsi Lampung pada periode berikutnya akan mengalami penurunan yang signifikan. Dari tahun 2020 hingga 2024, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Lampung sebesar 3,45 persen poin, lebih tinggi dari Provinsi lainnya di regional Sumatera.

Grafik 1.20. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Periode Maret 2020 s.d. 2024 (persen)



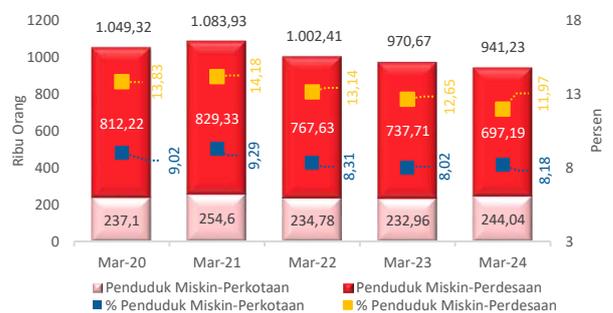
Sumber: BPS (diolah)

Tingkat kemiskinan di Lampung turun, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 menurun sebesar 29,4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2023 yang mencapai 941,23 ribu orang. Dari periode Maret 2020 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Lampung telah mengalami penurunan sebesar 108,09 ribu orang. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi di Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan strategi pembangunan yang inklusif dari pemerintah.

Jumlah dan persentase penduduk miskin yang terkonsentrasi di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Persentase kemiskinan berdasarkan tempat tinggal menunjukkan tren yang fluktuatif dari Maret 2020 hingga Maret 2024. Penduduk miskin di Lampung hingga Maret 2024 yang tinggal di Kawasan pedesaan berjumlah 697,19 ribu orang setara

dengan 11,97 persen dari total penduduk di pedesaan. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 244,04 ribu orang atau setara dengan 8,18 persen dari total penduduk di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebanyak 11,1 ribu orang (dari 232,96 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 244,04 ribu orang pada Maret 2024). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun sebanyak 40,5 ribu orang (dari 737,71 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 697,19 ribu orang pada Maret 2024).

Grafik 1.21. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal Periode Maret 2020 – 2024



Sumber: BPS (diolah)

Dicermati berdasarkan persentasenya, Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 8,18 persen, dibandingkan Maret 2023 meningkat sebesar 0,16 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,97 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,68 persen. Karena pendapatan masyarakat perkotaan tidak mengalami perubahan seperti halnya yang terjadi di pedesaan, peningkatan pendapatan pedesaan ditandai dengan meningkatnya NTP Maret 2024 terhadap Maret 2023 sebesar 15,42 persen (yoy). Meskipun Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik tipis namun *share* pengeluaran 40 persen penduduk terbawah naik dan pengeluaran 20 persen pendapatan teratas turun. *Gini ratio* daerah perkotaan turun, ini mengindikasikan walaupun penduduk miskinnya naik, tetapi kondisi pemerataan pendapatan membaik di daerah perkotaan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung berpendapat bahwa penurunan angka kemiskinan di pedesaan menunjukkan

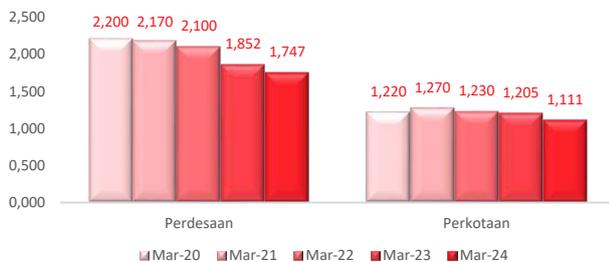




efektivitas beberapa program Pemerintah Provinsi Lampung. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan implementasi Kartu Petani Berjaya (KPB) yang berjalan dengan baik.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebagaimana grafik 1.22. Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sebagaimana grafik 1.23.

Grafik 1.22. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.23. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) 2020 – 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

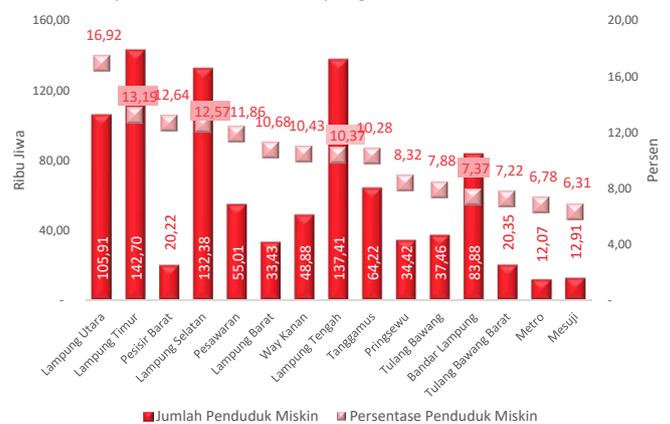
Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan, yang menunjukkan lebih besar usaha diperlukan untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Begitu pula, semakin tinggi Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), semakin parah tingkat kemiskinannya, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. P1 dan P2 membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien.

Di Provinsi Lampung, antara Maret 2023 dan Maret 2024, baik di pedesaan maupun perkotaan, P1 dan

P2 mengalami penurunan. P1 di pedesaan turun dari 1,85 persen menjadi 1,75 persen, dan di perkotaan dari 1,21 persen menjadi 1,11 persen, menunjukkan jarak konsumsi penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan. P2 di pedesaan turun dari 0,40 persen menjadi 0,37 persen, dan di perkotaan dari 0,27 persen menjadi 0,25 persen, menandakan distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin merata. Secara umum, P1 dan P2 di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Persentase penduduk miskin di Lampung pada Maret 2024 bervariasi antara 6,31 persen hingga 16,92 persen, mencerminkan perbedaan yang signifikan antar daerah. Kabupaten Mesuji, Kota Metro, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki persentase kemiskinan terendah masing-masing 6,31 persen, 6,78 persen, dan 7,22 persen. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Utara mencatat persentase kemiskinan tertinggi sebesar 16,92 persen sebagaimana tampak pada grafik 1.24.

Grafik 1.24. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode Maret 2024



Sumber: BPS (diolah)

Meskipun Kabupaten Lampung Utara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Lampung, persentase kemiskinan di daerah ini mengalami penurunan sebesar 2,38 persen selama periode Maret 2020 hingga Maret 2024, dari 19,30 persen pada Maret 2020 menjadi 16,92 persen pada Maret 2024. Penurunan ini menjadikannya sebagai daerah ketiga dengan penurunan persentase kemiskinan terbesar di provinsi Lampung.





Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Lampung telah meluncurkan aplikasi berbasis web bernama Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan). Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan kemiskinan, sehingga kualitas database kemiskinan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dengan pedesaan sebagai kantong utama kemiskinan, menjadi fokus utama. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi dalam membangun infrastruktur pedesaan untuk menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas, termasuk pendirian BUMDes, UMKM berbasis potensi desa, dan desa wisata. Pemda juga dianjurkan untuk memilih satu desa percontohan di setiap kecamatan untuk diberdayakan setiap tahun, menjadikannya sebagai contoh bagi desa lainnya.

Sektor utama Provinsi Lampung, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mendapat dukungan melalui program strategis seperti hilirisasi. Program ini bertujuan meningkatkan produksi komoditas pertanian, menstabilkan harga, dan meningkatkan daya beli petani. Dengan meningkatkan harga jual produk agar menutupi atau melebihi biaya produksi, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Lampung.

Karena kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, penanganannya memerlukan intervensi lintas sektor dengan pendekatan yang sesuai untuk masing-masing wilayah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memainkan peran penting dalam memetakan sumber kemiskinan ekstrem dan potensi sumber daya yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.

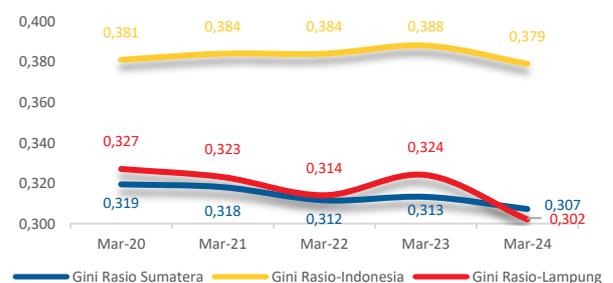
1.2.2. Tingkat Ketimpangan

Tingkat Ketimpangan atau *Gini Ratio* adalah indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu

wilayah. Rasio Gini (*Gini Ratio*) mampu memberikan gambaran derajat ketimpangan dalam suatu daerah dengan nilai yang terletak antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Semakin kecil angka *Gini Ratio* maka akan semakin baik karena mengindikasikan peningkatan pemerataan distribusi ekonomi penduduk suatu wilayah atau berkurangnya tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penurunan ketimpangan juga mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

Selama periode Maret 2020 hingga 2024, *Gini Ratio* di Provinsi Lampung berada di bawah tingkat nasional, menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan capaian *Gini Rasio* nasional. Jika dibandingkan dengan rata-rata regional Sumatera, *Gini Ratio* Lampung pada periode Maret 2020 hingga 2023 tercatat di atas rata-rata regional Sumatera. Namun, pada periode Maret 2024, *Gini Ratio* Lampung berada di bawah rata-rata regional Sumatera sebagaimana tampak pada grafik 1.25. Hal ini mengindikasikan capaian *gini ratio* Lampung yang semakin baik di periode 2024 yang berarti ketimpangan pendapatan yang semakin rendah di Provinsi Lampung.

Grafik 1.25. Perkembangan *Gini Ratio* Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode Maret 2020 – 2024



Sumber: BPS (diolah)

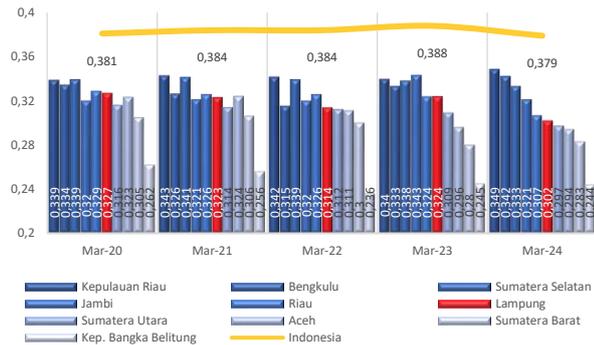
Gini Ratio semua Provinsi di Regional Sumatera berada di bawah Nasional sebagaimana tampak pada grafik 1.26. Pada Maret 2024, Lampung termasuk ke dalam 5 Provinsi dengan Indeks Gini Rasio terendah di Regional Sumatera setelah Bangka Belitung (0,244), Sumatera Barat (0,283), Aceh (0,294), dan Sumatera Utara (0,297).





Pada Maret 2024, *Gini Ratio* Provinsi Lampung tercatat 0,302, Angka ini turun sebesar 6,79 persen atau turun 0,022 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,313. Tren *Gini Ratio* Lampung dari tahun 2020 hingga 2024 fluktuatif dengan rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,90 persen (*yoy*) atau 0,00625 basis poin per tahun.

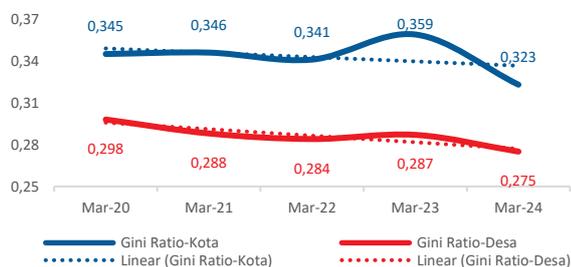
Grafik 1.26. *Gini Rasio* Provinsi di Regional Sumatera Periode Maret 2020 – 2024



Sumber: BPS (diolah)

Tren *Gini Ratio* di daerah perkotaan dan perdesaan cenderung mengalami penurunan sebagaimana tampak pada grafik 1.27. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,323. Angka tersebut meningkat 0,036 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,359. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275. Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,287.

Grafik 1.27. Perkembangan *Gini Ratio* Lampung Menurut Tempat Tinggal Periode Maret 2020 – 2024

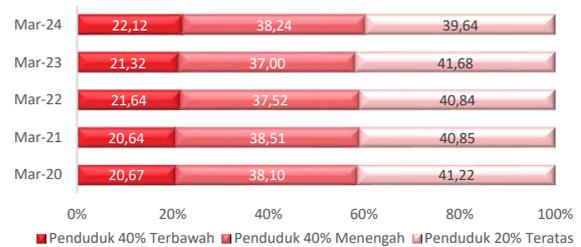


Sumber: BPS (diolah)

Selain *Gini Ratio*, ketimpangan juga diukur menggunakan persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40

persen terbawah angkanya di bawah 12 persen; ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 – 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Berdasarkan metode ini, ketimpangan di Lampung mencapai 22,12 persen, yang termasuk kategori ketimpangan rendah, sebagaimana terlihat pada Grafik 1.28.

Grafik 1.28. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Periode Maret 2020–2024



Sumber: BPS (diolah)

Beberapa penyebab ketimpangan di Provinsi Lampung antara lain perbedaan sumber daya alam yang ada pada masing-masing Kabupaten, perbedaan kondisi demografis, kurangnya mobilitas barang dan jasa pada daerah-daerah tertentu, terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di kota besar, misalnya Bandar Lampung, dan adanya ketimpangan alokasi dana pembangunan.

“Keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua.” – Sri Mulyani Indrawati

Upaya yang telah Pemerintah Lampung lakukan dalam penurunan tingkat ketimpangan pendapatan antara lain yaitu:

1. Pembangunan pertanian dan perdesaan sehingga terjadi peningkatan ekonomi di perdesaan yang berdampak mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan;
2. Peningkatan infrastruktur jalan, Usaha Tani, dan adanya program Kartu Petani Berjaya (KBP) sehingga petani mendapatkan kemudahan dari sarana dan prasarana pertanian, kemudahan mendapatkan pembiayaan pengolahan pertanian, manajemen pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.





SUPLEMEN 1.2

Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Lampung



Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Lampung: setiap peningkatan 1% dalam belanja pemerintah akan diikuti dengan penurunan sekitar 0,163% dalam Gini Ratio, ceteris paribus

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara belanja pemerintah dan tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio Gini. Dengan menggunakan model regresi logaritma, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana perubahan dalam belanja pemerintah dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah.

Model statistik yang dihasilkan:

$$\text{Ln(Gini Ratio)} = 1.48154 - 0.163279 \text{ Ln(Belanja Pemerintah)}$$

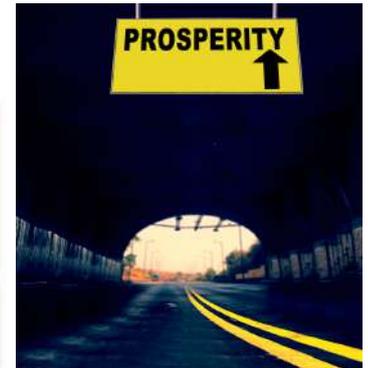
Keterangan :

- Ln(Gini Ratio): Ini adalah logaritma natural dari rasio Gini, yang merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara. Semakin tinggi nilai rasio Gini, semakin besar ketimpangan.
- Ln(Belanja Pemerintah): Ini adalah logaritma natural dari belanja pemerintah. Belanja pemerintah sering kali dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
- 1.48154: Ini adalah konstanta dalam persamaan.
- -0.163279: Ini adalah koefisien dari logaritma belanja pemerintah.

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic	P-value
Regression (between y and y')	1	0.0117819	0.0117819	5.172534	0.0421081
Residual (between y and y')	12	0.0273334	0.00227779		
Total (between y and y')	13	0.0391154	0.00300867		

$$\text{Ln(Gini Ratio)} = 1.48154 - 0.163279 \text{ Ln(Belanja Pemerintah)}$$

	Coeff	SE	t-stat	lower t(0.05)(12)	upper t(0.05)(12)	Stand Coeff	p-value	VIF
b	1.48154	1.126454	1.315224	-0.972793	3.935873	0	0.213012	
Ln(Adm Pemerintahan)	-0.163279	0.0717923	-2.274321	-0.3197	-0.0685671	-0.548826	0.0421081	1



Hasil uji F menunjukkan nilai $F(1,12) = 5,172534$ dengan $p\text{-value} = 0,0421081$. Karena $p\text{-value} < \alpha (0,05)$, kita menolak hipotesis nol (H_0). Ini berarti model regresi menunjukkan bahwa **Belanja Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Gini Ratio di Provinsi Lampung selama periode 2010 s.d. 2023.**

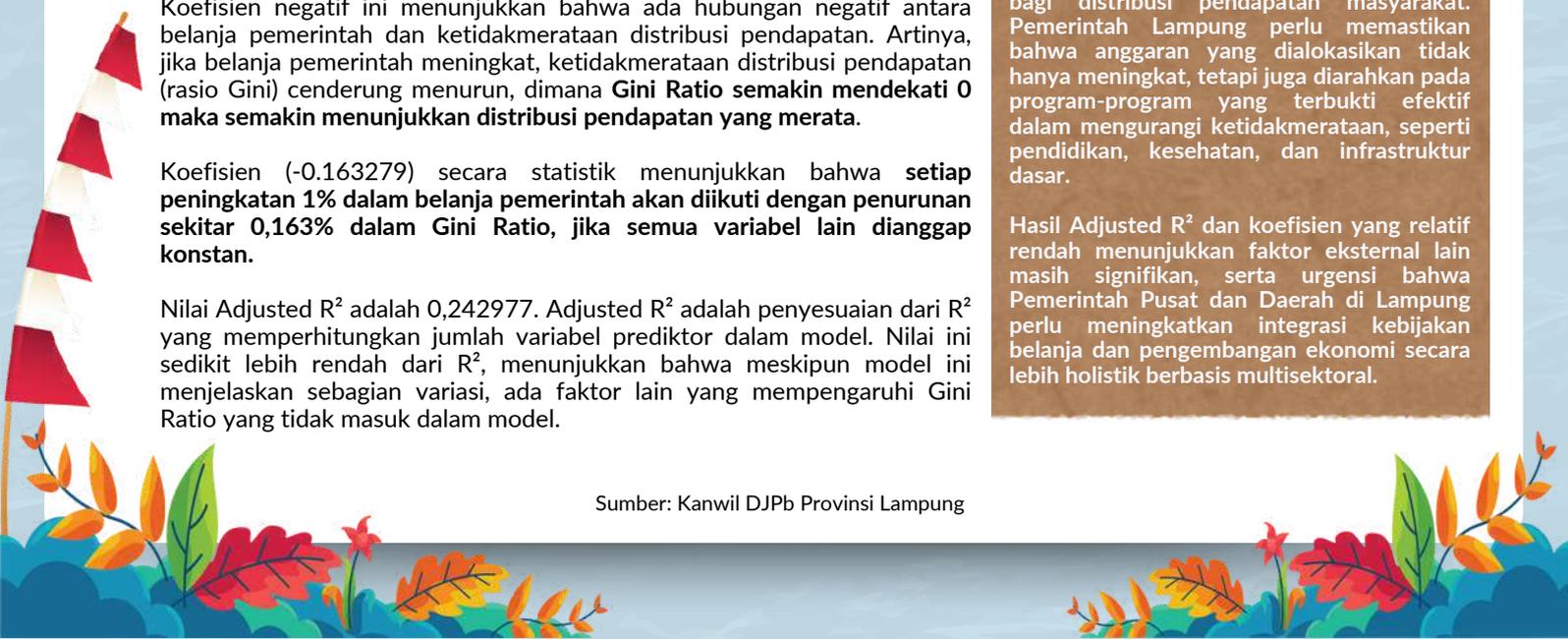
Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara belanja pemerintah dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Artinya, jika belanja pemerintah meningkat, ketidakmerataan distribusi pendapatan (rasio Gini) cenderung menurun, dimana **Gini Ratio semakin mendekati 0 maka semakin menunjukkan distribusi pendapatan yang merata.**

Koefisien (-0.163279) secara statistik menunjukkan bahwa **setiap peningkatan 1% dalam belanja pemerintah akan diikuti dengan penurunan sekitar 0,163% dalam Gini Ratio, jika semua variabel lain dianggap konstan.**

Nilai Adjusted R^2 adalah 0,242977. Adjusted R^2 adalah penyesuaian dari R^2 yang memperhitungkan jumlah variabel prediktor dalam model. Nilai ini sedikit lebih rendah dari R^2 , menunjukkan bahwa meskipun model ini menjelaskan sebagian variasi, ada faktor lain yang mempengaruhi Gini Ratio yang tidak masuk dalam model.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang strategis dan efisien bagi distribusi pendapatan masyarakat. Pemerintah Lampung perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya meningkat, tetapi juga diarahkan pada program-program yang terbukti efektif dalam mengurangi ketidakmerataan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Hasil Adjusted R^2 dan koefisien yang relatif rendah menunjukkan faktor eksternal lain masih signifikan, serta urgensi bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah di Lampung perlu meningkatkan integrasi kebijakan belanja dan pengembangan ekonomi secara lebih holistik berbasis multisektoral.





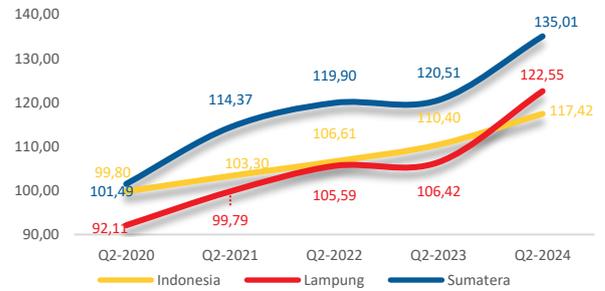
Pemerintah berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa melalui alokasi anggaran. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi atas implementasi dan efektivitas perlu terus diperlukan agar infrastruktur dan penggunaan anggaran memberikan dampak yang inklusif. Perluasan program bantuan sosial dan prioritas pelayanan publik di daerah tertinggal juga penting untuk mengurangi ketimpangan kota dan desa.

1.2.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penghitungan NTP berlandaskan pada pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. Semakin besar NTP pada suatu periode maka semakin besar pendapatan petani yang diterima dari pada pengeluarannya dan relatif semakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada triwulan II 2024, rata-rata NTP di Provinsi Lampung tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, tetapi masih di bawah capaian rata-rata NTP wilayah regional Sumatera sebagaimana tampak pada grafik 1.29.

Grafik 1.29. Perkembangan NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024

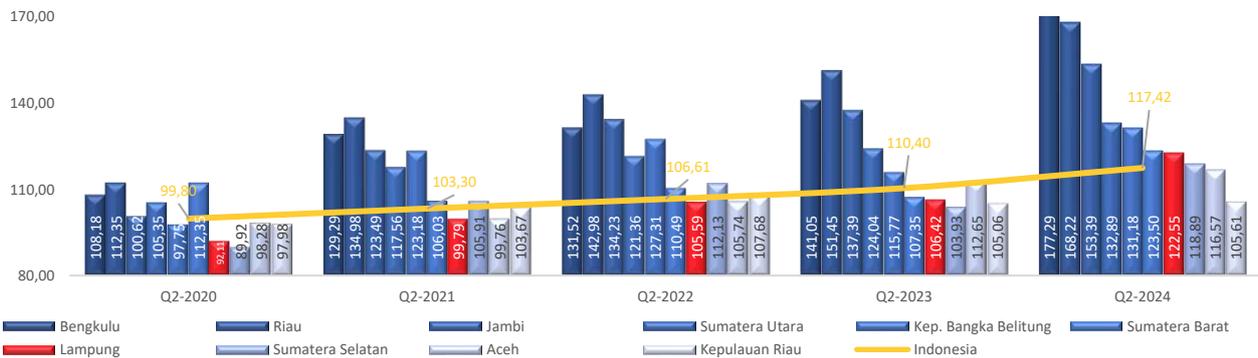


Sumber: BPS (diolah)

NTP Lampung, nasional dan rata-rata regional Sumatera menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan peningkatan daya beli petani yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani secara umum pada triwulan II 2024 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tren capaian NTP masing-masing provinsi di Regional Sumatera dapat dilihat pada Grafik 1.30. Seluruh provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II 2024 dibandingkan triwulan II 2023.

Grafik 1.30. NTP Regional Sumatera Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Lampung mencatatkan pertumbuhan NTP tertinggi kedua untuk periode triwulan II 2024 dibandingkan dengan triwulan II 2023, dengan pertumbuhan sebesar 15,15 persen (yoy). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan NTP provinsi lain di regional

Sumatera, rata-rata NTP Lampung di triwulan II 2024 yang sebesar 122,55 masih menempati posisi keempat terendah dari 10 Provinsi setelah Kepulauan Riau (105,61), Aceh (116,57), dan Sumatera Selatan (118,89).





Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor dapat dilihat pada tabel 1.9. Peningkatan NTP Lampung pada triwulan I 2024

didorong oleh peningkatan kinerja beberapa subsektor NTP lainnya.

Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 – Triwulan II 2024

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2020				2021				2022				2023				2024		Perubahan	
	I	II	III	IV	I	II	%qtq	%yoy												
Nilai Tukar Petani																				
Tanaman Pangan	97,55	93,64	93,90	91,96	90,90	90,54	93,43	94,44	96,79	94,31	93,10	94,47	97,81	98,33	103,42	109,18	112,68	101,25	-10,14%	2,97%
Hortikultura	97,58	95,10	95,06	97,63	99,92	95,45	94,81	96,70	97,96	105,67	118,99	107,16	105,68	105,87	112,65	126,82	130,49	127,66	-2,17%	20,59%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,51	87,70	92,31	98,38	102,85	110,21	114,03	119,70	123,12	119,00	110,38	109,56	111,99	117,92	124,21	127,15	136,29	153,95	12,96%	30,55%
Peternakan	99,58	98,05	100,84	99,73	99,01	102,10	104,25	104,24	104,37	104,58	102,61	100,48	98,46	100,06	100,35	98,53	96,283	99,83	3,68%	-0,23%
Perikanan Tangkap	101,45	99,79	101,50	102,63	103,57	104,95	106,22	108,14	109,23	110,04	108,26	106,28	108,25	110,85	111,61	111,74	110,24	109,11	-1,03%	-1,56%
Perikanan Budidaya	100,78	99,73	100,09	100,89	100,57	101,68	101,40	101,28	100,98	100,02	98,98	99,65	96,88	97,17	98,86	99,42	97,347	97,33	-0,02%	0,16%
Gabungan																				
Nilai Tukar Petani	96,72	92,11	94,29	95,78	97,05	99,79	102,69	105,36	107,77	105,59	102,32	101,70	103,74	106,42	111,45	115,66	120,58	122,55	1,63%	15,15%
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	101,93	97,38	99,74	101,89	104,58	107,74	111,00	114,16	118,74	119,11	117,43	117,17	120,99	124,77	131,31	137,85	145,45	149,53	2,81%	19,84%
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	105,39	105,71	105,77	106,38	107,75	107,97	108,10	108,34	110,17	112,82	114,78	115,20	116,63	117,24	117,82	119,18	120,62	122,01	1,15%	4,07%

Sumber: BPS (diolah)

Secara triwulanan, peningkatan NTP didorong oleh peningkatan Nilai Tukar Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 12,96 persen (qtq) dan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sebesar 3,68 persen (qtq). Sementara itu, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), Nilai Tukar Perikanan Tangkap (NTN), dan Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya (NTPi) mengalami penurunan masing-masing sebesar -10,14 persen (qtq), -2,17 persen (qtq), -1,03 persen (qtq), dan -0,02 persen (qtq).

Secara tahunan, peningkatan NTP Lampung pada triwulan II 2024 dipicu oleh kenaikan kinerja di beberapa subsektor. NTPP naik 2,97 persen (yoy) menjadi 101,25, menunjukkan peningkatan tahunan yang disebabkan oleh kenaikan harga gabah dalam kelompok padi. Fenomena El Nino yang mengurangi produksi padi dan mengubah musim tanam menjadi faktor utama kenaikan ini. Namun, secara triwulanan, NTPP mengalami penurunan akibat stabilisasi harga gabah yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

NTPH pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 127,66, meningkat 20,59 persen (yoy) karena kenaikan harga sayur-sayuran, terutama cabai merah. Peningkatan tahunan ini didorong oleh permintaan yang kuat, tetapi secara triwulanan, NTPH menurun karena pasokan cabai merah meningkat akibat musim panen, yang menyebabkan harga turun.

NTPR pada triwulan II 2024 mencapai 153,95, mencatat kenaikan sebesar 30,55 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan harga

komoditas perkebunan rakyat seperti kopi dan kakao, yang mengalami kenaikan harga di pasar global. Secara triwulanan, NTPR juga meningkat, mencerminkan penguatan subsektor ini.

NTPT, di sisi lain, tercatat menurun sebesar -0,23 persen (yoy) menjadi 99,83, yang menunjukkan bahwa daya beli peternak lebih rendah dibandingkan tahun dasar perhitungan 2018. Penurunan tahunan ini disebabkan oleh lonjakan harga beras yang meningkatkan indeks yang dibayar peternak lebih tinggi daripada indeks yang diterima. Meskipun demikian, secara triwulanan, NTPT mengalami peningkatan yang dipicu oleh meningkatnya permintaan sapi potong selama Idul Adha.

NTN pada triwulan II 2024 menurun -1,56 persen (yoy) menjadi 109,11. Penurunan ini disebabkan oleh harga ikan teri yang turun akibat melimpahnya pasokan dari musim tangkap. Selain itu, kenaikan harga beras yang lebih tinggi daripada harga komoditas yang diterima nelayan turut menekan NTN.

NTPi pada triwulan II 2024 sebesar 97,33, menurun secara triwulanan tetapi meningkat 0,16 persen (yoy). Penurunan triwulanan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga udang payau dan ikan lele. Meskipun berbeda dengan NTN yang berada di atas 100, NTPi Lampung tetap berada di bawah 100 sejak triwulan III 2022, menunjukkan bahwa daya beli nelayan belum sepenuhnya pulih.

Dalam perhitungan NTP, seluruh pengeluaran rumah tangga petani dihitung, termasuk biaya





produksi, sekolah, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Namun, untuk mengukur kinerja usaha pertanian secara lebih spesifik, digunakan NTUP (Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian) yang hanya meliputi biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Pada triwulan II 2024, NTUP Lampung tercatat sebesar 125,77, naik 2,09 persen

(qtq) dan 17,53 persen (yoy). Kenaikan terbesar secara triwulanan dan tahunan berasal dari subsektor NTPR, masing-masing sebesar 13,23 persen (qtq) dan 34,07 persen (yoy), menunjukkan penguatan yang signifikan di sektor perkebunan rakyat.

Tabel 1.10. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 – Triwulan II 2024

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2020				2021				2022				2023				2024		Perubahan %qtq	Perubahan %yoy
	I	II	III	IV	I	II														
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	97,63	93,15	95,10	96,87	98,55	101,10	103,67	104,63	108,53	107,26	104,03	101,40	103,96	107,01	112,31	117,65	123,19	125,77	2,09%	17,53%
Tanaman Pangan	98,66	94,83	94,96	93,22	92,61	92,22	94,68	95,31	97,89	96,31	95,54	95,09	98,74	99,57	104,91	111,55	115,08	104,25	-9,42%	4,69%
Hortikultura	99,77	97,13	97,01	100,04	102,75	98,10	97,31	104,06	100,70	109,87	123,64	110,25	109,04	109,68	117,19	133,28	137,12	134,59	-1,84%	22,71%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,98	88,35	92,62	99,10	103,99	110,90	114,48	115,70	123,09	120,12	111,16	107,46	110,68	117,03	123,62	128,06	138,57	156,90	13,23%	34,07%
Peternakan	100,59	99,29	101,73	100,62	100,05	102,83	104,70	103,24	104,71	104,96	102,70	100,16	98,81	100,57	101,02	100,08	98,56	101,87	3,37%	1,30%
Perikanan Tangkap	102,53	100,79	102,28	103,51	104,82	105,99	107,22	108,68	110,60	111,91	76,48	106,03	108,44	111,29	112,32	113,09	112,32	111,57	-0,67%	0,25%
Perikanan Budidaya	102,26	101,46	101,72	102,65	102,76	103,86	103,39	102,57	102,83	102,76	102,06	101,94	99,58	100,17	102,10	103,09	101,16	102,09	0,92%	1,92%

Sumber: BPS (diolah)

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kewenangan yang diamanatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sesuai dengan kewenangan tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya memfasilitasi petani dalam mendapatkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan asuransi usaha, fasilitas sosial dari program pemerintah maupun swasta, serta akses terkait kepastian ketersediaan pupuk, baik yang digunakan pada sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik yang bersubsidi maupun non subsidi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk sebuah program yang diberi nama Kartu Petani Berjaya (KPB). Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi penjangaan

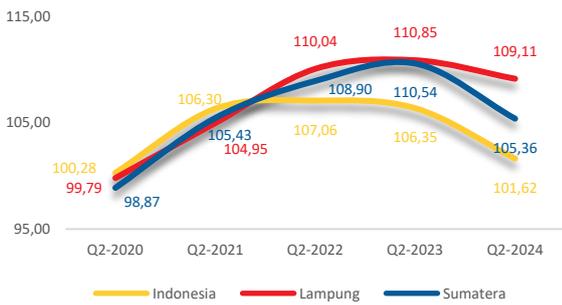
ketersediaan benih, bibit dan pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan budidaya, ketersediaan teknologi pertanian, permodalan, manajemen risiko usaha tani, penentuan jadwal tanam, dan penyaluran air irigasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini antara lain *supplier*, distributor, perbankan, petani, pembeli, dan Pemerintah Provinsi. Program KPB akan terus disempurnakan di berbagai aspek dengan harapan bahwa NTP Provinsi Lampung akan dapat melampaui capaian NTP Nasional dalam beberapa tahun mendatang.

1.2.4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pada triwulan II 2024, rata-rata NTN Lampung tercatat sebesar 109,11. Nilai tersebut berada di atas rata-rata NTN untuk regional Sumatera, yang tercatat sebesar 105,36 serta di atas rata-rata NTN Nasional, yang tercatat sebesar 101,62 sebagaimana tampak pada grafik 1.31.



Grifik 1.31. Perkembangan NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024



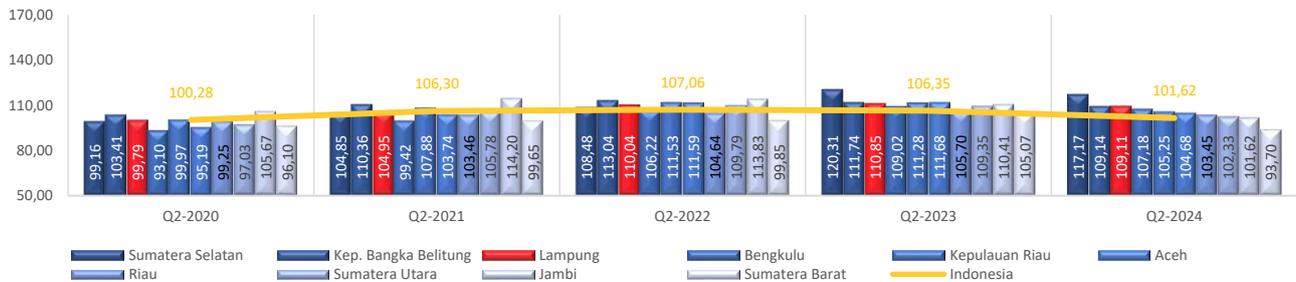
Sumber: BPS (diolah)

Pergerakan NTN pada triwulan II berfluktuasi. Provinsi Lampung, nasional, dan Sumatera memiliki rata-rata NTN di atas 100, yang menandakan bahwa nelayan mengalami surplus atau keuntungan Angka

ini mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli nelayan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018, yang merupakan tahun dasar perhitungan.

Pada Triwulan II 2024, Jika dibandingkan dengan NTN provinsi lain di regional Sumatera, NTN Lampung sebesar 109,11 menempati posisi tertinggi ketiga dari 10 Provinsi setelah Sumatera Selatan (117,17) dan Kepulauan Bangka Belitung (109,14), sebagaimana tampak pada grafik 1.33. Capaian NTN ketiga Provinsi tersebut juga berada di atas NTN nasional. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, rata-rata NTN semua provinsi di regional Sumatera mengalami penurunan.

Grifik 1.32. NTN Regional Sumatera Triwulan II 2020 – Triwulan II 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menggalakkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) untuk mempermudah keterjangkauan akses bahan bakar. Saat ini, beberapa SPBN telah beroperasi, seperti SPBN Lempasing yang terletak di kawasan TPI Lempasing, SPBN Kalianda di Kalianda, SPBN Labuhan Maringgai di Labuhan Maringgai, dan SPBN Kota Agung yang berlokasi di Kota Agung. Selain itu, terdapat SPBN Dente Telandas, Kuala Penet, dan Muara Pulu, dan Pesisir Barat yang sedang dalam tahap pembangunan.

Selain itu, seiring dengan perkembangan era digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Program e-KPB. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha bagi petani dalam arti yang luas (termasuk masyarakat kelautan dan perikanan) dengan tujuan mencapai visi “Rakyat Lampung

Berjaya”. Salah satu menu layanan bagi nelayan pada Program e-KPB adalah bantuan premi Asuransi Nelayan Berjaya (ANB).

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah mendorong implementasi program kegiatan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah penetapan lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pulau Pasaran. Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang merupakan bantuan dari KKP. Fasilitas tersebut meliputi rumah pengering higienis, gudang beku portabel, sentra kuliner, kios, dan balai pertemuan nelayan. Ini semua merupakan bagian dari upaya untuk mendukung dan memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

“Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB II

Analisis Fiskal Regional



Tugu Nago, Lampung Utara



BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. PELAKSANAAN APBN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung pada Semester I Tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dan *resilient* guna mendukung penguatan ekonomi regional secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Peningkatan penyerapan Belanja Negara memberikan kontribusi pada sektor-sektor perekonomian, meskipun pada sisi Pendapatan Negara masih tercatat mengalami penurunan.

Sampai dengan 30 Juni 2024, Belanja Negara tercatat Rp16.170,83 miliar atau 50,50 persen dari Pagu. Kinerja ini terus melanjutkan pertumbuhan positif dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 15,63 persen (*yoy*) yang didukung oleh penyerapan Belanja di beberapa sektor strategis

seperti pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Di sisi lain, Pendapatan Negara telah terealisasi Rp4.795,23 miliar atau 42,77 persen dari Target Penerimaan. Meskipun masih tercatat mengalami kontraksi dari periode yang sama tahun lalu sebagai dampak dari adanya fluktuasi harga komoditas dan perlambatan aktivitas ekonomi, angka kontraksi ini terus termoderasi dari hingga 0,48 persen (*yoy*) pada akhir Juni, didukung oleh Pendapatan Negara dari sektor dalam negeri yang secara agregat mencatat pertumbuhan.

Tabel 2.1 I-Account APBN di Provinsi Lampung Realisasi s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	T.A. 2023			T.A. 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	10.229,84	4.818,53	47,10	11.211,70	4.795,23	42,77	(0,48)
1. Pendapatan Perpajakan	9.267,37	4.174,52	45,05	10.165,05	4.106,73	40,40	(1,62)
a. Pajak Dalam Negeri	8.054,66	3.579,59	44,44	8.843,16	3.632,95	41,08	1,49
i. Pajak Penghasilan	3.557,99	1.736,49	48,81	3.958,15	1.886,76	47,67	8,65
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4.180,11	1.723,94	41,24	4.576,70	1.629,03	35,59	(5,51)
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	160,43	58,49	36,46	153,56	28,12	18,31	(51,93)
v. Cukai	2,93	0,49	16,86	2,25	6,25	278,26	1.165,70
vi. Pajak Lainnya	153,20	60,18	39,28	152,50	82,79	54,29	37,58
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.212,71	594,93	49,06	1.321,89	473,78	35,84	(20,36)
i. Bea Masuk	285,08	200,91	70,47	548,86	323,68	58,97	61,11
ii. Bea Keluar	927,63	394,02	42,48	773,03	150,10	19,42	(61,90)
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	962,47	644,01	66,91	1.046,64	688,50	65,78	6,91
a. PNBPN Lainnya	477,33	393,45	82,43	448,82	410,26	91,41	4,27
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	485,14	250,57	51,65	597,83	278,24	46,54	11,05
B. BELANJA NEGARA	32.186,18	13.984,49	43,45	32.019,47	16.170,83	50,50	15,63
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	10.586,76	3.815,55	36,04	9.757,80	4.712,43	48,29	23,51
a. Belanja Pegawai	3.828,89	1.968,98	51,42	4.003,32	2.299,97	57,45	16,81
b. Belanja Barang	5.060,35	1.496,12	29,57	4.474,54	2.078,70	46,46	38,94
c. Belanja Modal	1.659,35	333,13	20,08	1.243,08	312,94	25,18	(6,06)
d. Bantuan Sosial	38,18	17,32	45,37	36,86	20,82	56,49	20,21
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	21.599,42	10.168,93	47,08	22.261,67	11.458,40	51,47	12,68
a. Dana Transfer Umum (DTU)	13.649,87	6.746,97	49,43	14.264,93	7.822,24	54,84	15,94
i. Dana Alokasi Umum	12.701,28	6.503,21	51,20	13.662,11	7.597,20	55,61	16,82
ii. Dana Bagi Hasil	948,59	243,76	25,70	602,81	225,04	37,33	(7,68)
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	5.389,96	2.278,29	42,27	5.582,20	2.231,78	39,98	(2,04)
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.232,35	181,88	14,76	1.453,58	113,75	7,83	(37,46)
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.147,62	2.095,50	50,52	4.126,75	2.118,03	51,32	1,07
iii. Hibah Daerah	9,99	0,92	9,16	1,87	0,00	-	(100,00)
c. Insentif Fiskal	255,96	57,21	22,35	147,69	73,85	50,00	29,09
d. Dana Desa	2.303,63	1.086,47	47,16	2.266,86	1.330,53	58,70	22,46
C. SURPLUS (DEFISIT)	(21.956,34)	(9.165,95)	41,75	(20.807,78)	(11.375,60)	54,67	24,11

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, SIKRI, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (data diolah)

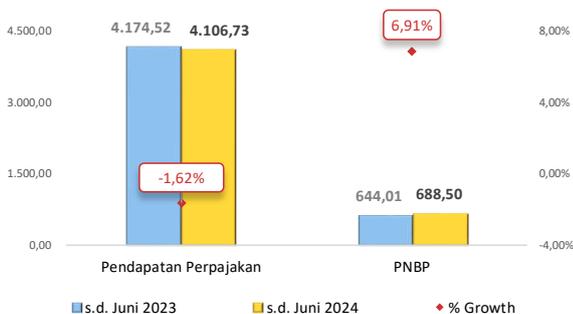


Kondisi ini mencerminkan APBN di regional Lampung yang bekerja keras secara ekspansif dengan Defisit APBN yang tercatat pada akhir Juni sebesar Rp11.375,60 miliar atau lebih lebar 24,11 persen (yoy) sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN di Lampung pada Semester I Tahun 2024 tidak hanya menunjukkan kinerja yang positif tetapi juga menciptakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.1. Pendapatan Negara

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi Pendapatan Negara telah mencapai Rp4.795,23 miliar atau 42,77 persen dari Target Penerimaan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp11.211,70 miliar. Secara kumulatif, Pendapatan Negara berkontraksi 0,48 persen (yoy) utamanya dipengaruhi oleh Penerimaan Perpajakan yang mengalami kontraksi 1,62 persen atau secara nominal terealisasi Rp4.106,73 miliar atau 40,40 persen dari target. Namun, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan pertumbuhan 6,91 persen (yoy) atau secara nominal terealisasi Rp688,50 miliar atau 65,78 persen dari target.

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Negara di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN (data diolah)

Berdasarkan kontribusinya, komponen penerimaan Perpajakan mendominasi Pendapatan Negara di Lampung hingga 85,64 persen dan PNBP menyumbang Pendapatan negara sebesar 14,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak merupakan pilar penting dalam APBN Lampung untuk memenuhi kebutuhan Belanja Negara. Dominasi penerimaan pajak dalam pendapatan negara juga menunjukkan efektivitas kebijakan

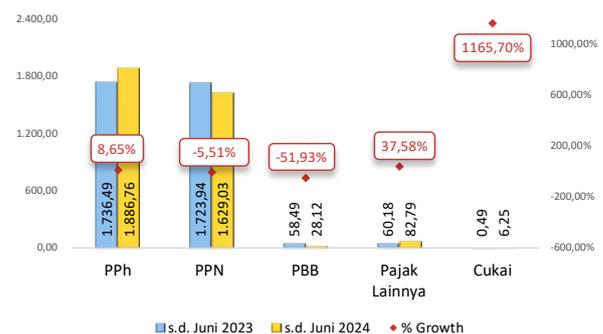
perpajakan dan tata kelola fiskal, serta kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai sektor ekonomi.

2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

2.1.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Sampai dengan 30 Juni 2024, penerimaan Pajak Dalam Negeri telah terealisasi Rp3.632,95 miliar atau 41,08 persen dari Target. Angka Realisasi ini tercatat tumbuh 1,49 persen (yoy) didukung oleh peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) yang berkontribusi hingga 51,93 persen terhadap total penerimaan Pajak Dalam Negeri. Seiring dengan hal tersebut, komponen Pajak Lainnya, dan Cukai juga menunjukkan peningkatan. Sementara, komponen yang mencatat kontraksi yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Grafik 2.2 Realisasi Pajak Dalam Negeri di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Kanwil DJBC Sumbagbar (data diolah)

Penerimaan PPh seluruhnya merupakan penerimaan atas PPh Non Migas yang terealisasi sebesar Rp1.886,76 miliar atau 47,67 persen dari Target. Secara lebih detail, PPh Nonmigas berdasarkan nominal penerimaannya masih ditopang oleh tiga komponen terbesar yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final. Kontribusi ketiganya mencapai 83,67 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas.

Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas hingga akhir Juni 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 8,65 persen (yoy). Hal ini didukung oleh kinerja dua komponen utamanya, yaitu PPh Pasal 21

dan PPh Final masing-masing tumbuh 27,17 persen (yoy) dan 8,16 persen (yoy). Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh faktor pembayaran THR serta utilisasi tenaga kerja dan upah, sedangkan Kinerja PPh Final yang tumbuh didukung oleh peningkatan setoran atas layanan pengolahan air dan penyewaan/Sewa Guna Usaha.

Selain itu, kinerja PPh Non Migas juga didorong oleh pertumbuhan PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, dan PPh Non Migas Lainnya. Sementara, kinerja PPh Pasal 25/29 Badan mencatat kontraksi utamanya dipengaruhi oleh penurunan pada sub sektor kelapa sawit. Adanya kontraksi juga terlihat pada komponen PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 26. Rincian realisasi komponen Penerimaan Pajak di Lampung s.d. 30 Juni Tahun 2023 dan 2024 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Jenis Pajak	Realisasi s.d. Jun 2023	Target 2024	Realisasi s.d. Jun 2024	Growth %
PPh Non Migas	1.736,47	3.958,15	1.886,77	8,66%
1. PPh Pasal 21	666,05	1.400,71	847,00	27,17%
2. PPh Pasal 22	92,44	213,59	83,41	-9,77%
3. PPh Pasal 22 Impor	74,37	97,08	58,64	-21,15%
4. PPh Pasal 23	87,28	284,09	102,93	17,94%
5. PPh Pasal 25/29 Badan	506,16	1.211,07	457,56	-9,60%
6. PPh Pasal 25/29 OP	45,90	80,70	53,86	17,34%
7. PPh Pasal 26	10,90	41,72	9,31	-14,61%
8. PPh Final	253,36	629,17	274,03	8,16%
9. PPh Non Migas Lainnya	0,0053	0,0115	0,0147	175,19%
10. PPh DTP	(0,0003)	0,0000	0,0000	-100,00%
PPN dan PPnBM	1.723,94	4.576,70	1.629,03	-5,51%
1. PPN Dalam Negeri	1.419,43	4.030,71	1.244,38	-12,33%
2. PPN Impor	302,40	542,15	383,41	26,79%
3. PPnBM Dalam Negeri	0,15	2,39	0,52	256,06%
4. PPnBM Impor	1,58	0,0028	0,34	-78,41%
5. PPN Lainnya	0,39	1,45	0,32	-17,86%
6. PPnBM Lainnya	0,0012	0,0034	0,0447	3510,93%
7. PPN DTP	0,00	0,00	0,00	-
PBB	58,49	153,56	28,12	-51,93%
Pajak Lainnya	60,18	152,50	82,79	37,58%
PPh Migas	0,02	0,00	(0,00)	-106,96%
Total	3.579,10	8.840,92	3.626,70	1,33%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (data diolah)

Realisasi penerimaan Pajak yang bersumber dari penerimaan PPN mencatatkan realisasi sebesar Rp1.629,03 miliar atau 35,59 persen dari Target, mengalami kontraksi 5,51 persen. Secara nominal, realisasi PPN ditopang oleh penerimaan PPN Dalam Negeri dengan kontribusi 76,39 persen dan PPN Impor dengan kontribusi 23,54 persen. Kinerja PPN Dalam Negeri tercatat mengalami kontraksi 12,33

persen (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar. Di sisi lain, PPN Impor mencatat peningkatan 26,79 persen (yoy) seiring dengan peningkatan aktivitas Impor pada Juni 2024 dan pelemahan nilai tukar rupiah. Komponen PPnBM Dalam Negeri dan PPnBM Lainnya juga mencatat peningkatan yang signifikan khususnya pada sub sektor perdagangan besar kopi, teh, dan kakao.

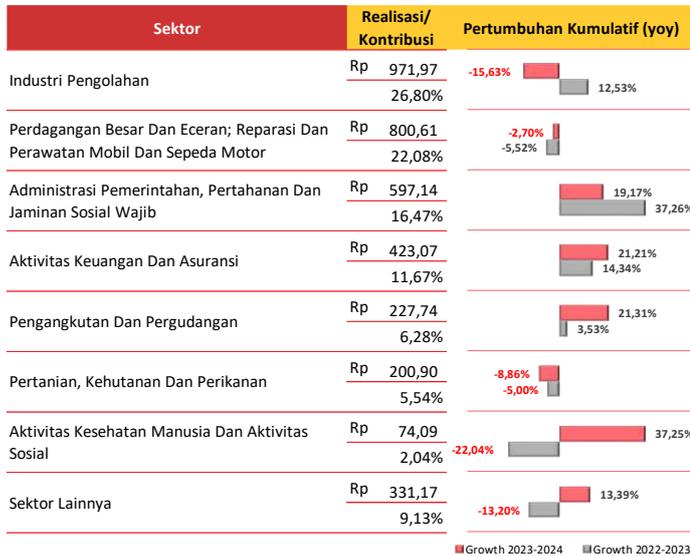
Selanjutnya, penerimaan Pajak Lainnya telah terealisasi Rp82,79 miliar atau 54,29 persen dari Target yang didominasi oleh penerimaan Bea Meterai. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi Pajak Lainnya tumbuh cukup tinggi sebesar 37,59 persen (yoy) didorong peningkatan setoran pada industri pengolahan dan perdagangan besar. Di sisi lain, komponen PBB terealisasi sebesar Rp28,12 miliar atau 18,31 persen dari Target, mencatatkan kontraksi yang cukup dalam yakni 51,93 persen (yoy) yang disebabkan karena terdapat banyak tagihan pajak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Semester I namun sudah dilakukan penagihan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB. Berdasarkan tren, pembayaran atas tagihan PBB cenderung meningkat pada Triwulan IV.

Selain penerimaan dari Pajak, penerimaan Cukai juga menyumbang pendapatan negara di Lampung. Di samping sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu, penerimaan Cukai di Lampung telah menyumbang pendapatan negara sebesar Rp6,25 miliar atau tercapai sangat tinggi melampaui target hingga 278,26 persen. Kinerja ini juga tercatat tumbuh sangat signifikan hingga 1.165,70 persen (yoy) yang utamanya bersumber dari realisasi atas pemesanan Pita Cukai (CK-1) atas komoditas rokok elektrik.

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan Sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana pada Grafik 2.3, tiga sektor yang menyumbang penerima Pajak terbesar di Lampung yakni Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi masing-masing 26,08 persen, 22,08

persen, dan 16,47 persen terhadap total penerimaan Pajak Dalam Negeri di luar Cukai.

Grafik 2.3 Realisasi Komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (data diolah)

Sampai dengan 30 Juni 2024, penerimaan Pajak dari Sektor Industri Pengolahan tercatat mengalami kontraksi sebesar 15,63 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan harga dan aktivitas pada sub sektor industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit, serta adanya restitusi pajak yang diajukan oleh perusahaan di awal tahun 2024. Selanjutnya, kinerja kumulatif Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga kian mengalami penurunan sebesar 2,70 persen (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh tekanan pada kinerja sub sektor perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Penurunan pada kedua sektor utama ini menyumbang penurunan realisasi Pajak Dalam Negeri sebagai dampak dari normalisasi harga komoditas yang tumbuh cukup tinggi pada tahun 2023, serta adanya perlambatan aktivitas pada sub sektor tertentu.

Sementara itu, kinerja pada Sektor Administrasi Pemerintahan tercatat mengalami peningkatan sebesar 16,47 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 seiring dengan peningkatan pembayaran gaji pegawai dan pengadaan barang dan/atau kegiatan pemerintah, khususnya pada Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan,

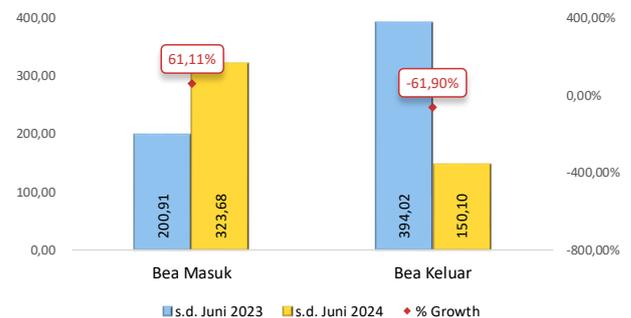
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Administrasi Pemerintah Lainnya.

Selain ketiga sektor tersebut, sektor utama lainnya yang menyumbang peningkatan antara lain Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Pengangkutan dan Pergudangan, dan Aktivitas Kesehatan dan Sosial. Di sisi lain, penerimaan pajak pada *leading sector* di Lampung yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan khususnya pada sub sektor perkebunan buah kelapa sawit.

Secara keseluruhan kinerja Penerimaan Pajak di Lampung sampai dengan 30 Juni 2024 mencatat pelambatan yang terkendali, hal ini didukung oleh sektor-sektor dalam negeri yang cenderung lebih stabil dan tidak rentan terhadap perubahan harga komoditas, sehingga upaya intensifikasi pada sektor-sektor yang potensial terus dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak di Lampung.

2.1.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Grafik 2.4 Realisasi Pajak Perdagangan Internasional di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (data diolah)

Sampai dengan 30 Juni 2024, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terealisasi sebesar Rp437,78 miliar atau 35,84 persen dari Target. Realisasi ini mencatatkan kontraksi sebesar 20,36 persen (yoy) yang utamanya disumbang oleh kontraksi pada komponen Bea Keluar yang cukup dalam. Realisasi penerimaan Bea Masuk memberikan kontribusi dominan sebesar 68,32 persen terhadap penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Sementara, penerimaan Bea Keluar menyumbang kontribusi sebesar 31,68 persen.

Secara nominal, penerimaan Bea Masuk telah terealisasi sebesar Rp323,68 miliar atau 58,97 persen dari Target. Kinerja Bea masuk tercatat

meningkat signifikan 61,11 persen (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan importasi komoditas gula yang digunakan sebagai bahan baku dan penolong serta komoditas beras yang digunakan untuk konsumsi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar juga menambah penerimaan impor.

Tabel 2.3 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Masuk di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Nama Komoditas	Real s.d. Juni 2023	Real s.d. Juni 2024	Growth
Gula	136,58	205,42	50,41%
Beras Setengah Giling	29,90	58,12	94,41%
Jagung		15,12	∞
Beras Pecah	3,87	8,18	111,19%
Pakan Ternak	4,63	5,82	25,88%

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (data diolah)

Di sisi lain, kinerja penerimaan Bea Keluar mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 61,90 persen (yoy). Secara nominal, penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp150,10 miliar atau 19,42 persen dari target. Capaian Bea Keluar terhadap target yang masih relatif rendah disebabkan oleh penurunan harga yang signifikan pada minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) beserta turunannya di pasar global yang merupakan komoditas terbesar penyumbang penerimaan Bea Keluar dan devisa ekspor di Lampung. Meskipun demikian, kontraksi pada Bea Keluar hingga akhir Juni 2024 lebih kecil apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal ini mengindikasikan harga CPO di pasar global cenderung mulai menguat.

Tabel 2.4 Lima Komoditas Terbesar Penyumbang Penerimaan Bea Keluar di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Nama Komoditas	Real s.d. Juni 2023	Real s.d. Juni 2024	Growth
Palm Kernel Expeller	66,65	39,21	-41,16%
RBD Palm Olein	52,54	22,04	-58,04%
CPO	18,85	13,09	-30,54%
RBD Palm Oil	87,92	6,41	-92,71%
RBD Palm Kernel Oil	25,10	5,75	-77,10%

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (data diolah)

2.1.1.1.3. Analisis *Tax Ratio* Pemerintah Pusat

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak

Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel 2.5 menyajikan perhitungan *tax ratio* s.d. 30 Juni 2024 di Lampung.

Tabel 2.5 *Tax Ratio* Penerimaan Perpajakan di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024
Pajak Dalam Negeri	3.640,85	3.579,59	3.632,95
Pajak Perdagangan Internasional	1.581,33	594,93	473,78
Total Pendapatan Perpajakan	5.222,17	4.174,52	4.106,73
PDRB AHDB s.d. Juni	201.659,72	220.373,65	236.784,89
<i>Tax Ratio</i>	2,59%	1,89%	1,73%

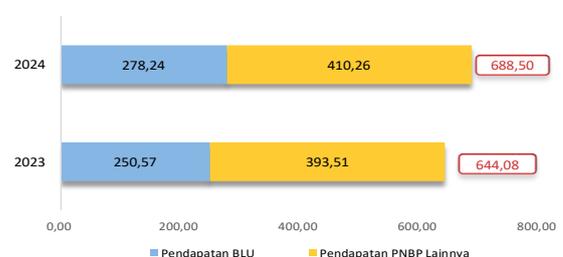
Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa selama tiga tahun terakhir, *tax ratio* pemerintah pusat pada Semester I tertinggi yakni di tahun 2022 sebesar 2,59 persen yang kemudian mulai menurun di tahun 2023 menjadi 1,89 persen. Menurunnya angka *tax ratio* ini terjadi seiring dengan perlambatan kinerja penerimaan Perpajakan di Lampung yang berkontraksi sebesar 1,62 persen (yoy) pada Semester I-2024.

Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Lampung pada Semester I-2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,08 persen secara *c-to-c*, namun tidak diiringi dengan pertumbuhan penerimaan Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktur ekonomi terjadi peningkatan produktivitas sampai akhir Semester I-2024, namun dengan adanya penurunan harga yang cukup dalam terhadap komoditas penyangga penerimaan Perpajakan, sehingga tidak cukup kuat untuk meningkatkan *tax ratio*.

2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Grafik 2.5 Realisasi PNBP Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024



Sumber: OM-SPAN (data diolah)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp688,50 miliar tumbuh 6,91 persen (yoy). Kinerja positif ini menunjukkan capaian target yang cukup optimal

yakni 65,78 persen dari Target. Kinerja PNBP utamanya disumbang oleh kontribusi positif seluruh komponen penerimaan PNBP yakni PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Komponen PNBP Lainnya menyumbang 59,59 persen terhadap total PNBP sementara Pendapatan BLU menyumbang 40,41 persen.

2.1.1.2.1. PNBP Lainnya

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi PNBP Lainnya di Provinsi Lampung sebesar Rp410,26 miliar atau tercapai 91,41 persen dari Target. Capaian yang memuaskan ini mencatatkan pertumbuhan 4,27 persen (*yoy*) didukung oleh pendapatan administrasi dan penegakan hukum yang merupakan kontributor terbesar penerimaan PNBP Lainnya. Rincian realisasi atas PNBP Lainnya sebagaimana pada Grafik 2.6 berikut.

Grafik 2.6 Rincian Realisasi PNBP Lainnya di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024



Sumber: LKPK-TW, OM-SPAN (data diolah)

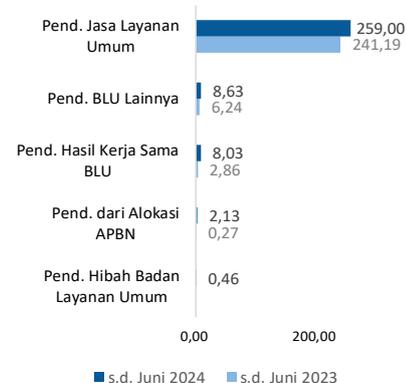
Secara lebih detail, realisasi atas Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp139 miliar tumbuh 32,66 persen (*yoy*) yang disumbang oleh Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang merupakan kontributor terbesar kedua penyumbang PNBP Lainnya sebesar Rp113,73 miliar

tumbuh 27,72 persen (*yoy*) yang didominasi oleh Pendapatan Biaya Pendidikan khususnya yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri antara lain ITERA, Polinela, dan IAIN Metro. Komponen PNBP Lainnya yang juga disumbang oleh Pendapatan atas layanan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan, Jasa Transportasi dan Informatika, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha (IUB), Bunga Perbankan yang juga menunjukkan peningkatan.

2.1.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi Pendapatan BLU di Provinsi Lampung sebesar Rp278,24 miliar atau tercapai 46,54 persen dari Target. Capaian ini mencatatkan pertumbuhan 11,05 persen (*yoy*) yang utamanya ditopang oleh Pendapatan atas Jasa Layanan Umum yang diterima oleh kelima Satuan Kerja BLU di Provinsi Lampung. Rincian realisasi Pendapatan BLU di Provinsi Lampung sebagaimana Grafik 2.7.

Grafik 2.7 Rincian Realisasi Pendapatan BLU di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024



Sumber: LKPK-TW, OM-SPAN (data diolah)

Secara lebih detail, realisasi atas Jasa Layanan Umum terdiri dari pendapatan atas Layanan Pendidikan sebesar Rp232,06 miliar yang diterima oleh Universitas Lampung, UIN Raden Intan Bandar Lampung, dan Politeknik Kesehatan Tangkarang; Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang diterima oleh Rumkit Bhayangkara Bandar Lampung sebesar Rp23,7 miliar; Pendapatan atas Layanan Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan teknologi yang diterima oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan



SUPLEMEN 2.1

Analisis Pengaruh Pembiayaan UMi terhadap Nilai Keekonomian Debitur



Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan dan pengaruh Pembiayaan UMi terhadap Nilai Keekonomian Debitur (NKD). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan secara statistik dari dampak Pembiayaan UMi yang diterima terhadap aspek keekonomian dan perkembangan usaha debitur yang dicerminkan oleh NKD. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih baik terkait peran pembiayaan UMi di Lampung guna mendorong pemberdayaan sektor UMKM dalam membantu mengatasi tantangan akses keuangan pelaku usaha dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal.

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah skor NKD *Baseline* Semester I-2023 dan *Endline* Semester I-2024 serta nilai akad dari 23 sampel yang ada.

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian adalah statistik parametrik yakni Uji Regresi Linear Berganda. Pengujian ini dipilih karena data yang digunakan pada analisis terdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi statistik parametrik untuk membuat inferensi tentang parameter populasi.



Secara matematis, model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\ln \text{NKD Endline} = -2.583009 + 0.767587 \ln \text{NKD Baseline} + 0.220836 \ln \text{Pembiayaan UMi} + \epsilon$$

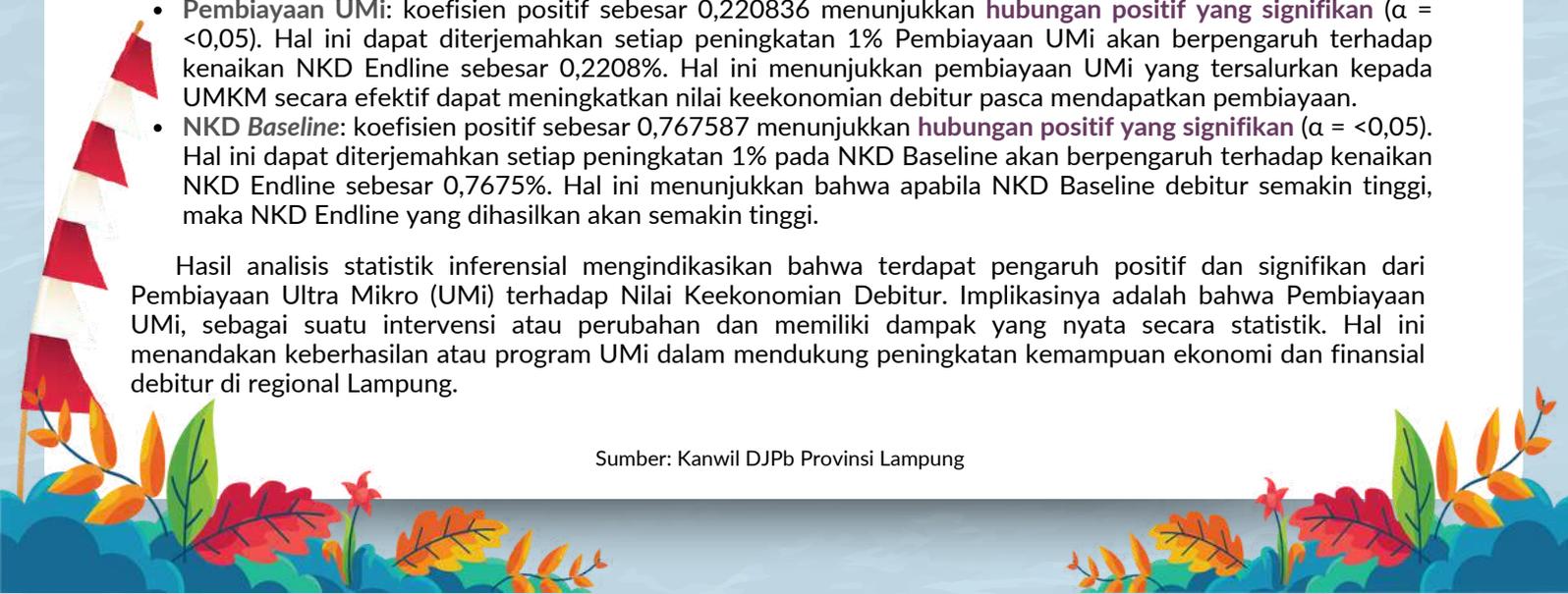
Keterangan :

- NKD Endline / Nilai Keekonomian Debitur *Endline* adalah variabel dependen;
- NKD Baseline / Nilai Keekonomian Debitur *Baseline* adalah variabel independen 1;
- Pembiayaan UMi (Nilai Akad) adalah variabel independen 2;
- -2,583009 adalah intersep atau konstanta (β_0);
- 0,767587 adalah koefisien regresi (β_1) yang menunjukkan perubahan rata-rata dalam NKD *Endline* untuk setiap unit perubahan dalam variabel NKD *Baseline*;
- 0,220836 adalah koefisien regresi (β_2) yang menunjukkan perubahan rata-rata dalam NKD *Endline* untuk setiap unit perubahan dalam variabel Pembiayaan UMi;
- ϵ adalah kesalahan residual atau *error term*.

Hasil regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat **pengaruh signifikan secara keseluruhan** antara variabel independen yakni NKD *Baseline* dan Pembiayaan UMi terhadap NKD *Endline* yang tercermin dari p-value sebesar 0,000131238 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = <0,05$). Selanjutnya, analisis dilakukan untuk melihat signifikansi dari setiap variabel sebagai berikut:

- **Pembiayaan UMi:** koefisien positif sebesar 0,220836 menunjukkan **hubungan positif yang signifikan** ($\alpha = <0,05$). Hal ini dapat diterjemahkan setiap peningkatan 1% Pembiayaan UMi akan berpengaruh terhadap kenaikan NKD *Endline* sebesar 0,2208%. Hal ini menunjukkan pembiayaan UMi yang tersalurkan kepada UMKM secara efektif dapat meningkatkan nilai keekonomian debitur pasca mendapatkan pembiayaan.
- **NKD *Baseline*:** koefisien positif sebesar 0,767587 menunjukkan **hubungan positif yang signifikan** ($\alpha = <0,05$). Hal ini dapat diterjemahkan setiap peningkatan 1% pada NKD *Baseline* akan berpengaruh terhadap kenaikan NKD *Endline* sebesar 0,7675%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila NKD *Baseline* debitur semakin tinggi, maka NKD *Endline* yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Hasil analisis statistik inferensial mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Nilai Keekonomian Debitur. Implikasinya adalah bahwa Pembiayaan UMi, sebagai suatu intervensi atau perubahan dan memiliki dampak yang nyata secara statistik. Hal ini menandakan keberhasilan atau program UMi dalam mendukung peningkatan kemampuan ekonomi dan finansial debitur di regional Lampung.



Jasa Industri (BSPJI) Lampung sebesar Rp1,79 miliar; dan Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya yang diterima oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebesar Rp1,42 miliar; serta Pendapatan Pengelolaan BMN sebesar Rp5,69 juta.

Selain itu, Pendapatan BLU Lainnya yang bersumber dari layanan perbankan dan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU juga turut memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan Pendapatan BLU meskipun memiliki porsi yang minim. Pertumbuhan Pendapatan BLU mencerminkan kinerja BLU di Provinsi Lampung yang semakin baik dan efektif, serta berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.1.3. Prognosis/Outlook Pendapatan Negara

Sampai dengan akhir tahun 2024, Pendapatan Negara di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar Rp11.499,04 miliar, dengan rincian proyeksi pendapatan Perpajakan sebesar Rp9.910,03 miliar dan proyeksi PNPB Rp1.589,01 miliar sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.6. Apabila dibandingkan dengan Target Pendapatan Negara Tahun 2024 sebesar Rp11.211,70, persentase ketercapaian proyeksi hingga akhir Tahun 2024 terhadap Target sebesar 102,56 persen.

Tabel 2.6 Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Negara Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar rupiah)

Periode	Perpajakan		PNPB		Total	
	Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi
Triwulan I	1.773,89	1.718,11	309,49	432,89	2.083,38	2.151,00
Triwulan II	2.210,54	2.388,62	398,69	255,61	2.609,24	2.644,23
Triwulan III	2.678,19	-	476,15	-	3.154,34	-
Triwulan IV	3.247,40	-	404,69	-	3.652,09	-
Total	9.910,03	4.106,73	1.589,01	688,50	11.499,04	4.795,23

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (data diolah)

Melihat capaian kinerja Pendapatan Negara sampai dengan Semester I-2024, secara nominal telah terealisasi sebesar Rp4.795,23 miliar dengan proyeksi Pendapatan Negara s.d. Juni 2024 sebesar Rp4.692,62 miliar, dimana capaian Pendapatan Negara lebih besar dari proyeksi (*underestimated*) dengan tingkat deviasi 2,19 persen. Artinya, realisasi Pendapatan Negara berhasil melampaui estimasi penerimaan yang diekspektasikan. Pencapaian ini menunjukkan kinerja positif Pendapatan Negara dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah berbagai tantangan dan risiko perekonomian

seperti perlambatan sektor industri pengolahan pada awal tahun, fluktuasi harga komoditas, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2.1.1.4. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan capaian kinerja Pendapatan Negara di Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2024, rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain:

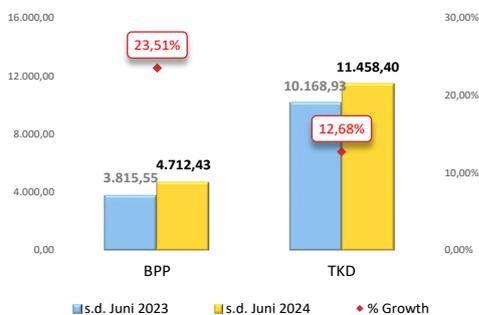
- Upaya intensifikasi pajak perlu terus dilakukan khususnya pada sektor-sektor yang potensial seperti Administrasi Pemerintahan dan Jasa Keuangan dan Asuransi guna mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah fluktuasi harga komoditas serta diversifikasi penerimaan pajak.
- Sosialisasi dan penyuluhan terkait perkembangan kebijakan terbaru, inovasi, *platform* pembayaran pajak perlu terus dilakukan secara menyeluruh khususnya pada daerah yang sulit memiliki akses komunikasi guna meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak.
- Satker PNPB agar memperbaiki pola tata Kelola PNPB dengan menyusun proses bisnis pengelolaan PNPB dengan baik, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti kepatuhan atas penyetoran dan sisa kas pada akhir hari kerja guna menunjang akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara.
- Diperlukan adanya ketentuan lanjutan antara Kementerian Keuangan maupun K/L Teknis atas potensi ketidaktercapaian PNPB pada satker disebabkan kondisi eksternal, namun kegiatan yang didanai oleh sumber dana PNPB bersifat rutin/tetap. Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko dan menghindari disrupsi operasional pelayanan.

2.1.2. Belanja Negara

Sampai dengan akhir 30 Juni 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp4.712,43 miliar atau 48,29 persen dari pagu. Realisasi Belanja Negara mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,51 persen (*yoy*) utamanya didukung oleh pertumbuhan *double digit* pada kedua komponennya. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mengalami pertumbuhan

sebesar 23,51 persen (yoy) yang utamanya didorong oleh penyerapan Belanja Barang yang terakselerasi tinggi. Dari sisi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) kian mencatatkan pertumbuhan 12,68 persen (yoy) didukung oleh peningkatan penyaluran Dana Transfer Umum, Dana Desa, dan Insentif fiskal. Berdasarkan kontribusinya, realisasi Belanja Negara didominasi oleh penyaluran TKD yang menyumbang 68,27 persen dari total Belanja Negara. Sementara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang 29,14 persen terhadap dari total Belanja Negara. Realisasi komponen Belanja Negara s.d. Juni 2024 ditunjukkan sebagaimana pada Grafik 2.8.

Grafik 2.8 Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)

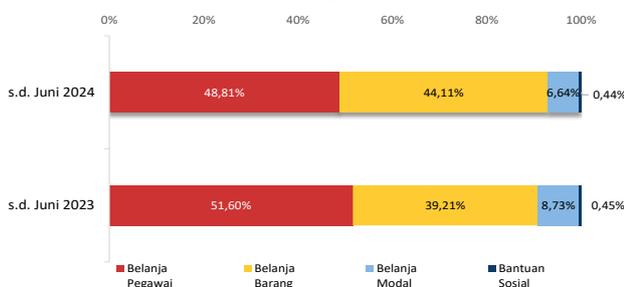


Sumber: OM-SPAN (diolah)

2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Hingga 30 Juni 2024, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp4.712,43 miliar atau 48,29 persen dari pagu. Realisasi ini membukukan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 23,51 persen (yoy) meskipun ternormalisasi dari periode triwulan sebelumnya.

Grafik 2.9 Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (persen)



Sumber: OM-SPAN (data diolah)

Realisasi BPP didominasi oleh Belanja Pegawai dengan kontribusi 48,81 persen terhadap total BPP dan Belanja Barang yang menyumbang 44,11

persen. Kedua jenis Belanja ini mencatatkan pertumbuhan masing-masing Belanja Pegawai 16,81 persen (yoy) dan Belanja Barang 38,94 persen (yoy) yang menyumbang pertumbuhan pada realisasi BPP keseluruhan. Sementara, untuk Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial memiliki kontribusi masing-masing 6,64 persen dan 0,44 persen terhadap total BPP. Meskipun memberikan kontribusi yang rendah, realisasi Belanja Bantuan mencatatkan pertumbuhan. Sementara, realisasi Belanja Modal mengalami penurunan seiring dengan penurunan pagu di Tahun 2024.

2.1.2.1.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Grafik 2.10 Realisasi BPP Berdasarkan Jenis Belanja s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN (data diolah)

Berdasarkan jenis Belanja, Belanja Pegawai yang merupakan komponen terbesar mencatatkan realisasi sebesar Rp2.99,97 miliar atau terserap 57,45 persen dari pagu dengan pertumbuhan 16,81 persen (yoy). Pertumbuhan ini di dorong oleh adanya kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri dan Pensiunan pada tahun 2024 yang berimplikasi pada peningkatan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Pensiunan, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 yang dibayarkan pada Bulan Juni. Alokasi Belanja Pegawai juga dimanfaatkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kenaikan terbesar pada satker Kementerian Agama termasuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK pegawai dan guru tersebar di seluruh Provinsi Lampung yang diangkat pada tahun 2022 dan 2023.

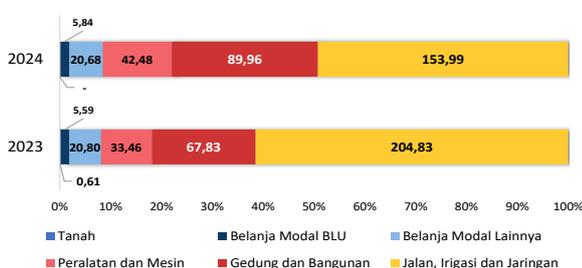
Belanja Barang merupakan komponen terbesar kedua terhadap total BPP mencatatkan realisasi Rp2.078,70 miliar atau 46,46 persen dari pagu dengan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar



38,94 persen (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh realisasi Belanja yang difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 dan persiapan Pilkada yang akan diselenggarakan pada November mendatang, termasuk pelaksanaan pengawasan pemilu. Selain itu, pertumbuhan Belanja Barang juga disumbang oleh penyaluran Bantuan melalui Kementerian Pertanian berupa Prasarana Pengembangan Kawasan dalam rangka mendukung ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta realisasi belanja keperluan operasional pada Badan Layanan Usaha (BLU).

Selanjutnya, Belanja Modal telah terealisasi Rp312,94 miliar atau 25,18 persen dari Pagu. Berdasarkan pertumbuhannya, Belanja Modal tercatat mengalami kontraksi 6,06 persen seiring dengan adanya penurunan Pagu dari tahun sebelumnya. Namun apabila dilihat dari secara persentase penyerapan, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencerminkan adanya akselerasi Belanja Modal utamanya yang digunakan untuk pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi dalam rangka *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP), pembangunan fasilitas pendukung Bendungan Margatiga, dan pembangunan/revitalisasi prasarana layanan publik antara lain terminal, gedung sekolah pendidikan dasar dan menengah, dan kantor Kejaksaan Negeri. Grafik 2.11 menyajikan rincian realisasi Belanja Modal di Lampung.

Grafik 2.11 Rincian Belanja Modal di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)



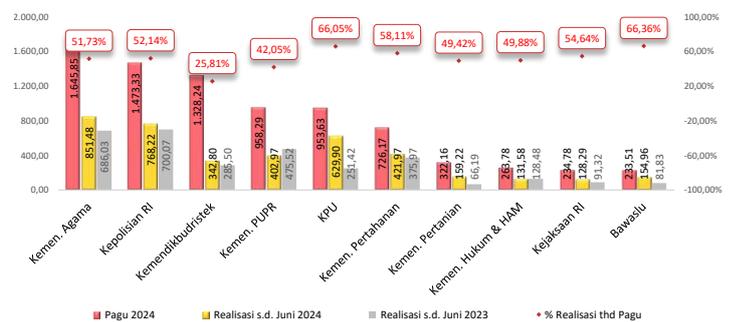
Sumber: SINTESA (data diolah)

Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi Rp 20,82 miliar atau 56,49 persen dari Pagu. Meskipun secara kontribusi memiliki porsi yang paling rendah, namun realisasi Belanja Sosial

mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 20,21 persen (yoy) didukung oleh penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi berupa KIP Kuliah yang disalurkan oleh UIN Raden Inten dan IAIN Metro. Belanja Bantuan Sosial juga dimanfaatkan untuk Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang disalurkan melalui Kementerian Agama.

2.1.2.1.2. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga Pagu Terbesar

Grafik 2.12 Pagu, Realisasi, dan Perbandingan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: SINTESA (data diolah)

Capaian kinerja BPP pada Semester I tentunya tidak terlepas dari kinerja sepuluh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki porsi hingga 67,80 persen dari total pagu Tahun 2024. Kementerian Agama memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung TA 2024 mencapai Rp1.645,85 miliar didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 66,88 persen dari total Pagu yang salah satunya dialokasikan untuk membayar Gaji dan Tunjangan PPPK. Selanjutnya, di urutan kedua yakni Kepolisian RI dengan total Pagu Rp1.473,33 miliar dan urutan ketiga yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total Pagu Rp1.328,24 miliar.

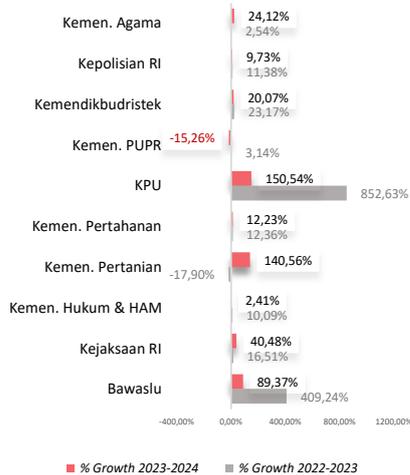
Selanjutnya berdasarkan Grafik 2.12, apabila mencermati kinerja sepuluh K/L dengan pagu terbesar sampai dengan 30 Juni 2024 berdasarkan tingkat penyerapan terhadap pagu, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tingkat penyerapan tertinggi sebesar 66,36 persen dari pagu utamanya didorong oleh realisasi Belanja Barang dan Belanja Pegawai dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu Tahun 2024 mulai dari perencanaan,





penyelenggaraan, hingga penetapan hasil pemilu. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki persentase penyerapan terendah yakni 25,81 persen dari total Pagu, yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Belanja Modal.

Grafik 2.13 Pertumbuhan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (persen)



Sumber: SINTESA (data diolah)

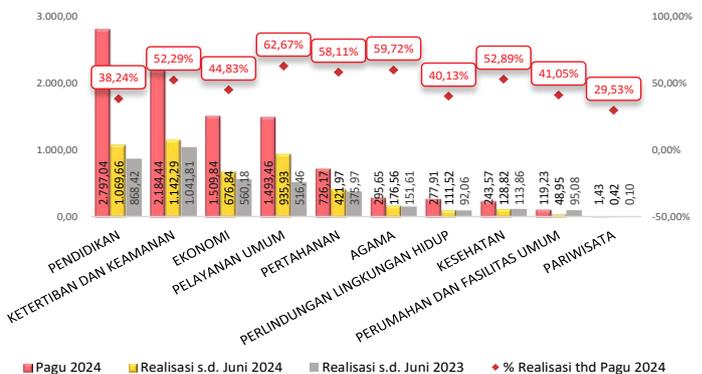
Lebih lanjut, apabila dilihat berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja dari sepuluh K/L dengan Pagu terbesar di Provinsi Lampung berdasarkan Grafik 2.13, Komisi Pemilihan Umum memiliki pertumbuhan realisasi belanja tertinggi sebesar 150,54 persen (yoy) seiring dengan peningkatan alokasi belanja untuk pelaksanaan pemilu meskipun pertumbuhannya lebih kecil dari tahun lalu. Kementerian Pertanian juga mencatat pertumbuhan realisasi yang signifikan sebesar 140,56 persen (yoy) yang didorong oleh realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada pemda dalam bentuk Tugas Pembantuan berupa konstruksi kegiatan Upaya Khusus (Upsus) optimasi lahan rawa pada empat kabupaten. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercatat mengalami kontraksi 15,26 persen (yoy) seiring dengan penurunan pagu khususnya pada Belanja Modal seiring dengan penyelesaian Inpres Pembangunan Jalan Daerah di tahun 2023.

2.1.2.1.3. Berdasarkan Fungsi

Kinerja BPP sampai dengan 30 Juni 2024 berdasarkan Fungsi ditunjukkan sebagaimana pada Grafik 2.14. Alokasi belanja terbesar terdapat pada

Fungsi Pendidikan dengan porsi 28,99 persen dari total APBN di Provinsi Lampung Tahun 2024 dan fungsi dengan porsi paling rendah yakni fungsi Pariwisata sebesar 0,01 persen. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi fokus belanja yang di prioritaskan di Lampung guna mendukung optimalisasi layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah dasar negeri dan keagamaan hingga perguruan tinggi termasuk BLU, melalui peningkatan kesejahteraan guru/tenaga pendidik maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kondisi ini selaras dengan visi APBN 2024 dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk meningkatkan produktivitas.

Grafik 2.14 Pagu, Realisasi, dan Perbandingan Realisasi BPP Lampung Berdasarkan Fungsi s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: SINTESA (data diolah)

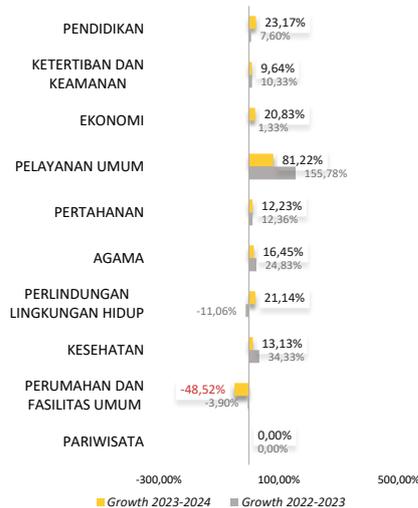
Apabila melihat berdasarkan tingkat penyerapan belanja sampai dengan 30 Juni 2024, belanja pada Fungsi Pelayanan Umum memiliki tingkat penyerapan tertinggi yakni 62,67 persen dari pagu yang di dalamnya termasuk realisasi atas belanja yang mendukung pelaksanaan pemilu. Selain itu, fungsi dengan tingkat serapan yang baik atau di atas 50 persen dari pagu antara lain fungsi Keamanan dan Ketertiban, Pertahanan, Agama, dan Kesehatan.

Di sisi lain, fungsi Pariwisata yang memiliki porsi paling minim juga tercatat memiliki tingkat serapan yang rendah yakni 29,53 persen dari Pagu yang dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dimana beberapa kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Semester II sesuai agenda Kementerian Pariwisata, seperti pelatihan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,



serta bimtek dan *workshop* Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas). Selain itu, fungsi dengan tingkat penyerapan yang masih di bawah 50 persen antara lain fungsi Pendidikan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Perumahan dan Fasilitas Umum.

Grafik 2.15 Pertumbuhan Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar rupiah)



Sumber: SINTESA (data diolah)

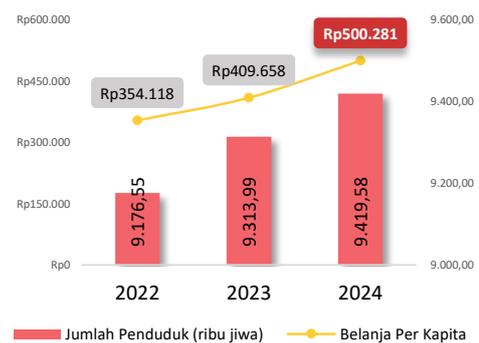
Selanjutnya, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi belanja sebagaimana Grafik 2.15, Fungsi Pelayanan Umum melanjutkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 81,22 persen (*yoy*), didorong oleh realisasi belanja untuk pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dalam proses konsolidasi demokrasi. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi diikuti oleh Fungsi Pendidikan dengan pertumbuhan 23,17 persen (*yoy*) yang antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Guru/ PNS/ PPPK serta operasional penyelenggaraan pendidikan.

Dari kesepuluh fungsi BPP, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan, namun realisasi belanja pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami pertumbuhan negatif disebabkan karena alokasi pagu yang mengalami penurunan dari tahun 2023, serta terdapat sebagian pagu Tahun 2024 yang masih terblokir karena menunggu SK penetapan lokasi penerima bantuan penyediaan infrastruktur air minum dan Bantuan Simultan Perumahan Swadaya.

2.1.2.1.4. Belanja Pemerintah Pusat Per Kapita

BPP Per Kapita menggambarkan seberapa banyak dana publik yang dihabiskan untuk setiap individu dalam suatu wilayah. Untuk melihat tren BPP Per Kapita selama tiga tahun terakhir, dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi BPP sampai dengan 31 Juni 2022 – 2024 dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun berkenaan yang diperoleh dari portal resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Grafik 2.16 Tren BPP Per Kapita s.d. 30 Juni 2022 – 2024 (rupiah, jiwa)



Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pertumbuhan penduduk di Lampung pada tiga tahun terakhir memiliki tren yang meningkat. Dimana pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 9,18 juta jiwa kemudian meningkat di Tahun 2023 menjadi 9,31 juta jiwa dan Tahun 2024 tercatat sebanyak 9,42 juta jiwa. Tren peningkatan ini seiring dengan realisasi BPP. Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi BPP di Lampung sebesar Rp4.712,43 miliar, tumbuh lebih tinggi dibanding realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp3.815,55 miliar dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp3.249,58 miliar.

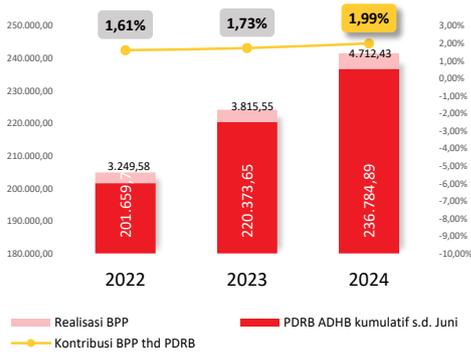
Sebagaimana Grafik 2.16, pada Juni Tahun 2024, BPP Per Kapita di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp500.281. Artinya, rata-rata Belanja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan untuk setiap penduduk di Lampung sebesar Rp500.281. Angka ini meningkat cukup tinggi 22,12 persen (*yoy*) seiring pertumbuhan alokasi anggaran BPP, yang mencerminkan adanya upaya dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan dasar publik yang lebih baik.



2.1.2.1.5. Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Realisasi BPP di Lampung sampai dengan 30 Juni 2024 memberikan kontribusi terhadap PDRB kumulatif s.d. Juni sebesar 1,99 persen atau meningkat 0,26 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi ini mencerminkan belanja yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan turut menyumbang PDRB Lampung melalui komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Peningkatan kontribusi ini dipicu oleh peningkatan Belanja Barang yang secara tahunan tumbuh cukup tinggi 38,94 persen (*yoy*) khususnya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan persiapan Pilkada, diikuti oleh Belanja Pegawai yang tumbuh 16,81 persen (*yoy*). Tren Kontribusi BPP Terhadap PDRB sebagaimana disajikan pada Grafik 2.17.

Grafik 2.17 Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022 – 2024 (miliar Rp, persen)

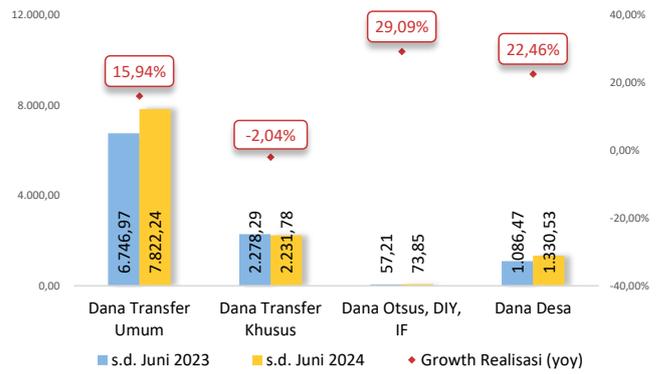


Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung (diolah)

2.1.2.2. Transfer ke Daerah (TKD)

Sampai dengan 30 Juni 2024, Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan di Lampung sebesar Rp11.458,40 miliar atau 51,47 persen dari Pagu. Kinerja penyaluran TKD pada Semester I ini berjalan on-track dan mencatatkan pertumbuhan 12,68 persen (*yoy*) yang utamanya didorong oleh akselerasi penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) yang tumbuh 15,94 persen (*yoy*), Insentif Fiskal 29,09 persen (*yoy*), dan Dana Desa 22,46 persen (*yoy*). Sementara, penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) tercatat mengalami sedikit perlambatan penyaluran 2,04 persen (*yoy*) khususnya pada jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Realisasi Penyaluran TKD Berdasarkan Komponen disajikan pada Grafik 2.18.

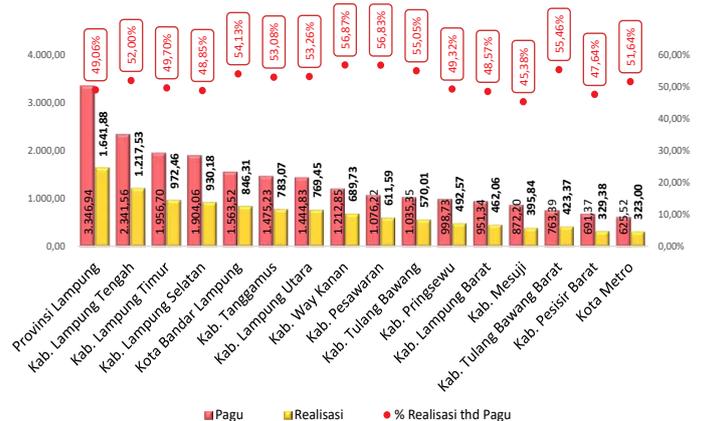
Grafik 2.18 Realisasi Penyaluran TKD Berdasarkan Komponen s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Secara nominal, penyaluran TKD untuk masing-masing komponen: DTU tersalur Rp7.822,24 miliar atau 54,84 persen dari Pagu, DTK tersalur Rp2.231,78 miliar atau 39,98 persen dari Pagu, Insentif Fiskal tersalur Rp73,85 miliar atau 50 persen dari Pagu, dan Dana Desa tersalur Rp1.330,53 miliar atau 58,70 persen dari Pagu. Secara lebih detail, berdasarkan kontribusinya komponen DTU masih mendominasi penyaluran TKD khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi alokasi TKD pada seluruh pemerintah daerah sebagai instrumen TKD guna mendukung pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah.

Grafik 2.19 Pagu dan Realisasi Penyaluran TKD per Pemerintah Daerah s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN TKD, SIKD Next Generation (diolah)

Lebih lanjut, kinerja penyaluran TKD secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen

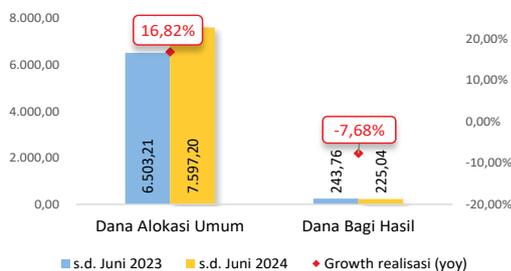


syarat salur yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran TKD di tingkat pusat. Untuk mencermati kinerja penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah, dapat dilihat melalui persentase penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah serta pertumbuhannya sebagaimana disajikan pada Grafik 2.19.

Berdasarkan grafik tersebut, persentase penyaluran TKD tertinggi pada Kabupaten Way Kanan sebesar 58,87 persen dari Pagu, diikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 56,83 persen dari Pagu, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara itu, pemda dengan tingkat penyaluran TKD yang paling rendah yakni Kabupaten Mesuji sebesar 45,38 persen. Penyaluran TKD yang semakin optimal akan mendukung akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah pada berbagai sektor guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat antar daerah.

2.1.2.2.1. Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 2.20 Realisasi Dana Transfer Umum wilayah Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



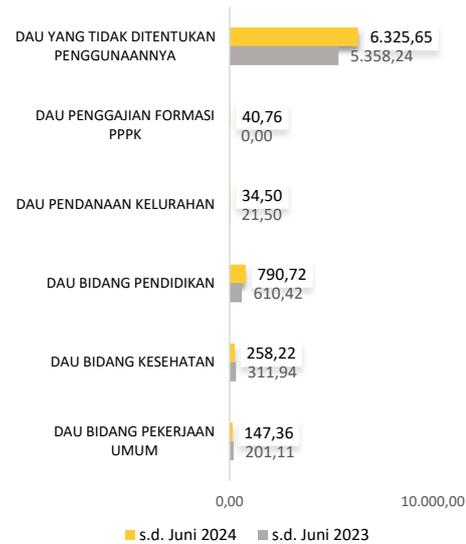
Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Sampai dengan Juni 2024, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) di wilayah Lampung terealisasi sebesar Rp7.822,24 atau 54,84 persen dari Pagu, mencatatkan pertumbuhan 15,94 persen (yoy) yang di dorong oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terakselerasi dan mendominasi komponen DTK, meskipun penyaluran Dana Bagi Hasil tercatat mengalami perlambatan. Berdasarkan kontribusinya, realisasi DAU menyumbang hingga 97 persen dari total penyaluran DTK. Sementara, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya berkontribusi 2,88 persen dari penyaluran DTK.

Secara nominal, realisasi penyaluran DAU di wilayah Lampung mencapai Rp7.597,20 miliar atau 55,61

persen dari Pagu. Kinerja DAU hingga Juni tercatat tumbuh 16,82 persen seiring dengan peningkatan alokasi DAU *Non Earmarked*. Pertumbuhan ini juga di dorong oleh penyaluran DAU *Earmarked* Bidang Pendidikan, DAU Penggajian Formasi PPPK dan DAU Pendanaan Kelurahan yang tersalur lebih cepat.

Grafik 2.21 Realisasi DAU Per Jenis s.d. 30 Juni 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

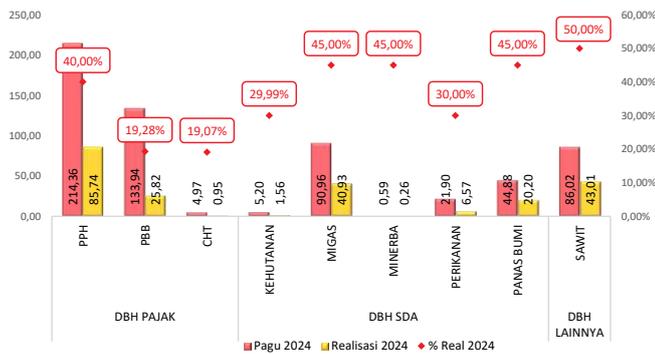


Sumber: OM-SPAN TKD, SIKD *New Generation* (diolah)

Berdasarkan Grafik 2.21, DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya memiliki porsi terbesar dan telah tersalur Rp6.325,65 miliar, tumbuh 18,05 persen (yoy) seiring dengan peningkatan alokasi DAU di tahun 2024 untuk mendukung kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan melekat ASN-Daerah dan penggajian PPPK. DAU Bidang Pendidikan tumbuh 29,54 persen, DAU Pendanaan Kelurahan tumbuh 60,54 persen, dan DAU Penggajian Formasi PPPK yang tumbuh dari tahun sebelumnya dimana s.d. Juni belum terdapat penyaluran. Kinerja Penyaluran DTU tidak terlepas dari kecepatan pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK. Berdasarkan persentase penyalurannya, DAU Bidang Pendanaan Kelurahan menunjukkan kinerja yang optimal yakni tersalur 84,17 persen dari total Pagu. Sementara, DAU Penggajian Formasi PPPK persentase penyerapannya masih cukup rendah yakni 10,13 persen meskipun tumbuh secara tahunan, sehingga pemenuhan dokumen syarat salur oleh pemda perlu lebih dioptimalkan.

Selanjutnya, untuk komponen DBH terealisasi Rp225,04 miliar atau 37,33 persen dari Pagu, tercatat mengalami penurunan 7,68 persen (yoy) seiring dengan penurunan alokasi DBH pada tahun 2024 pada seluruh jenis. Namun demikian, DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatatkan pertumbuhan tipis sebesar 0,23 persen (yoy) utamanya dipicu oleh peningkatan penyaluran DBH PBB Migas. Berdasarkan persentase penyalurannya, DBH Sawit menunjukkan capaian tertinggi sebesar 50 persen dari total pagu. Sementara, persentase penyerapan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan DBH PBB masih cukup rendah yakni 19,07 persen dan 19,28 persen dari Pagu. Rincian pagu dan realisasi penyaluran DBH di Lampung sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.22.

Grafik 2.22 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

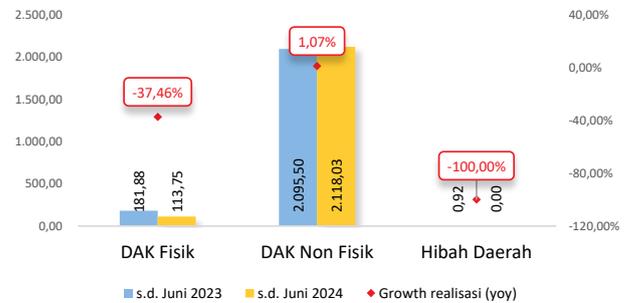
2.1.2.2.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) di provinsi Lampung sebesar Rp2.231,78 miliar atau tersalur 39,98 persen dari Pagu, tercatat menurun 2,04 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik yang cukup dalam pada Semester I 2024. Berdasarkan kontribusinya, kinerja penyaluran DTK didominasi oleh penyaluran DAK Non Fisik dengan porsi 94,90 persen, sementara DAK Fisik dan Hibah Daerah memiliki porsi yang minim.

Secara nominal, realisasi DAK Fisik telah tersalur Rp113,75 miliar atau 7,83 persen dari Pagu. Realisasi ini mengalami penurunan 37,46 persen (yoy) dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain: proses kontrak barang dan jasa pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang berjalan lambat dan terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan di daerah dengan alokasi DAK Fisik sehingga tidak dapat dilakukan kontrak.

Grafik 2.23 Realisasi Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK) s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN (diolah)

Lebih lanjut, apabila dicermati berdasarkan Bidang, penyaluran DAK Fisik terbesar pada Bidang Jalan memiliki nilai realisasi tertinggi, diikuti Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan Bidang Irigasi. Atas DAK Fisik yang telah disalurkan, jumlah dana yang telah terserap dan dilaporkan oleh pemda sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp60,70 miliar atau 53,36 persen dari total DAK Fisik yang telah salur dengan tingkat serapan tertinggi pada Bidang Irigasi. Rincian Pagu, Realisasi, dan Penyerapan DAK Fisik Per Bidang disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Pagu, Realisasi, dan Penyerapan DAK Fisik Per Bidang s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)

Bidang	Pagu	Realisasi	% Real thd Pagu	Penyerapan	% Penyerapan
Pendidikan	561,48	19,88	3,54%	3,43	17,26%
Jalan	379,96	71,61	18,85%	51,48	71,89%
Kesehatan dan KB	277,85	16,68	6,00%	0,56	3,37%
Perdagangan	70,00	-	-	-	-
Irigasi	50,44	5,59	11,08%	5,22	93,47%
Pertanian	48,03	-	-	-	-
Kelautan dan Perikanan	22,45	-	-	-	-
Air Minum	16,36	-	-	-	-
Perumahan dan Permukiman	16,28	-	-	-	-
Lingkungan Hidup	3,36	-	-	-	-
Industri Kecil dan Menengah	3,32	-	-	-	-
Pariwisata	2,43	-	-	-	-
Sanitasi	1,63	-	-	-	-
UMKM	0,00	-	-	-	-
Total	1.453,58	113,75	7,83%	60,70	53,36%

Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Di sisi lain, penyaluran DAK Non Fisik di Wilayah Lampung sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp2.118,03 miliar atau 51,32 persen dari Pagu, tercatat tumbuh 1,07 persen (yoy) didorong oleh penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN



Daerah yang keduanya memiliki porsi yang dominan terhadap penyaluran DAK Non Fisik.

Secara lebih detail, penyaluran Dana TPG ASN Daerah tumbuh 0,81 persen (yoy) dan penyaluran Dana BOS tumbuh 4,30 persen (yoy). Kinerja yang baik ini didukung oleh peningkatan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan sekolah dalam memenuhi dokumen syarat salur, serta adanya perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan di Kemendikbudristek. Dari seluruh jenis DAK Non Fisik yang disalurkan, Dana Pelayanan Kepariwisata memiliki pertumbuhan tertinggi, sementara Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menurun cukup dalam seiring dengan penurunan Pagu. Berdasarkan persentase penyalurannya, sebagian besar jenis DAK Non Fisik sepanjang Semester I-2024 berjalan *on-track* dan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik di Lampung s.d. 30 Juni 2023 – 2024 (miliar Rp, persen)

Jenis	Pagu	Realisasi s.d. Juni 2024	% Real thd Pagu 2024	Realisasi s.d. Juni 2023	% Growth Realisasi (yoy)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	1.714,42	942,93	55,00%	935,36	0,81%
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.651,86	848,01	51,34%	813,09	4,30%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	411,79	148,50	36,06%	164,30	-9,61%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	123,68	62,72	50,71%	65,09	-3,65%
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	93,45	46,73	50,00%	46,28	0,97%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	41,05	21,40	52,13%	19,08	12,17%
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	35,92	19,76	55,00%	23,32	-15,27%
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	17,62	9,69	55,00%	7,52	28,83%
Dana Fasilitas Penanaman Modal	8,01	3,81	47,56%	3,43	10,91%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7,43	3,72	50,00%	4,89	-23,92%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6,32	3,16	50,00%	3,48	-9,18%
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5,78	2,89	50,00%	4,69	-38,32%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5,50	2,75	50,00%	2,75	0,00%
Dana Pelayanan Kepariwisata	2,20	1,10	50,00%	0,85	29,58%
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	1,72	0,86	50,00%	1,38	-37,49%
Total	4.126,75	2.118,03	51,32%	2.095,50	1,07%

Sumber: SINTESA (diolah)

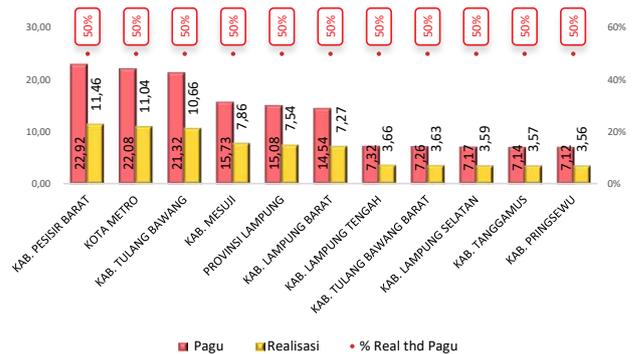
Selain DAK, Hibah Daerah juga menjadi salah satu komponen penyaluran DTK. Dari alokasi Pagu Hibah Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp1,87 miliar, sampai dengan 30 Juni 2024 belum terdapat penyaluran. Alokasi Pagu Hibah tersebut merupakan hibah yang dialokasikan pada

Kabupaten Lampung Tengah merupakan Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat untuk pembangunan sanitasi layak dan aman berupa tangki septik dan pemasangan Sambungan Rumah (SR) sanitasi.

2.1.2.2.3. Insentif Fiskal

Sampai dengan 30 Juni 2024, penyaluran Insentif Fiskal di Lampung sebesar Rp73,85 miliar atau 50 persen dari Pagu, tercatat tumbuh 29,09 persen (yoy). Adapun jumlah penyaluran Insentif Fiskal sepenuhnya merupakan realisasi dari penyaluran Tahap I Insentif Fiskal TA 2024 atas kinerja tahun sebelumnya kepada 11 pemda di wilayah Lampung penerima alokasi yang telah memenuhi dokumen syarat salurnya paling lambat 20 Juni 2024. Kinerja penyaluran ini telah sesuai dengan ketentuan dimana pada Tahap I Insentif Fiskal disalurkan sebesar 50 persen paling cepat pada Bulan Februari.

Grafik 2.24 Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal di Lampung s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)



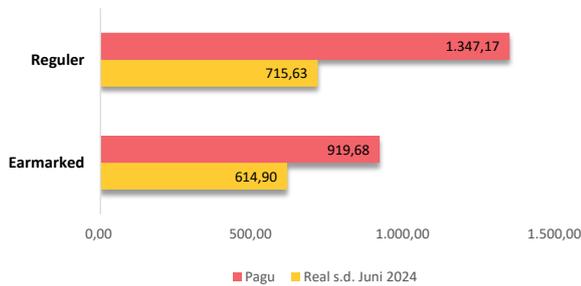
Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

2.1.2.2.4. Dana Desa

Sampai dengan 30 Juni 2024, Dana Desa yang telah tersalurkan mencapai Rp1.330,53 miliar atau 58,70 persen dari Pagu. Dari seluruh desa yang ada di Lampung, sebanyak 2.445 desa telah melakukan penyaluran Dana Desa pada Tahap 1, hanya terdapat 1 desa yang belum melakukan penyaluran dikarenakan terkendala dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja penyaluran Dana Desa sampai dengan Juni tercatat mengalami peningkatan 22,46 persen (yoy) didukung oleh *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 dan peningkatan kepatuhan pemda dan perangkat desa dalam menyampaikan

dokumen melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

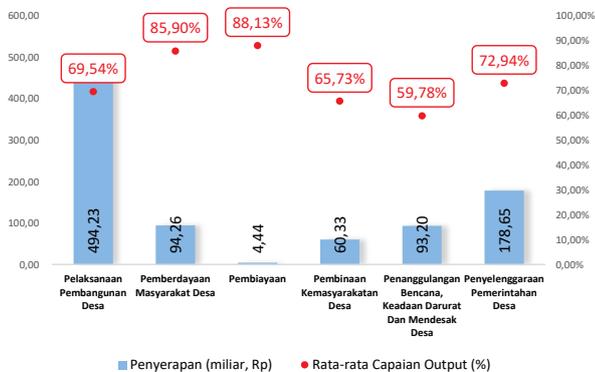
Grafik 2.25 Pagu dan Realisasi Dana Desa s.d. 30 Juni 2024 Berdasarkan Jenis (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Lebih lanjut, penyaluran Dana Desa di Lampung terdiri dari penyaluran Dana Desa Reguler sebesar Rp715,63 miliar atau 53,12 persen dari Pagu Dana Desa Reguler, dan Dana Desa *Earmarked* sebesar Rp614,90 miliar atau 66,86 persen dari Pagu Dana Desa *Earmarked*, yang merupakan realisasi Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT Desa, Penanganan Stunting, dan Mendukung Ketahanan Pangan.

Grafik 2.26 Clustering Penyerapan Dana Desa Berdasarkan Bidang (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN TKD, data diakses 18 Agustus 2024 (diolah)

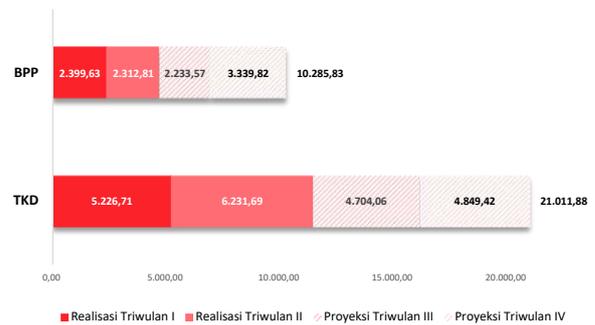
Dari total Dana Desa yang telah tersalur, jumlah dana telah terserap dan dilaporkan oleh pemda adalah sebesar Rp925,10 miliar. Berdasarkan nominal penyerapannya, sebagian besar Dana Desa yang disalurkan digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, atau secara nominal sebesar Rp494,23 miliar dengan rata-rata capaian output 69,54 persen. Hal ini membuktikan bahwa Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat hingga mendukung pembiayaan BUMDes guna menciptakan kemandirian ekonomi desa.

2.1.2.3. Prognosis/Outlook Belanja Negara

Proyeksi realisasi Belanja Negara diperoleh dari penjumlahan proyeksi BPP dan TKD. Perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan *data series* selama lima tahun terakhir. Proyeksi BPP dilakukan berdasarkan proyeksi Halaman III DIPA Satuan Kerja, sementara untuk proyeksi TKD dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata eksponensial. Pada Triwulan III, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) diproyeksikan sebesar Rp2.233,57 miliar dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan sebesar RpRp4.704,06 miliar, sehingga secara total proyeksi Belanja Negara pada Triwulan III sebesar Rp6.937,63 miliar.

Grafik 2.27 Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2024 (miliar, Rp)



Sumber: ALCo (diolah)

Adapun realisasi Belanja Negara hingga akhir tahun dengan memperhitungkan realisasi sampai dengan Bulan Juni 2024 diproyeksikan sebesar Rp31.297,71 miliar atau 97,75 persen dari Pagu. Proyeksi tersebut terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp10.285,83 miliar dan proyeksi TKD sebesar Rp21.011,88 miliar. Pada Triwulan IV Belanja Negara diproyeksikan masih memiliki tren penyaluran yang lebih tinggi seiring dengan optimalisasi anggaran dan pelaksanaan Langkah-langkah Akhir Tahun.

2.1.2.4. Rekomendasi Kebijakan Belanja

Berdasarkan capaian kinerja Belanja Negara di Provinsi Lampung s.d. 30 Juni 2024, rekomendasi kebijakan yang diberikan antara lain:



SUPLEMEN 2.2

Artikel Ilmiah KUR



Kanwil DJPb Provinsi membuka kesempatan bagi Mahasiswa Magang Kementerian Keuangan untuk dapat memperoleh pengalaman praktis dan mendalam terkait pelaksanaan tugas di Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai Regional Chief Economist pada periode Maret s.d. Mei 2024. Salah satu output yang dihasilkan berupa kajian ilmiah sebagai berikut:

Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Kapasitas UMKM di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh : Ahmad Firgi Mahrezi (Mahasiswa Universitas Brawijaya)
Pembimbing : Gwen Adhitya Amalkhan (Kepala Seksi PPA II C, Kanwil DJPb Provinsi Lampung)

ABSTRAK :

Penelitian bertujuan untuk membuktikan apakah pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung, dengan fokus pada perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan data yang diperoleh dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Lampung dan situs resmi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran KUR, baik konvensional maupun syariah, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kapasitas UMKM tetapi terdapat perbedaan manfaat yang diberikan antara KUR syariah dan konvensional. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan instansi terkait dalam mengevaluasi kebijakan KUR serta memperkuat inklusi keuangan syariah untuk keberlanjutan UMKM di Indonesia.



Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik untuk melihat signifikansi antar variabel dengan sumber data berasal dari data Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Lampung dan website pemerintah daerah Provinsi Lampung, dimana data ini berisi data nasabah UMKM penerima KUR konvensional maupun syariah. Dalam penelitian ini digunakan 3 komponen kapasitas UMKM yang akan diuji yaitu tingkat penjualan, tingkat keuntungan, dan jumlah tenaga kerja menggunakan aplikasi SPSS. Didapatkan model regresi seperti berikut:

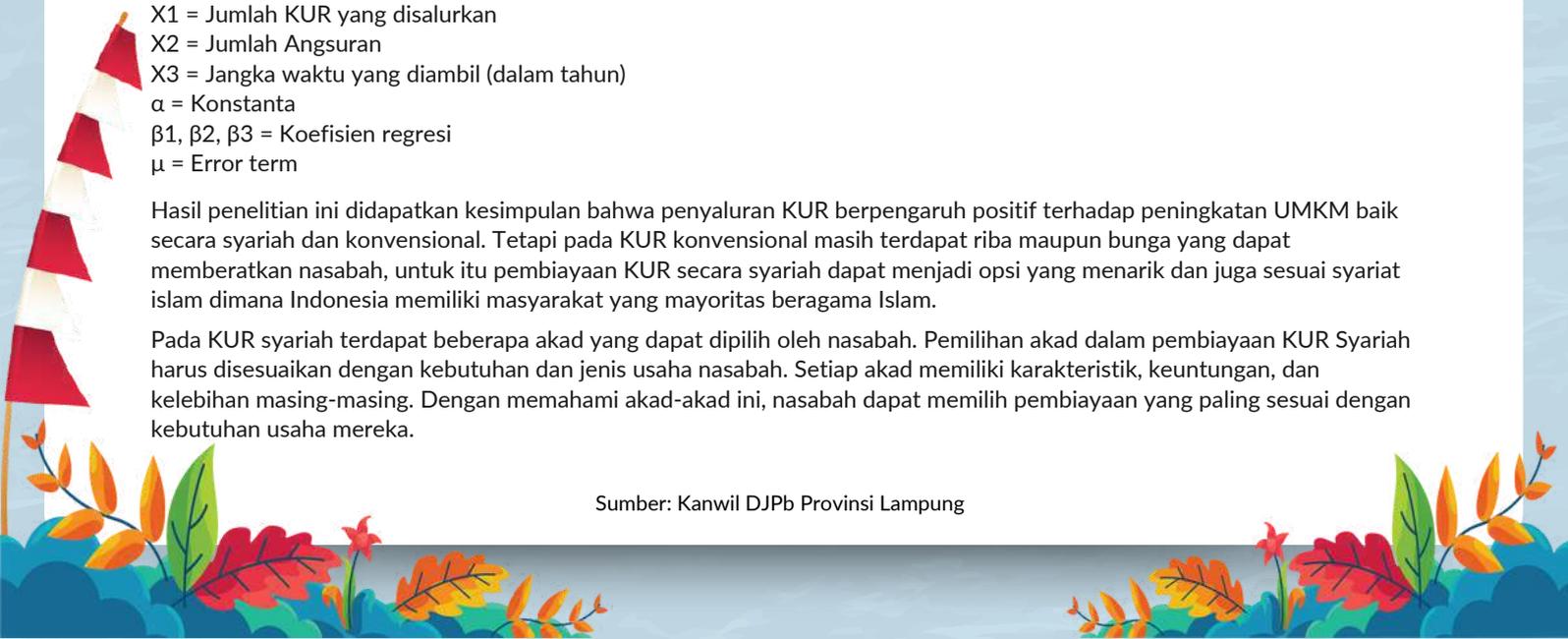
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots + \mu$$

Keterangan:

- Y = Kapasitas UMKM (pendapatan, tenaga kerja, penjualan).
- X1 = Jumlah KUR yang disalurkan
- X2 = Jumlah Angsuran
- X3 = Jangka waktu yang diambil (dalam tahun)
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- μ = Error term

Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa penyaluran KUR berpengaruh positif terhadap peningkatan UMKM baik secara syariah dan konvensional. Tetapi pada KUR konvensional masih terdapat riba maupun bunga yang dapat memberatkan nasabah, untuk itu pembiayaan KUR secara syariah dapat menjadi opsi yang menarik dan juga sesuai syariat islam dimana Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Pada KUR syariah terdapat beberapa akad yang dapat dipilih oleh nasabah. Pemilihan akad dalam pembiayaan KUR Syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis usaha nasabah. Setiap akad memiliki karakteristik, keuntungan, dan kelebihan masing-masing. Dengan memahami akad-akad ini, nasabah dapat memilih pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.



- a. Kementerian/Lembaga dan unit vertikalnya agar melakukan perencanaan dan eksekusi sesegera mungkin dalam hal terdapat penambahan pagu melewati Triwulan II, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan RPD, menyiapkan strategi mitigasi dan melakukan monitoring progres pekerjaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
- b. Kementerian/Lembaga c.q. Eselon I terkait agar menerbitkan SK penetapan lokasi penerima bantuan sejak awal tahun agar satker memiliki waktu untuk verifikasi penerima bantuan dan eksekusi kegiatan guna mengakselerasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
- c. Pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga teknis terkait agar meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan penggunaan alokasi DAK Fisik serta melakukan koordinasi secara intensif dan dua arah guna menunjang efektivitas dan mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik.
- d. Pemerintah Daerah bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar berkolaborasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) guna mendorong efektivitas penyaluran DBH CHT.
- e. Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu bersinergi dengan Pendamping Desa dalam rangka membangun sistem pengendalian internal desa guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Di samping itu, adanya payung hukum yang mengatur terkait kewajiban pelaporan oleh Pendamping Desa kepada Pemerintah Daerah juga diperlukan guna menunjang efektivitas pengawasan Dana Desa pada level Pemerintah Daerah.

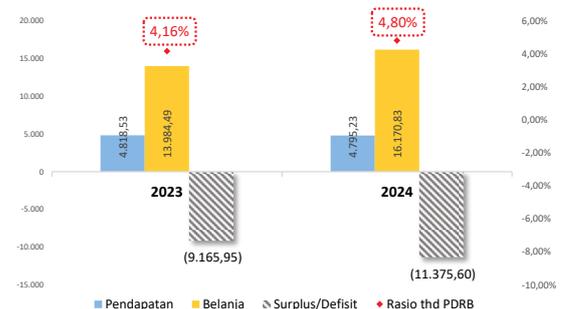
2.1.3. Surplus/Defisit APBN

Hingga Juni 2024, posisi APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp11.375,60 miliar, atau secara tahunan melebar 24,11 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun lalu. Melebarnya defisit ini dipengaruhi oleh capaian realisasi Belanja Negara

yang terakselerasi cukup tinggi, namun di sisi Penerimaan Negara mengalami perlambatan.

Rasio defisit APBN terhadap PDRB pada akhir Juni 2024 dihitung sebesar 4,80 persen. Rasio ini mengalami peningkatan dari rasio pada akhir Juni 2023 yang tercatat sebesar 4,16 persen, seiring dengan meningkatnya nominal realisasi Belanja Negara. Hal ini menunjukkan bahwa APBN di Lampung bekerja terus keras secara ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Grafik 2.28 Surplus/Defisit APBN Regional Lampung s.d. 30 Juni 2023-2024 (miliar, Rp)



Sumber: OM-SPAN (diolah)

2.1.4. Capaian Output Strategis APBN

Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan nasional guna membangun fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 disusun dengan mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam 7 Program Prioritas Nasional (PN). Sejalan dengan kerangka tersebut, APBN Tahun 2024 dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung program prioritas nasional.

Sampai dengan Juni 2024, Belanja Negara pada APBN di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Program PN secara total dialokasikan sebesar Rp2.492,95 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp1.363,75 miliar atau 54,70 persen dari alokasi. Atas dana yang telah terealisasi tersebut, telah menghasilkan capaian output strategis masing-masing Program PN yang tersebar di berbagai sektor pembangunan di daerah. Tabel 2.9 menyajikan tiga output strategis berdasarkan alokasi pagu terbesar pada setiap Program PN.

Tabel 2.9 Pagu, Realisasi, dan Capaian Output Program Prioritas Nasional s.d. 30 Juni 2024 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Juni	% Real	Progres Capaian Output s.d. Juni	
				Volume	Satuan
<i>PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</i>					
Prasarana Pengembangan Kawasan	165,47	112,42	67,94%	104	km ²
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	124,57	23,28	18,69%	116	Unit
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	18,31	6,60	36,05%	969,18	Hektar
<i>PN 2 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</i>					
PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	39,04	7,88	20,17%	47.022	Hektar
Pelayanan Publik kepada masyarakat	9,97	1,63	16,30%	13.434	Bidang
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2,03	0,66	32,62%	8	Kebijakan
<i>PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</i>					
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	188,41	107,97	57,31%	39.242	Orang
Pelatihan Bidang Pendidikan	100,80	21,55	21,38%	3.589	Orang
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	57,40	36,05	62,81%	15	Unit
<i>PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</i>					
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25,53	10,46	40,98%	6513	Orang
Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Profesional Melayani	10,78	7,51	69,65%	3	Layanan
KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	9,89	6,55	66,18%	5	Lembaga
<i>PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</i>					
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	220,19	69,36	31,50%	352,95	km
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	44,71	14,32	32,03%	2.864,29	m
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	42,64	0,37	0,87%	0,07	SR
<i>PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</i>					
Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	36,28	10,32	28,44%	460	Hektar
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa Bibit	7,79	3,81	48,88%	586.500	Unit
OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2,07	0,71	34,31%	3	Unit
<i>PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</i>					
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	625,84	592,58	94,69%	125	Lembaga
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	191,95	134,59	70,12%	4.401	Laporan
Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	12,96	4,12	31,79%	3.193	Lembaga
				28	Unit

Sumber: Direktorat PA DJPb (diolah)

2.2. PELAKSANAAN APBD

APBD tahun 2024 menargetkan pendapatan agregat regional Lampung yang naik 1,76 persen menjadi Rp32.262,05 miliar dibanding APBD-P tahun 2023. Hal ini seiring dengan peningkatan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebagai sumber utama pendapatan daerah di regional Lampung. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan naik 3,90 persen, demikian pula Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan naik 2,47 persen. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 3,65 persen di angka Rp8.125,39 miliar dan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah turun 4,01 persen menjadi Rp199,58 miliar. Meski PAD ditargetkan turun namun target Retribusi Daerah naik 356,95 persen.

Hal ini terkait adanya pengalihan pembukuan pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah dimana tahun sebelumnya dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di sisi lain, APBD tahun 2024 mengalokasikan Belanja sebesar Rp32.343,51 miliar yang sedikit menurun sebesar 0,05 persen dibanding pada alokasi APBD-P tahun 2023. Penurunan alokasi Belanja Daerah khususnya terjadi pada Belanja Modal; beberapa komponen Belanja Operasi berupa Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Subsidi; serta komponen Belanja Transfer yang berupa Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 2.10 I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2023			TA 2024			%Growth (2023-2024)	
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	31.702,97	10.915,10	34,43	32.262,05	13.038,93	40,42	1,76	19,46
PAD	8.433,08	2.626,34	31,14	8.125,39	2.546,94	31,35	(3,65)	(3,02)
Pendapatan Transfer (Pusat)	21.431,18	7.745,86	36,14	22.265,96	9.890,11	44,42	3,90	27,68
Transfer Antar daerah	1.630,79	536,43	32,89	1.671,12	594,00	35,54	2,47	10,73
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	207,91	6,48	3,12	199,58	7,88	3,95	(4,01)	21,66
BELANJA DAERAH	32.358,72	9.773,93	30,20	32.343,51	10.930,06	33,79	(0,05)	11,83
Belanja Operasi	22.600,15	7.631,64	33,77	22.965,31	8.220,10	35,79	1,62	7,71
Belanja Pegawai	11.791,05	5.138,73	43,58	12.679,89	5.249,39	41,40	7,54	2,15
Belanja Barang dan Jasa	8.858,81	2.264,54	25,56	8.216,82	2.380,56	28,97	(7,25)	5,12
Belanja Bunga	53,52	26,26	49,07	45,49	14,03	30,84	(15,02)	(46,60)
Belanja Subsidi	6,95	0,69	9,87	4,73	0,65	13,77	(31,85)	(4,84)
Belanja Hibah	1.837,55	193,69	10,54	1.991,11	571,35	28,69	8,36	194,98
Belanja Bantuan Sosial	52,26	7,72	14,77	27,27	4,12	15,11	(47,82)	(46,61)
Belanja Modal	4.497,65	612,54	13,62	4.041,42	683,81	16,92	(10,14)	11,64
Belanja Modal	4.497,65	612,54	13,62	4.041,42	683,81	16,92	(10,14)	11,64
Belanja Tidak Terduga	79,11	9,14	11,55	124,16	26,76	21,55	56,94	192,80
Belanja Tidak Terduga	79,11	9,14	11,55	124,16	26,76	21,55	56,94	192,80
Belanja Transfer	5.181,81	1.520,62	29,35	5.212,61	1.999,39	38,36	0,59	31,49
Belanja Bagi Hasil	1.747,66	618,34	35,38	1.853,24	689,05	37,18	6,04	11,43
Belanja Bantuan Keuangan	3.434,15	902,27	26,27	3.359,37	1.310,34	39,01	(2,18)	45,23
SURPLUS/ (DEFISIT)	-655,75	1.141,18	(174,03)	-81,46	2.108,87	(2.588,92)	(87,58)	84,80
PEMBIAYAAN	655,75	8,11	1,24	81,45	112,57	138,21	(87,58)	1.288,70
Penerimaan Pembiayaan	1.008,92	206,54	20,47	483,58	209,94	43,41	(52,07)	1,65
Pengeluaran Pembiayaan	353,17	198,43	56,18	402,13	97,37	24,21	13,86	(50,93)
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	0,00	1.149,28		(0,01)	2.221,44		900,00	93,29

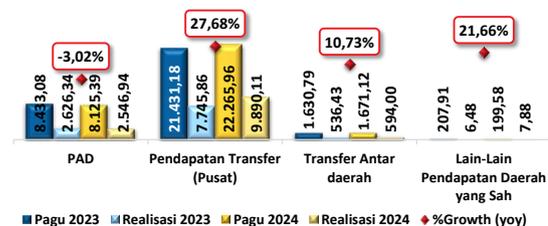
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1. Pendapatan Daerah

Hingga 30 Juni 2024, realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung mencapai Rp13.038,93 miliar, atau sebesar 40,42 persen dari target APBD. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 19,46 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini terutama didorong oleh peningkatan dalam beberapa komponen utama pendapatan daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencatat pertumbuhan paling signifikan, yaitu sebesar 27,68 persen (yoy). Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami peningkatan sebesar 10,73 persen (yoy). Sumber pendapatan lain yang menunjukkan kinerja positif adalah kategori Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang tumbuh sebesar 21,66 persen (yoy).

Grafik 2.29 Perkembangan Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) Triwulan II 2023 dan 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Namun, berbeda dengan komponen pendapatan lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kontraksi sebesar 3,02 persen (yoy). Meskipun secara nominal terjadi penurunan, persentase realisasi PAD terhadap target masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun PAD mengalami penurunan, efektivitas pencapaian target PAD menunjukkan perbaikan. Perbandingan pagu dan realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II 2023 dan 2024 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 2.29.

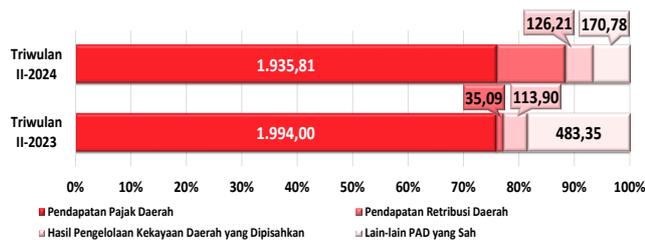


2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hingga 30 Juni 2024, PAD Lampung tercatat sebesar Rp2.546,94 miliar atau 31,35 persen dari target. Secara nominal capaian PAD pada akhir Triwulan II-2024 berkontraksi 3,02 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini juga secara signifikan mengurangi kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Pada Triwulan II-2024, kontribusi PAD menurun 4,53 poin dibandingkan dengan Triwulan II-2023 menjadi 19,53 persen.

Terkontraksinya PAD di Triwulan II-2024 terjadi seiring dengan melemahnya kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 2,92 persen (yoy), sementara Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan penurunan yang lebih tajam, yaitu sebesar 64,67 persen (yoy).

Grafik 2.30. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Meski demikian, di tengah kontraksi yang terjadi, terdapat perkembangan positif pada beberapa komponen PAD lainnya yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Pendapatan Retribusi Daerah menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan, meningkat hingga 795,25 persen (yoy). Kondisi ini juga berdampak pada kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD meningkat tajam, dari hanya 1,34 persen pada Triwulan II-2023 menjadi 12,33 persen pada Triwulan II-2024. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,81 persen (yoy) yang juga menguatkan kontribusinya terhadap PAD di angka 4,96 persen dari sebelumnya yang sebesar 4,34 persen.

Di sisi lain, meskipun Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan nominal, kontribusinya terhadap total PAD berhasil meningkat 0,08 persen,

dan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PAD di regional Lampung, dengan kontribusi sebesar 76,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat penurunan, Pajak Daerah masih merupakan penyumbang utama bagi pendapatan daerah, yang mencerminkan stabilitas dalam penerimaan pajak sebagai komponen penting dari PAD. Perbandingan komposisi PAD secara total pada regional Lampung Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 dapat dilihat pada grafik 2.30.

2.2.1.1.1. Pajak Daerah

Secara nominal, Pendapatan Pajak Daerah regional Lampung per 30 Juni 2024 termoderasi 2,92 persen (yoy) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp1.935,81 miliar, atau hanya mencapai 40,89 persen dari target yang telah ditetapkan. Pajak Daerah tetap menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi terhadap PAD mencapai 76,01.

Pada Triwulan II-2024, mayoritas komponen pendapatan Pajak Daerah mengalami kontraksi kecuali Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berhasil mencatatkan pertumbuhan. Pajak Air Tanah mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,56 persen (yoy), diikuti oleh Pajak Hotel dengan pertumbuhan 17,77 persen (yoy). Banyaknya festival kuliner yang diadakan dan dibukanya hotel berbintang serta tempat wisata baru pada Triwulan II-2024 telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya secara kuartalan maupun tahunan (sumber: BPS Provinsi Lampung). Peningkatan aktivitas di sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner di Lampung ini membawa dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah melalui berbagai jenis pajak. Keterkaitan antara peningkatan jumlah pengunjung, aktivitas promosi, dan kebutuhan operasional usaha dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah menunjukkan bagaimana dinamika ekonomi lokal dapat mempengaruhi penerimaan pajak secara komprehensif.

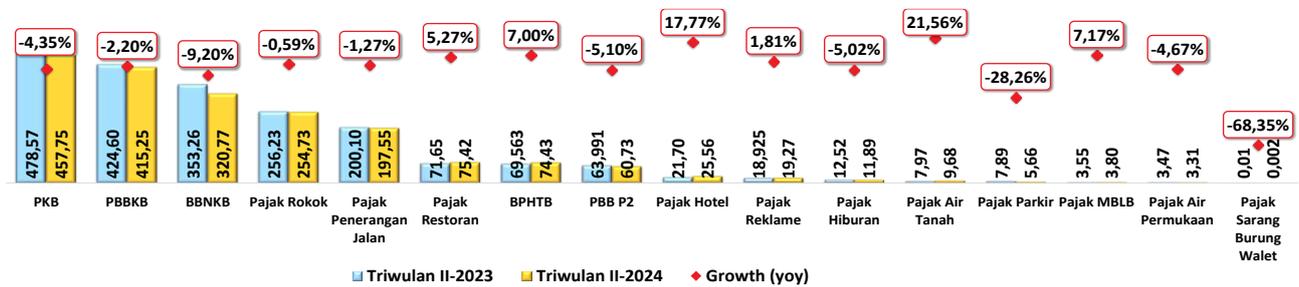




Lebih lanjut, meski mengalami penurunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi tumpuan utama pendapatan Pajak Daerah di regional Lampung dan menduduki peringkat 3 jenis pajak terbesar di regional Lampung dengan kontribusi terhadap pendapatan Pajak Daerah masing-masing mencapai 21,65 persen (Pajak Kendaraan Bermotor), 21,29 persen (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan 17,72 persen (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Dengan

dukungan adanya peningkatan mutu layanan pembayaran Pajak Daerah, seperti penyediaan *platform* pembayaran digital serta pemanfaatan 277 e-SamDes sebagai inovasi layanan Pemerintah Provinsi Lampung berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diharapkan dapat meningkatkan capaian target pajak Daerah di regional Lampung. Perbandingan realisasi per jenis Pajak Daerah Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 dapat dilihat pada grafik 2.31.

Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

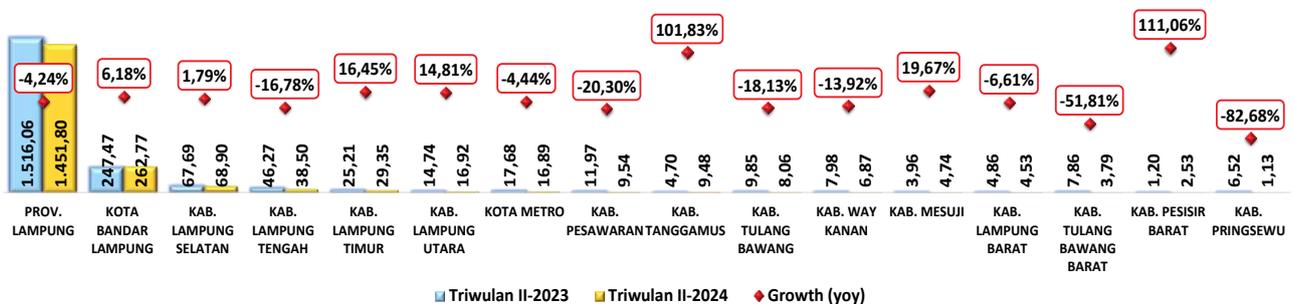


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Secara spasial, Pemerintah Daerah dengan nominal realisasi pendapatan Pajak Daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai Rp1.451,80 miliar atau 43,41 persen dari target. Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat menjadi penyumbang Pajak Daerah tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp262,77 miliar atau 47,46 persen yang juga

merupakan Pemda dengan tingkat ketercapaian target Pendapatan Pajak Daerah tertinggi. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi dicapai oleh Kab. Pesisir Barat yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 111,06 persen. Realisasi Pajak Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dan pertumbuhannya Triwulan II-2024 dapat dilihat pada grafik 2.32.

Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada Triwulan II-2024 di regional Lampung secara nominal mencatat

pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 795,25 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Pendapatan dari Retribusi Daerah



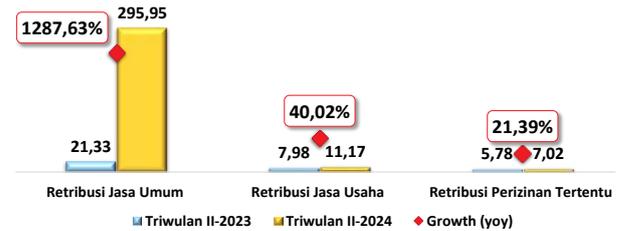
mencapai Rp314,14 miliar, yang setara dengan 38,58 persen dari target APBD tahun 2024.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Jasa Umum, yang berhasil menyumbang Rp295,95 miliar atau 94,21 persen dari total realisasi Retribusi Daerah. Pertumbuhan signifikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh pengalihan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kini dikategorikan sebagai bagian dari Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, pendapatan ini dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Perubahan kategori Retribusi daerah ini menunjukkan adanya upaya untuk lebih mengintegrasikan dan mengelola sumber pendapatan daerah secara lebih efektif, yang diharapkan akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendanaan daerah. Dampak dari pengalihan ini diharapkan mampu menciptakan struktur pendapatan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, dukungan terbesar dalam pendapatan Retribusi Jasa Layanan Umum, yaitu sebesar 89,56 persen, berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas BLUD di Provinsi Lampung bergerak di sektor kesehatan, meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, serta Laboratorium Kesehatan Daerah. Hingga 30 Juni 2024, realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai Rp281,36 miliar. Perbandingan realisasi per jenis Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.33.

Grafik 2.33. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, Pemerintah Daerah dengan realisasi penerimaan retribusi Daerah terbesar adalah Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp152,22 miliar atau berkontribusi sebesar 48,45 persen dari total realisasi Retribusi Daerah di regional Lampung. Sedangkan Kota Metro mencatatkan persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah terbesar dibanding target yaitu sebesar 57,60 persen. Perbandingan realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.34.

Grafik 2.34. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.1.3. Rasio Pajak Daerah (Local Tax Ratio)

Rasio Pajak Daerah merupakan rasio antara pajak daerah (total pajak daerah dan retribusi daerah/PDRD) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). *Local Tax Ratio* digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

perpajakan dalam perekonomian di daerah. Perbandingan *Local Tax Ratio* Regional Lampung Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 yang disajikan dalam tabel 2.11.

Tabel 2.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024

Komponen (miliar Rupiah)	Triwulan II-2023	Triwulan II-2024
Pendapatan Pajak Daerah	1.994,00	1.935,81
Pendapatan Retribusi Daerah	35,09	314,14
Total Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	2.029,09	2.249,95
PDRB s.d. Triwulan II (ADHB)	220.373,65	236.784,89
Local Tax Ratio (Persen)	0,92%	0,95%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Rasio pajak daerah di regional Lampung pada Triwulan II-2024 masih jauh dari ideal (kurang dari 3 persen), yaitu sebesar 0,95 persen. Rasio Pajak Daerah yang rendah menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi terhadap PDRB juga masih sangat rendah. Kondisi ini menandakan adanya ketergantungan yang tinggi pada pendanaan dari luar komponen PDRD.

Meskipun demikian, rasio ini menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Triwulan II-2023, yang tercatat sebesar 0,92 persen. Peningkatan ini selaras dengan kinerja PDRD yang tumbuh positif mencapai 10,88 persen (*yoy*) serta peningkatan PDRB sebesar 7,45 persen (*yoy*).

Lebih lanjut, rendahnya *Local Tax Ratio* mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PDRD yang belum dioptimalkan sehingga realisasinya masih jauh dari target. Untuk itu perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan seperti memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan pembayaran, dan mengurangi kebocoran penerimaan. Strategi ini akan membantu meningkatkan pendapatan PDRD sehingga Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dapat mendekati atau mencapai tingkat ideal.

Selain itu, dilihat dari sisi distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, terdapat ketidakseimbangan antara porsi kontribusi lapangan usaha dengan penerimaan pajak. Sektor pertanian berperan besar dalam menggerakkan ekonomi Lampung yaitu sebesar 29,04 persen, namun sumbangsih sektor pertanian pada penerimaan pajak dan retribusi daerah amat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan industrialisasi berbasis hilirisasi sektor pertanian. Hal ini penting mengingat sektor

industri pengolahan, yang saat ini menjadi kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Lampung dengan porsi sebesar 17,66 persen, dapat menjadi sektor yang diandalkan dalam memperkuat basis pendapatan daerah melalui pengembangan lebih lanjut dan peningkatan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian.

2.2.1.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Grafik 2.35. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

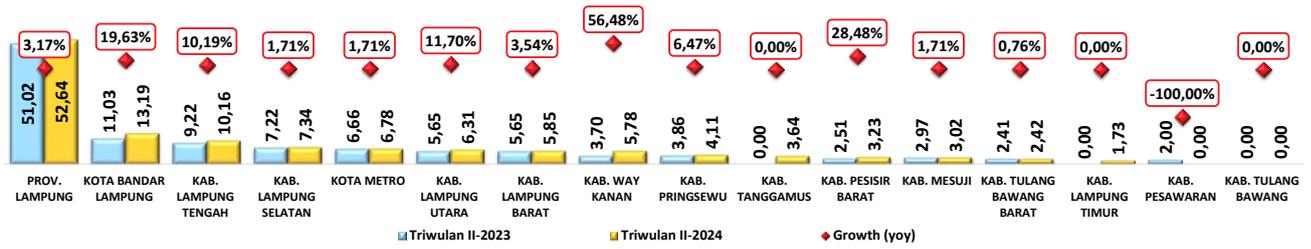


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seluruh Pemerintah Daerah di regional Lampung pada Triwulan II-2024 tumbuh 10,81 persen (*yoy*) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp126,21 miliar. Realisasi ini masih jauh dari target APBD 2024 yaitu hanya mencapai 18,07 persen dan seluruhnya berasal dari deviden atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Triwulan II-2024 dan Triwulan II-2024 di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.35.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar secara nominal dicapai oleh Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar Rp52,64 miliar. Sedangkan pencapaian target tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Tengah yang bahkan melebihi target mencapai 126,02 persen atau sebesar Rp10,16 miliar. Sementara itu, Kab. Way Kanan mencatatkan pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 56,48 (*yoy*) dengan realisasi sebesar Rp5,78 miliar. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.36.

Grafik 2.36. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

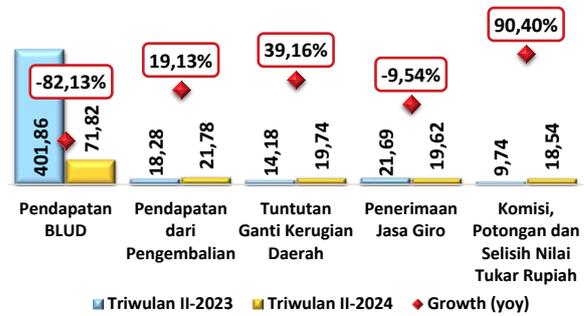
2.2.1.1.5. Lain-Lain PAD yang Sah

Total realisasi Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADyS) di regional Lampung dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan tren menurun meski beberapa jenis LLPADyS juga menunjukkan pertumbuhan. Realisasi penerimaan dari LLPADyS pada Triwulan II-2024 berkontraksi 64,67 persen (yoy). Kondisi ini sekaligus menurunkan kontribusinya terhadap PAD menjadi hanya 6,71 persen. Porsi terbesar (42,05 persen) pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan BLUD yang mencapai Rp71,82 miliar yang meski realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini disebabkan beberapa Pemda telah mengalihkan pencatatan Pendapatan BLUD dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi pendapatan Retribusi Daerah.

Beberapa komponen LLPADyS juga mengalami pertumbuhan antara lain Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Hasil penjualan Aset daerah yang Tidak Dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, serta Pendapatan dari Pengembalian. Grafik 2.37 berikut

menggambarkan perkembangan realisasi LLPADyS Triwulan II tahun 2023 dan 2024 pada 5 jenis LLPADyS dengan kontribusi tertinggi di regional Lampung.

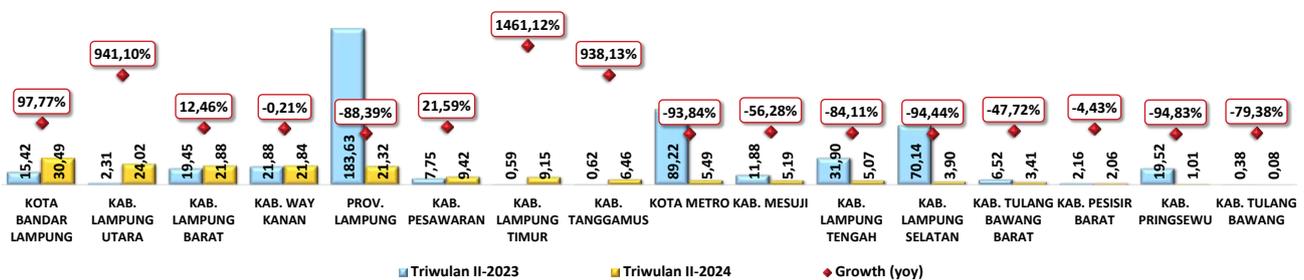
Grafik 2.37. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Dilihat secara spasial, realisasi Lain-lain PAD yang sah tertinggi secara nominal dicapai Kota Bandar Lampung dengan realisasi sebesar Rp30,49 miliar. Realisasi lain-lain PAD yang sah masing-masing Pemda di regional Lampung Triwulan II 2023 dan Triwulan II-2024 sebagaimana grafik 2.38.

Grafik 2.38. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pada total target pendapatan seluruh pemerintah daerah di regional Lampung tahun 2024, porsi terbesar dimiliki oleh pendapatan transfer yang

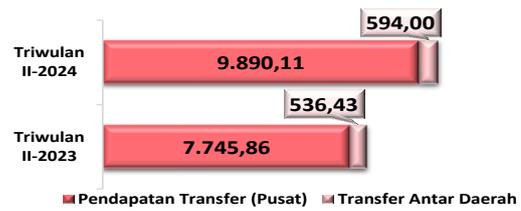
terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) dan Transfer Antar Daerah yaitu sebesar 80,41 persen. Dari nilai tersebut, kontribusi Transfer Pemerintah Pusat sendiri mencapai 75,85 persen yang mengindikasikan masih cukup tingginya

ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kebijakan TKD pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal di daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah diharapkan semakin kreatif dalam menciptakan pembiayaan alternatif ataupun mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini disebabkan Pemerintah Pusat beberapa tahun terakhir cenderung secara bertahap mengurangi alokasi dana transfer terutama komponen yang menggunakan alokasi perhitungan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan melakukan redesign seperti halnya kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai tahun 2023 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*).

Realisasi Pendapatan Transfer total secara nominal pada Triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, baik pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun pada Pendapatan Transfer Antar Daerah. Hingga 30 Juni 2024, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di regional Lampung tercatat sebesar Rp 9.890,11 miliar atau 44,42 persen dari pagu, tumbuh 27,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga masih menjadi kontributor utama yaitu sebesar 75,85 persen terhadap total Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Angka ketergantungan ini kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,96 persen.

Terdapat perbedaan realisasi antara TKD (APBN) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (APBD) yang disebabkan oleh perbedaan sistem aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya *lag* dalam penyajian informasi keuangan daerah. Pada dasarnya, TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat secara keseluruhan menjadi bagian dari pendapatan daerah dalam komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan II-2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.39.

Grafik 2.39. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

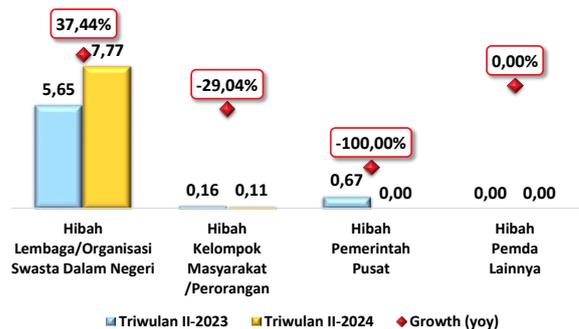


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tumbuh positif seiring dengan pertumbuhan di seluruh komponennya, terutama komponen Dana Desa yang tumbuh signifikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya *redesign* penyaluran Dana Desa yang menjadi hanya 2 tahap dimana di tahun sebelumnya untuk dana Desa Reguler disalurkan dalam 3 tahap. Hal ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa.

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 2.40. Perkembangan Realisasi LLPDiS Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Hingga 30 Juni 2024, realisasi LLPDiS tercatat sebesar Rp7,88 miliar, tumbuh 21,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Namun, hingga periode ini realisasi LLPDiS sepenuhnya berasal dari Hibah yang terdiri atas Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri serta Hibah dari Kelompok Masyarakat. Sedangkan kelompok Hibah berupa Hibah dari Pemerintah Pusat dan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya juga belum mencatatkan realisasi. Sebagaimana alokasi Belanja Hibah Pemerintah Pusat pada APBN tahun 2024



SUPLEMEN 2.3

Success Story: Pemanfaatan Dana Desa pada Desa Bumi Daya

Desa Bumi Daya, Lampung Selatan



Budidaya porang 4 Ha oleh PMI purna



Penyediaan Sarpras PAUD Desa

Desa Bumi Daya terletak di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Berbagai prestasi telah diukir oleh desa ini, antara lain mencapai status *Zero Stunting*, juara 1 Lomba Desa tingkat Provinsi Lampung 2024 dan maju mewakili tingkat regional. Selain itu, Desa Bumi Daya memiliki bermacam inovasi seperti Pelayanan PMI Purna dan *Smart Village* juga program unggulan Desa Inklusi Keuangan dan Desa Nabung Saham

Pada tahun 2024, alokasi Dana Desa yang diterima desa ini sebesar Rp1.435.252.000,- dengan realisasi senilai Rp902.709.400 per Juli 2024. Sebanyak 67,39 persen dari nilai penyaluran tersebut telah dilaporkan penggunaannya.

Kebermanfaatan penggunaan dana desa ini tercermin dari pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilakukan dengan besaran realisasi sebanyak Rp114,82 juta atau 18,87 persen dari total penyerapan dana desa yang telah dilaporkan. Pemerintah Desa telah melakukan normalisasi embung pertanian yang salah satu manfaatnya adalah memastikan ketersediaan air untuk mengairi lahan pertanian. Kegiatan ini sejalan dengan latar belakang pekerjaan sebagian besar warganya (23,2 persen) sebagai petani.

Selain itu pemberdayaan masyarakat desa juga menyasar para purna PMI. Mereka didukung untuk berperan serta mengubah perekonomian desa dengan berbagai bisnis, di antaranya budidaya ikan air tawar, abon lele, budidaya porang, jahe merah, dan lain-lain. Harapan ke depannya melalui berbagai produk yang dikembangkan di Desa Bumi Daya dapat memenuhi target komoditas ekspor.



Kolaborasi Sosialisasi Desa Inklusi Keuangan dengan OJK dan BEI

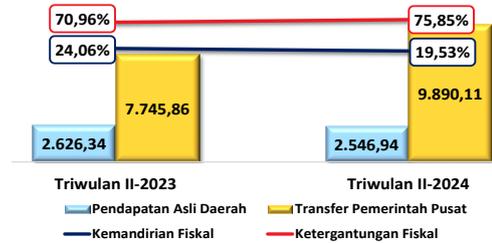
hanya Kabupaten Lampung Tengah yang mendapatkan alokasi Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,87 miliar berupa Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat. Atas alokasi ini, Kabupaten Lampung Tengah telah mencatat sebagai target Pendapatan Hibah pada APBD 2024. Pertumbuhan LLPdYS yang signifikan dan fokus pada hibah dari sektor swasta dan masyarakat menunjukkan peningkatan kapasitas dan kerjasama daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan. Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Triwulan II-2023 dan 2024 tergambar dalam grafik 2.40.

2.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Rasio kemandirian fiskal daerah regional Lampung secara agregat pada Triwulan II-2024 mengalami penurunan (yoy) seiring dengan melemahnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Pada Triwulan II-2024, secara agregat, Kemandirian Fiskal regional Lampung sebesar 19,53 persen atau masuk dalam kategori belum mandiri. Sejalan dengan itu, rasio pendapatan transfer yang menggambarkan ketergantungan fiskal meningkat dari 70,96 persen pada Triwulan II-2023 menjadi 75,85 persen seiring dengan meningkatnya pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Perkembangan Realisasi PAD dan TPP (miliar rupiah) dibandingkan dengan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal (persen) Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 dilihat pada grafik 2.41.

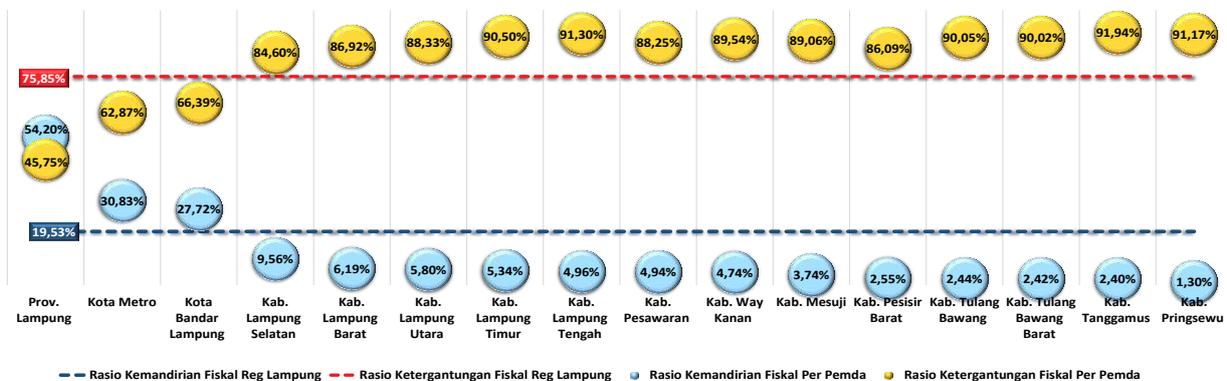
Grafik 2.41. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal (persen) Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Secara spasial, berdasarkan perbandingan realisasi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah, Provinsi Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi, yaitu 54,20 persen (kategori mandiri). Sebaliknya, Kabupaten Pringsewu mencatat rasio kemandirian terendah, yaitu 1,30 persen. Sedangkan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masuk pada kategori menuju kemandirian dengan rasio kemandirian pada rentang 25-50 persen. Ketergantungan terhadap TPP juga bervariasi, di mana Kabupaten Tanggamus memiliki angka ketergantungan tertinggi, yaitu 91,94 persen. Di sisi lain, Provinsi Lampung mencatat angka ketergantungan terendah terhadap TPP, yaitu 45,75 persen. Rasio kemandirian daerah Triwulan II-2024 dan komposisi realisasi pendapatan masing-masing Pemda di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.42 dan 2.43.

Grafik 2.42. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Triwulan II Tahun 2024 (persen)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)



Grafik 2.43. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Triwulan II Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.5. Prognosis/Outlook Pendapatan

Ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu selama delapan tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini juga tidak lepas dari adanya pelambatan ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi perlahan tumbuh positif seiring dengan program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah dan meredanya pandemi Covid-19. Hingga akhir tahun 2024, berdasarkan tren ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu selama delapan tahun terakhir, persentase komposisi dan pertumbuhan target, serta ketercapaian realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II-2024, realisasi pendapatan diproyeksikan di angka 92,24 persen dengan realisasi sekitar Rp29.758,88 miliar atau tumbuh 0,08 persen dibandingkan dengan realisasi

tahun 2023. Lebih lanjut, Realisasi pendapatan dari Pajak Daerah diproyeksikan melampaui target penerimaan, mengingat pertumbuhan positif yang tetap terjaga selama dua tahun terakhir dan selalu melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah hingga akhir tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat signifikan sebesar 7,61 persen mencapai Rp719,78 miliar, seiring dengan peningkatan target Pendapatan Retribusi Daerah. Peningkatan ini disebabkan oleh pengalihan pencatatan pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah, di mana pada tahun sebelumnya pendapatan ini dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Sejalan dengan perubahan tersebut, Lain-Lain PAD yang Sah diproyeksikan tumbuh negatif sebesar 0,12 persen, dengan realisasi mencapai Rp1.310,04 miliar.

Tabel 2.12. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Terhadap Target								Proyeksi Realisasi s.d. akhir tahun 2024		Growth (yoy)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	%	(miliar rupiah)	
Pendapatan Daerah	94,62	100,54	95,51	96,21	87,77	94,08	97,32	92,03	92,24	29.758,88	0,08
PAD	94,92	100,25	85,70	89,07	80,53	89,40	97,82	86,61	86,30	7.012,33	0,15
Pajak Daerah	90,13	97,38	88,35	95,35	78,03	90,93	110,55	102,91	102,01	4.829,80	0,09
Retribusi Daerah	63,38	47,53	68,75	83,47	52,55	45,99	58,94	54,84	88,41	719,78	7,61
HPKD yg Dipisahkan	109,15	95,63	100,09	97,59	88,50	68,92	32,25	25,07	23,15	161,72	0,25
Lain-Lain PAD yang Sah	115,99	118,63	78,68	75,07	90,51	93,57	87,53	70,78	69,28	1.301,04	(0,12)
Transfer Pemerintah Pusat	95,29	92,84	93,19	90,57	82,89	97,97	99,52	95,94	95,92	21.357,51	0,05
Transfer Antar Daerah	68,90	72,00	80,98	92,37	73,91	67,87	83,07	79,30	81,07	1.354,75	0,13
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	142,54	359,93	176,27	273,94	258,59	84,09	38,83	11,01	17,18	34,29	(0,04)

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

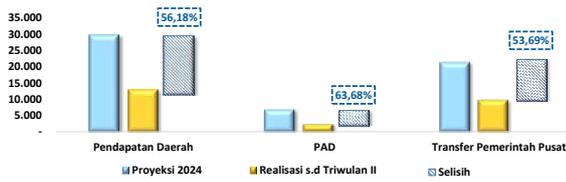
Turunnya alokasi Hibah ke Daerah pada komponen penyaluran TKD yang sangat signifikan juga mengakibatkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terutama dari komponen Hibah diproyeksikan

terkontraksi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga diproyeksikan naik sejalan dengan meningkatnya alokasi TKD secara total untuk regional Lampung. Proyeksi ketercapaian



Pendapatan sampai dengan akhir tahun 2024 disajikan pada tabel 2.12 dan grafik 2.44.

Grafik 2.44. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.6. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Kinerja realisasi Pendapatan Daerah hingga 30 Juni 2024 secara umum belum berjalan ideal. Turunnya realisasi PAD sebesar 3,02 persen telah menyebabkan melemahnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah yang mengakibatkan tingkat kemandirian fiskal regional Lampung secara agregat mengalami penurunan. Beberapa rekomendasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah di regional Lampung berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

- Meskipun beberapa kemudahan telah diterapkan dalam pembayaran pajak daerah, pada Triwulan II-2024, terjadi penurunan signifikan pada pendapatan Pajak Daerah, yang merupakan kontributor utama PAD. Diperlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan tunggakan melalui penguatan regulasi dan SDM, serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Sinergi data pajak pusat dan daerah juga harus dioptimalkan melalui Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara DJP, DJPK, dan Pemda.
- Optimalisasi teknologi informasi dalam pemungutan retribusi daerah, seperti *e-payment* dan penggunaan *parking meter*, sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kerja sama dengan sektor swasta dalam inovasi pengelolaan retribusi juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat transformasi digital.
- Untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah, optimalisasi pengelolaan aset BLUD, terutama gedung dan fasilitas kesehatan, penting dilakukan dengan penetapan tarif yang

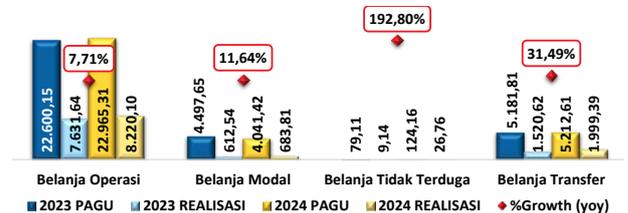
wajar dan peningkatan kualitas layanan. Kemitraan strategis dengan sektor swasta dapat mendorong pengelolaan aset yang lebih efektif.

- Realisasi komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan masih rendah, terutama dividen BUMD yang hanya mencapai 18,07 persen. Diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap investasi permanen di BUMD, penguatan struktur organisasi dan manajemen, serta perluasan usaha berbasis potensi unggulan daerah.
- Sebagai sumber utama pendapatan daerah di Regional Lampung, akselerasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sangat penting. Oleh karena itu, kepatuhan pemerintah daerah dalam penyampaian dokumen yang dipersyaratkan secara tepat waktu perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kinerja daerah terus dilakukan guna memperoleh insentif fiskal berdasarkan penilaian kinerja.

2.2.2. Belanja Daerah

Sampai dengan 30 Juni 2024, Belanja Daerah regional Lampung telah terealisasi sebesar Rp10.930,06 miliar, nilai ini mencapai 33,79 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,83 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan pagu, realisasi, dan pertumbuhan realisasi belanja per jenis belanja Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 dapat dilihat grafik 2.45.

Grafik 2.45. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan II Tahun 2023 dan 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

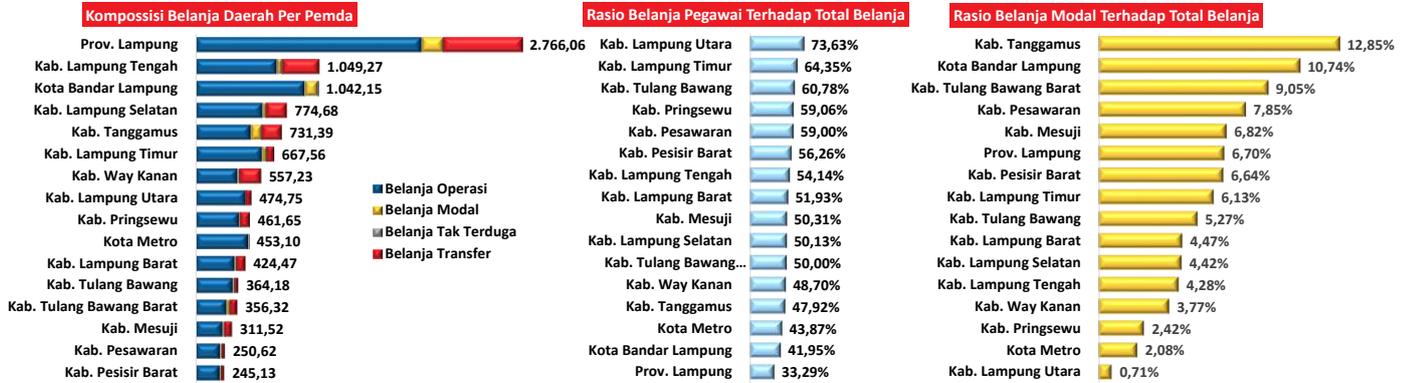
Belanja Daerah berdasarkan jenis diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan jenis belanja, agregat realisasi Belanja Daerah



Lampung masih didominasi oleh belanja operasi dengan kontribusi terhadap total realisasi belanja pada Triwulan II-2024 adalah sebesar 75,21 persen, sedikit menurun dibanding periode yang sama

tahun 2023 yang sebesar 78,08 persen. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 2.46.

Grafik 2.46. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah), Rasio Belanja Pegawai (persen), dan Rasio Belanja Modal (persen) Triwulan II-2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1.1. Belanja Operasi

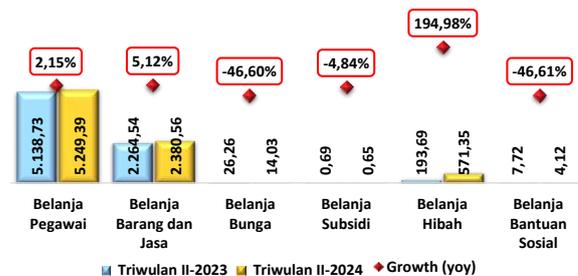
Realisasi Belanja Operasi pada 30 Juni 2024 tercatat naik 7,71 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan nominal realisasi sebesar Rp8.220,10 miliar atau 35,79 persen dari pagu. Kenaikan ini didukung oleh pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah. Sementara itu Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial mengalami kontraksi.

Komponen Belanja Pegawai masih mendominasi Belanja Operasi dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp5.249,39 miliar atau 41,40 persen dari pagu. Meski secara nominal tumbuh 2,15 persen (yoy), andil komponen Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi pada Triwulan II-2024 lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. *Share* komponen Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi pada Triwulan II-2024 sebesar 63,86 persen, sedangkan pada Triwulan II-2023 mencapai 67,33 persen. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dalam kurun waktu 5 tahun sejak ditetapkannya UU-HKPD dimaksud Pemerintah Daerah harus dapat melakukan penyesuaian alokasi Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD

tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD.

Hingga 30 Juni 2024, Belanja Barang dan Jasa secara nominal mencatatkan realisasi sebesar Rp2.380,56 miliar, tumbuh 5,12 persen (yoy). Namun demikian kontribusi Belanja Barang terhadap Belanja Operasi hanya sebesar 28,96 persen atau lebih rendah 0,71 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Grafik 2.47. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Belanja Hibah tumbuh sangat signifikan hingga 194,98 persen dan mencatatkan realisasi sebesar Rp571,35 miliar atau 28,69 persen. Pertumbuhan ini terutama disebabkan naiknya Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu kepada Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pertahanan (pada Korem/Kodim), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (pada Polda/Polres) sebagai persiapan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Anggaran Pilkada regional Lampung 2024





bersumber dari APBD Provinsi Lampung dan APBD 15 kabupaten/kota dengan skema pendanaan berbagi biaya (*cost sharing*) dengan APBN, baik berupa penyelenggaraan kegiatan, pengawasan serta dukungan pengamanan Pilkada.

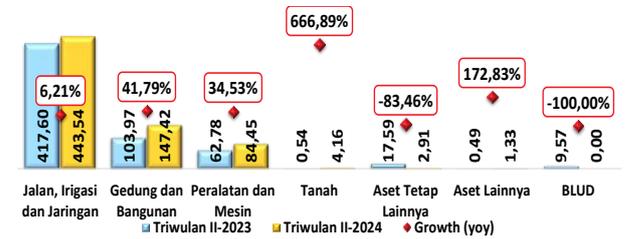
Lebih lanjut, pemda dengan rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Utara dengan rasio sebesar 73,63 persen. Sedangkan rasio terendah pada Provinsi Lampung sebesar 33,29 persen. Perbandingan Rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.47.

2.2.2.1.2. Belanja Modal

Meski mengalami penurunan pagu, realisasi Belanja Modal Daerah regional Lampung hingga 30 Juni 2024 menunjukkan kinerja positif, tumbuh 11,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Secara nominal Belanja Modal mencatatkan realisasi sebesar Rp 683,81 miliar atau 16,92 persen dari alokasi pagu 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan di hampir seluruh komponen Belanja Modal terutama Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang memberikan kontribusi terbesar. Kontribusi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan terhadap realisasi belanja modal mencapai 64,86 persen terutama pada Pengadaan jalan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp365,76 miliar. Sementara itu, Belanja Modal Aset Tetap lainnya, serta Belanja Modal BLUD mengalami penurunan bahkan beberapa belum terealisasi.

Rincian realisasi Belanja Modal Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 sebagaimana grafik 2.48.

Grafik 2.48. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Realisasi Belanja Modal secara spasial di regional Lampung menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berperan signifikan sebagai kontributor utama dalam peningkatan realisasi Belanja Modal, dengan kontribusi sebesar Rp185,26 miliar atau 27,09 persen dari total Belanja Modal. Di sisi lain, Kabupaten Tanggamus berhasil mencapai target tertinggi dalam realisasi Belanja Modal dengan ketercapaian sebesar 39,45 persen. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 dapat dilihat pada grafik 2.49.

Secara spasial, rasio realisasi Belanja Modal terhadap total belanja tertinggi juga dicapai oleh Kabupaten Tanggamus, di mana realisasi belanja modalnya menyumbang 12,85 persen dari total belanja. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Utara mencatatkan rasio terendah, dengan kontribusi belanja modal hanya sebesar 0,71 persen dari total realisasi belanjanya. Perbandingan rasio Belanja Modal terhadap realisasi Belanja daerah pada Triwulan II-2024 juga dapat dilihat pada grafik 2.46.

Grafik 2.49. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga di regional Lampung hingga akhir Triwulan II-2024 tercatat sebesar

Rp26,76 miliar, atau 21,55 persen dari alokasi yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 192,80 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Mengacu



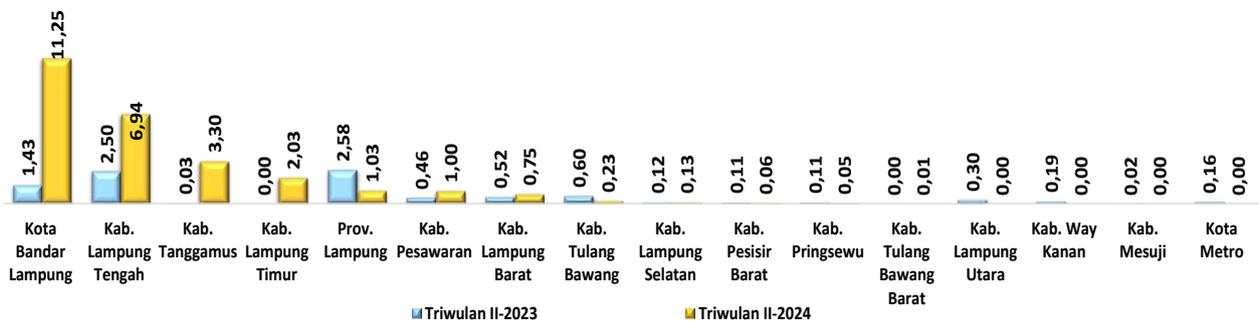


pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga tidak hanya ditujukan untuk keadaan darurat yang mendesak dan tidak terprediksi atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tetapi juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menganggarkan pengembalian pembayaran yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini dapat berupa sisa dana

tahun 2023 yang diperhitungkan dalam penyaluran TKD tahun 2024 (seperti DAK Non Fisik) dan lain sebagainya.

Secara spasial, Realisasi Belanja Tidak Terduga tertinggi dicatatkan Kota Bandar Lampung sebesar Rp 11,25 miliar. Sementara itu hingga Triwulan II-2024 masih terdapat 4 Kabupaten yang belum mencatatkan realisasi pada Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Tidak Terduga masing-masing Pemda lingkup regional Lampung Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024 sebagaimana grafik 2.50.

Grafik 2.50. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1.4. Belanja Transfer

Grafik 2.51. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

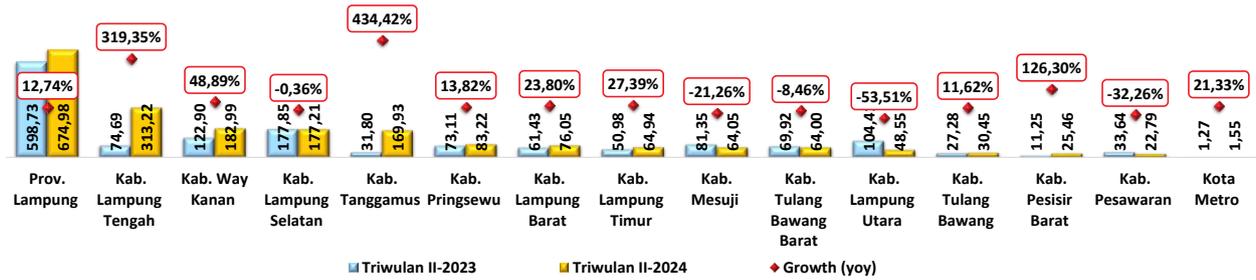
Realisasi Belanja Transfer hingga 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp1.999,39 miliar atau tercapai 38,36 persen dari pagu. Realisasi ini tumbuh 31,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya realisasi di seluruh komponen Belanja Transfer. Realisasi Belanja Transfer tertinggi berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Desa yang menyumbang 64,25 persen realisasi atau sebesar Rp1.284,64

miliar. Angka ini menunjukkan ketercapaian sebesar 48,12 persen dari alokasi pagu yang telah ditetapkan, tumbuh 43,33 persen. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Triwulan II tahun 2023 dan 2024 dan pertumbuhannya sebagaimana grafik 2.51

Secara spasial, Realisasi Belanja Transfer tertinggi dicatatkan Provinsi Lampung sebesar Rp674,98 miliar atau 38,49 persen dari pagu, tumbuh 12,74 persen (yoy). Sedangkan realisasi Belanja Transfer terendah dicatatkan Kota Metro dengan realisasi sebesar Rp1,55 miliar atau 79,29 persen dari pagu, tumbuh 21,33 persen (yoy). Kota Bandar Lampung tidak mengalokasikan belanja Transfer pada APBD tahun 2023 dan 2024. Realisasi Belanja Transfer masing-masing Pemda lingkup regional Lampung Triwulan II tahun 2023 dan 2024 sebagaimana grafik 2.52.



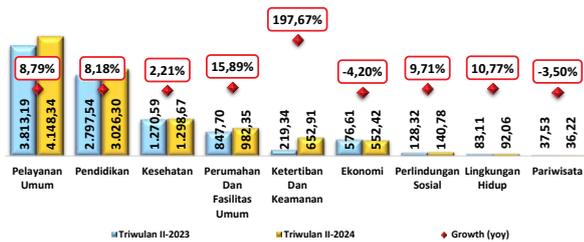
Grafik 2.52. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.2. Berdasarkan Fungsi

Grafik 2.53. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan II Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan fungsinya, Belanja Daerah terdiri atas 9 fungsi yaitu Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial. Hingga 30 Juni 2024, distribusi realisasi belanja berdasarkan fungsi menunjukkan bahwa fungsi Pelayanan Umum mencatat realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar Rp4.148,34 miliar. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 8,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.813,19 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan peningkatan sebesar 197,67 persen (yoy), yang mencapai Rp652,91 miliar. Kondisi ini juga berkaitan dengan meningkatnya belanja hibah untuk dukungan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada Kepolisian dan Kementerian Pertahanan di regional Lampung.

Di sisi lain, belanja fungsi Pariwisata memberikan kontribusi terendah dengan realisasi hanya sebesar Rp36,22 miliar, terkontraksi 3,50 persen (yoy). Realisasi belanja regional Lampung berdasarkan fungsi terdistribusi sebagaimana grafik 2.53.

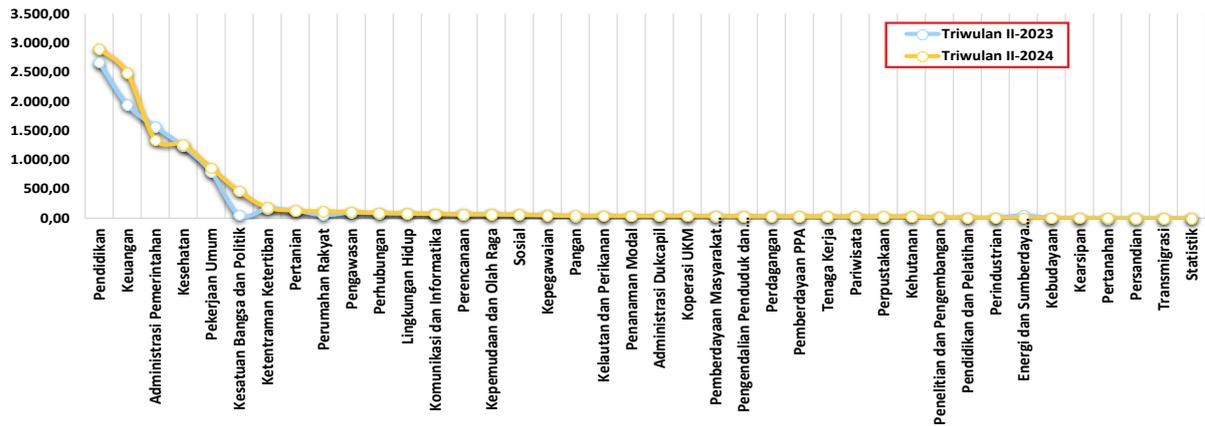
2.2.2.3. Berdasarkan Urusan

Belanja dalam APBD juga dibedakan berdasarkan urusan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih terfokus, transparan, dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.

Berdasarkan urusan, realisasi belanja regional Lampung tertinggi pada akhir Triwulan II-2024 dialokasikan untuk urusan Pendidikan, yaitu sebesar Rp2.899,47 miliar atau 26,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja Pendidikan regional Lampung secara agregat telah berupaya memenuhi *mandatory spending* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yaitu sebesar 20 persen dari keseluruhan belanja.

Sementara itu, realisasi belanja urusan Pertanian, yang merupakan sektor unggulan di Lampung, berkontribusi 1,22 persen terhadap total belanja daerah dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp132,87 miliar. Persentase yang relatif kecil ini mencerminkan tantangan dalam mengoptimalkan alokasi anggaran bagi sektor pertanian, meskipun sektor ini berperan penting dalam perekonomian daerah. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pangan regional, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani lokal dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Realisasi belanja berdasarkan urusan regional Lampung Triwulan II-2024 dapat dilihat pada grafik 2.54.

Grafik 2.54. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Triwulan II Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: Direktorat APK (diolah)

2.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

PDRB Pengeluaran dihitung berdasarkan total pengeluaran di wilayah tertentu, mencakup berbagai komponen seperti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Provinsi meliputi pengeluaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat yang terkait dengan provinsi, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah provinsi bersangkutan. Tabel 2.13 berikut menunjukkan kontribusi daerah terhadap PDRB regional Lampung dalam periode Triwulan II tahun 2023-2024.

Tabel 2.13. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II Tahun 2023 dan 2024

Komponen	Triwulan II-2023	Triwulan II-2024
Belanja Daerah (miliar rupiah)	9.773,93	10.930,06
PK-P s.d. Triwulan II ADHB (miliar rupiah)	12.580,88	13.983,00
PDRB s.d. Triwulan II ADHB (miliar rupiah)	220.373,65	236.784,89
Ratio Belanja Daerah terhadap PDRB	4,44%	4,62%
Kontribusi PK-P pada PDRB s.d. Triwulan II ADHB	5,71%	5,91%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Sampai dengan Triwulan II-2024, PDRB (Pengeluaran ADHB) Provinsi Lampung mencapai Rp236.784,89 miliar, dengan komponen PK-P sebesar Rp13.983,00 miliar, atau berkontribusi sebesar 5,91 persen dari keseluruhan PDRB. Rasio ini lebih tinggi 0,20 persen dibandingkan dengan distribusi PK-P pada Triwulan II-2023. Kondisi ini

mencerminkan kontribusi belanja pemerintah yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan belanja daerah di regional Lampung yang menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 11,83 persen (yoy) hingga akhir Triwulan II-2024. Peningkatan ini juga berdampak positif pada kenaikan rasio belanja daerah terhadap PDRB Lampung, dari 4,44 persen pada Triwulan II-2023 menjadi 4,62 persen pada Triwulan II-2024. Peningkatan rasio ini juga mengindikasikan bahwa proporsi belanja daerah terhadap keseluruhan PDRB semakin besar, serta menunjukkan peran yang semakin aktif dari pemerintah daerah dalam perekonomian regional, baik melalui pengeluaran untuk program-program pembangunan maupun penyediaan layanan publik.

2.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita

Rasio belanja daerah per kapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengeluaran daerah untuk kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi nilainya, semakin besar anggaran yang dialokasikan per orang, sehingga meningkatkan potensi tercapainya kesejahteraan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data realisasi Belanja Daerah Triwulan II-2024 dan jumlah penduduk Lampung tahun 2024 (data BPS), Kota Metro memiliki rasio belanja per kapita tertinggi di regional Lampung, yaitu Rp2.578.696,84 dengan jumlah penduduk 175.710 jiwa. Sebaliknya, Kabupaten Pesawaran memiliki rasio belanja per kapita terendah, yaitu Rp500.945,55 dengan jumlah penduduk 500.300 jiwa. Sementara itu, belanja per kapita agregat se-



Provinsi Lampung mencapai Rp1.160.355,60 dengan populasi total 9.419.580 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Grafik 2.55. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2024 (ribu rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Grafik 2.56. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2024 (ribu rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Selanjutnya, rasio belanja modal per kapita akan mengukur alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur per penduduk. Rasio ini penting karena belanja modal merupakan salah satu komponen pengeluaran pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, rasio ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada Triwulan II-2024, rasio belanja modal per kapita agregat di Lampung hanya sebesar Rp72.595,97. Kabupaten Tanggamus mencatat rasio belanja modal per kapita tertinggi di regional Lampung, yaitu Rp140.197,24 dengan jumlah penduduk 670.370 jiwa. Di sisi lain, Kabupaten Lampung Utara memiliki rasio belanja modal per kapita terendah, sebesar Rp5.102,61 dengan jumlah penduduk 659.890 jiwa. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung Utara mencatat realisasi terendah pada akhir Triwulan II-2024, yakni sebesar Rp3,37 miliar.

Realisasi Belanja Daerah per Kapita dan Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota di

regional Lampung sampai dengan akhir Triwulan II-2024 dapat dilihat pada grafik 2.55 dan grafik 2.56.

2.2.2.6. Prognosis/Outlook Belanja Daerah

Tabel 2.14. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024

BELANJA	Persentase Ketercapaian terhadap Pagu							Proyeksi Realisasi Hingga Akhir Tahun 2024		Growth (yoy)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PAGU 2024		% (miliar Rp)	
Belanja Daerah	92,71	98,05	92,07	92,34	86,89	92,89	95,26	90,20	32.343,51	90,70	29.336,42	0,07
Belanja Pegawai	87,46	93,68	94,25	93,49	90,31	92,56	94,50	90,12	12.679,89	92,82	11.769,54	0,11
Belanja Barang Jasa	92,06	112,22	95,61	95,24	83,92	93,23	96,80	91,62	8.216,82	89,81	7.379,29	0,03
Belanja Modal	92,29	101,87	87,17	78,86	67,27	96,39	87,85	89,26	4.041,42	83,59	3.378,32	(0,05)
Belanja Lainnya	106,33	90,87	90,36	98,62	97,28	91,26	100,44	89,24	7.405,38	91,95	6.809,27	0,13

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

Ketercapaian realisasi belanja terhadap pagu selama delapan tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini tidak lepas dari kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang diterapkan setiap tahunnya. Berdasarkan tren ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu APBD dalam delapan tahun terakhir, persentase komposisi dan pertumbuhan pagu, serta ketercapaian realisasi belanja sampai dengan triwulan II-2024, persentase ketercapaian realisasi belanja daerah regional Lampung diproyeksikan kembali meningkat di angka 90,70 persen mencapai Rp29.336,42 miliar. Lebih lanjut, realisasi belanja pegawai, seiring dengan adanya peningkatan pagu pada APBD 2024 diproyeksikan akan meningkat dengan ketercapaian pagu sebesar 92,82 persen setelah terkonsentrasi pada akhir tahun 2023. Begitu pula dengan Belanja Lainnya diproyeksikan meningkat dengan ketercapaian pagu sebesar 91,95 persen. Peningkatan proyeksi Belanja Lainnya terutama pada komponen Belanja Hibah sebagai dampak penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada 16 pemerintah daerah di regional Lampung.

Proyeksi ketercapaian Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.14 dan grafik 2.57.

Grafik 2.57. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)





2.2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja

Realisasi Belanja Daerah regional Lampung hingga akhir Triwulan II-2024 menunjukkan kinerja positif meskipun alokasi pagu belanja tahun ini lebih rendah dibandingkan APBD 2023. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan terkait Belanja Daerah berdasarkan analisis pada bab ini:

- a. **Optimalisasi Belanja Pegawai.** Saat ini, Belanja Pegawai masih mendominasi realisasi belanja daerah, mencapai 51,12 persen. Dalam APBD 2024, pagu Belanja Pegawai secara agregat masih berada di angka 39,20 persen. Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan alokasi Belanja Pegawai menjadi maksimal 30 persen dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru dari TKD, sesuai amanat UU HKPD dengan masa penyesuaian lima tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan.
- b. **Peningkatan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.** Kebijakan belanja daerah perlu lebih diarahkan pada belanja infrastruktur pelayanan publik. Dalam UU HKPD, disebutkan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik harus mencapai minimal 40 persen dari APBD di luar transfer ke daerah bawahan dan desa. Dalam masa transisi, evaluasi pemenuhan belanja infrastruktur mempertimbangkan kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah.
- c. **Akselerasi Realisasi Belanja Modal.** Meskipun secara nominal, kinerja realisasi Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 11,64 persen, namun ketercapaian terhadap pagu hingga akhir Triwulan II-2024 masih terbatas di angka 16,92 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun belanja modal telah mengalami peningkatan, efektivitas pengeluaran tersebut belum optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, akselerasi realisasi belanja modal sangat diperlukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini dapat dicapai melalui perencanaan yang lebih matang, percepatan proses pengadaan, dan penyederhanaan prosedur administrasi. Belanja modal, sebagai komponen belanja yang produktif, memiliki potensi untuk menciptakan

multiplier effect yang signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada aktivitas ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing infrastruktur di Lampung.

2.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Pada Triwulan II-2024, realisasi APBD regional Lampung secara agregat mengalami surplus. Perkembangan surplus/defisit APBD yang dapat dilihat menggunakan tiga rasio sebagai berikut:

- a. **Rasio Surplus APBD terhadap Total Pendapatan Daerah.** Pada Triwulan II-2024, rasio ini sebesar 0,16, naik 0,06 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kinerja fiskal yang semakin kuat, di mana pendapatan daerah mampu membiayai belanja dengan lebih efektif.
- b. **Rasio Surplus APBD terhadap Dana Transfer.** Pada Triwulan II-2024, rasio ini mencapai 0,21, meningkat 0,07 basis poin. Hal ini mengindikasikan adanya potensi optimalisasi alokasi dana transfer (Transfer Pemerintah Pusat) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif.
- c. **Rasio Surplus APBD terhadap PDRB** menggambarkan kesehatan ekonomi regional. Rasio ini tercatat sebesar 0,009 pada Triwulan II-2024, meningkat 0,004 basis poin dari periode sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan surplus APBD yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB, didorong oleh realisasi pendapatan yang lebih cepat daripada pertumbuhan belanja daerah.
- d. **Rasio SiLPA terhadap belanja** memberikan gambaran mengenai pengelolaan anggaran belanja oleh pemerintah daerah serta efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pada Triwulan II-2024, rasio SiLPA tercatat sebesar 0,20, meningkat sebesar 0,09 basis poin (*yoy*). Meskipun SiLPA yang tinggi tidak selalu negatif, rasio yang meningkat dapat menjadi *early warning system* yang menunjukkan kemungkinan adanya permasalahan dalam eksekusi anggaran.



Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024

Periode	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Realisasi Dana Transfer	Surplus terhadap PDRB	SiLPA terhadap Realisasi Belanja
Triwulan II-2023	0,10	0,15	0,005	0,12
Triwulan II-2024	0,16	0,21	0,009	0,20

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Selanjutnya, keseimbangan umum APBD Lampung pada Triwulan II-2024 mencatat surplus sebesar Rp2.108,87 miliar, dan keseimbangan primer mencapai Rp2.122,90 miliar setelah komponen bunga. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal kontraktif, di mana belanja daerah lebih rendah dari pendapatan. Kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas fiskal jangka panjang dengan menjaga belanja di bawah pendapatan, namun berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial yang perlu dikelola secara cermat.

Tabel 2.16. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan II Tahun 2023 dan 2024

Periode	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
Triwulan II-2023	10.915,10	9.773,93	26,26	1.141,18	1.167,44
Triwulan II-2024	13.038,93	10.930,06	14,03	2.108,87	2.122,90

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Pada Triwulan II-2024, pembiayaan netto Lampung mencapai Rp112,57 miliar, meningkat 1.288 persen (yoy), didorong oleh penurunan substansial pengeluaran pembiayaan sebesar 50,93 persen dan kenaikan moderat penerimaan pembiayaan sebesar 1,65 persen. Total penerimaan pembiayaan mencapai Rp209,94 miliar, terutama berasal dari

pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp97,37 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran pokok pinjaman. Pemerintah daerah dapat memperluas investasi strategis, memprioritaskan proyek infrastruktur, serta memanfaatkan kemitraan publik-swasta atau pinjaman jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan Daerah Regional Lampung Triwulan II tahun 2023 dan 2024 sebagaimana grafik 2.58.

Grafik 2.58. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan II Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.3. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD

Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah s.d. Juni 2024 Provinsi Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp9.050,36 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp18.317,09 miliar sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp9.266,73 miliar. Dari sisi Pembiayaan mencatatkan realisasi sebesar Rp112,57 miliar yang seluruhnya merupakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, yang kemudian mengurangi angka defisit sehingga diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp9.154,16 miliar. Ringkasan *I-Account* Konsolidasi APBN dan APBD Regional Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 *I-Account* Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung s.d. 30 Juni 2023-2024 (miliar Rp, persen)

Uraian	2023		2024		% Kontribusi	% Growth
	Konsolidasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Konsolidasi		
A. Pendapatan Negara dan Hibah	8.530,84	13.038,93	4.795,23	9.050,36	100,00	6,09
I. Penerimaan Perpajakan	6.203,61	2.249,95	4.106,73	6.356,68	70,24	2,47
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.241,26	296,99	688,50	985,49	10,89	(20,61)
III. Penerimaan Hibah	6,48	7,88	-	7,88	0,09	21,66
IV. Pendapatan Transfer	1.079,49	10.484,11	-	1.700,30	18,79	57,51
B. Belanja Negara	16.555,61	10.930,06	16.170,83	18.317,09	100,00	10,64
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	12.068,86	8.930,67	4.712,43	13.643,10	74,48	13,04
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4.486,75	1.999,39	11.458,40	4.673,99	25,52	4,17
C. Surplus (Defisit) Anggaran	(8.024,78)	2.108,87	(11.375,60)	(9.266,73)	100,00	15,48
D. Pembiayaan	8,11	112,57	-	112,57	100,00	1.288,70
I. Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah	8,11	112,57	-	112,57	100,00	1.288,70
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-	-	-	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(8.016,67)	2.221,44	(11.375,60)	(9.154,16)	100,00	14,19

Sumber: OM-SPAN, ALCo, LKPD-TW (diolah)

2.3.1. Pendapatan Konsolidasian

Realisasi pendapatan negara konsolidasian Triwulan II-2024 membukukan realisasi sebesar Rp9.050,36 miliar, tumbuh 6,09 persen (*yoy*) yang dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan, Hibah, serta pendapatan transfer konsolidasian yang meningkat masing-masing sebesar 2,47 persen (*yoy*), 21,66 persen (*yoy*), dan 57,51 persen (*yoy*). Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) konsolidasian termoderasi 20,61 persen (*yoy*) dengan hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp985,49 miliar.

2.3.2. Belanja Konsolidasian

Belanja konsolidasian Lampung sebesar Rp18.317,09 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat/Daerah dan Transfer ke Daerah. Mencermati Proporsi realisasi belanja konsolidasian terbesar Triwulan II-2024, Belanja Pemerintah Pusat/Daerah mendominasi hingga 74,48 persen atau secara nominal sebesar Rp13.643,10 miliar, sedangkan proporsi Belanja Transfer mencapai 25,52 persen atau secara nominal Rp4.673,99 miliar yang merupakan Belanja Pemerintah Pusat berupa Transfer ke Daerah yang belum dilakukan pencatatan oleh pemda, sehingga belum tereliminasi. Realisasi Belanja Negara Konsolidasian Triwulan II-2024 meningkat 10,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023, didorong pertumbuhan realisasi Belanja baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.3.2.1. Belanja Perkapita Konsolidasi

Tabel 2.18. Belanja Perkapita Konsolidasi Triwulan II Tahun 2023-2024

Keterangan	2023	2024
Belanja Konsolidasi Triwulan II (miliar rupiah)	16.555,61	18.317,09
Jumlah Penduduk (jiwa)	9.313.990	9.419.580
Belanja Konsolidasi Per Kapita (juta rupiah)	1.777,50	1.944,58

Sumber: LKPP-TW, LKPKD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

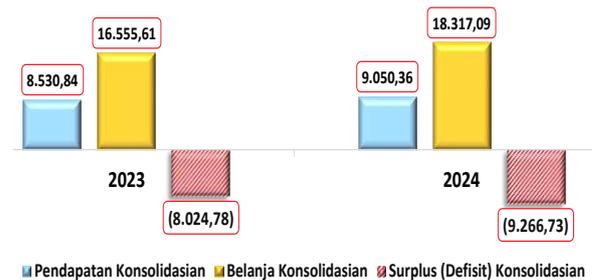
Berdasarkan perhitungan tercatat bahwa Belanja Konsolidasi Per Kapita di Lampung tahun 2024

sebesar Rp1.944,58 juta. Artinya belanja pemerintah pusat dan daerah di Lampung yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada satu orang penduduk pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp1.944,58 juta. Angka ini tumbuh 9,40 persen (*yoy*) seiring dengan peningkatan realisasi pada belanja pusat dan pemerintah daerah.

2.3.3. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian

Hingga 30 Juni 2024, keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung berada pada posisi defisit Rp9.266,73 miliar. Angka defisit ini melebar cukup besar yakni 15,48 persen (*yoy*). Melebarnya defisit anggaran terutama dipicu oleh adanya peningkatan realisasi belanja konsolidasian yang lebih besar dibanding dengan peningkatan pendapatan. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2023-2024 dapat dilihat pada grafik 2.59.

Grafik 2.59. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan II 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPP-TW, LKPKD-TW Lingkup Provinsi Lampung

2.3.4. Pembiayaan Konsolidasian

Sampai dengan 30 Juni 2024, Pembiayaan Konsolidasian Neto di Lampung tercatat sebesar Rp112,57 miliar dimana angka ini naik signifikan dari tahun lalu 1.288,70 persen (*yoy*) yang seluruhnya merupakan pembiayaan pemerintah daerah dan bersumber dari dalam negeri. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan Pengeluaran Pembiayaan pemerintah daerah yang cukup dalam s.d. Semester I-2024 sebagai komponen pengurang Pembiayaan Neto.

“Kegagalan Hanya Terjadi Ketika Kita Menyerah”

-B. J. Habibie-
Preseiden Republik Indonesia Ketiga

BAB III

Pengembangan Ekonomi Daerah:
Harmonisasi Belanja Pemerintah
Pusat dan Transfer ke Daerah

 Tugu Nago Ratu Basanding, Tulang Bawang Barat



BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN TRANSFER KE DAERAH

3.1. PENDAHULUAN

Belanja terkait infrastruktur dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat (melalui belanja Kementerian/Lembaga atau K/L) dan pemerintah daerah (melalui Transfer ke Daerah atau TKD). Salah satu jenis TKD yang sangat penting adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dimana merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK Fisik diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan, serta mendukung prioritas pembangunan.

Penyelarasan antara Belanja K/L dan DAK Fisik merupakan elaborasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Penyelarasan ini diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi pengelolaan keuangan serta meningkatkan dampak belanja terhadap prioritas tertentu di daerah.

Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) menjadi esensial untuk memastikan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dimulai dari PP Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur sinkronisasi penyusunan rencana, penganggaran pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Dalam ketentuan ini, Kementerian Keuangan dan Bappenas berperan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan dan anggaran serta kebijakan tahun berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan meningkatkan upaya ini melalui SOP *Link* 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja

Pemerintah Pusat dan TKD. Amanah tersebut diberikan kepada Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) selaku *Unit in Charge* (UIC). DJA dan DJPK melakukan monev dari sisi perencanaan dan penganggaran, sedangkan DJPb melakukan monev pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan TKD. Sinergi ketiga unit ini sangat diperlukan dalam mengawal harmonisasi belanja pemerintah pusat dan TKD. Tahun 2024, merupakan tahun kedua pelaksanaan SOP Link dimaksud.

Berikutnya, akan diterangkan mengenai pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis (RO Harmonis).
2. Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik.
3. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

3.2. ALOKASI BELANJA K/L YANG MENDUKUNG DAK FISIK DAN DAK FISIK PADA 6 BIDANG

Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tercermin melalui sinergi antara Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya dalam program DAK Fisik. Dalam konteks ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) akan melakukan analisis harmonisasi antara Belanja K/L dan DAK Fisik di wilayah Lampung. Analisis ini akan menggunakan identifikator yang disebut "**Rincian Output (RO) Harmonis**", yaitu rincian output pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) yang saling melengkapi atau mendukung rincian kegiatan pada DAK Fisik.

Tabel 3.1. Perbedaan DAK Fisik dan RO Harmonis K/L DAK Fisik

No.	Indikator	DAK Fisik	RO Harmonis K/L DAK Fisik
1.	Jenis Belanja	Dana Transfer	Belanja Pemerintah Pusat
2.	Pelaksana Kegiatan	OPD Pemerintah Daerah	Satker Kementerian/Lembaga
3.	Jumlah Bidang	13	6
4.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar ✓ Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat & pemerataan ekonomi ✓ Mendukung pencapaian prioritas nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ✓ Mendukung pelaksanaan DAK Fisik

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Monev sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik tahun 2024 dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahapan perencanaan/penganggaran, yaitu:

1. Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
2. Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
3. Bidang Jalan (Kementerian PUPR)
4. Bidang Air Minum (Kementerian PUPR);
5. Bidang Sanitasi (Kementerian PUPR);
6. Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian).

3.2.1. Perbandingan Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik

Tabel 3.2 Perbandingan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dengan DAK Fisik pada 6 Bidang (miliar Rp)

Bidang	Belanja KL (RO Harmonis)			TKD DAK Fisik		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1 Pendidikan	127,48	32,95	25,84%	561,48	19,88	3,54%
2 Kesehatan	2,27	0,33	14,37%	277,85	16,68	6,00%
3 Jalan	433,86	118,01	27,20%	379,96	71,61	18,85%
4 Air Minum	12,26	1,67	13,59%	16,36	0	0%
5 Sanitasi	2,05	0,74	36,23%	1,63	0	0%
6 Pertanian	25,33	12,06	47,62%	48,03	0	0%
TOTAL	603,25	165,76	27,48%	1.285,31	108,17	8,42%

Sumber: Sintesa (diolah)

Per 30 Juni 2024, Belanja Kementerian/Lembaga yang sinergis mendukung area yang menjadi fokus penyaluran DAK Fisik di regional Lampung (RO Harmonis) memiliki total pagu anggaran sebesar Rp603,25 miliar dengan capaian realisasi Rp165,76 miliar atau 27,48 persen dari pagu anggaran. Tingkat serapan cukup rendah disebabkan oleh beberapa belanja K/L dan DAK Fisik akan dilaksanakan pada Semester II-2024.

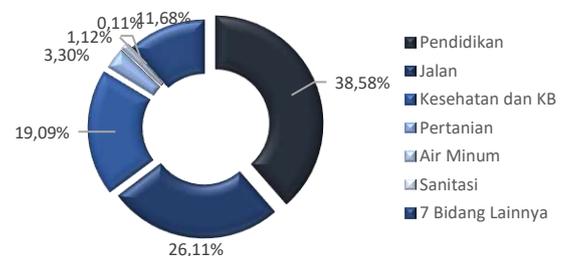
Grafik 3.1. Pagu dan Realisasi DAK Fisik Pemda Lampung Semester I Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: OM SPAN (diolah)

Menurut alokasi DAK Fisik secara keseluruhan, Pemerintah Daerah dengan alokasi DAK Fisik terbesar pada tahun 2024 adalah Provinsi Lampung dengan total pagu Rp267,36 miliar. Sedangkan, Kabupaten Pesisir Barat memperoleh pagu DAK Fisik terkecil dengan alokasi Rp24,79 miliar. Dari sisi realisasi, per 30 Juni 2024, Kabupaten Mesuji memiliki penyaluran DAK Fisik tertinggi dibandingkan Pemda lainnya dengan nilai Rp25,09 miliar.

Grafik 3.1. Porsi Pagu DAK Fisik Pemda Per Bidang Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: OM SPAN (diolah)

Berdasarkan porsi per bidang, Belanja DAK Fisik untuk Bidang Pendidikan menerima alokasi tertinggi, yaitu Rp561,48 miliar atau 38,58 persen dari pagu. Selanjutnya, Bidang Jalan mendapatkan alokasi sebesar Rp379,96 miliar (26,11 persen), Bidang Kesehatan (dan Keluarga Berencana) Rp277,85 miliar (19,09 persen), Bidang Pertanian Rp48,03 miliar (3,30 persen), Bidang Air Minum Rp16,36 miliar (1,12 persen), dan Bidang Sanitasi Rp1,63 miliar (0,11 persen). Alokasi untuk tujuh bidang lainnya berjumlah Rp169,9 miliar atau 11,68 persen.





Dari sisi penyaluran, Bidang Jalan menempati peringkat pertama dengan realisasi anggaran mencapai 18,85 persen dari alokasinya. Sebaliknya, penyaluran terendah terdapat pada Bidang Pertanian, Air Minum, Sanitasi, serta enam bidang lainnya yang belum menunjukkan penyerapan.

Berfokus pada enam bidang DAK Fisik yang menjadi target sinergi belanja, seperti terlihat pada tabel 3.2, total pagu anggaran DAK Fisik untuk seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di regional Lampung adalah sebesar Rp1.285,31 miliar. Namun, realisasi anggaran dari jumlah tersebut baru mencapai Rp108,17 miliar atau 8,42 persen dari pagu.

Meskipun realisasi belanja K/L mencapai persentase yang lebih baik yaitu 27,48 persen, realisasi DAK Fisik di daerah baru mencapai 8,42 persen. Ketidaksielarasan capaian ini mencerminkan perlunya peningkatan eksekusi harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks DAK Fisik di regional Lampung. Secara nominal, terlihat bahwa harmonisasi belanja K/L yang secara langsung mendukung DAK Fisik perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutor.

3.2.2. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum (miliar Rp)

Kode BA	Nama K/L	Pagu yang Mendukung DAK Fisik		Porsi (%)	Jumlah Satker	Jumlah RO
		Total Pagu	E=C/D			
A	B	C	D	E=C/D	F	G
33	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	448,17	1.056,60	42,42%	6	15
23	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	127,48	1.328,24	9,60%	3	7
18	Kementerian Pertanian	25,33	322,16	7,86%	5	19
24	Kementerian Kesehatan	2,27	142,71	1,59%	1	22
TOTAL		603,25	2.849,71	21,17%	15	63

Sumber: Sintesa (diolah)

Jumlah pagu yang termasuk dalam kategori RO Harmonis Belanja K/L pendukung DAK Fisik pada Satuan Kerja K/L mencapai Rp603,25 miliar dengan Alokasi Belanja K/L yang mendukung pelaksanaan DAK Fisik memiliki porsi sebesar 21,17 persen dari total pagu anggaran seluruh belanja K/L di Provinsi

Lampung, dengan total 63 Rincian Output Harmonis. Alokasi tersebut tersebar pada 4 Kementerian Lembaga dan 15 Satuan Kerja.

Kementerian PUPR memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp448,17 miliar atau 74,29 persen dari total pagu RO Harmonis Belanja K/L pendukung DAK Fisik di Provinsi Lampung. Sedangkan, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi paling kecil yaitu Rp2,27 miliar atau 0,38 persen.

Dari sisi Satuan Kerja sebagai instansi pelaksana, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung mengelola alokasi terbesar yaitu Rp226,07 miliar, diikuti Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung dengan pagu Rp197,32 miliar, dan BGP Provinsi Lampung Rp112,62 miliar. Sementara itu, pagu terkecil dikelola oleh Kantor Bahasa Lampung sebesar Rp563,15 juta, Balai Pelatihan Pertanian Lampung Rp1,03 miliar, dan Dinas Tanaman dan Holtikultura Prov. Lampung Rp1,5 miliar.

Apabila dibandingkan dengan keseluruhan total pagu Belanja Pemerintah Pusat yang bersifat non administratif (belanja barang, modal, dan sosial) di regional Lampung pada tahun 2024 yang berjumlah Rp2.849,71 miliar, belanja K/L yang sinergis mendukung DAK Fisik secara langsung memiliki porsi sebesar 21,17 persen.

3.2.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik (Miliar Rp)

Bidang DAK Fisik	Subbidang	Nama K/L	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Jumlah Satker	Jumlah RO	
								1
		SD/SMP/SMA/SMK	Kementerian Pendidikan	127,25	32,92	25,87%	3	6
2	Kesehatan	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	0,92	0,17	18,82%	1	6
		Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1,36	0,15	11,36%	1	16
3	Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	433,86	118,01	27,20%	3	11
4	Air Minum	Air Minum	Kementerian PUPR	12,26	1,67	13,59%	3	3
5	Sanitasi	Sanitasi	Kementerian PUPR	2,05	0,74	36,23%	1	1
6	Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementerian Pertanian	25,33	12,06	47,62%	5	19

Sumber: Sintesa (diolah)

Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dapat dijabarkan ke dalam beberapa sub-bidang per kementerian/lembaga, sebagaimana tertera dalam tabel 3.3. Di antara sub-bidang tersebut, RO





Harmonis untuk DAK Fisik Bidang Jalan menerima alokasi tertinggi, yaitu sebesar Rp433,86 miliar. Hal ini sejalan dengan pentingnya infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar yang mendukung akses masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan jalan juga mendukung program nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar daerah.

Hingga 30 Juni 2024, Bidang Pertanian mencapai realisasi tertinggi, yaitu sebesar 47,62 persen dari pagu anggaran, sedangkan Bidang Air Minum memiliki realisasi terendah, yaitu 13,59 persen. Sub-bidang dengan penyerapan terendah adalah PAUD, dengan realisasi sebesar 9,78 persen.

Lebih rinci, alokasi anggaran untuk Bidang Pendidikan berada di bawah Kementerian Pendidikan, mencakup 2 sub-bidang, dan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan tujuh RO. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di bawah Kementerian Kesehatan mencakup 2 sub-bidang, dilaksanakan oleh satu Satker dengan 22 RO. Bidang Jalan, di bawah Kementerian PUPR, terdiri dari 1 sub-bidang dan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan 11 RO. Bidang Air Minum, juga di bawah Kementerian PUPR, memiliki 1 sub-bidang dan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan tiga RO. Bidang Sanitasi, masih di bawah Kementerian PUPR, terdiri dari 1 sub-bidang dan dilaksanakan oleh 1 Satker dengan satu RO. Sementara itu, Bidang Pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian, terdiri dari 1 sub-bidang, dan dilaksanakan 5 Satker dengan 19 RO.

3.2.4. Capaian RO utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik

3.2.4.1. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi sebesar Rp433,86 miliar dengan realisasi mencapai Rp118,01 miliar atau 27,2 persen dari alokasi. Terdapat 11 RO yang masuk dalam Bidang Jalan dengan kriteria RO biasa, Pro PN, dan Padat Karya. RO Pro PN artinya adalah kegiatan tersebut merupakan Program Prioritas Nasional dimana menjadi fokus kerja pemerintah yang harus dilaksanakan dengan segera. Sedangkan

RO Padat Karya artinya adalah pekerjaan dengan pelaksanaan kegiatan membutuhkan banyak orang sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 3.2. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Jalan

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Jalan Strategis (ProPN)	km	114,04	31,94	28%	8	3	31,49%
	Preservasi							
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	km	107,98	39,89	36,94%	818	292	35,66%
	Preservasi							
3	Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	94,80	7,07	7,45%	8	1	15,9%
Total			316,82	78,89	24,90%	834	296	35,44%

Sumber: Sintesa (diolah)

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Jalan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) RO Jalan Strategis (ProPN) dengan pagu sebesar Rp114,04 miliar di antaranya untuk rencana rekonstruksi jalan ruas Gedong Aji Baru – Rawajitu di Tulang Bawang senilai Rp75 miliar dan pembebasan lahan untuk operasionalisasi Jembatan Way Kandis Kota Bandar Lampung.
- 2) RO Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dengan pagu sebesar Rp107,98 miliar di antaranya untuk rencana pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Kota Bandar Lampung, Metro, Kab. Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur.
- 3) RO Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dengan pagu sebesar Rp 94,8 miliar di antaranya untuk rencana rehabilitasi mayor dan minor jalan serta penanganan longsor di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatannya atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Akses Jalan Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas total pagu sebesar Rp25,51 miliar, dengan nilai sebesar Rp7,4 miliar dilaksanakan





oleh Pemprov Lampung, dan Rp18,11 miliar di Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Timur.

- 2) Akses Jalan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) total alokasi sebesar Rp 85,47 miliar, dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp12,83 miliar di Lampung Timur, Rp12,22 miliar di Provinsi Lampung, Rp11,51 miliar di Lampung Tengah, dan Rp38,16 miliar di 4 kabupaten lainnya.
- 3) Perbaikan dan Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota dengan total Rp 268,97 miliar, dengan rincian Rp71,65 miliar di Way Kanan, Rp54,75 miliar di Lampung Timur, Rp30,07 miliar di Lampung Selatan, Rp20,29 miliar di Pringsewu, Rp13,09 miliar di Tulang Bawang Barat, Rp11,58 miliar di Lampung Utara, Rp10,87 miliar di Mesuji, Rp10,66 miliar di Tulang Bawang, Rp10,2 miliar di Tanggamus, Rp9,81 miliar di Lampung Tengah, Rp9,1 miliar di Pesawaran, Rp9,08 miliar di Pesisir Barat, dan Rp7,74 miliar di Lampung Barat.

3.2.4.2. Bidang Kesehatan dan KB

Bidang Kesehatan dan KB memiliki alokasi sebesar Rp2,27 Miliar dengan realisasi sebesar Rp0,33 Miliar atau 14,37 persen dari alokasi. Terdapat 22 RO yang masuk dalam Bidang Kesehatan dan KB dengan capaian output mencapai 9,09 persen.

Tabel 3.3. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4)	Orang	0,50	0,10	20%	84	0	0%
2	Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu (LP-1)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,22	0,07	31,55%	15	0	0%
3	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri (LP-10)	Orang	0,18	0,00	0,00%	30	0	0%
Total			0,89	0,17	19,12%	-	-	0%

Sumber: Sintesa (diolah)

RO Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada Bidang Kesehatan yaitu Rp0,5 Miliar namun belum terdapat penyerapan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut masih pada tahap penetapan SK

sehingga belum dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas SDM pendukung Cakupan program ini antara lain pelatihan konseling menyusui, *Training of Trainers* (ToT) SDIDTK dan Pemberian Makan pada Balita dan Anak, ToT MTBS dan Tata Laksana Gizi Buruk yang menargetkan 84 tenaga kesehatan.

RO Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu menargetkan 15 daerah atau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Telah tercapai realisasi anggaran yang cukup baik yaitu sebesar 31,55 persen atau Rp70,00 Juta dari alokasi pagu sebesar Rp220,00 Juta. Program ini masih dalam proses administrasi pasca pelaksanaan.

Belanja untuk Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri memiliki pagu sebesar Rp180 Juta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui *workshop* pelayanan kesehatan lansia dan geriatri bagi petugas kesehatan dengan target output 30 orang dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung. Sampai dengan 30 Juni 2024, belum terdapat realisasi anggaran maupun output.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Kesehatan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja Kab./Kota yang Mendapatkan Fasilitas/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan pagu sebesar Rp52 juta dengan rencana kegiatan dilaksanakan di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Pesawaran, Way Kanan, dan Tanggamus.
- 2) Belanja Kab./Kota yang Dilakukan Fasilitas Surveilans Gizi dan KIA dengan pagu sebesar Rp15,52 juta dilaksanakan terhadap seluruh OPD regional Lampung.
- 3) Belanja Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dengan target peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 4) Belanja Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Aplikasi Sistem Informasi Gizi Berbasis Keluarga/ GIKIA (termasuk



ePPGBM) dengan pagu sebesar Rp101,36 juta dilaksanakan dengan target peserta dari seluruh regional Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatannya atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dengan total pagu sebesar Rp30,15 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hingga 30 Juni 2024, sebanyak 12 dari 15 kabupaten/kota telah merealisasikan anggaran tersebut dengan realisasi senilai Rp13 miliar.
- 2) Penguatan Sistem Kesehatan di Provinsi Lampung dengan total pagu Rp247,05 miliar, yang secara khusus dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota regional Lampung.

3.2.4.3. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan memiliki alokasi sebesar Rp127,48 Miliar dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp32,95 Miliar atau 25,84 persen dari alokasi. Terdapat 7 RO yang masuk dalam Bidang Pendidikan dengan capaian output rerata 39,94 persen.

Tabel 3.4. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Orang	92,41	21,08	23%	5.101	2.301	45,11%
2	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Lembaga	14,06	6,57	46,70%	6.744	1.750	25,95%
3	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	12,48	4,88	39,12%	1.833	1.034	56,41%
Total			118,95	32,53	27,35%	-	-	42,49%

Sumber: Sintesa (diolah)

Capaian output utama bidang Pendidikan berdasarkan 3 RO pagu tertinggi ditunjukkan melalui Tabel 3.4 di atas. Kegiatan dengan alokasi terbesar pada Bidang Pendidikan adalah RO Guru yang Mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru yaitu sebesar Rp92,41 Miliar dengan realisasi sebesar Rp21,08 Miliar atau 23 persen dari alokasi. RO ini merupakan turunan dari

program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan. Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru ditujukan bagi seluruh Kepala Sekolah dalam rangka mendukung peningkatan mutu. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah harus mampu kreatif dalam membuat program dan memimpin guru dan perangkat lainnya yang selaras dengan Program Merdeka Belajar. Kepemimpinan sekolah yang baik akan berdampak terhadap efektivitas sekolah dan kualitas belajar siswa. Hingga semester I-2024, kegiatan ini telah diikuti oleh 2.301 orang dari target 5.101 orang guru sehingga capaian output sebesar 45,11 persen.

Kegiatan yang memiliki pagu terbesar kedua yaitu Satuan Dikdas dan Dikmen yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya dengan pagu sebesar Rp14,06 Miliar dan telah terealisasi Rp6,57 Miliar atau sebesar 46,7 persen. Kegiatan ini menargetkan 6.744 lembaga pendidikan dan telah dilaksanakan oleh sebanyak 1.750 lembaga sehingga capaian RO sebesar 25,95 persen.

Kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Pendampingan Pembelajaran memiliki pagu Rp12,48 Miliar dan telah terealisasi Rp4,88 Miliar atau sebesar 39,12 persen dari pagu. Target kegiatan ini sebanyak 1.833 orang guru dan tenaga kependidikan dan telah dilakukan pendampingan kepada 1.034 orang atau terealisasi capaian RO sebesar 56,41 persen.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran dengan pagu sebesar Rp12,48 miliar di antaranya dengan kegiatan Pendampingan IKM, Kepemimpinan, Komunitas Belajar, P5, Pengimbasan PSP di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, kegiatan Diklat transisi PAUD ke SD serta kegiatan penguatan IKM bagi guru jenjang PAUD di Sekolah Penggerak yang diadakan di Bandar Lampung



- 2) Belanja untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi dengan pagu sebesar Rp7,73 miliar yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung
- 3) Belanja untuk Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan pagu sebesar Rp230,29 juta yang dilaksanakan di Bandar Lampung.

Belanja-belanja yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatannya atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik untuk:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapatkan dengan alokasi pagu sebesar Rp14,2 miliar, yang terdiri dari Lampung Selatan sebesar Rp2 miliar, Metro sebesar Rp1,4 miliar, Lampung Timur dan Tanggamus masing-masing Rp1,25 miliar, sedangkan Mesuji sebesar Rp1 miliar. Lampung Utara, Way Kanan, dan Lampung Tengah masing-masing sebesar Rp953,71 juta, Rp932 juta, Rp904,19 juta. Sementara itu, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, dan Bandar Lampung masing-masing sebesar Rp896,96 juta, Rp851,98 juta, Rp686,22 juta, Rp644,12 juta, Rp600,77 juta, Rp485,02 juta, dan Rp264,94 juta.
- 2) Pengembangan perpustakaan di berbagai daerah. Bandar Lampung dengan pagu sebesar Rp10,5 miliar, Lampung Barat dengan total Rp10,18 miliar. Lampung Utara sebesar Rp800 juta, dan Metro sebesar Rp499,95 juta.

3.2.4.4. Bidang Air Minum

Bidang Air Minum memiliki pagu sebesar Rp12,26 Miliar dengan realisasi Rp1,67 Miliar atau 13,59 persen dari pagu anggaran. Terdapat 3 RO pada Bidang Air Minum dengan rerata capaian RO sebesar 28,08 persen sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.5. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi F=E/D	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	8,31	0,01	0,07%	3.040	0	0%
2	Jaringan air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	2,48	1,28	51,39%	16	7	44,25%
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Daerah (Prov/Kab /Kota)	1,47	0,39	26,22%	15	6	40%
Total			12,26	1,67	13,59%	-	-	28,08%

Sumber: Sintesa (diolah)

RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran tertinggi pada Bidang Air Minum yaitu Rp8,31 Miliar dan telah terealisasi 0,01 Miliar atau 0,07 persen dari pagu. Meski demikian, tingkat realisasi capaian RO masih sebesar 0 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk pembangunan sistem penyediaan air bersih langsung ke rumah masyarakat tanpa harus jauh ke sumber air dengan target tahun 2024 sebanyak 3.040 Sambungan Rumah (SR).

RO Jaringan Air Baku Yang Dioperasikan Dan Dipelihara mencapai realisasi tertinggi pada DAK Fisik Bidang Air Minum yaitu 51,39 persen atau sebesar Rp1,28 Miliar dari pagu senilai Rp2,48 Miliar. Jumlah capaian output kegiatan ini mencapai 44,25 persen dengan pelaksanaan sebanyak 7 unit dari target 16 unit.

RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum memiliki alokasi anggaran Rp1,47 Miliar dan telah terealisasi Rp0,39 Miliar atau 26,22 persen dari pagu. Capaian output ini sebanyak 40 persen atau 6 daerah dari target pelaksanaan 15 daerah (Prov/Kab/Kota).

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Air Minum dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan rencana kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dalam program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (BPM Pamsimas) dilaksanakan di Lampung Selatan sebanyak 6 desa, Lampung





SUPLEMEN 3.1

Peluang Investasi Regional Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki peluang investasi dalam pengembangan Agro Wisata melalui proyek Agri Park Kemiling yang menggaungkan keunggulan Provinsi Lampung di sektor pertanian dan sektor pariwisata.

Agripark Kemiling adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Destinasi wisata ini memiliki tema sebagai "Kawasan Eduwisata dan Generator Pembangunan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan". Agri Park Kemiling berlokasi di Kec. Kemiling dengan luas +/- 5 - 7.5 ha. Kondisi saat ini, Agri Park Kemiling merupakan kebun bibit milik TP PKK Kota Bandar Lampung. Lokasi Agri Park Kemiling dekat dengan pusat kota, bandara, terminal dan juga pusat pendidikan. Status lahan lokasi Agri Park Kemiling sudah clean and clear dan proyek ini masuk dalam RTRW dan RPJMD Kota Bandar Lampung.



Agri Park Kemiling Akan Memiliki Berbagai Fungsi

- 1 **Fungsi Ekologis** sebagai tempat penyerapan karbondioksida, pelestarian air tanah, penahan angin, ameliorasi iklim serta habitat kehidupan liar.
- 2 **Fungsi Sosial dan Edukasi** sebagai lokasi wisata untuk menurunkan tingkat stres dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Agri Park Kemiling juga menjadi tempat untuk menjaga kenyamanan kota serta tempat edukasi pengetahuan dan keterampilan pertanian (Agro-edu-wisata)
- 3 **Fungsi Ekonomi** sebagai tempat pengembangan komoditi buah-buahan dan juga tanaman pertanian serta hasil peternakan sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih baik. Membuka akses bagi konsumen komoditas pertanian untuk dapat memperoleh komoditi pertanian unggul di Kota Bandar Lampung khususnya dan komoditas pertanian Provinsi Lampung pada umumnya.
- 4 Agri Park Kemiling akan menjadi identitas kota, sebagai *landmark* kota Bandar Lampung dan ikon keindahan kota.



KONSEP RUANG

- | | |
|---|---|
| <p>I Kantor Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan</p> | <p>III Public Space
Children Playing Ground, Camping Ground, Amphitheatre, Aula Pertemuan, Shelter</p> |
| <p>II Service Area
Nursey, Konservasi, Workshop</p> | <p>IV Entrance
Maingate, Parkir, dan Souvernir</p> |

Opsi Pendanaan

Adapun opsi pendanaan yang dapat dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung yang disarankan Kanwil DJPb Provinsi Lampung untuk mengembangkan Pembangunan Agri Park Kemiling yaitu antara lain:

- 1 Kerja sama Pembiayaan dengan BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup). Dalam pembangunan *green house* atau terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar Agri Park Kemiling.
- 2 Dukungan dari PT SMI yang tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga hal lain, seperti bantuan teknis dalam aspek lingkungan, bahkan kombinasi pembiayaan melalui skema *Blended Finance* yang mengkombinasikan pinjaman dan hibah,
- 3 Memanfaatkan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) jika ada.
- 4 Pembangunan Agri Park Kemiling dapat melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Utara sebanyak 7 desa, dan Pringsewu sebanyak 6 desa.

- 2) Belanja Jaringan air baku yang dioperasikan dan dipelihara dengan rencana pelaksanaan di Lampung Timur, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Way Kanan.
- 3) Belanja Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM dilaksanakan dengan target peserta dari seluruh regional Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Belanja sub bidang Air Minum oleh Pemkot Bandar Lampung dengan total pagu sebesar Rp14,99 miliar.
- 2) Belanja sub bidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu oleh Pemda Kabupaten Mesuji dengan alokasi anggaran Rp1,36 miliar.

3.2.4.5. Bidang Sanitasi

Bidang Sanitasi memiliki alokasi sebesar Rp2,05 Miliar dengan realisasi sebesar Rp0,74 Miliar atau tercapai 36,23 persen dari alokasi anggaran. Hanya terdapat 1 RO pada Bidang Sanitasi dan telah memiliki capaian output sebesar 40 persen.

RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung. Pelaksanaan RO ini dilakukan dalam bentuk Pendampingan kepada Pemerintah Daerah terkait Implementasi Strategi Sanitasi Kab. /Kota, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Sanitasi terkait Percepatan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta *Workshop* Daerah. Adapun target dari RO ini adalah sebanyak 15 Kabupaten/Kota atau seluruh OPD di Provinsi Lampung.

Tabel 3.6. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi (F=E/D)	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah (Prov/Kab /Kota)	2,05	0,74	36,23%	15	6	40%
Total			2,05	0,74	36,23%	15	6	40%

Sumber: Sintesa (diolah)

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik sub bidang Sanitasi- Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dengan total pagu sebesar Rp1,62 miliar. DAK Fisik tersebut dialokasikan pada Kabupaten Mesuji. Per Juni 2024, belum terdapat realisasi anggaran atas kegiatan tersebut.

3.2.4.6. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian memiliki alokasi sebesar Rp25,33 Miliar dengan realisasi mencapai Rp12,06 Miliar atau 47,62 persen. Terdapat 19 RO yang masuk dalam Bidang Pertanian dimana 11 kegiatan telah memiliki penyerapan. Realisasi tertinggi terdapat pada RO Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan dengan capaian 300 persen. RO Lainnya yang telah terserap 100 persen adalah RO Penumbuhan dan Penguatan P4S dan RO Perangkat Perlindungan Perkebunan.

Tabel 3.7. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi (F=E/D)	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Area penyaluran benih jagung	Hektar	6,75	0	0%	7.500	0	0%
2	Layanan Kesehatan Hewan	Layanan	6,25	6,25	100%	250.000	248.675	99,47%
3	Area penyaluran benih padi	Hektar	4,42	3,62	81,91%	13.000	24	0%
Total			17,42	9,87	56,66%	-	-	33,22%

Sumber: Sintesa (diolah)

Kegiatan dengan alokasi terbesar pada Bidang Pertanian adalah RO Area Penyaluran Benih Jagung. Program ini dilaksanakan dalam bentuk belanja barang bantuan lainnya berupa penyaluran benih jagung untuk diserahkan kepada masyarakat. Sampai dengan 30 Juni 2024 belum terdapat realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp6,75 Miliar. Capaian output juga masih menunjukkan realisasi nihil. Pada realisasinya, penyaluran benih jagung



kepada kelompok tani telah dilaksanakan pada triwulan II (akhir bulan Mei), akan tetapi realisasi yang tercatat masih nol karena belum selesai proses pertanggungjawabannya oleh satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung.

RO Layanan Kesehatan Hewan memiliki pagu terbesar kedua yaitu sebesar Rp6,25 Miliar dengan realisasi anggaran Rp6,25 Miliar atau 100 persen dari target dan capaian output 99,47 persen. Bentuk dari kegiatan tersebut adalah layanan pengendalian dan penanggulangan PMK (penyakit mulut dan kuku) melalui vaksinasi PMK dengan target sebanyak 250.000 dosis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi pengendalian dan penanggulangan risiko penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak di provinsi Lampung.

RO Area Penyaluran Benih Jagung dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan benih padi untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran Rp4,42 miliar dan telah terealisasi Rp3,62 miliar. Dari target output sejumlah 13.000 hektar, jumlah realisasi capaian output adalah sebanyak 24,18 hektar. Hingga 30 Juni 2024, proses pertanggungjawaban RO ini oleh satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung belum selesai menyebabkan jumlah capaian output yang dilaporkan masih 0,19 persen dari target.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Pertanian dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk area penyaluran benih jagung dengan pagu sebesar Rp6,75 miliar dilaksanakan di Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat.
- 2) Belanja untuk peningkatan area penyaluran benih padi dengan pagu sebesar Rp4,42 miliar dilaksanakan di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pringsewu dan Mesuji.

- 3) Belanja untuk Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur dengan pagu sebesar Rp796 juta dilaksanakan di seluruh Lampung Selatan.
- 4) Belanja untuk pembelian Prasarana Pascapanen Hortikultura dengan pagu sebesar Rp960 juta dilaksanakan di Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatannya atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik pada sub bidang Dukungan Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), alokasi anggaran terfokus pada pengembangan kawasan sentra produksi pangan di berbagai kabupaten. Lampung Selatan sebesar Rp15,07 miliar, Provinsi Lampung sebesar Rp7,89 miliar, dan Lampung Tengah sebesar Rp7,41 miliar. Sementara itu, Pesawaran memiliki pagu sebesar Rp9,2 miliar, Tanggamus sebesar Rp4,15 miliar, Tulang Bawang sebesar Rp2,9 miliar, dan Mesuji yaitu Rp1,39 miliar.

3.3. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Harmonisasi Belanja K/L

Pelaksanaan DAK Fisik yang diawali dengan penyusunan rancangan kriteria penilaian awal, yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama-sama antara Bappenas, K/L, dan Kemenkeu c.q. DJPK. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada kepala daerah pengusul untuk kemudian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi yang bertujuan antara lain untuk keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi; dan/atau pagu anggaran per jenis/bidang/sub bidang DAK fisik.

Hasil dari pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi tersebut akan disesuaikan dan dilakukan perhitungan alokasi DAK Fisik dengan memperhitungkan alokasi pada Satker K/L di daerah yang melaksanakan kegiatan pendukung DAK Fisik.

Dalam pelaksanaan belanja K/L terdapat beberapa tantangan yang dialami oleh satker pelaksana kegiatan yang selaras dengan DAK Fisik tersebut, antara lain:



a. Penganggaran, antara lain meliputi:

- Revisi Anggaran
 - Terdapat Pengurangan pagu anggaran pada Satker Kementerian Pertanian karena penyesuaian alokasi, seperti pengurangan kegiatan pelatihan.
 - Terdapat instruksi dari pusat untuk mengubah atau menambah kegiatan yang memerlukan penyesuaian kembali pada alokasi anggaran, contohnya pada Satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Revisi anggaran membutuhkan waktu karena harus mengikuti *timeline* yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Satker terkait, serta memerlukan validasi dan verifikasi di tingkat Kementerian dan DJA.
- Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana)
 - Revisi anggaran yang tidak segera selesai membuat pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda. Hal ini menyebabkan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang telah disusun oleh Satuan Kerja sebelumnya tidak optimal.
 - Tingginya deviasi pada Halaman III DIPA disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan dan *timeline* baru dari pusat sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu arahan dan menyebabkan penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA belum dapat dilakukan. Permasalahan ini terjadi pada seluruh Satker lingkup Kemendikbudristek di wilayah Provinsi Lampung.
- Blokir Anggaran
Satuan Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung mengalami adanya blokir anggaran di awal tahun untuk program banper berupa peralatan dan mesin. Proses buka blokir yang membutuhkan kesiapan semua dokumen dan data dukung membutuhkan waktu dan menyesuaikan kesiapan satker, yang menyebabkan Satuan Kerja harus menunggu hingga semua data dukung terkumpul dan revisi anggaran selesai baru dapat melaksanakan program.

- *Automatic Adjustment* (AA).
Ketidakpastian waktu pembukaan blokir anggaran AA yang tidak dapat diprediksi dan biasanya baru dibuka pada akhir triwulan III dan IV berpotensi menyebabkan tidak optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya kontrak yang membutuhkan proses panjang namun waktu yang tersedia tidak banyak. Kendala terkait AA merupakan kendala yang paling banyak terjadi pada Kementan dan Kemendikbudristek pada tahun 2024 ini.
- Sumber Dana SBSN
Terdapat belanja dengan sumber dana SBSN pada Satker Kementerian PUPR yang hingga akhir semester I baru terealisasi 20 persen, dengan kendala yang dihadapi adalah faktor cuaca yang kadang menghambat kegiatan pembangunan jalan, sehingga dijadwalkan akan terkonsentrasi di semester akhir.

b. Sumber Daya Manusia, antara lain meliputi:

- Keterbatasan Kapasitas SDM
 - Keterbatasan jumlah pegawai yang bersertifikasi pejabat perbendaharaan sehingga satker akan mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian belanja apabila pejabat perbendaharaan berhalangan maupun mutasi;
 - Arus mutasi pegawai yang dinamis pada satker mengakibatkan sering terjadinya perubahan pejabat dan staf pengelola keuangan yang belum mempunyai kompetensi maupun pengalaman di bidang perbendaharaan dan teknis pengoperasian aplikasi perbendaharaan seperti SAKTI.
- Pergantian Pejabat Perbendaharaan
Kegiatan yang masuk dalam kategori Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memiliki masalah dalam administrasi. Penyebabnya adalah SK pergantian KPA tidak segera diterbitkan di awal tahun oleh Gubernur sebagai pemegang dana Dekon-TP di daerah.





- Pemahaman terhadap Aplikasi
Kurangya kompetensi dan pemahaman SDM pengelola keuangan pada beberapa satker terhadap regulasi pengelolaan keuangan maupun pengoperasian aplikasi perbendaharaan. Selain itu, koordinasi internal satker yang belum optimal baik antar pengelola keuangan maupun antara pengelola keuangan dengan tim teknis pada satuan kerja sehingga rencana dan realisasi yang kurang sejalan bahkan kegiatan yang tidak terlaksana.
- c. Eksekusi Kegiatan, antara lain meliputi:
- Faktor Luar
Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, kondisi lapangan tidak selalu dapat diprediksi. Misalnya cuaca yang terlalu ekstrem atau material yang tidak tersedia. Hal ini menjadi hambatan salah satunya bagi Satker di Kementerian PUPR.
 - Kesiapan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, Dokumen Pelaksanaan Lain
Terlambatnya penerbitan Juknis oleh Kantor Pusat Kementan yang baru diterbitkan di Bulan April tahun berjalan, menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga terjadi pada satker Kemendikbudristek yang sesuai arahan kantor pusat harus menambah kegiatan. Namun, kegiatan tersebut harus menunggu juknis dan menyesuaikan *timeline* yang disusun oleh kantor pusat.
 - Proses pembagian bantuan
Kegiatan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan pada Kementerian Pertanian mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan ke Kabupaten Pesisir Barat dan Way Kanan karena jauhnya lokasi target bantuan sehingga realisasi masih belum berjalan.
- d. Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain:
- Proses Lelang
Beberapa K/L memiliki sistem lelang secara terpusat salah satunya pada Kementerian Pendidikan. Kontrol satker atas pelaksanaan lelang secara terpusat sangat rendah

sehingga satker hanya mengikuti petunjuk dari kantor pusat maupun kanwil. Pada salah satu satker juga mengalami hambatan proses lelang akibat permasalahan pada aplikasi LKPP, mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk proses lelang menjadi lebih lama, dan mundurnya pelaksanaan pekerjaan.

e. Regulasi Pelaksanaan Anggaran, antara lain:

Munculnya PMK 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK yang secara tidak langsung memunculkan pergeseran kegiatan DAK Fisik yang dikelola pemda sehingga turut berdampak juga pada kegiatan penunjang DAK Fisik pada K/L. Diharapkan pemda pengelola DAK Fisik dapat terus berkoordinasi secara aktif dengan K/L terkait agar pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan kegiatan penunjang dapat berjalan maksimal.

3.4. Kendala dan Tantangan Pelaksanaan DAK Fisik pada 6 Bidang

Hingga akhir semester I-2024, dari 6 bidang yang dilakukan harmonisasi, terdapat 3 bidang DAK Fisik yang belum memiliki realisasi penyaluran. Bidang Air Minum, bidang Sanitasi, dan bidang Pertanian menunjukkan belum adanya penyaluran dan realisasi.

Rendahnya penyaluran dan penyerapan ini turut dipengaruhi oleh kendala dan tantangan yang dihadapi Pemda dalam melaksanakan DAK Fisik di wilayahnya. Adapun permasalahan selama semester I-2024 di wilayah Provinsi Lampung yang dihimpun berdasarkan pendalaman bersama KPPN dan Pemda adalah sebagai berikut:

1. Terbitnya PMK Nomor 25/PMK.07/2024 pada tanggal 16 April 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik memerlukan pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan DAK Fisik di wilayah masing-masing guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Peluncuran aplikasi OMSPAN TKD dengan menu DAK Fisik untuk periode tahun 2024





- yang baru mulai diimplementasikan pada awal triwulan II tahun 2024 telah menyebabkan keterlambatan dalam proses entri data kontrak oleh pemerintah daerah.
3. Pergantian pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki alokasi DAK Fisik, ditambah dengan kurangnya koordinasi di unit-unit terkait, turut berkontribusi terhadap tertundanya proses penyelesaian administrasi yang diperlukan untuk penyaluran DAK Fisik secara tepat waktu.
 4. Penyaluran DAK Fisik untuk Bidang Air Minum dan Sanitasi yang dialokasikan di Kabupaten Mesuji mungkin tidak dapat terealisasi hingga akhir tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh lokasi relokasi baru yang dinilai cukup jauh dari lokasi yang ditetapkan dalam tahap perencanaan, serta terbatasnya waktu dan sumber daya untuk mempersiapkan lahan relokasi secara memadai pada tahun berkenaan.

3.5. Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan RO Harmonis DAK Fisik yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian Lembaga melakukan berbagai upaya.

Pertama, sinkronisasi perencanaan anggaran menjadi langkah kunci. Ini melibatkan analisis pada tahap penyusunan anggaran untuk menghindari tumpang tindih antara APBD dan APBN, terutama yang terkait dengan DAK Fisik. Sebagai contoh, Satker Kementerian Kesehatan di Lampung memimpin koordinasi dengan Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota. Setelah tahap diskusi regional, hasil analisis bersama diverifikasi secara terpusat untuk meningkatkan efisiensi penganggaran.

Kedua, evaluasi rutin menjadi penting dalam memantau pelaksanaan anggaran. Misalnya, Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan pemerintah daerah, seringkali melalui platform daring. Mekanisme ini memungkinkan pemantauan progres pelaksanaan program secara berkala, memastikan ketercapaian target yang ditetapkan.

Ketiga, koordinasi Satker dan Pemda kepada KPPN dan Kanwil DJPb menjadi strategis dalam mengatasi hambatan pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah mencari solusi atas permasalahan yang mungkin timbul sehingga pelaksanaan anggaran tidak terhambat oleh kendala administratif atau teknis.

Ke depan, harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu lebih menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan kerangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) yang diatur dalam PP 1 tahun 2024. Proses ini melibatkan penyalarsan antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah. Selain itu, harmonisasi Belanja DAK Fisik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan RO Harmonis Belanja K/L Pendukung DAK Fisik melalui Kementerian Lembaga juga perlu dimasukkan dalam kerangka ini. Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“ Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan mengelola APBN secara baik dan bertanggung jawab ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB IV

**Analisis Tematik:
Perubahan Iklim dan
Upaya Pemerintah untuk
Memitigasi Dampaknya**

 Islamic Cener, Tulang Bawang Barat

BAB IV ANALISIS TEMATIK:

PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMITIGASI DAMPAKNYA

4.1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi isu sentral yang menantang berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan meningkatnya suhu global, perubahan pola cuaca yang ekstrem, dan dampak yang meluas pada lingkungan, perubahan iklim tidak hanya memengaruhi ekosistem tetapi juga menimbulkan tantangan signifikan bagi sektor ekonomi. Fenomena seperti pemanasan global, fluktuasi curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan habitat alami kini menjadi isu yang mendesak, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia.

Konsekuensi dari perubahan iklim sangat nyata. Dalam sektor pertanian, perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian hasil panen, sementara infrastruktur dan properti semakin rentan terhadap kerusakan akibat bencana cuaca. Industri pariwisata juga menghadapi tantangan dengan perubahan iklim yang dapat merusak daya tarik destinasi wisata. Selain itu, kesehatan masyarakat terancam oleh penyebaran penyakit yang dipicu oleh perubahan kondisi lingkungan, sementara sektor keuangan harus menyesuaikan diri dengan risiko ekonomi yang meningkat.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan dan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Mulai dari pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, hingga pengelolaan hutan dan lahan serta kebijakan regulasi, semua ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menangani krisis iklim. Selain itu, kerja sama internasional juga memainkan peran penting dalam upaya mitigasi global.

Bab ini berfokus pada topik **Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya**. Dalam bab ini, terdapat tiga poin utama akan menjadi sorotan utama.

1. Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional, utamanya di Provinsi Lampung.
2. Analisis *policy responses* Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim.
3. Evaluasi atas *policy response* pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

4.2. ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KINERJA SEKTOR PEREKONOMIAN REGIONAL

4.2.1. Fenomena Perubahan Iklim

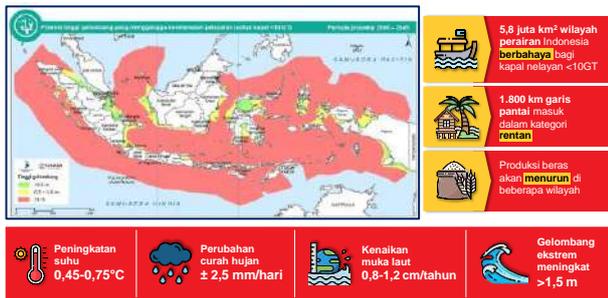
4.2.1.1. Fenomena Umum pada Level Global, Nasional, dan Lampung

Laporan Penilaian Keenam IPCC 2022 menggarisbawahi peringatan merah terhadap ketahanan dampak iklim, menekankan bahwa sejumlah dampak perubahan iklim telah mencapai tingkat keparahan yang tidak dapat diatasi, sehingga membutuhkan tindakan *Loss & Damage* yang mendesak. Data menunjukkan bahwa lebih dari 91 persen kematian di negara-negara berkembang antara tahun 1970 dan 2019 disebabkan oleh cuaca ekstrem, krisis iklim, dan kerentanan air, menegaskan urgensi aksi global untuk mengurangi dampak ini (IPCC, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2017 mencapai 2,908 miliar USD, menunjukkan dampak signifikan bencana terhadap perekonomian negara. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 77 persen dari total kerugian tersebut, atau setara dengan 2,245 miliar USD, disebabkan oleh bencana yang terkait dengan perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kerugian ekonomi Indonesia akibat bencana alam

secara langsung berhubungan dengan dampak perubahan iklim (Bappenas, 2022).

Gambar 4.1. Dampak Negatif Perubahan Iklim di Indonesia dan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas LHK Provinsi Lampung, 2024

Gambar di atas menunjukkan dampak negatif perubahan iklim di Indonesia dan Provinsi Lampung. Peningkatan suhu rata-rata di Indonesia sebesar 0,45-0,75 derajat Celcius telah menyebabkan berbagai masalah seperti gelombang panas, kekeringan, dan perubahan pola musim, sementara perubahan curah hujan yang signifikan dengan rata-rata ± 75 mm per bulan memicu bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Selain itu, kenaikan muka air laut yang diperkirakan mencapai 0,8-1,2 cm per tahun mengancam wilayah pesisir, terutama pulau-pulau kecil, dengan risiko banjir rob yang lebih sering dan intens. Dampaknya terhadap nelayan juga sangat signifikan, dengan luas wilayah perairan berbahaya bagi kapal nelayan kecil mencapai 5,8 juta km², yang tidak hanya membahayakan keselamatan mereka tetapi juga mengancam mata pencaharian. Terakhir, sekitar 18.000 km garis pantai di Indonesia tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim, menghadapi risiko abrasi, intrusi air laut, dan bencana lainnya (Bappeda, 2024).

4.2.1.2. Fenomena Spesifik pada Beberapa Daerah di Regional Lampung

Provinsi Lampung menghadapi tantangan signifikan akibat perubahan iklim yang terus berkembang, utamanya karena sektor basis pertanian dan sisi pesisir laut yang rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, fenomena perubahan iklim di wilayah ini mencakup beberapa aspek penting yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Pemanasan Global

Pemanasan global menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi suhu udara di Lampung. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu udara tertinggi di Lampung Utara mencapai 38°C pada Mei 2024. Suhu rata-rata di Indonesia pada April 2024 tercatat sebagai yang tertinggi sejak tahun 1981, mencerminkan tren pemanasan global yang semakin intensif (BMKG, 2024). Peningkatan suhu ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan mengganggu ekosistem lokal.

Perubahan Pola Hujan

Perubahan pola hujan di Lampung juga merupakan masalah serius. Pada tahun 2023, tujuh kabupaten/kota mengalami kekeringan ekstrem, yang menyebabkan 765 hektar sawah mengalami kekeringan. Studi terbaru oleh Pratiwi (2022) mengungkapkan bahwa selama 23 tahun terakhir (1998–2020), Kota Bandar Lampung mengalami perubahan signifikan dalam suhu maksimum, curah hujan di musim penghujan, dan curah hujan di musim kemarau. Pola hujan yang tidak stabil ini mengancam ketahanan pangan dan mempengaruhi sektor pertanian secara luas.

Kenaikan Permukaan Air Laut

Kenaikan permukaan air laut merupakan ancaman nyata bagi pulau-pulau kecil di Lampung. Menurut data Walhi (2024), empat pulau berpotensi tenggelam di provinsi ini termasuk Pulau Sagama dan Pulau Sekopong di Kabupaten Lampung Timur, Pulau Kubur di Kota Bandar Lampung, serta Pulau Umang di Kabupaten Lampung Selatan. Kenaikan permukaan air laut tidak hanya mengancam habitat alami tetapi juga berdampak pada komunitas pesisir yang bergantung pada pulau-pulau tersebut untuk mata pencaharian mereka.

Gambar 4.2. Fenomena Perubahan Iklim pada beberapa daerah di regional Lampung



Sumber: BMKG (2024), Walhi (2024), KLHK (2024), Pratiwi (2022)

Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan di Lampung telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hingga tahun 2021, sekitar 37,42 persen dari total luas hutan mengalami kerusakan. Kerusakan ini meliputi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Penurunan kualitas hutan ini berpotensi mengurangi keanekaragaman hayati dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem (KLHK, 2021).

4.2.2. Sektor Ekonomi Paling Terdampak Perubahan Iklim di Lampung

Bappenas (2022) memprediksi potensi kerugian ekonomi di Provinsi Lampung akibat perubahan iklim mencapai total Rp3,62 triliun, dengan kerugian terbesar berasal dari sektor pertanian yang diperkirakan mencapai Rp2,65 triliun.

Grafik 4.1. Fenomena Perubahan Iklim pada beberapa daerah di regional Lampung (Rp Miliar)



Sumber: Bappenas (diolah)

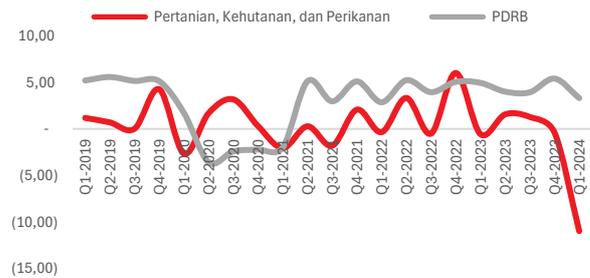
Sektor-sektor lainnya yang turut mengalami kerugian signifikan meliputi sektor kesehatan dengan estimasi kerugian sebesar Rp502,94 miliar, sektor air sebesar Rp237,05 miliar, serta sektor pesisir dan kelautan dengan kerugian masing-masing sebesar Rp164,99 miliar dan Rp69,34 miliar. Sedangkan secara nasional, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan

mencapai Rp281,90 triliun dalam periode 2020 hingga 2024 (Bappenas, 2022).

4.2.2.1. Dampak terhadap Sektor Pertanian

Pada triwulan I 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan, tercatat hanya 3,3 persen (yoy), jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi tajam di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang secara langsung terpengaruh oleh fenomena El Nino. El Nino, yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, memicu perubahan pola cuaca ekstrem dan tidak menentu di wilayah Lampung, berimbas pada berbagai sektor ekonomi.

Grafik 4.2. Perbandingan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Q1-2019 s.d. Q1-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar -10,97 persen (yoy). Hal ini salah satunya diakibatkan oleh dampak puncak El Nino berkepanjangan pada tahun 2023/2024. Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi hasil panen tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan lokal, menyebabkan kekurangan pasokan pangan dan lonjakan harga. Salah satu dampak utama dari El Niño utamanya kekeringan berkepanjangan, menyebabkan penurunan produktivitas sektor pertanian di Lampung. Produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai mengalami penurunan signifikan akibat kekurangan air dan gangguan pada siklus tanam dan panen.

Kontraksi pertumbuhan pertanian yang dalam ini mengkonfirmasi analisis Bappenas (2022) dimana menyatakan bahwa potensi penurunan produksi



padi Provinsi Lampung termasuk dalam kategori tinggi, yaitu mencapai kisaran 10,10 persen hingga 17,50 persen.

Kekurangan air akibat perubahan iklim dapat meningkatkan biaya operasional petani, terutama untuk irigasi dan pemeliharaan tanaman, yang pada gilirannya menekan margin keuntungan dan mengurangi hasil panen. Dampak ini memperburuk kondisi ekonomi sektor pertanian, mempengaruhi kesejahteraan petani, serta stabilitas harga pangan. Penurunan produksi juga berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi yang lebih luas, mengurangi daya beli masyarakat, dan berdampak pada sektor-sektor lain yang bergantung pada hasil pertanian.

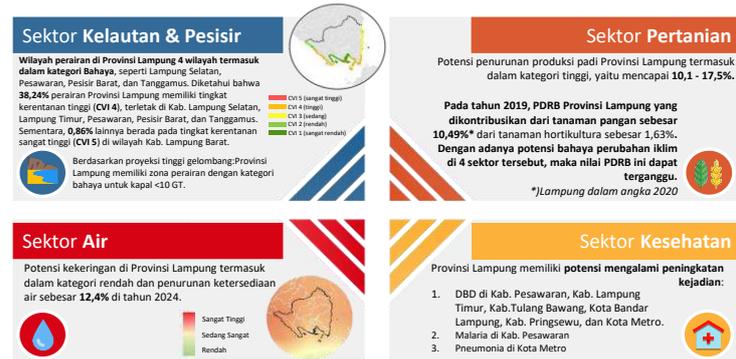
4.2.2.2. Dampak terhadap Sektor Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan proyeksi tinggi gelombang, Provinsi Lampung memiliki zona perairan yang berbahaya untuk kapal dengan bobot di bawah 10 gross ton (GT). Empat wilayah perairan yang termasuk dalam kategori bahaya adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Selain itu, sekitar 38,24 persen pesisir Provinsi Lampung memiliki kerentanan tinggi atau *Coastal Vulnerability Index* (CVI) kelas 4, yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Sementara itu, 0,6 persen wilayah pesisir lainnya, yang terletak di Kabupaten Tanggamus, berada pada tingkat kerentanan sangat tinggi (CVI kelas 5) (Bappenas, 2022). Kenaikan gelombang dan permukaan air laut akibat perubahan iklim akan berdampak pada risiko inefisiensi distribusi sektor perikanan di Lampung, terutama bagi nelayan kecil. Selanjutnya, sebuah studi kasus di Lampung Timur menemukan bahwa perubahan suhu laut dan pola arus juga mempengaruhi habitat alami rajungan, sehingga nelayan rajungan di wilayah tersebut menghadapi penurunan populasi rajungan yang drastis serta pergeseran lokasi tangkapan yang semakin jauh dari pesisir, dimana imbasnya adalah biaya kebutuhan solar yang semakin tinggi (Widiyanto, 2024).

Perubahan suhu laut yang tidak stabil dan arus yang berubah-ubah memengaruhi distribusi dan keberadaan rajungan, yang berdampak langsung terhadap efisiensi nelayan. Akibat perubahan ini, biaya produksi untuk melaut meningkat tajam. Kebutuhan solar melonjak dari 10 liter menjadi 30 liter per perjalanan melaut (Widiyanto, 2024), yang secara signifikan menambah beban ekonomi bagi nelayan.

Selain itu, hasil tangkapan rajungan mengalami penurunan yang mencolok. Lima tahun lalu, nelayan menangkap 50-70 kg rajungan per trip, namun saat ini hanya 3-5 kg pada musim biasa dan 15-30 kg pada musim puncak (Widiyanto, 2024). Penurunan ini berisiko mempengaruhi pendapatan nelayan, ketahanan pangan lokal, dan ekonomi komunitas pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

Gambar 4.3. Potensi Bahaya Perubahan Iklim di Provinsi Lampung



Sumber: Bappeda (2024)

4.2.2.3. Dampak terhadap Sektor Pariwisata Pesisir Laut

Kondisi kerentanan 38 persen pesisir pada level CVI kelas 4 dan 0,6 persen pesisir pada level CVI kelas 5 di Provinsi Lampung juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap daerah-daerah pesisir dengan pariwisata potensial. Empat kabupaten di Lampung—Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tanggamus—teridentifikasi sebagai wilayah yang berisiko paling akan terdampak.

Kerentanan pesisir yang signifikan menghadirkan risiko kompleks bagi sektor pariwisata pesisir laut. Penurunan kunjungan wisatawan adalah salah satu risiko utama, di mana risiko gelombang tinggi dan kondisi laut yang tidak stabil dapat menurunkan





rasa aman wisatawan. Kekhawatiran mengenai keselamatan dapat mengurangi minat dan efisiensi terhadap aktivitas wisata bahari seperti *snorkeling*, *diving*, dan berlayar, dan pemerintah atau pengelola wisata mungkin perlu menerapkan pembatasan aktivitas di wilayah pesisir yang lebih berisiko untuk menjaga keselamatan pengunjung.

Kerentanan pesisir yang tinggi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lebih cepat pada infrastruktur pariwisata. Abrasi pantai yang meningkat dapat merusak fasilitas penting seperti hotel, restoran, dan jalan akses yang vital bagi operasional sektor pariwisata. Selain itu, gelombang tinggi berisiko merusak fasilitas wisata lainnya, seperti dermaga, yang esensial untuk aktivitas wisata bahari dan transportasi kapal. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya berisiko mempengaruhi kenyamanan wisatawan tetapi juga dapat mengganggu pendapatan dan keberlanjutan industri pariwisata lokal, yang mana salah satu peluang investasi pariwisata paling besar di Lampung adalah wisata pesisir pantai.

Perubahan ekosistem yang disebabkan oleh kondisi perairan dan kerentanan pesisir berisiko mengancam daya tarik utama pariwisata. Gelombang tinggi dan sedimentasi akibat erosi berisiko merusak terumbu karang, yang merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang menyukai *snorkeling* dan *diving*. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali juga dapat berisiko merusak keindahan alam bawah laut, memperburuk daya tarik wisata, dan mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir.

4.2.2.4. Dampak terhadap Sektor Kesehatan

Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama melalui peningkatan kasus penyakit menular.

Salah satu penyakit yang terdampak adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan potensi peningkatan kejadian akibat perubahan iklim paling banyak pada Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Timur, Kab. Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kab. Pringsewu, dan Kota Metro (Bappenas, 2022).

Perubahan iklim menciptakan kondisi yang lebih hangat dan lembap, lingkungan ideal bagi nyamuk *Aedes Aegypti*, vektor utama penyakit ini. Peningkatan curah hujan yang tidak teratur juga menyebabkan genangan air yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk, memperburuk risiko penyebaran DBD.

Malaria juga dipengaruhi oleh perubahan iklim meskipun secara tidak langsung, dengan peningkatan potensi kejadian khususnya di Kab. Pesawaran (Bappenas, 2022). Peningkatan suhu dapat mempercepat siklus hidup nyamuk *Anopheles*, vektor malaria, sementara perubahan pola curah hujan memengaruhi distribusi nyamuk ini dan meningkatkan risiko penularan. Selain itu, perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem seperti banjir dan badai, yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur kesehatan, mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, termasuk pneumonia, dengan potensi peningkatan kejadian pada Kota Metro (Bappenas, 2022).

Peningkatan kasus penyakit menular seperti DBD, malaria, dan pneumonia berpotensi meningkatkan beban penyakit di fasilitas kesehatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan perawatan pasien dan biaya yang dikeluarkan, membebani sistem kesehatan lokal. Kasus-kasus berat dari penyakit-penyakit ini juga dapat menyebabkan kematian, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan mendasar.

Selain beban kesehatan, dampak ekonomi juga menjadi perhatian serius. Peningkatan kasus penyakit mengurangi produktivitas masyarakat, mengurangi pendapatan keluarga, dan meningkatkan pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Risiko kerugian ekonomi ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Lampung, menambah tantangan bagi masyarakat yang harus menghadapi beban kesehatan dan finansial yang meningkat.

4.2.2.5. Dampak terhadap Sektor Air





Meskipun potensi kekeringan di Provinsi Lampung masih rendah, data terbaru menunjukkan penurunan ketersediaan air sebesar 12,40% pada tahun 2024 dibandingkan sebelumnya, yang perlu segera ditangani. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan pola curah hujan yang semakin tidak menentu, dengan musim kering yang lebih panjang dan hujan yang datang dalam intensitas tinggi namun singkat, serta peningkatan suhu yang mempercepat penguapan air dan mengurangi kelembaban tanah.

Selain itu, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat di Lampung meningkatkan permintaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, sektor pertanian bisa mengalami penurunan produksi, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air, yang bisa menaikkan harga pangan dan mengancam ketahanan pangan.

Penurunan ketersediaan air bersih juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih mengandalkan air permukaan, serta mengganggu ekosistem, menyebabkan degradasi lahan, dan mengancam keanekaragaman hayati. Upaya untuk mengelola air dengan lebih efisien dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di Lampung.

4.3. ANALISIS POLICY RESPONSES PEMERINTAH DALAM MEMITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

4.3.1. Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Belanja Negara dan Daerah

Perubahan iklim menghadirkan tantangan signifikan bagi sektor perekonomian di Lampung. Untuk mengatasi dampaknya, intervensi pemerintah melalui kebijakan belanja negara dan daerah difokuskan pada upaya adaptasi dan mitigasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi regional. Anggaran dialokasikan untuk memperkuat ketahanan sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan infrastruktur, guna memastikan stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi Lampung di tengah ancaman perubahan iklim.

4.3.1.1. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat terkait Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Lampung

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengidentifikasi Belanja Pemerintah Pusat terkait perubahan iklim di Provinsi Lampung selama tahun 2021 s.d. 2024. Adapun proses identifikasi (*tagging*) data belanja pemerintah pusat dilakukan melalui penilaian terhadap setiap *item* anggaran untuk menentukan relevansi dan kontribusinya terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tabel 4.1. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Terkait Perubahan Iklim per Program di Lampung 2021 s.d. 2024

Program Terkait Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Total Pagu (Rp Miliar)	Porsi (%)
Program Ketahanan Sumber Daya Air	2.778,21	66,91
Program Infrastruktur Konektivitas	541,14	13,03
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	537,48	12,95
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	152,56	3,67
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	131,38	3,16
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	6,75	0,16
Program Kualitas Lingkungan Hidup	2,14	0,05
Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	0,80	0,02
Program Perlindungan Sosial	0,71	0,02
Program Kesehatan Masyarakat	0,45	0,01
Program Penyiaran Publik	0,25	0,01
Total	4.151,96	100,00

Sumber: Sintesa dan OM-SPAN, 2024 (diolah)

Secara umum, selama empat tahun terakhir, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp4.151,96 miliar untuk program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Lampung. Alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mendesak.

Belanja pemerintah pusat di Lampung menunjukkan alokasi yang dominan pada Program Ketahanan Sumber Daya Air, yang mendapatkan porsi terbesar sebesar Rp2.778,21 miliar atau 66,91% dari total anggaran. Fokus utama pada program ini menunjukkan prioritas yang tinggi dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, terutama dalam menghadapi ancaman seperti kekeringan dan fluktuasi curah hujan yang ekstrem. Ketahanan sumber daya air merupakan komponen krusial dalam memastikan ketersediaan air bersih, mendukung pertanian, dan menjaga ekosistem yang bergantung pada sumber air. Alokasi yang besar ini penting karena dapat





membantu memperkuat infrastruktur dan sistem manajemen air, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mencegah potensi krisis air di masa depan.

Program-program lain seperti Infrastruktur Konektivitas, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pengelolaan Hutan Berkelanjutan juga mendapatkan perhatian signifikan. Program Infrastruktur Konektivitas, dengan alokasi sebesar Rp541,14 miliar (13,03 persen), dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebesar Rp537,48 miliar (12,95 persen), menunjukkan usaha pemerintah untuk memperkuat jaringan infrastruktur dan meningkatkan kualitas perumahan yang berkelanjutan. Kedua aspek ini penting dalam mendukung pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

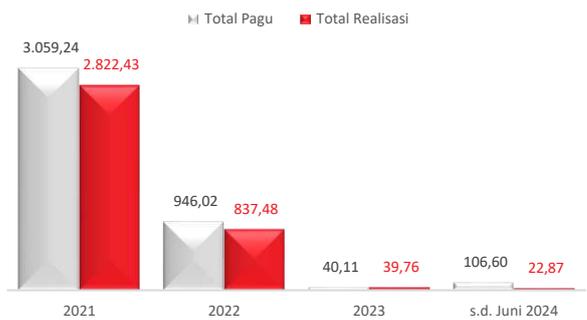
Sementara itu, alokasi untuk Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp152,56 miliar (3,67 persen) menunjukkan upaya dalam menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan hutan yang efektif dapat mengurangi emisi karbon, melindungi biodiversitas, dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.

Selama 4 tahun terakhir, berbagai output terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menunjukkan pencapaian cukup baik. Beberapa diantaranya, pada Program Ketahanan Sumber Daya Air mencatat pembangunan 28 unit bangunan penyediaan air baku mandiri (ABSAH) atau bangunan Penampung Air Hujan (PAH), 16 unit bendung, dan 1 unit bendungan Margatiga yang memiliki kapasitas tampung sebesar 42,31 juta m³ dengan luas genangan 2.217 Hektare dan tinggi bendungan 22,5 m, serta perawatan 254 unit embung. Peningkatan pada daerah irigasi seperti Way Seputih dan Way Umpu juga tercatat dengan total panjang 91 km. Sementara itu, pada sektor kesehatan masyarakat, sebanyak 15 kabupaten/kota telah dibina dalam

upaya pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan serta pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup, kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola mencakup luas 72.212 hektar, dengan 5 mata air yang dipulihkan. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan mencatat rehabilitasi hutan dan ekosistem seluas sekitar 371.528 hektare serta distribusi benih dan bibit berkualitas sebanyak 8,64 juta benih/batang. Terakhir, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan mencakup beberapa distribusi pengembangan kluster kawasan tambak, dengan pembinaan 42 kelompok masyarakat pengawas, distribusi 9.378 kg bibit rumput laut yang ke masyarakat (PEN), dan distribusi 127.752 kg pakan ikan kepada masyarakat (PEN).

Grafik 4.3. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. Juni 2024 (Rp Miliar)



Sumber: Sintesa dan OMSPAN, 2024 (diolah)

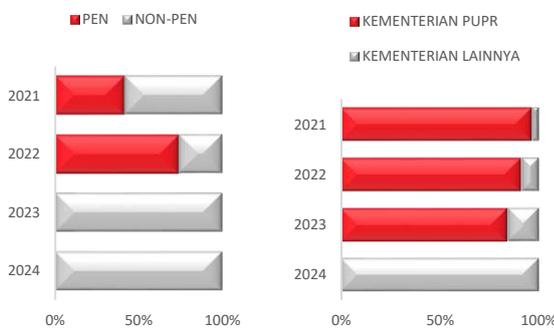
Berdasarkan tren dalam 4 tahun terakhir, analisis data anggaran perubahan iklim di Provinsi Lampung menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam alokasi anggaran Belanja K/L untuk program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun demikian, pagu anggaran belanja K/L terkait perubahan iklim pada tahun 2024 meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2023. Adapun anggaran perubahan iklim di Provinsi Lampung pada tahun 2021 dan 2022 jauh lebih tinggi karena beberapa hal, yaitu:

1. Terdapat anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan COVID-19, dimana dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi, yang



- menyumbang sebesar 26,54 persen dari total pagu anggaran kedua tahun tersebut; serta
2. Terdapat pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan bendungan, serta jalan dan irigasi yang mendukung upaya memitigasi dampak perubahan iklim terkait sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi basis dan unggulan di Lampung, dimana menyumbang sebesar 95,39 persen dari total pagu pada kedua tahun tersebut.

Grafik 4.4. Clustering Proporsi Pagu Anggaran terbesar terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. 2024 (%)



Sumber: Sintesa dan OMSPAN, 2024 (diolah)

Secara detail, anggaran terbesar terdapat di tahun 2021, dengan *top five* pengeluaran tertinggi pada tahun tersebut, antara lain: pembangunan Bendungan Way Sekampung dengan realisasi belanja sebesar Rp644,65 miliar (21,81 persen dari total pagu 2021); preservasi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan sebesar Rp442,63 miliar (14,97 persen dari total pagu 2021); pembangunan Bendungan Margatiga sebesar Rp441,11 miliar (14,92 persen dari total pagu 2021); perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp189,93 miliar (14,97 persen dari total pagu 2021); serta peningkatan daerah irigasi Way Umpu sebesar Rp154,66 miliar (14,97 persen dari total pagu 2021).

Fokus belanja PEN dan pembangunan proyek strategis terkait irigasi dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa *social buffer strategy* yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dampak COVID-19 juga selaras dengan upaya mitigasi dampak perubahan iklim terhadap

sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Banyak program belanja K/L pada periode tersebut difokuskan pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan yang merupakan sektor utama di Provinsi Lampung dan paling terdampak oleh perubahan iklim (peningkatan suhu udara, perubahan pola curah hujan, perubahan ekosistem dan biodiversitas, cuaca ekstrem, dan pengaruh ketahanan pangan). Diharapkan ke depan agar implementasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim semakin diurusutamakan dalam perencanaan dan penganggaran sektoral untuk memastikan bahwa penanganan perubahan iklim menjadi bagian integral pembangunan pusat dan daerah secara berkelanjutan.

Grafik 4.5. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Terkait Perubahan Iklim di Lampung Semester I Tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: Sintesa dan OMSPAN, 2024 (diolah)

Dalam hal penyerapan anggaran, tingkat realisasi anggaran setiap tahunnya relatif tinggi, menunjukkan upaya maksimal dari K/L untuk melaksanakan program yang ada, dengan rata-rata capaian penyerapan tahunan sebesar 94,87 persen dalam 3 tahunan terakhir. Namun demikian, melihat kinerja capaian penyerapan anggaran semester 1 selama 4 tahun terakhir, satuan kerja diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran di tahun 2024 karena capaian penyerapan *year-on-year* semester I-2024 yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, semakin terbatasnya alokasi anggaran dan perlunya akselerasi penyerapan belanja perubahan iklim menyoroti pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program adaptasi dan perubahan iklim di regional Lampung. Evaluasi dimaksud penting guna mengoptimalkan



kualitas capaian, cakupan, dan desain program terbaik untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, dengan semakin terbatasnya anggaran, pemerintah pusat dan daerah seyogyanya perlu mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta, lembaga donor nasional maupun internasional, atau mekanisme pendanaan berbasis kinerja mitigasi perubahan iklim internasional, guna meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara lebih kolaboratif dan *impactful*.

4.3.1.2. Alokasi Transfer Ke Daerah terkait Perubahan Iklim di Lampung

Pada sub bab ini, analisis akan difokuskan pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun pemerintah desa di Provinsi Lampung. Meneliti DAK Fisik dan Dana Desa penting karena kedua instrumen ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim di tingkat komunitas lokal. Anggaran ini mendukung secara langsung maupun tidak langsung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah Lampung selama periode tahun 2021 hingga 2024.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terkait Perubahan Iklim

Selama empat tahun terakhir, Provinsi Lampung telah menerima alokasi DAK Fisik yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar total Rp6.377,86 miliar. Secara rata-rata, porsi DAK Fisik ini mencapai 3,63 persen dari total keseluruhan pagu DAK Fisik di Provinsi Lampung setiap tahunnya. Grafik XXX mengilustrasikan klasterisasi DAK Fisik yang berhubungan dengan perubahan iklim di Lampung selama periode tersebut.

Meskipun tren alokasi DAK Fisik terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Lampung menunjukkan stabilitas selama periode 2021 hingga Juni 2024, terdapat sedikit penurunan dalam

anggaran dari Rp213,81 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp209,74 miliar pada tahun 2024, yang mencerminkan penurunan sebesar 0,98 persen (*year-on-year*).

Grafik 4.6. Clustering DAK Fisik Terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. Juni 2024 (Pagu dan Realisasi dalam Rp Miliar)



Sumber: OMSPAN dan OMSPAN-TKD, 2024 (diolah)

Secara rinci, alokasi DAK Fisik terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir telah digunakan untuk beberapa *output* pembangunan penting. Misalnya, sebesar Rp129,90 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi yang berperan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan cuaca dan kemarau yang lebih panjang terhadap pertanian. Selain itu, dukungan ketahanan pangan lainnya terhadap risiko perubahan iklim yang dilaksanakan melalui pembangunan jalan dan sentra produksi pertanian dan hewani mencapai Rp433,42 miliar. Pemeliharaan kehutanan dan lingkungan hidup yang berperan dalam adaptasi dan mitigasi kerusakan alam, dalam rangka penguatan sentra produksi, ketahanan pangan, dan destinasi pariwisata, memperoleh alokasi sebesar Rp34,81 miliar. Dukungan terhadap adaptasi dan mitigasi risiko iklim terhadap produksi kelautan dan perikanan mendapatkan Rp56,36 miliar.

Berdasarkan realisasi DAK Fisik di Lampung selama empat tahun terakhir, setiap kabupaten/kota telah menerima alokasi dana terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meskipun distribusinya tidak sepenuhnya merata. Rata-rata, setiap kabupaten/kota menerima realisasi belanja DAK Fisik sebesar Rp45,58 miliar. Kabupaten Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Lampung Tengah merupakan beberapa daerah yang



mendapatkan realisasi belanja DAK Fisik terkait perubahan iklim di atas rata-rata.

Grafik 4.7. Realisasi DAK Fisik Terkait Perubahan Iklim di Lampung per Lokasi pada 2021 s.d. Juni 2024 (Rp Miliar)



Sumber: OMSPAN dan OMSPAN-TKD, 2024 (diolah)

Selain itu, terdapat porsi besar DAK Fisik terkait perubahan iklim sebesar Rp197,18 miliar atau 27,04 persen dari total belanja DAK Fisik terkait perubahan iklim selama empat tahun tersebut yang direalisasikan tersebar ke seluruh regional Sumatera. Dari alokasi ini, diharapkan distribusi belanja DAK Fisik terkait perubahan iklim dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah, guna memaksimalkan efektivitas dan efisiensi program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di regional Lampung.

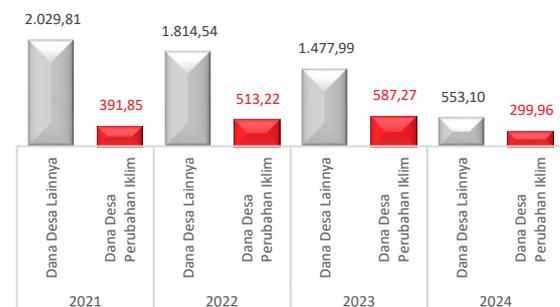
Dana Desa Terkait Perubahan Iklim

Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Lampung, terutama dalam memperkuat ketahanan masyarakat pedesaan terhadap ancaman iklim yang semakin nyata. Lampung, sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk banjir, kekeringan, dan penurunan produktivitas lahan, memerlukan strategi khusus untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam konteks ini, Dana Desa menjadi instrumen penting untuk mengimplementasikan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan desa-desa terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, selama periode 2021 hingga Juni 2024, total alokasi dana desa untuk program perubahan iklim mencapai Rp1.792,29 miliar atau sekitar 23,30 persen dari total realisasi Dana Desa

sebesar Rp7.667,73 miliar di regional Lampung. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan upaya adaptasi di tingkat desa, namun juga menyoroti tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan alokasi tersebut di tengah berbagai kebutuhan desa lainnya. Peningkatan alokasi yang lebih konsisten dan strategis diperlukan untuk memastikan keberlanjutan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Lampung.

Grafik 4.8. Clustering Dana Desa Terkait Perubahan Iklim di Lampung 2021 s.d. Juni 2024 (Realisasi dalam Rp Miliar)



Sumber: OMSPAN dan OMSPAN-TKD, 2024 (diolah)

Analisis data terkait alokasi Dana Desa untuk berbagai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Lampung menunjukkan distribusi yang luas dan komprehensif dalam upaya meningkatkan ketahanan desa terhadap dampak lingkungan. Dari kegiatan yang dibiayai anggaran Dana Desa, terlihat bahwa pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur terkait air, seperti sumber air bersih, sumur resapan, dan saluran irigasi, merupakan fokus utama. Kegiatan ini mendukung pengelolaan sumber daya air yang efektif, yang sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat menyebabkan fluktuasi curah hujan dan kekeringan. Pembangunan dan pemeliharaan sarana seperti jalan usaha tani dan pelabuhan perikanan juga menonjol, mencerminkan upaya untuk memperkuat infrastruktur ekonomi desa agar lebih resilien terhadap bencana dan perubahan iklim. Rehabilitasi serta peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif menunjukkan komitmen terhadap transisi energi yang lebih ramah lingkungan, sementara program-program seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana dan teknologi tepat guna

mendukung pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi risiko terkait iklim.

Kegiatan lain yang patut dicatat termasuk pengelolaan sampah, penghijauan desa, serta pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Inisiatif ini berkontribusi pada pengurangan dampak negatif dari perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa. Secara keseluruhan, alokasi Dana Desa menunjukkan pendekatan yang terintegrasi dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam membangun ketahanan desa di Lampung.

Dengan berbagai inisiatif ini, Dana Desa tidak hanya menjadi sarana untuk pembangunan fisik desa, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang penting untuk meningkatkan resiliensi desa-desa di Lampung terhadap dampak perubahan iklim. Keberlanjutan program-program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat desa, sehingga manfaat jangka panjang dari Dana Desa dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam jangka panjang, peran Dana Desa diharapkan mampu mendukung terwujudnya desa-desa yang tangguh, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terus berlangsung.

Grafik 4.9. Realisasi Dana Desa Terkait Perubahan Iklim di Lampung per Lokasi pada 2021 s.d. Juni 2024 (Rp Miliar)



Sumber: OMSPAN dan OMSPAN-TKD, 2024 (diolah)

Analisis realisasi Dana Desa dalam 4 tahun terakhir hingga Juni 2024 untuk upaya perubahan iklim di berbagai kabupaten di Lampung menunjukkan perbedaan dalam distribusi dan prioritas. Hal

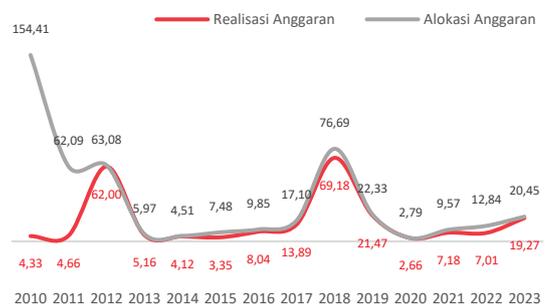
tersebut mencerminkan variasi dalam kebutuhan dan kerentanan masing-masing daerah terhadap perubahan iklim. Dari total alokasi sebesar Rp1.792,29 miliar, Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan realisasi terbesar, yaitu Rp 254,10 miliar, disusul oleh Kabupaten Lampung Timur dengan Rp 239.455,06 miliar. Selain itu, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Tanggamus juga mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

Tingginya alokasi di beberapa kabupaten ini juga selaras dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak untuk proyek-proyek besar yang mendukung adaptasi dan mitigasi, seperti rehabilitasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Provinsi juga menjadikan kabupaten-kabupaten tersebut sebagai lokasi super prioritas dan top prioritas aksi ketahanan iklim di regional Lampung utamanya untuk sektor pertanian (Bappeda Provinsi Lampung, 2024).

4.3.1.3. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah terkait Perubahan Iklim di Lampung

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Lampung menunjukkan perkembangan yang dinamis selama periode 2010 hingga 2024.

Gambar 4.4. Tren APBD Terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Lampung 2020-2023 (Rp Miliar)



Sumber: Data AKSARA, Bapenda Provinsi Lampung, 2024

Fluktuasi dalam alokasi anggaran mencerminkan tantangan dalam merespons perubahan iklim. Meskipun alokasi puncak tertinggi pada tahun 2011

mengalami penurunan yang cukup signifikan setelahnya, tetapi terdapat tren peningkatan alokasi anggaran yang signifikan di tahun 2018. Peningkatan ini mengindikasikan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif nasional untuk menanggulangi perubahan iklim dan mendorong pembangunan rendah karbon.

Grafik 4.10. Alokasi dan Realisasi APBD Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Lampung periode 2020-2023 (Rp Miliar)



Sumber: Data AKSARA, Bappeda Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

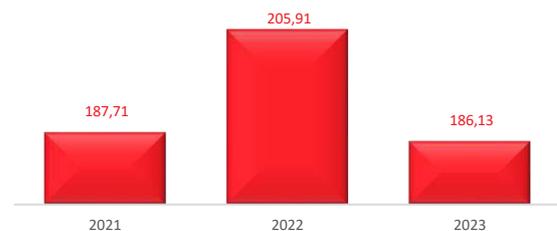
Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Rendah Karbon sebesar Rp43,26 miliar, dengan realisasi mencapai Rp33,51 miliar. Tingkat penyerapan rata-rata mencapai 76,95 persen, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Angka ini didasarkan pada pelaporan yang telah divalidasi melalui aplikasi AKSARA Bappenas. Namun, penting dicatat bahwa angka ini belum mencerminkan keseluruhan anggaran daerah yang dialokasikan untuk tujuan ini, mengindikasikan kemungkinan masih adanya ruang untuk peningkatan transparansi dan pelaporan anggaran yang lebih komprehensif.

Pada tahun 2023, belanja APBD yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menunjukkan peningkatan signifikan, dengan kenaikan sebesar 59,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya menangani isu perubahan iklim melalui kebijakan fiskal di tingkat daerah. Namun, meskipun ada peningkatan alokasi, tantangan dalam optimalisasi dan penyerapan anggaran tetap menjadi perhatian. Beberapa faktor yang mungkin

mempengaruhi penyerapan anggaran ini termasuk koordinasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kapasitas teknis dalam implementasi program, dan integrasi kebijakan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan belanja APBD dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tahun 2023 adalah langkah positif. Namun, keberlanjutan dari komitmen ini sangat tergantung pada peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran dengan lebih efektif. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan ketahanan iklim di Provinsi Lampung.

Grafik 4.11. Realisasi APBD Belanja Urusan Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung periode 2021-2023 (Rp Miliar)



Sumber: Data AKSARA, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Selanjutnya, apabila melihat secara spesifik terhadap belanja APBD fungsi lingkungan hidup di regional Lampung memiliki porsi hanya sebesar rata-rata 0,90 persen dari total Belanja APBD dalam 3 tahun terakhir. Adapun Belanja APBD urusan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam 3 tahun terakhir memiliki total realisasi sebesar Rp579,75 miliar, dengan realisasi paling besar berada pada tahun 2022 sebesar Rp205,91 miliar.

4.3.2. Intervensi Pemerintah Pusat & Daerah terhadap Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Non Belanja

Intervensi pemerintah pusat dan daerah terhadap perubahan iklim melalui kebijakan non-belanja melibatkan berbagai langkah strategis yang tidak langsung terkait dengan alokasi anggaran, tetapi berfokus pada pengaturan, regulasi, insentif, dan peningkatan kapasitas. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam



mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui pendekatan kebijakan yang lebih struktural dan jangka panjang, memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2.1. Kebijakan Non Belanja oleh Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat berkomitmen untuk mengupayakan pembangunan yang ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengacu pada Pasal 3.4 *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), komitmen ini diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan strategi utama menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 27,3 persen dan penurunan intensitas emisi sebesar 31,6 persen pada tahun 2024.

Fokus utama diberikan pada sektor-sektor kunci seperti penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, energi berkelanjutan, restorasi lahan, serta pembangunan laut dan pesisir. Untuk mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon, Indonesia mulai menggaungkan konsep *circular economy* dan melakukan analisis risiko terhadap lokasi prioritas aksi ketahanan iklim di sektor-sektor prioritas. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ditetapkan sebagai prioritas nasional nomor 6 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, menegaskan arah kebijakan ini sebagai fondasi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia kembali menargetkan penurunan intensitas emisi GRK hingga 93,5 persen menuju Net Zero Emissions. Komitmen ini mencerminkan dedikasi Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. World Bank (2023) menyoroti bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia membutuhkan kebijakan yang

komprehensif, termasuk intervensi non-belanja yang strategis seperti regulasi, pengaturan, insentif, dan peningkatan kapasitas untuk mengurangi emisi dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Ratifikasi Perjanjian Paris dan penyusunan *Nationally Determined Contribution* (NDC) menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui NDC, Indonesia menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi GRK, didukung oleh kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta regulasi lingkungan seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi landasan hukum untuk mencapai target tersebut. Upaya ini juga didukung oleh kebijakan non-belanja lainnya seperti perlindungan hutan yang berkelanjutan, penghapusan bertahap *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk batu bara, serta pemberian insentif bagi energi terbarukan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum iklim internasional seperti UNFCCC semakin menegaskan komitmen negara ini untuk bekerja sama dengan komunitas global, guna mendapatkan dukungan finansial dan teknologi serta berbagi pengetahuan dalam implementasi kebijakan iklim yang efektif. Kerja sama ini penting dalam memperkuat strategi transisi energi, kebijakan fiskal, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi dari perubahan iklim. Lebih jauh lagi, reformasi kebijakan fiskal seperti penetapan harga karbon dan peningkatan investasi hijau dianggap krusial untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi, sekaligus membangun model pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.3.2.2. Kebijakan Non Belanja oleh Pemerintah Daerah Lampung

Di Provinsi Lampung, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan non belanja juga diimplementasikan untuk mengatasi perubahan



iklim. Saat ini, Provinsi Lampung sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dimana mencakup strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sesuai dengan tata kelola Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Amanat UU No. 23/2014 dan Permendagri No. 86/2017, serta mengikuti ketentuan Perpres 98/2021.

Gambar 4.5. Transformasi Kebijakan RAD-GRK Provinsi Lampung Menjadi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)



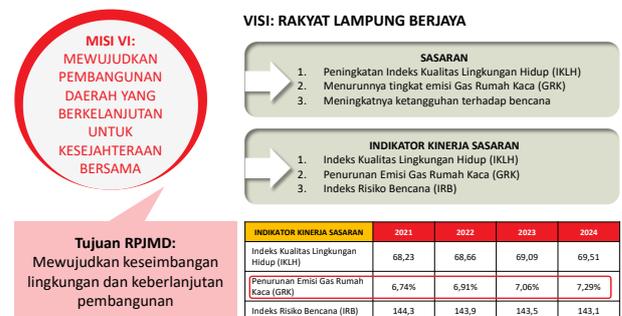
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Setelah RPJPD disusun, strategi ini akan diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPd, dan RENJA pemerintah daerah. Rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan *baseline* emisi GRK provinsi. Dari *baseline* ini, disusun Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga setiap daerah akan memiliki rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi dan potensinya masing-masing.

Adapun arah pembangunan jangka panjang di Provinsi Lampung akan mengedepankan kemampuan yang lebih cepat untuk mengadaptasi kemajuan teknologi, penentuan kebijakan yang lebih adaptif, sejalan dengan arah pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Terhadap target penurunan intensitas emisi GRK hingga 93,17 persen, Provinsi Lampung menginternalisasikan Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Penurunan Emisi GRK, Indeks Ekonomi Hijau, dan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi Primer sebagai sasaran kinerja.

Arah strategi ini telah dimulai sejak 2021, dengan diluncurkannya Perda Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 bermuatan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Adapun Provinsi Lampung telah memiliki strategi utama Peta juga mencantumkan strategi utama untuk masing-masing sektor. Untuk sektor kelautan dan perikanan, fokusnya adalah pada perlindungan kawasan pesisir dan keselamatan pelayaran, sedangkan untuk sektor pertanian, strateginya adalah menerapkan pertanian cerdas iklim (*climate smart agriculture*) untuk menjaga produktivitas pangan.

Gambar 4.6. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung 2021 s.d. 2024



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Strategi lainnya yang penting yaitu adanya Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Lampung, dimana terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam upaya menghadapi perubahan iklim di tingkat lokal. ProKlim adalah inisiatif nasional yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Program ini telah berhasil menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan sadar lingkungan melalui berbagai aksi lokal yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, ProKlim di Provinsi Lampung mencatat kemajuan penting dengan 70 lokasi yang teregistrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN). Lokasi-lokasi ini tersebar di 9 kabupaten/kota di Lampung, menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk



SUPLEMEN 4.1

Secondment RCE Kemenkeu: Analisis Dampak Belanja Pemerintah Terkait Perubahan Iklim Terhadap Perekonomian Provinsi Lampung

Secondment RCE Kemenkeu

Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah dipilih sebagai salah satu lokus Program Pemberdayaan Pegawai Selesai Tugas Belajar (*Re-entry program*) Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui integrasi ilmu dan pengalaman baru ke dalam lingkungan kerja. Program ini melibatkan tiga pegawai berprestasi yang telah menyelesaikan tugas belajar mereka dari BPPK, DJP, dan DJKN, yang khusus diterbangkan ke Lampung dan bertugas selama 1 bulan.

Para secondee tersebut didukung oleh mentor lokal, yaitu Kabid PPA II, Kasi PPA II C, serta seluruh tim Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Salah satu kontribusi utama mereka adalah peningkatan kualitas analisis fiskal regional, dengan fokus khusus pada analisis tematik dampak perubahan iklim dan belanja pemerintah terkait perubahan iklim terhadap sektor perekonomian di Provinsi Lampung.

Dalam proses penyusunan kajian, para secondee terlibat dalam diskusi intensif dengan para *local expert* dan mengumpulkan data-data relevan dari Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan jurnal kajian yang berkualitas dengan judul "Efektivitas Belanja Pemerintah terkait Perubahan Iklim terhadap Sektor Perekonomian di Provinsi Lampung".



mengambil peran aktif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Selain itu, jumlah Kampung Iklim di Lampung diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, dengan tambahan 192 lokasi baru yang didukung oleh Green Climate Fund (GCF) serta berbagai program reguler dari kabupaten/kota. Ini merupakan langkah penting menuju pencapaian target nasional yang menetapkan pembentukan 20.000 Kampung Iklim di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 4.7. Contoh Kolaborasi Dalam Program Kampung Iklim



Sumber: Dinas LHK Provinsi Lampung, 2024

Provinsi Lampung telah menetapkan target ambisius untuk membentuk 664 Kampung Iklim pada tahun 2024, yang mewakili sekitar 20% dari total target nasional. Dalam rangka mencapai target ini, upaya peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim akan dilakukan di berbagai lokasi desa dan kelurahan yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah merencanakan berbagai inisiatif untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas Program Kampung Iklim. Bantuan sarana dan prasarana akan diberikan untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan di desa-desa tersebut, termasuk penyediaan komposter rumah tangga, pusat pembibitan, lubang biopori, sistem pengelolaan air hujan (SPA), instalasi *solar cell*, pelestarian dan revitalisasi embung, serta pengembangan biogas. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon di tingkat lokal.

4.4. EVALUASI ATAS POLICY RESPONSE PEMERINTAH DALAM MEMITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Dari bagian sebelumnya, diketahui bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor perekonomian di Lampung yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai lumbung pangan nasional, Lampung sangat bergantung pada sektor pertanian yang menghadapi tantangan besar akibat perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan frekuensi bencana alam seperti banjir. Risiko gagal panen meningkat, yang dapat mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, sektor perikanan dan kelautan juga terancam oleh perubahan suhu air laut dan kerusakan ekosistem pesisir, yang mempengaruhi stok ikan dan produktivitas nelayan. Ketidakpastian iklim ini memaksa Lampung untuk segera mengadopsi strategi adaptasi dan mitigasi yang lebih efektif untuk melindungi kedua sektor vital ini.

Selain itu, kapasitas alokasi dan realisasi belanja untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Lampung menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan penyebarannya. Meskipun berbagai program telah dirancang, seperti Program Kampung Iklim (ProKlim) dan kebijakan pembangunan rendah karbon, realisasi belanja masih menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas teknis dan infrastruktur di tingkat daerah. Alokasi anggaran sering kali tidak merata, dengan fokus yang lebih besar pada program-program jangka pendek, sementara investasi untuk adaptasi jangka panjang masih terbatas. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, diperlukan peningkatan koordinasi dan dukungan kapasitas di daerah, serta penyesuaian alokasi anggaran yang lebih strategis sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh sektor-sektor yang paling rentan di Lampung.

4.4.1. Evaluasi Ketepatan dan Kapasitas Alokasi Belanja APBN/D Dengan Kebutuhan Sektor Terdampak Perubahan Iklim di Lampung



Dari sisi APBN, alokasi belanja pemerintah pusat untuk program terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Lampung selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fokus utama pada sektor ketahanan sumber daya air, dengan total pagu mencapai Rp2.778,21 miliar atau 66,91 persen dari total anggaran. Fokus ini mencerminkan urgensi dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air dan potensi bencana hidrometeorologi, yang berdampak langsung pada sektor pertanian, sektor utama di Lampung. Sementara itu, alokasi untuk program infrastruktur konektivitas dan perumahan serta kawasan permukiman masing-masing sebesar 13,03 persen dan 12,95 persen menekankan pentingnya kedua sektor ini dalam pembangunan dan adaptasi, meskipun tidak menjadi prioritas seperti ketahanan air. Sebaliknya, program-program seperti pengelolaan hutan berkelanjutan, ketersediaan pangan, dan pengelolaan perikanan serta kelautan menerima porsi anggaran yang jauh lebih kecil, mencerminkan bahwa prioritas belanja lebih terpusat pada sektor yang paling langsung terpengaruh oleh perubahan iklim. Dampak alokasi ini relevan dengan sektor pertanian yang mengalami penurunan tajam sebesar -10,97 persen pada triwulan I 2024 akibat fenomena El Niño, menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan dukungan langsung pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air dan kondisi cuaca. Meskipun program-program seperti ketahanan sumber daya air mendominasi anggaran, perhatian yang lebih besar pada sektor pertanian dalam anggaran perubahan iklim untuk mitigasi dan adaptasi sangat diperlukan.

Dari sisi TKD, evaluasi alokasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa menunjukkan peran strategis kedua jenis belanja ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. DAK Fisik, yang berfokus pada infrastruktur, dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi infrastruktur. Namun,

alokasi DAK Fisik perlu disesuaikan dengan prioritas perubahan iklim yang lebih mendesak, seperti ketahanan air dan pertanian, untuk memastikan efektivitas. Dana Desa, di sisi lain, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan lokal seperti pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur ramah iklim, dan program-program adaptasi berbasis komunitas. Meskipun alokasi Dana Desa sering kali lebih kecil dibandingkan dengan DAK Fisik, peningkatan kapasitas desa untuk melaksanakan inisiatif adaptasi dan mitigasi yang relevan dapat memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, alokasi dan pemanfaatan kedua jenis belanja ini harus dioptimalkan dan diselaraskan dengan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang lebih komprehensif.

Dari sisi APBD, evaluasi alokasi belanja terkait perubahan iklim di Lampung menunjukkan bahwa anggaran yang ada cenderung tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan adaptasi dan mitigasi yang mendesak di tingkat lokal. Walaupun ada alokasi untuk sektor-sektor kritis seperti ketahanan sumber daya air dan infrastruktur, proporsi anggaran untuk program-program pengelolaan hutan berkelanjutan, ketersediaan pangan, dan pengelolaan perikanan masih relatif kecil. Hal ini menyoroti bahwa alokasi belanja APBD belum sepenuhnya mencerminkan urgensi menangani dampak perubahan iklim, terutama di sektor pertanian yang mengalami penurunan signifikan akibat fenomena El Niño. Kebutuhan untuk alokasi yang lebih besar pada sektor-sektor seperti pengelolaan lingkungan dan perlindungan sosial juga semakin mendesak, mengingat dampak luas perubahan iklim terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Dengan total alokasi yang masih terbatas, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi ulang dan penyesuaian anggaran agar dapat lebih efektif dalam merespons tantangan perubahan iklim serta mendukung ketahanan masyarakat dan ekonomi lokal.





4.4.2. Evaluasi atas Kebijakan Non Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Perubahan Iklim

Secara keseluruhan, baik kebijakan non-belanja pemerintah pusat maupun daerah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam menangani perubahan iklim. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penyesuaian yang lebih baik terhadap kebutuhan spesifik di tingkat lokal dan pelaksanaan kebijakan yang lebih konsisten di seluruh level pemerintahan.

Pemerintah pusat telah mengimplementasikan berbagai kebijakan non-belanja strategis, seperti regulasi, insentif, dan peningkatan kapasitas, dengan fokus utama pada sektor ketahanan sumber daya air, ekonomi sirkular, dan energi berkelanjutan. Program-program seperti *Circular Economy* dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menggambarkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dengan target pengurangan emisi hingga 93,5 persen pada tahun 2045. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan ini diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah. Implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan keterbatasan kapasitas pelaksanaan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih kuat serta dukungan teknis dan pelatihan yang memadai bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik.

Di Lampung, kebijakan non-belanja seperti Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 menunjukkan upaya yang positif dalam melibatkan masyarakat lokal dan mengintegrasikan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah. ProKlim, yang juga didukung oleh Green Climate Fund, telah menunjukkan kemajuan dalam pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan dana, keterampilan komunitas lokal yang perlu

ditingkatkan, serta perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan desa. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan kapasitas lokal melalui pelatihan dan memperkuat dukungan teknis dalam pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi.

Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi non-belanja untuk menghadapi perubahan iklim, peraturan turunan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten masih sering kali belum memadai dalam implementasinya. Banyak daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam regulasi daerah yang konkret dan terukur, yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kurangnya detail teknis dan pedoman operasional yang jelas menghambat efektivitas kebijakan, sementara keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis bagi aparat pemerintah daerah turut memperburuk situasi. Untuk memperbaiki kondisi ini, sangat penting untuk meningkatkan penyusunan peraturan turunan yang lebih spesifik dan terperinci serta memperkuat kapasitas dan dukungan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal.

4.4.3. Efektivitas/ Dampak dari Belanja Pemerintah Terkait Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perekonomian (Sektor Basis) di Lampung

Bagian ini disusun melalui kolaborasi *Secondee* RCE Lampung yaitu Irene Santi Br. Bukit (DJP), Amin Hudaya (BPPK), Wisnu Yogaswara (DJKN) dengan mentor dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung yaitu Farhan Fatnanto dan Gwen Adhitya, serta segenap tim Bidang PPA II. Hasilnya adalah *upcoming journal* berjudul *Climate Change, Agriculture Growth, and The Fiscal Policy of Local Government: The Case of Lampung* (2024).

Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di regional Lampung dan pertumbuhan sektor pertanian dengan menggunakan model regresi



panel dengan data dari tahun 2015 hingga 2023. Tiga model regresi yang digunakan mencakup: (1) belanja iklim sebagai keseluruhan, (2) belanja iklim diklasifikasikan menjadi infrastruktur dan non-infrastruktur, dan (3) belanja iklim dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pupuk dan irigasi. Model ini mempertimbangkan variabel seperti curah hujan, luas lahan, dan dampak COVID-19. Penelitian ini mencakup 15 kabupaten/kota di Lampung, dengan total 135 unit observasi.

Dua pejabat diwawancarai untuk memperdalam pemahaman atas hasil analisis regresi. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program terkait perubahan iklim, baik program mitigasi maupun adaptasi di Provinsi Lampung, yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.

Wawancara ini dibagi menjadi lima bagian: perencanaan, penganggaran, pengeluaran anggaran, penyebab ketidakefektifan di setiap tahap, dan evaluasi. Dari wawancara ini, analisis regresi dapat dijelaskan lebih lanjut, tidak hanya dari estimasi regresi tetapi juga dari perspektif praktis.

Tabel 4.2. Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi
y	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
Belanja.Iklm	Belanja daerah terkait perubahan iklim
Curah.Hujan	Rata-rata curah hujan tahunan
Dummy.Covid	Variabel dummy untuk Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021

Sumber: Yogaswara, Hudaya, & Bukit (2024)

4.4.3.1. Pemodelan Regresi

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (y) = $0.0216522 + 0.0102301(\Delta \ln \text{belanja.iklim}) + 0.0195711(\Delta \ln \text{curah.hujan}) + 0.00000015265(\text{lahan}) - 0.034091(\text{dummy.covid})$

Model regresi, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam belanja terkait iklim diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian Lampung sebesar 0,0102 persen. Efek positif ini menekankan pentingnya investasi dalam inisiatif terkait iklim untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, setiap peningkatan 1 persen dalam rata-rata curah hujan (curah hujan) diharapkan akan meningkatkan

pertumbuhan PDRB pertanian sebesar 0,0196 persen, yang menunjukkan peran penting curah hujan yang memadai dalam meningkatkan hasil pertanian.

Variabel lahan, yang mewakili luas panen, menunjukkan bahwa setiap tambahan satu hektar lahan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian sekitar 0,0000153 persen. Meskipun efek ini relatif kecil, hal ini menekankan pentingnya perluasan lahan pertanian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di sektor basis pertanian.

Sebaliknya, variabel dummy.covid menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 (tahun 2020 dan 2021), pertumbuhan PDRB pertanian menurun sebesar 3,41 persen. Dampak negatif yang signifikan ini menyoroti gangguan yang disebabkan oleh pandemi terhadap aktivitas pertanian.

Tabel 4.3. Estimasi Parameter Model 1

Metric	Value
RSquare	0.375539
RSquare Adj	0.356324
Root Mean Square Error	0.021521
Mean of Response	0.019558
Observations (or Sum Wgts)	135

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio	Prob > F
Model	4	0.03620756	0.009052	19.5449	<.0001
Error	130	0.06020744	0.000463		
C. Total	134	0.096415			

Term	Estimate	Std Error	t Ratio	Prob> t	VIF
Intercept	0.0216522	0.00296	7.31	<.0001	-
d_ln_b_iklim	0.0102301	0.004904	2.09	0.0389	1.004327
d_ln_rata_curah_hujan	0.0195711	0.004539	4.31	<.0001	1.066234
luas_panen	1.53E-07	5.39E-08	2.83	0.0054	1.006118
covid	-0.034091	0.004505	-7.4	<.0001	1.06848

Sumber: Yogaswara, Hudaya, & Bukit (2024)

Model secara statistik signifikan ($p < 0,0001$) dengan sekitar 37,55 persen variabilitas (R-Square 0,375539) dalam y dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Temuan ini mengarah pada penolakan hipotesis nol (H_0), karena terdapat korelasi antara belanja pemerintah daerah terkait iklim dan pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Lampung.

4.4.3.2. Pendalaman Kualitatif Melalui Wawancara

Meskipun hasil pemodelan regresi menunjukkan adanya dampak positif dari belanja terkait iklim terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Lampung, dampaknya masih tergolong

minimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi dalam inisiatif terkait iklim berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kontribusinya belum signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas implementasi program, kesiapan infrastruktur, serta tantangan dalam mengelola perubahan iklim secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman menggunakan data kualitatif melalui wawancara dengan *Subject Matters Expert* dari Bappeda dan BPKAD.

Tabel 4.4. Hasil Pendalaman Kualitatif Melalui Wawancara *Subject Matters Experts* Bappeda dan BPKAD Provinsi Lampung

Parameter Kualitatif	Hasil Wawancara
Apakah program/kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik?	<p>PERLU PERBAIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Program yang telah direncanakan untuk menangani perubahan iklim tidak optimal dan kurang efektif. Alokasi belanja iklim hanya mencapai 3.4% dari total anggaran (2023). Target Penurunan Emisi GRK belum diturunkan ke dalam indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung
Apakah terdapat hubungan antara belanja pemerintah daerah dan laju pertumbuhan sektor pertanian (sektor utama di Lampung)?	<p>TERDAPAT HUBUNGAN SIGNIFIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja iklim memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Belanja iklim belum sepenuhnya memenuhi fungsi yang diharapkan untuk mendukung laju pertumbuhan pertanian. (Wawancara) Belanja irigasi lebih efektif dibandingkan dengan belanja subsidi pupuk untuk mendorong sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim. Belanja infrastruktur lebih efektif dibandingkan dengan belanja non infrastruktur
Apakah tantangan dalam perencanaan dan pembelanjaan terkait perubahan iklim?	<p>KETERBATASAN ANGGARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan fiskal dan prioritas terakhir dalam pembangunan daerah. Kualitas belanja rendah berdampak pada efektivitas program perubahan iklim. <p>MASIH PERLU PENINGKATAN STRATEGI DAN KESADARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih perlu peningkatan dan pendetailan arahan, kebijakan, dan anggaran untuk pelaksanaan program penanganan perubahan iklim di tingkat kabupaten dan kota. Perlu dukungan Political Will dari Kepala Daerah, Perangkat Daerah, dan DPRD yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas agenda upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sumber: Yogaswara, Hudaya, & Bukit (2024)

4.4.4. Rekomendasi Kebijakan Upaya Perubahan Iklim

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan (Yogaswara, Hudaya, & Bukit, 2024), antara lain:

1. Penjaringan Talenta dan Pendanaan Swasta melalui Call for Project. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik talenta dan pendanaan swasta melalui pengembangan program-program inovatif yang konkret sebagai solusi atas permasalahan daerah. Program-program tersebut dapat langsung diuji coba dan diimplementasikan.

2. Mekanisme Baru dalam Kemitraan Publik-Swasta - Membuka Kesempatan bagi Pihak Swasta dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Proyek yang direncanakan sebaiknya tidak hanya berasal dari rencana pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga dapat diusulkan oleh pihak swasta. Hal ini memungkinkan munculnya ide-ide baru dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3. Sistem Peringatan Dini Perubahan Iklim melalui Teknologi Informasi. Penyebaran informasi mengenai dampak perubahan iklim, khususnya kepada petani, harus dilakukan secara cepat dan tepat. Selain mengandalkan penyuluh pertanian, teknologi seperti SMS broadcast atau monitor kalender tanam di setiap kabupaten/kota dapat menjadi solusi diseminasi dengan anggaran terbatas.
4. Optimasi Penagunaan Lahan. Fokus utama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian yang ada melalui praktik pertanian yang lebih baik, penggunaan teknologi canggih, dan metode pertanian berkelanjutan, daripada sekadar memperluas area budidaya.
5. Program Pemulihan Lahan. Program ini dirancang untuk memperbaiki dan mengelola lahan yang terdampak perubahan iklim dengan menggabungkan teknik agroforestri dan praktik pertanian konvensional. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas tanah dan membantu penyerapan karbon, yang turut berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Contoh pelaksanaan program serupa dapat ditemukan di Filipina.
6. Belanja Iklim serta Monev yang Efektif. Penting untuk memastikan bahwa investasi dalam penanganan perubahan iklim direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dicapai melalui penilaian kebutuhan yang menyeluruh, pemanfaatan solusi inovatif, serta evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas belanja.

“ Anda harus memberi lebih banyak kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikan baik dalam bentuk pemikiran, kerja keras, prestasi, dan yang paling penting berikan hati anda hanya untuk Indonesia ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

 Nuwo Sessat, Tulang Bagian Barat



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang didapatkan dari analisis KFR Triwulan II-2024 Provinsi Lampung, yaitu:

5.1.1. Outlook Makroekonomi Regional Lampung

1. Pada Semester I 2024, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 4,08 persen (ctc), melambat dari 4,45 persen pada Semester I 2023. Pertumbuhan ini dipicu oleh sektor transportasi dan pergudangan yang naik 13,37 persen, serta peningkatan pengeluaran Lembaga Nonprofit sebesar 16,27 persen akibat aktivitas Pemilu dan Pilkada 2024. Secara year-on-year, ekonomi Lampung pada Triwulan II 2024 tumbuh 4,80 persen, lebih tinggi dari 4,00 persen tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,05 persen.
2. Struktur PDRB Lampung didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 29,04 persen dari total PDRB ADHB, meskipun kontribusinya mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam struktur PDRB berdasarkan pengeluaran, mencapai 62,54 persen.
3. Inflasi di Lampung pada Triwulan II 2024 terkendali di angka 2,84 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,51 persen. Secara bulanan, Lampung mencatat deflasi sebesar 0,01 persen, lebih rendah dari rata-rata inflasi Triwulan I 2024 yang sebesar 0,19 persen.
4. Meskipun terjadi depresiasi rupiah, impor bahan baku dan barang konsumsi di Lampung meningkat, menunjukkan dorongan positif dalam sektor industri dan daya beli masyarakat yang tetap kuat. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Lampung turun menjadi 10,69 persen, meski masih di atas rata-rata nasional (9,03 persen) dan regional Sumatera (8,97 persen). Penurunan kemiskinan sebesar 29,4 ribu orang menunjukkan efektivitas strategi pembangunan inklusif.

5. Gini Ratio Lampung turun menjadi 0,302 pada Maret 2024, menunjukkan penurunan ketimpangan sebesar 6,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung naik menjadi 122,55 pada Triwulan II 2024, meskipun masih di bawah rata-rata regional Sumatera sebesar 135,01. Pemerintah Pusat dan Daerah di Lampung telah meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program, termasuk subsidi benih dan akses permodalan.
6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) subsektor perikanan tangkap juga mengalami peningkatan positif dengan rata-rata 109,11, di atas rata-rata nasional dan regional. Upaya pemerintah untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan, seperti penetapan Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern, turut mendorong kesejahteraan nelayan di Lampung.

5.1.2. Kinerja Fiskal Regional Lampung

5.1.2.1. Kinerja APBN

1. Kinerja APBN Regional Lampung hingga 30 Juni 2024 menunjukkan hasil positif dan resilien dalam mendukung penguatan ekonomi regional. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp16.170,83 miliar atau 50,50 persen dari pagu, tumbuh 15,63 persen (yoy). Di sisi Pendapatan Negara, terealisasi Rp4.795,23 miliar atau 42,77 persen dari target, mengalami kontraksi tipis sebesar 0,48 persen (yoy), meskipun penerimaan sektor domestik mencatat pertumbuhan. Defisit APBN pada akhir Juni tercatat sebesar Rp11.375,60 miliar, meningkat 24,11 persen (yoy).
2. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp4.795,23 miliar atau 42,77 persen dari target Rp11.211,70 miliar untuk tahun 2024. Pendapatan ini berkontraksi 0,48 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar 1,62 persen (yoy), terutama dari Pajak Perdagangan Internasional. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh sebesar





6,91 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp688,5 miliar, didorong oleh pertumbuhan kedua komponen PNBPNP.

3. Belanja Negara tumbuh sebesar 23,51 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp4.712,43 miliar atau 48,29 persen dari pagu. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan penyaluran Transfer ke Daerah. Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing tumbuh sebesar 16,81 persen dan 38,94 persen (yoy), dengan Belanja Barang terutama mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Belanja Modal terealisasi Rp312,94 miliar atau 25,18 persen dari pagu, mengalami kontraksi 6,06 persen (yoy) seiring dengan penurunan pagu. Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp20,82 miliar atau 56,49 persen dari pagu, tumbuh 20,21 persen (yoy), didukung oleh penyaluran KIP Kuliah.
4. Transfer ke Daerah (TKD) di Lampung mencapai Rp11.458,40 miliar atau 51,47 persen dari pagu, tumbuh 12,68 persen (yoy), terutama karena akselerasi penyaluran Dana Transfer Umum (DTU), Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Dana Transfer Khusus (DTK) mengalami sedikit perlambatan. Realisasi Dana Transfer Umum tumbuh 15,94 persen (yoy), didorong oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU). Sebaliknya, Dana Transfer Khusus mengalami penurunan 2,04 persen (yoy), terpengaruh oleh penurunan kinerja Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik akibat proses kontrak yang lambat. Penyaluran Insentif Fiskal tumbuh 29,09 persen (yoy), sedangkan Dana Desa tumbuh 22,46 persen (yoy), didukung oleh redesign kebijakan dan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah.
5. Posisi APBN di Provinsi Lampung pada akhir Juni mengalami defisit sebesar Rp11.375,60 miliar, meningkat 24,11 persen (yoy), disebabkan oleh tekanan atas pertumbuhan Pendapatan Negara akibat dari ketidakpastian global yang berimbas pada ekonomi domestik.

5.1.2.2. Kinerja APBD

1. Hingga Triwulan II-2024, pendapatan daerah Lampung mencapai Rp13.038,93 miliar, atau 40,42 persen dari target, mengalami

pertumbuhan 9,46 persen (yoy). Kenaikan ini terutama dipicu oleh peningkatan Pendapatan Transfer, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 3,02 persen (yoy), dengan rincian penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh positif.

2. Realisasi PAD mencapai Rp2.546,94 miliar atau 31,35 persen dari target, dengan penurunan 3,02 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, meskipun Retribusi Daerah tumbuh signifikan sebesar 795,25 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh 10,81 persen (yoy). Rasio pajak daerah di Lampung pada Triwulan II-2024 masih rendah, yaitu 0,95 persen, menunjukkan potensi yang belum teroptimalkan.
3. Pendapatan daerah Lampung sangat bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat (TKD), yang menyumbang 75,85 persen dari total pendapatan daerah dalam APBD 2024, dengan Kemandirian Fiskal regional sebesar 19,53 persen, yang menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan untuk mencapai kemandirian yang lebih baik.
4. Belanja Daerah Lampung hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp10.930,06 miliar atau 33,79 persen dari pagu, tumbuh 11,83 persen (yoy) dibandingkan periode sebelumnya. Belanja Operasi tercatat sebesar Rp8.220,10 miliar atau 35,79 persen dari pagu, meningkat 7,71 persen (yoy), dengan kenaikan signifikan pada Belanja Hibah terkait persiapan Pilkada 2024. Belanja Modal mencapai Rp683,81 miliar atau 16,92 persen dari pagu, didorong oleh investasi dalam infrastruktur, sementara Belanja Transfer berkontraksi 38,36 persen (yoy), didominasi oleh Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.
5. Belanja tertinggi berdasarkan fungsi adalah pada Pelayanan Umum sebesar Rp4.148,34 miliar, tumbuh 8,7 persen (yoy), sementara belanja terendah adalah pada Pariwisata sebesar Rp36,22 miliar, turun -3,5 persen (yoy). Rasio belanja dan belanja modal per kapita



bervariasi di Lampung, dengan Kota Metro memiliki rasio belanja tertinggi dan Kabupaten Tanggamus memiliki rasio belanja modal tertinggi.

6. APBD Lampung mencatat surplus pada keseimbangan umum dan primer, menunjukkan kebijakan fiskal kontraktif, namun masih perlu peningkatan belanja untuk mendukung daya beli masyarakat. Pembiayaan netto meningkat sebesar 1.288 persen, didorong oleh penurunan pengeluaran pembiayaan dan pertumbuhan moderat penerimaan pembiayaan, terutama dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5.1.2.3. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD

1. Hingga Juni 2024, realisasi pendapatan negara konsolidasian di Lampung mencapai Rp9.050,36 miliar, tumbuh 6,09 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan penerimaan perpajakan, hibah, dan pendapatan transfer konsolidasian. Penerimaan perpajakan merupakan komponen utama, menyumbang 70,24 persen dari total pendapatan konsolidasian, sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang 10,89 persen, didominasi oleh PNBP dari BLU dan kategori lainnya. Pendapatan Transfer berkontribusi sebesar 18,79 persen.
2. Belanja konsolidasian Lampung hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp18.317,09 miliar, meningkat 10,64 persen (yoy). Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/Daerah dan Transfer ke Daerah, dengan proporsi Belanja Pemerintah Pusat/Daerah sebesar 74,48 persen dan Belanja Transfer sebesar 25,52 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian adalah 65,56 persen, menurun dari tahun lalu akibat peningkatan alokasi belanja modal.
3. Keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung menunjukkan defisit sebesar Rp9.266,73 miliar, mengalami pelebaran 15,48 persen (yoy) yang tercatat sebesar Rp8.024,78 miliar. Pelebaran defisit ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja

konsolidasian yang melebihi kenaikan pendapatan.

5.1.3. Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

1. Program belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Rincian Output (RO) Harmonis dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Lampung menunjukkan fokus pada sektor-sektor kritis. Alokasi anggaran meliputi jalan sebesar Rp433,86 miliar (27,2 persen), kesehatan Rp2,27 miliar (14,37 persen), pendidikan Rp127,48 miliar (25,84 persen), air minum Rp12,26 miliar (13,59 persen), sanitasi Rp2,05 miliar (36,23 persen), dan pertanian Rp25,33 miliar (47,62 persen). Setiap sektor mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan regional dan prioritas pembangunan.
2. Hingga 30 Juni 2024, total pagu anggaran DAK Fisik yang dialokasikan untuk seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Lampung mencapai Rp1.453,58 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran baru mencapai Rp113,75 miliar atau 7,83 persen. Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik memiliki pagu sebesar Rp603,25 miliar, dengan realisasi mencapai Rp165,76 miliar atau 27,48 persen dari pagu, menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan DAK Fisik.
3. Namun, realisasi dan pencapaian output dari Belanja RO Harmonis DAK Fisik menghadapi berbagai kendala, seperti revisi dan blokir anggaran, keterlambatan penerbitan petunjuk teknis, kekurangan sumber daya manusia (SDM) bersertifikasi, dan masalah koordinasi antara pemerintah daerah dan K/L. Faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis juga mempengaruhi eksekusi kegiatan.
4. Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Strategi tersebut mencakup penyalarsan perencanaan anggaran untuk meningkatkan dampak sinergis, evaluasi



rutin untuk memastikan target tercapai, koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan anggaran, serta penekanan pada harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan program.

5. Belanja K/L menunjukkan pola distribusi anggaran yang merata di sektor-sektor penting seperti jalan, kesehatan, pendidikan, air minum, sanitasi, dan pertanian. Fokusnya meliputi pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan sistem air minum, serta peningkatan layanan sanitasi. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas hidup di seluruh regional Lampung.

5.1.4. Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

1. Lampung, sebagai lumbung pangan nasional, menghadapi ancaman signifikan dari perubahan iklim yang mempengaruhi, utamanya, sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian di Lampung mengalami penurunan tajam sebesar -10,97 persen (yoy) pada triwulan I 2024 akibat fenomena El Nino, menunjukkan dampak negatif perubahan iklim terhadap hasil pertanian. Sektor perikanan juga terancam oleh perubahan suhu air laut dan kerusakan ekosistem pesisir, yang mempengaruhi stok ikan, produktivitas nelayan, dan beban biaya melaut nelayan.
2. Meskipun terdapat alokasi anggaran cukup signifikan untuk ketahanan sumber daya air, belanja iklim di Lampung cenderung tidak merata, dengan fokus lebih besar pada infrastruktur jangka pendek dibandingkan dengan kebutuhan adaptasi jangka panjang. Alokasi anggaran untuk ketahanan sumber daya air mencapai Rp2.778,21 miliar atau 66,91 persen dari total anggaran dalam 4 tahun terakhir, sedangkan alokasi untuk sektor-sektor lain seperti pengelolaan hutan berkelanjutan,

ketersediaan pangan, dan pengelolaan perikanan hanya menerima porsi yang jauh lebih kecil. Sedangkan, belanja iklim di tingkat pemerintah daerah menunjukkan keterbatasan fiskal yang cukup signifikan selama 4 tahun terakhir, dengan fokus yang lebih besar pada program jangka pendek.

3. Evaluasi menunjukkan adanya hubungan positif antara belanja iklim dan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, namun kontribusi belanja terkait iklim masih tergolong minimal. Faktor-faktor seperti efektivitas implementasi, kesiapan infrastruktur, dan manajemen program yang kurang optimal mempengaruhi hasil tersebut. Meskipun kebijakan non-belanja seperti ProKlim menunjukkan kemajuan, tantangan dalam penerapan dan kurangnya dukungan teknis serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menghambat efektivitas. Oleh karena itu, peningkatan strategi, kapasitas lokal, dan dukungan *political will* sangat penting untuk memperbaiki hasil kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Lampung.
4. Pemodelan Regresi menemukan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam belanja terkait iklim diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian Lampung sebesar 0,0102 persen. Efek positif ini menekankan pentingnya investasi dalam inisiatif terkait iklim untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, setiap peningkatan 1 persen dalam rata-rata curah hujan (curah hujan) diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB pertanian sebesar 0,0196 persen, yang menunjukkan peran penting curah hujan yang memadai dalam meningkatkan hasil pertanian.
5. Meskipun belanja terkait iklim di Provinsi Lampung menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kontribusinya masih minimal. Hasil wawancara dengan *subject matters experts* menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program perlu lebih dioptimalkan, dengan alokasi belanja iklim yang rendah dan target penurunan



emisi yang belum diintegrasikan ke dalam indikator kinerja turunan kepada kota/kabupaten. Meskipun terdapat hubungan signifikan antara belanja iklim dan pertumbuhan sektor pertanian, efektivitas belanja irigasi dan infrastruktur dianggap lebih tinggi dibandingkan subsidi pupuk dan belanja non-infrastruktur. Artinya, strategi jangka panjang menjadi sangat penting. Selain itu, tantangan utama dalam implementasi kebijakan terkait perubahan iklim meliputi keterbatasan anggaran, kualitas belanja yang masih rendah akibat dari ketidakmerataan alokasi dan keterbatasan kapasitas fiskal, serta perlunya peningkatan strategi serta dukungan *political will* yang lebih kuat.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kondisi makroekonomi, fiskal, dan pembangunan di Lampung pada Triwulan II 2024, dapat disampaikan beberapa *policy responses* sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Lampung sangat krusial dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Peningkatan alokasi dana diperlukan untuk subsidi benih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi usaha tani, dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Langkah ini bertujuan untuk membantu petani menghadapi pergeseran musim tanam dan mengatasi inflasi pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kopi.
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung, OJK, dan Dinas Koperasi dan UMKM bersama Biro Perekonomian Daerah perlu aktif dalam mendorong penyaluran KUR berbasis klaster dan Kredit Usaha Alsintan. Penyaluran ini sebaiknya difokuskan pada wilayah penghasil komoditas strategis seperti padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kopi, kakao, dan kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dan mendukung skala ekonomi di daerah tersebut.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan agrowisata di Lampung dapat mengurangi ketergantungan pada permintaan global atas komoditas utama. Strategi ini diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru, mengurangi risiko penurunan penerimaan negara, dan meningkatkan daya tarik wisata di daerah.
4. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah. Fokus utama dari kerja sama ini adalah perbaikan kualitas SDM, pengembangan interkoneksi informasi pajak, serta penerapan teknologi informasi seperti sistem pembayaran digital yang dapat memperlancar proses administrasi dan pemantauan.
5. Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat skema pembangunan infrastruktur kolaboratif antar kewenangan daerah. Sebagai contoh, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 dapat menjadi payung hukum untuk mempercepat koordinasi dan pembangunan lintas sektor, serta mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak.
6. Peningkatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga, satuan kerja, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran. Baik Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Transfer ke Daerah (TKD) perlu diselaraskan agar anggaran dapat digunakan secara efektif sesuai dengan rencana.
7. Meminimalisir *time lag* dalam perencanaan, penyaluran, dan realisasi TKD sangat penting untuk efisiensi anggaran. Proses perencanaan dan alokasi dana harus dipercepat, termasuk dalam pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang perlu diselesaikan sebelum tahun berjalan agar tidak mengganggu pelaksanaan program.
8. Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah harus lebih waspada terhadap risiko perubahan anggaran di tengah tahun. Pemahaman yang



- baik mengenai mekanisme dan batas waktu pengajuan perubahan anggaran akan membantu meminimalkan ketidakpastian dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
9. Aturan dari Kemendagri perlu mempertegas peran pejabat perbendaharaan di Pemda ex-officio untuk memastikan bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak terhambat dan dimulai secara tepat waktu sejak awal tahun anggaran.
 10. Peningkatan validitas dan akurasi integrasi data Belanja Pemerintah Pusat dan TKD yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah sangat penting untuk meningkatkan harmonisasi Belanja K/L dan TKD di tingkat wilayah. Data yang akurat akan memudahkan pemantauan dan evaluasi anggaran.
 11. Kementerian dan unit vertikal harus segera merencanakan dan mengeksekusi pekerjaan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana. Selain itu, mereka harus menyiapkan strategi mitigasi risiko dan melakukan monitoring progres pekerjaan untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
 12. Kementerian terkait harus menerbitkan Surat Keputusan penetapan lokasi penerima bantuan sejak awal tahun. Ini memberikan waktu bagi satuan kerja untuk melakukan verifikasi penerima bantuan dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
 13. Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu bekerja sama dengan Pendamping Desa untuk memperkuat sistem pengendalian internal desa. Ini termasuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan memastikan adanya payung hukum yang mengatur kewajiban pelaporan oleh Pendamping Desa.
 14. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk proyek-proyek lingkungan hidup, seperti rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor pertanian. Dana ini penting untuk mendukung upaya adaptasi perubahan iklim.
 15. Dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Lampung. Program replanting, pelatihan petani, dan pengembangan produk turunan sawit yang bernilai tambah harus menjadi prioritas.
 16. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) perlu mendorong penyaluran KUR berbasis klaster di daerah penghasil komoditas unggulan. Ini akan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi dalam penyaluran pembiayaan serta mendukung keberlanjutan ekonomi daerah.
 17. Untuk mendukung modernisasi pertanian di Lampung, pemerintah daerah bersama perbankan perlu memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Alsintan. Pembelian alat dan mesin pertanian yang canggih akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian.
 18. Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk berperan dalam menyediakan pembiayaan murah dan jangka panjang bagi UMKM di Lampung. Fokus pada sektor pertanian dan perikanan yang terdampak perubahan iklim akan mendukung inovasi dan keberlanjutan di Lampung.
 19. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan insentif pajak kepada UMKM yang terlibat dalam kegiatan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Insentif ini dapat mencakup pengembangan produk ramah lingkungan dan teknologi berkelanjutan.
 20. Program Desa Devisa bisa diimplementasikan untuk desa-desa di Lampung yang memiliki produk unggulan ekspor seperti kopi dan lada. Ini akan memperkuat kapasitas produksi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui akses ke pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi OM-SPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi OM-SPAN TKD, <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/#/home/login>
- Aplikasi SIKD Next Generation, <https://sikd.kemenkeu.go.id/tkd/alokasi/realisasi>
- Aplikasi SINTESA, <https://sintesa.kemenkeu.go.id/v3/auth/login>
- Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran, <https://satudja.kemenkeu.go.id/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). AKSARA: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Daerah.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Lampung dalam Angka 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Diamnil kembali dari <https://lampung.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Bank Indonesia.
- Bappeda Provinsi Lampung. (2024). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung.
- Bappeda Provinsi Lampung. (2024). Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Lampung. Disampaikan pada Rapat ALCo Deputies Kemenkeu Satu Lampung.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. (2024). Program Kampung Iklim Provinsi Lampung. Disampaikan pada Rapat ALCo Deputies Kemenkeu Satu Lampung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). Deskripsi dan Analisis APBD. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan PNBPK Kekayaan Negara di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2024). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). Laporan Assets-Liability Comitee (ALCo) Regional Lampung. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW), Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

- Kementerian Keuangan. (2024). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2024). *APBN Kita Juli 2024*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024*. Diambil kembali dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/11/08.-BUKU-TKD-2024-PROVINSI-LAMPUNG.pdf>
- Manik, T. K. (2014). Mengkaji dampak perubahan iklim terhadap distribusi curah hujan lokal di Provinsi Lampung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rany, A. P. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia green growth program oleh bappenas. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 63-73.
- Sampurna, A. F. (2018). *Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal*. Banyuwangi.
- Sitadevi, L. (2016). Membangun Ketahanan Kota terhadap Dampak Perubahan Iklim: Studi Kasus Kota Bandar Lampung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 27(3), 190-207.
- Yogaswara, W., Hudaya, A., & Bukit, I. S. (2024). *Climate Change, Agriculture Growth, and The Fiscal Policy of Local: The Case of Lampung*.



DAFTAR ISTILAH

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan undang-undang.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BMN

Barang Milik Negara. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BPP

Belanja Pemerintah Pusat. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat.

DAK

Dana Alokasi Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAU

Dana Alokasi Umum. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH

Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DTK

Dana Transfer Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DTU

Dana Transfer Umum. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Insentif fiskal

Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

KPBU

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam

penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja.

LKPD-TW

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah yang mencakup Laporan Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKPK-TW

Laporan yang disusun dengan cara mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW).

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

TKD

Transfer ke Daerah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

QTQ

Quarter to Quarter. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Lampung dengan scan barcode di bawah ini:



Atau klik tautan dibawah ini:

<https://forms.office.com/r/tpPLHK8ffE?origin=lprLink>





Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214

Telepon : (0721) 471308 / (0721) 487423

Website : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>

Email : kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id

